



Wacana Bahasa Sastra

I.B. PUTERA MANUABA

*Wacana
Bahasa &
Sastra*

Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:


- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Wacana Bahasa & Sastra

Prof. Dr. I.B. PUTERA MANUABA, M.Hum.



Airlangga
University
Press

 Pusat Penerbitan dan Persekitaan
Universitas Airlangga

Wacana Bahasa dan Sastra

I.B. Putera Manuaba

2019 © AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI: 001/JTI/95

Anggota APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP869/RK513-09/19-B1E

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Layout (Roy Wahyudi) – Cover (Erie Febrianto)

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Manuaba, I.B.P.

Wacana Bahasa & Sastra/I.B. Putera Manuaba --
Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
x, 226 him. ; 23 cm

ISBN 978-602-473-189-2

1. Bahasa Indonesia.

I. Judul.

499.221




PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Bijaksana, karena berkat perkenan-Nya juga, buku ini akhirnya dapat diterbitkan. Terbitnya buku ini, tentu melibatkan banyak pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini.

Dua entitas, bahasa dan sastra Indonesia, bukanlah merupakan dualitas. Akan tetapi, merupakan satu-kesatuan jalinan terkait yang tidak terpisahkan. Ini analog dengan penyakit kulit dan kelamin, yang juga tidak dapat dipisahkan. Untuk mempelajari bahasa apa pun secara ideal, sebaiknya memang harus sampai pada mempelajari sastranya. Demikian sebaliknya, mempelajari sastra, tidaklah mungkin tanpa menguasai wahana sastra itu sendiri, yakni bahasanya. Seorang pengarang yang baik, tentunya juga mestinya adalah seorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Dengan demikian, bagi seorang pengarang, bahasa sangatlah vital karena merupakan modal utama untuk bersastra. Seorang yang tidak memiliki infrastruktur berbahasa, tidaklah mungkin menjadi pengarang.

Secara geneologis, buku ini sebenarnya dirajut dari tulisan-tulisan yang tercerai-berai, yang pernah ditulis pada berbagai forum pertemuan. Sebelum menjadi buku, tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini pernah diseminasi dalam berbagai pertemuan ilmiah di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tulisan ini kemudian dielaborasi dan dijadikan dalam satu buku agar wacana pemikiran bahasa dan sastra ini tersatukan dalam sebuah buku yang utuh.



Acap kali wacana pemikiran yang tidak dibukukan, seiring dengan perjalanan waktu, akan sirna begitu saja ditelan zaman dan tidak berbekas. Maka itu, mengabadikan wacana pemikiran dalam sebuah buku merupakan satu bentuk penyelamatan pemikiran yang pernah terpikirkan. Ini mengingatkan, kita sebagai manusia yang sudah pasti tidak kekal dan juga dengan ingatan masa demi masa yang juga akan semakin memudar. Kehadiran buku ini, tentu saja, tidak hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan jejak yang pernah dipikirkan dalam soal bahasa dan sastra.

Diterbitkannya buku yang sederhana ini, secara substantif, dimaksudkan untuk memperkaya wacana bahasa dan sastra (Indonesia) yang mungkin juga telah ada, dengan menghadirkan pemikiran khas penulis tentang bahasa dan sastra. Ada 5 tulisan tentang wacana bahasa dan 15 tulisan tentang wacana sastra yang terhimpun dalam buku ini. Jumlah yang lebih banyak berupa wacana sastra ini, menunjukkan bahwa—dalam perjalanan waktu—penulis memang kemudian cenderung lebih menekuni sastra, dengan tetap menaruh kecintaan pada bahasa.

Tulisan wacana bahasa dan wacana sastra ini penulis peruntukkan bagi para pembaca budiman. Para pembaca budiman ini, entah mahasiswa, dosen, guru, peneliti, pengarang, pemerhati, atau pencinta bahasa dan sastra, atau juga pembaca umum yang berminat membaca wacana bahasa dan sastra.

Terbitnya buku ini, tentu saja, tidak luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan di sana-sini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka jika ada masukan, kritik, dan saran, mungkin untuk menyempurnakan buku edisi berikutnya. Penulis sangat menyadari, tidak ada sesuatu yang sempurna sehingga sangat terbuka untuk diubah dan diperbaiki.

Akhir perkataan, penulis ingin menyampaikan harapan kepada pembaca budiman. Harapan penulis, semoga masih ada manfaatnya bagi pembaca budiman. Terima kasih.

Prof. Dr. I.B. Putera Manuaba, M.Hum.

Penulis
Karya ini saya tulis

*sebagai wujud kecintaan dan dedikasi saya
pada Ilmu Bahasa dan Sastra*







DAFTAR ISI

Prakata	v
BAGIAN 1 WACANA BAHASA	
1. Dekastanisasi Berbahasa dalam Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	1
2. Penguatan Bahasa Ibu melalui Pembiasaan Baca-Tulis	27
3. Internalisasi Nilai Lokal melalui Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa)	41
4. Pergeseran Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokal dan Global	49
5. Pengutamaan Bahasa Indonesia	65
BAGIAN 2 WACANA SASTRA	
6. Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Sastra dan Budaya di Jawa Timur	71
7. Perubahan Sosial pada Masyarakat Perkotaan dalam Cergam Indonesia Mutakhir	85
8. Urgensi Masyarakat Sastra dalam Perkembangan dan Pengembangan Sastra	93
9. Kritik Sastra Indonesia dalam Idealitas Siklus Ilmu Sastra	97
10. Karya Sastra sebagai Sumber Sejarah Bangsa	103



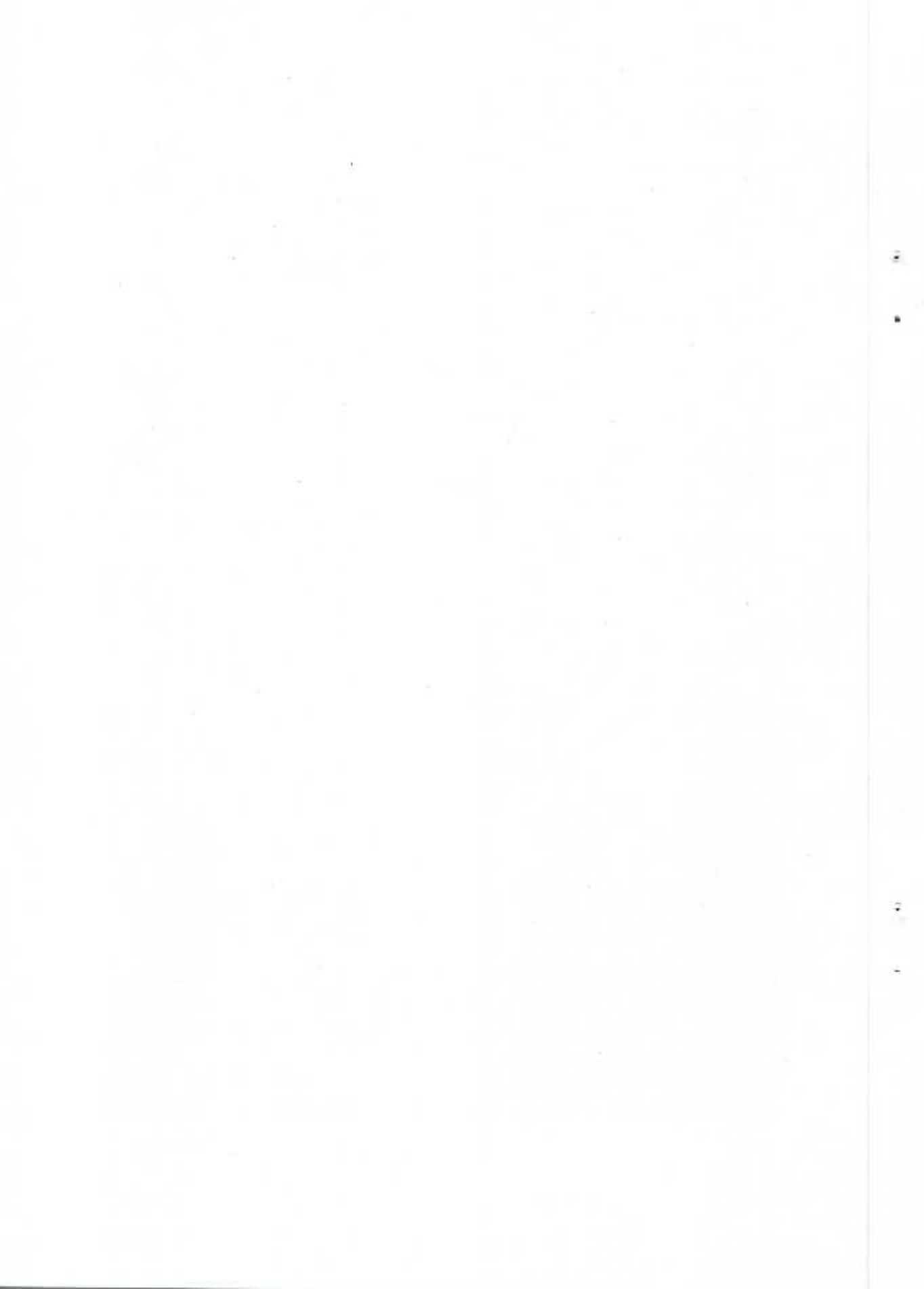
11. Politik Identitas, Kearifan Masyarakat, dan Sastra	115
12. Pendidikan Sastra dan Identitas Bangsa	123
13. Memaknai Jejak Kritik Sastra Rawamangun <i>vs</i> Ganzheit: dari Polemik ke Kolaborasi	131
14. Warna Lokal dalam Internasionalisasi Sastra Indonesia	143
15. Sejarah dan Keunggulan Kritik Sastra Akademik	157
16. Perihal Sastra, Institusi, dan Perubahan Sosial	167
17. Pemikiran tentang Warna Lokal dalam Sastra Indonesia	181
18. Sastra Jawa Timur Mutakhir: Potensi, Apresiasi, dan Aksi Literer	187
19. Kritik Sastra Indonesia yang Menginspirasi: Mediasi dan Semnasi.....	195
20. Sastra Itu Ruh Keindonesiaan Kita	205
Daftar Pustaka	209
Glosarium	217
Indeks	219

BAGIAN 1



**WACAN
BAHAS**

A





Dekastanisasi Berbahasa dalam Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia

Pengantar: Kesadaran atas Keniscayaan Bahasa-bahasa yang Nirkasta

Mengawali pemikiran ini, ada baiknya di sini diajukan suatu pemahaman bahwa bahasa pada dasarnya merupakan satu unsur kebudayaan yang sangat penting bagi manusia ketika berinteraksi-sosial dalam dunia kehidupan sosial sehari-hari. Sebagai manusia, kita memang dikodratkan untuk berinteraksi satu sama lain karena secara kodrati kita memang adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang memerlukan orang lain agar kita dapat *survive* dalam kehidupan ini.

Dalam hubungan itu, sosiolog kontemporer Berger dan Luckmann¹ pernah menyatakan bahwa suatu keniscayaan bahwa kita sebagai manusia memang tidak memiliki dunia manusia sejak awal (lahir). Kondisi tidak dimilikinya dunia manusia ini berbeda dengan binatang yang sudah memiliki dunianya sendiri, yang sudah serba terspesifikasi sehingga langsung dapat *survive* dalam kehidupannya.

Karena manusia tidak memiliki dunia untuk dapat *survive* maka manusia harus membangun dunianya sendiri. Di sinilah manusia memerlukan *kebudayaan*, dan dalam konteks ini pulalah bahasa menjadi satu unsur kebudayaan penting yang mendukung secara langsung proses membangun dunia manusia itu. Dengan bahasalah orang berkomunikasi dan membangun dan mengembangkan dunianya.

¹ Peter L. Berger, *Kabar Angin dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan dari buku asli *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural* oleh J. B. Sudarmantao (Jakarta: LP3ES, 1991), halaman 6-7.

Pentingnya bahasa sebagai wahana komunikasi, tidak terbantahkan bagi semua orang di dunia. Wibowo² menyatakan bahwa tidak pernah terjadi percakapan dilakukan manusia tanpa bahasa. Terkait dengan hal ini, satu hal menarik yang dicermati adalah adanya pernyataan yang pernah disampaikan Rivers, dkk.³ bahwa manusia itu sebagai pembuat simbol. Kemampuan ini ada, sebagaimana yang dikatakan oleh para filsuf karena manusia berbeda dengan binatang yakni manusia memiliki logika. Selain memiliki logika, ada unsur pembeda yang lain, yakni manusia memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Manusia adalah makhluk yang mengetahui bagaimana harus bereaksi tidak hanya terhadap lingkungan fisiknya, tetapi juga pada simbol-simbol yang dibuatnya sendiri. Misalnya, anjing yang lapar hanya akan bereaksi terhadap makanan yang disodorkan dengan memakannya, sedangkan manusia akan mereaksinya dengan berbagai cara, tergantung pada penafsirannya atas simbol-simbol yang ada. Ada kemungkinan ia akan membuang makanan itu meskipun ia lapar, ini kalau cara atau orang menyodorkannya tidak disukainya; mungkin pula ia akan menolak karena makanan itu tidak sesuai dengan selera atau dietnya.

Berkait dengan berbagai hal yang dinyatakan tentang bahasa, satu hal yang pasti dapat dikatakan di sini, bahwa manusia agar dapat *survive*, memerlukan bahasa untuk berkomunikasi. Dapat diperkirakan bahwa pada awal terjadinya komunikasi antarmanusia pada masa dahulu kala, pastilah dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat. Namun, penggunaan bahasa isyarat itu saja, tentu tidak cukup bagi manusia untuk mengembangkan dirinya dalam kerangka membangun dunia. Maka dari itu, dalam mengembangkan kebudayaannya dalam kerangka membangun dunia, manusia harus menciptakan bahasa verbal. Bahasa inilah yang kemudian merupakan bahasa yang diharapkan dapat mengekspresikan rasa, cipta, dan karsa manusia. Dengan bahasa verbal, dinamika kebudayaan manusia dapat terekspresikan dan terdokumentasikan secara baik.

² Wahyu Wibowo, *Manajemen Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) halaman 1.

³ Rivers William L., Theodore Peterson, dan Jay W. Jensen, *Media Massa Masyarakat Modern*, edisi kedua, diterjemahkan dari buku asli *Mass Media and Modern Society*, 2nd edition oleh Haris Munandar & Dudy Priatna. (Jakarta: Renada Media, 2003), halaman 28.

Sampai pada titik pemahaman ini, bahasa kemudian dipahami sebagai tanda yang disepakati oleh masyarakat, yang pembentukannya terjadi secara bebas (*arbitrer*), bergantung kepada si pengguna bahasa yang menyepakatinya. Dengan demikian, kata-kata, kalimat-kalimat, dan wacana-wacana yang terbangun, semuanya didasarkan atas kesepakatan dari pengguna bahasa. Bagi Wibowo,⁴ bahasa dalam wacana linguistik diberi pengertian sebagai sistem simbol bunyi bermakna dan berartikulasi, yang bersifat *arbitrer* dan konvensi, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Lebih jauh, dikatakan oleh Wibowo⁵ bahwa bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis sehingga dapat dipakai sebagai alat komunikasi, dan kata itu sendiri merupakan bagian integral dari simbol yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Simbol itu sebagai sesuatu yang dapat mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara *arbitrer*, konvensi, dan *representatif-interpretatif*. Artinya, dalam penyimbolan, tidak ada hubungan alamiah antara yang menyimbolkan dan yang disimbolkan. Namun, suatu realitas bahwa manusia mampu menciptakan simbol itu, merupakan realitas yang tidak terbantahkan.

Demikianlah, setiap suku dan bangsa mana pun di dunia pastilah memerlukan tanda yang disepakati sebagai bahasa untuk berkomunikasi. Maka dari itu, lahirlah berbagai bahasa—baik dalam suku-suku maupun bangsa-bangsa yang ada. Semua suku dan bangsa di seluruh dunia, pasti memiliki bahasanya sendiri, yang merupakan pengejawantahan kesepakatan simbol-simbol yang disepakati. Demikian juga halnya suku-suku pada daerah-daerah yang tersebar di seantero tanah air, lahir, dan berkembang berbagai bahasa suku bangsa. Suku bangsa Minang dengan bahasa Minangnya, suku Betawi dengan bahasa Betawinya, suku Sunda dengan bahasa Sundanya, suku Jawa dengan bahasa Jawanya, suku Madura dengan bahasa Maduranya, suku Bali dengan bahasa Balinya, suku Bugis dengan bahasa Bugisnya, dan seterusnya. Bahasa-bahasa tersebut menjadi bahasa komunikasi intersuku, yang menyatukan mereka menjadi satu suku.

⁴ Wahyu Wibowo, *op.cit.*, halaman 3.

⁵ Wahyu Wibowo, *op.cit.*

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang di dalamnya meliputi begitu banyak suku, memerlukan bahasa yang dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi antarsuku. Sebagai satu bangsa, diperlukan satu bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami bersama dan bahasa itu tidak lain adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang kemunculannya memiliki sejarah yang panjang ini, awal mulanya berasal dari bahasa Melayu Riau, yang kemudian dalam perkembangannya diperkaya dengan bahasa-bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia ini oleh Halim⁶ kemudian dinyatakan memiliki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara.

"... keberadaan bahasa Indonesia, yang memiliki dua kedudukan penting, yakni: pertama sebagai bahasa nasional dan kedua sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi."

Keberadaan bahasa Indonesia inilah yang menyatukan suku-suku yang ada dalam bangsa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu bangsa, keberadaan bahasa Indonesia sebenarnya dapat dikatakan memiliki prestasi besar karena mampu menjalin ribuan suku bangsa yang ada dalam tindak komunikasi yang sama di negeri ini. Spirit kebangsaan kemudian terekspresikan dalam wahana bahasa Indonesia dan tentunya tidak sekadar sebagai wahana, tetapi juga di dalamnya terkandung nilai kebangsaan. Bagi penulis,⁷ bahasa Indonesia semakin mematangkan

⁶ Amran Halim (ed.), *Politik Bahasa Nasional 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), halaman 5.

⁷ I.B. Putera Manuaba, "Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ipteks", dalam *Surabaya Post*, 22 Oktober 1992, halaman 4.

dirinya menjadi bahasa modern, yang penting artinya dalam membangun jiwa kebangsaan dan penguasaan iptek. Jauh sebelumnya, penulis⁸ juga pernah menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan media utama dalam pendidikan di Indonesia, yang di dalamnya mengandung nilai budaya bangsa.

Sebagai bangsa, tentu saja juga kita tidak dapat hidup sendiri karena setiap bangsa perlu melakukan hubungan antarbangsa, interaksi dengan orang-orang dari negara lain. Apalagi, sekarang ini, kondisi dunia telah berada dalam era global yang ditandai dengan pemanfaatan dominan ICT (*information, communication, and technology*) yang semakin lama semakin serba canggih. Oleh karena itu, setiap bangsa tentu harus pula memiliki wahana dalam rangka komunikasi global. Maka dari itu, bahasa-bahasa internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bahasa yang penting dimengerti dan dipahami dalam kehidupan global.

Pada dasarnya, itulah keniscayaan bahasa-bahasa yang patut diakui, yang semuanya memerlukan penguatan dan pemantapan agar kita dapat berkomunikasi secara proporsional dalam kondisi dunia yang semakin berubah dan berkembang. Namun, yang perlu dicatat adalah perihal penguatan dan pemantapan ini seyogianya tidak hanya terjadi pada satu kelompok bahasa saja. Idealnya, penguatan dan pemantapan bahasa-bahasa itu memang harus terjadi secara simultan pada ketiga kelompok bahasa.

Sejatinya, semua bahasa yang terkelompok menjadi tiga kelompok itu, diperlukan oleh pengguna bahasa dalam komunikasi tingkat lokal, nasional, dan internasional. Semua itulah yang menjadi alasan mengapa kita tidak boleh sampai menafikan atau memarginalkan salah satu kelompok bahasa itu, apalagi sampai menstratakan secara vertikal (atas-bawah) seperti dalam sistem kasta. Bahasa seharusnya diperlakukan oleh pengguna bahasa secara proporsional dalam tindak berkomunikasi.

⁸ I. B. Putera Manuaba, "Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Proses Dialektika", dalam *Nusa Tenggara*, 1996.

Sikap dan Orientasi Berbahasa Pengguna Bahasa

Kita sebagai *warga Indonesia* sekaligus adalah sebagai *warga daerah* dan *warga dunia*. Hal ini dapat dijelaskan dengan pemahaman berikut. Pertama, sebagai *warga Indonesia*, kita mesti mampu tampil sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik karena kitalah si penutur asli (*native*) bahasa Indonesia. Pengguna bahasa yang baik, tidak hanya dimaksudkan mampu sebatas berbahasa Indonesia secara lisan saja, namun tentu saja juga harus sampai pada kemampuan berbahasa secara tertulis. Ini perlu diwacanakan karena adanya kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa banyak warga Indonesia yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Padahal bahasa Indonesia sendiri telah dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ini berarti, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib dipelajari, dikuasai, dan digunakan secara konsisten oleh setiap warga bangsa Indonesia dalam komunikasi sesuai dengan konteksnya⁹ (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003). Hendaknya jangan sampai lupa juga bahwa kitalah si penutur asli bahasa Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis lebih baik daripada yang bukan penutur asli.

Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kurang ditekuni dan diakrabi oleh warga bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, dalam keseharian, sering terlontar ucapan, "Buat apa mempelajari bahasa Indonesia, *toh* kita dalam sehari-hari sudah berbahasa Indonesia." Akibat dari pernyataan ini, membuat warga itu menggampangkan bahasa Indonesia karena sudah dianggap dengan sendirinya menguasai bahasa Indonesia. Kenyataannya, belumlah otomatis seperti itu. Adanya sikap yang menggampangkan bahasa Indonesia semacam ini, berdampak langsung pada penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik. Ini sangat jelas dapat diketahui, di antaranya dari kemampuan menulis (mohon maaf) tulisan ilmiah pada warga kita di kalangan dunia akademik yang mewajibkan menggunakan bahasa standar ilmiah dalam tulisan ilmiahnya.

⁹ *Ibid.*

Praksis berbahasa Indonesia yang kurang baik ini, tidak hanya dijumpai dalam komunikasi tertulis karya ilmiah, tetapi juga tampak pada penyampaian dalam komunikasi lisan dalam forum-forum resmi atau ilmiah. Dengan perkataan lain, acap kali penyampaian lisan menjadi tidak standar sebagai bahasa lisan Indonesia. Di sini, perlu dipertanyakan juga, adakah bahasa lisan standar itu dan yang manakah bahasa lisan yang dapat dijadikan indikator kestandaran itu?

Satu hal yang pasti bahwa perlu ada perhatian khusus untuk mau belajar bahasa Indonesia secara benar dan baik karena kitalah penutur asli bahasa Indonesia. Sikap berbahasa ini sangat diperlukan bagi setiap warga Indonesia. Bukan hanya sekadar untuk penyelamatan bahasa Indonesia, tetapi juga pengembangan bahasa Indonesia di tengah bahasa-bahasa di dunia.

Ada juga contoh lainnya, yakni banyaknya ada anggapan atas bahasa Indonesia, yang pada intinya mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berstrata lebih rendah dari bahasa asing (terutama Inggris). Papan nama yang bertebaran di berbagai tempat di Indonesia, menurut perkiraan saya sekitar 80% menggunakan kata-kata bahasa asing (Inggris) dan mungkin hanya 20% menggunakan bahasa Indonesia. Realitas itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memang belum dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Realitas ini dapat digunakan untuk melihat tingkat atau kadar kebanggaan masyarakat Indonesia dengan bahasa bangsanya sendiri. Apalagi dengan adanya semangat internasionalisasi saat ini. Namun, sangat mungkin juga karena bukan menyangkut degradasi kebanggaan semacam itu, tetapi ada kepentingan lain di balik dominannya penggunaan kata bahasa asing (Inggris). Misalnya, sangat mungkin dengan menggunakan bahasa asing itu akan lebih laku di pasaran (*marketable*). Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan orientasi memasarkan barang (produk).

"... dalam tindakan berbahasa di masyarakat, baik menyangkut penulisan pada papan nama, baliho, istilah di jalanan, rumah makan, hotel, perusahaan, rumah sakit, dan institusi tinggi. Contohnya, sebuah "warung" cenderung menggunakan istilah cafe karena dianggap lebih laku jual. Berbahasa Inggris berarti memiliki citra global atau mendunia. Anggapan pengguna bahasa ini memang terjadi pada hampir seluruh kota di wilayah Indonesia."¹⁰

Ada anggapan yang sangat kuat juga tumbuh pada diri pengguna bahasa bahwa dengan menggunakan bahasa asing pada produk-produk yang ditawarkan ke pasaran, nilai barangnya dipandang lebih tinggi atau lebih berkualitas. Selain itu, penggunaan bahasa asing ini juga mencerminkan sebuah kuasa (*power*) karena di Indonesia sesuatu yang serba-asing memang masih dianggap sebagai sesuatu yang lebih berkualitas, patut dipercaya, dan dijamin kualitasnya. Kalau dipahami dengan pemikiran Roland Barthes,¹¹ hal ini mungkin juga merupakan sebetulnya mitos modern yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, sebagai *warga daerah*, setiap pengguna bahasa yang berbahasa Indonesia tersebut, sesungguhnya juga sekaligus sebagai pengguna bahasa daerah. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Oleh karena itu, pengguna bahasa yang memakai bahasa Indonesia ini juga sekaligus pengguna bahasa daerah.

Perihal bahasa daerah ini, justru adalah bahasa yang paling awal dikenal karena sejak anak mengenal bahasa maka bahasa daerah inilah yang mewarnai kehidupannya pertama kali, terkecuali keluarga anak ini dalam sehari-harinya memang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Oleh karena itu, sekaligus sebagai warga daerah, sikap berbahasa daerah ini juga menjadi bagian penting yang harus disosialisasikan pada anak. Jangan sampai anak daerah tidak mengenali bahasa daerahnya di mana ia hidup dan berkembang sebab penguasaan bahasa daerah ini menandakan bahwa orang memiliki pijakan tradisi yang kuat.

¹⁰ I.B. Putera Manuaba, "Pergeseran Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokal dan Global". Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Relasi Lokalitas-Globalitas Menuju Modernitas Bahasa dan Sastra Indonesia, tanggal 24-25 Juni 2009 di Hotel Garden Palace, Surabaya.

¹¹ Roland Barthes, *Elements of Semiology* (New York: Hill and Wang, 1981), halaman 4.

Pijakan ini diperlukan sebagai peneguhan karakter di tengah kompetisi masyarakat global. Pentingnya pijakan pada bahasa daerah ini pernah juga saya sampaikan dalam sebuah tulisan, yang di antaranya dapat disimak dalam petikan berikut.

"Bahasa daerah (Jawa, Madura, Bugis, Minang, Sunda, Bali, dan seterusnya) perlu disadari sebagai bahasa ibu (mother language), berfungsi sebagai alat komunikasi antaranggota komunitas dan daerah. Bahasa ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang perlu diketahui dan dihayati generasi penerus. Sebab, dengan memahami kearifan lokal, yang salah satunya dapat dipahami lewat bahasa daerahnya, ia akan memiliki pijakan yang kuat karena lewat bahasa daerah inilah ia dapat menginternalisasi nilai-nilai lokalitasnya."¹²

Oleh karena itu, memakai bahasa daerah masing-masing dalam konteks yang diperlukan, sama sekali tidak berarti kuno (*jadul*) sebagaimana banyak anggapan di kalangan generasi muda sekarang ini manakala memakai bahasa daerah. Sekali lagi, bahasa daerah tidak identik dengan sikap kekunoan atau ketidakmodernan. Maka itu, kita juga perlu memberikan pemahaman pada generasi muda agar tidak ada anggapan seperti itu lagi. Oleh karena itu, hal ini akan dapat berdampak pada tidak adanya respons pewarisan bahasa daerah. Tentunya juga, kita perlu memberikan perbandingan, perihal adanya realitas bagaimana antusiasme banyak orang asing untuk mempelajari bahasa daerah di Indonesia. Misalnya, kita perlu mencontoh bagaimana orang-orang asing begitu seriusnya belajar bahasa daerah, misalnya belajar bahasa daerah Jawa. Bahkan, mungkin, kemudian mereka tidak hanya sekedar belajar soal bahasa saja, tetapi juga sekaligus budayanya. Mereka pun kemudian tumbuh menjadi ahli Jawa (*Javanese*) atau ahli Bali (*Balinese*). Dalam soal budaya, dalam pandangan orang asing, Indonesia adalah gudangnya, bahkan akhir-akhir ini banyak peneliti asing yang mengkaji santet, mistik, bahkan mantra.

¹² *Ibid.*

Pada waktu yang sudah lalu, penulis menerima *e-mail* dari kawan dekat penulis, seorang pengarang sastra Jawa bernama Suparta Brata (almarhum) dari Surabaya karena secara kebetulan penulis sama-sama menjadi anggota badan pekerja sastra Jawa ke-5 di Jawa Timur tahun 2011, yang mengirimkan beberapa nama orang-orang asing melalui apa yang ditulis oleh seorang ahli bahasa Jawa, Rob van Albada dari Amsterdam, yang ternyata sangat ahli bahasa Jawa, bahkan dengan menggunakan bahasa Jawa lengkap dengan *kromo inggil*-nya. Penulis kaget membaca *e-mail*-nya yang menggunakan bahasa Jawa *kromo inggil*. Ia mengantar suratnya dengan mengatakan "*Punika pertelan alamat-alamat ahli basa Jawi ing Nederland*" dan di akhir *e-mail*-nya ia menulis "*Benjing kula badhe nyuwun pirsu dhateng... Matur sembah nuwun kagem emailipun.*" Padahal kita sendiri belum tentu bisa menggunakan bahasa Jawa *kromo inggil* seperti itu. Beberapa nama ahli bahasa Jawa yang disebut dalam *e-mail*-nya adalah Els Bogaerts (Leiden), Willem van der Molen (Leiden), Dick van der Meij (Jakarta), Victoria M.C. Clara van Groenendael (Amsterdam), Edwin Wieraga (Jerman), dan Thancerat Jatuthasri (Bangkok).

Penulis juga sangat yakin, pasti banyak juga saudara-saudara kita yang berasal dari luar negeri yang juga ahli bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Di Bali, penulis menjumpai banyak orang luar negeri yang sudah fasih berbahasa Bali. Bahkan tidak hanya fasih, tetapi bahkan lengkap dengan *unggah-ungguh* (bahasa Bali: *unda-usuk* bahasa Balinya). Lalu, ironisnya, orang Bali sendiri banyak juga yang dalam komunikasi sehari-harinya tidak lagi menggunakan bahasa daerah Bali. Banyak orang Bali yang cenderung lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing walaupun konteks kondisi sebenarnya lebih cocok menggunakan bahasa daerah Bali.

Melihat kenyataan ini, kita sesungguhnya perlu merenung sedalam-dalamnya bahwa jika orang-orang asing saja memandang bahasa daerah penting artinya, lalu mengapa justru kita sendiri kurang menganggap penting arti bahasa daerah itu? Untuk itu, ke depan tentu saja perlu ada ikhtiar untuk tidak hanya menyelamatkan bahasa daerah, tetapi juga mengembangkan bahasa daerah itu sendiri. Dengan perkataan lain, diperlukan sikap berbahasa yang lebih bijak terhadap bahasa-bahasa

daerah di Indonesia. Jadi, kendatipun kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara, kita tidak dapat serta-merta meninggalkan begitu saja bahasa daerah yang ada di daerah kita masing-masing hanya karena alasan menganggap sebagai sesuatu yang kuno itu. Mengapa demikian? Karena bahasa-bahasa daerah merupakan kekayaan budaya yang memiliki fungsi dan arti yang sesuai dengan konteksnya.

Selain bahasa daerah, sebagai bagian kekayaan budaya, ia juga merupakan wahana komunikasi di tingkat lokal yang bernuansa keakraban. Dikatakan demikian karena tentu tidak akan terasa afdal jika dua sekawan dari daerah yang sama bertemu di daerah lain tanpa menggunakan bahasa daerahnya. Ini suatu fenomena berbahasa yang sangat nyata. Sebagai contoh, penulis sendiri yang kebetulan berasal dari Bali yang berbahasa Bali ketika bertemu dengan kawan sekampung dari Bali di luar Bali, pastilah secara spontan akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bali (sekalipun sudah banyak kosakata yang juga sudah mulai terlupa karena sangat lamanya tinggal di Jawa). Sebab, dalam konteks komunikasi seperti ini ada nilai rasa dan keakraban yang mewarnai tindakan komunikasi yang tidak tergantikan baik oleh bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Contoh ini secara tidak langsung menyiratkan arti bahwa bahasa daerah memang diperlukan dalam konteks dan kondisinya yang tepat, seperti halnya bahasa Indonesia dan asing juga. Oleh karena, ada nilai kedaerahan yang tidak tergantikan.

Maka itu, dalam konteks ini, berkomunikasi tidak hanya sebatas transfer isi informasi, tetapi juga menyangkut rasa dan nilai kebahasaan itu sendiri. Penulis¹³ pernah mengungkap bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi lebih dari itu. Dengan menyitir pandangan para filsuf Yunani, dikatakan bahwa bahasa sebagai alat untuk mencari dan mengungkap kebenaran, mengekspresikan hal yang bersifat artistik, serta bersifat persuasif. Dalam pandangan hidup orang Athena abad ke-5, bahasa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang konkret dan praktis. Bahasa juga dianggap sebagai "senjata ampuh" tingkat tinggi; dan sastrawan tersohor Shakespeare dari Inggris menyatakan bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan kebijaksanaan dan meyakinkan.

¹³ *Ibid.*

Tindak komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dari sisi rasa kebahasaan tentunya tidak dapat tergantikan oleh bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Untuk itu, sebagai pengguna bahasa, kita memang harus tetap berikhtiar menghidupkan dan mengembangkan bahasa daerah karena bahasa ini memang memiliki kedudukan dan fungsi sendiri. Apabila kita masih merasa juga sebagai warga daerah, tentu harus ada tanggung jawab moral untuk menghidupkan dan mengembangkan bahasa daerah dalam komunitas daerah masing-masing.

Ketiga, sebagai warga dunia, kita yang berbahasa Indonesia dan daerah, pada konteks kondisi tertentu, mesti memakai bahasa asing yang diakui PBB sebagai bahasa internasional. Dalam hal ini, bahasa asing digunakan bukan karena alasan ingin menaikkan pencitraan sebagai manusia yang mengglobal atau bergengsi, tetapi karena memang menjadi sebuah tuntutan komunikasi dalam konteks berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari luar negeri. Misalnya, bahasa asing, seperti bahasa Inggris, penting dikuasai dan digunakan karena memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang yang berasal dari negara yang berbeda.

Bahasa asing sebagai bahasa internasional berfungsi sebagai media atau wahana komunikasi yang penting karena dengan wahana itu kita dapat berhubungan dan bekerja sama dengan pihak luar negeri. Komunikasi dapat terjadi secara langsung melalui sebuah pertemuan langsung dan tentu dapat juga melalui pertemuan melalui dunia maya. Namun, semua bentuk pertemuan memerlukan sarana bahasa asing yang dapat dimengerti dan dikuasai oleh kedua belah pihak. Misalnya, jika kita tidak menguasai bahasa Inggris—sebagai bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak—maka proses komunikasi tidak akan terjadi sehingga tujuan apa yang diinginkan kedua belah pihak tidak akan tercapai. Bahasa asing sebagai bahasa internasional, memiliki arti penting karena dapat menjembatani proses komunikasi itu.

Dengan demikian, sikap berbahasa itu merupakan bagian penting dalam tindak komunikasi. Sikap berbahasa memungkinkan kita untuk melestarikan dan mengembangkan semua kelompok bahasa yang ada. Sikap ini adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang mengenai bahasa dan objek bahasa tertentu, yang memberikan

kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya.¹⁴ Sebagai kuncinya, setiap pengguna bahasa tidak hanya dituntut memiliki kemahiran berbahasa, namun juga dituntut memiliki kesadaran, kecintaan, dan kebanggaan berbahasa. Bahasa apa pun di dunia ini, akan punah manakala tidak didukung dengan sikap dan kesadaran yang baik terhadap bahasa itu. Bahasa apa pun, secara cepat atau lambat, akan hilang manakala tidak ada kecintaan dan kebanggaan atas bahasa pada para pendukung bahasa.

Maka dari itu, jika kita ingin agar bahasa daerah tetap eksis di tengah masyarakat maka kita harus bersedia sebagai pendukung dari bahasa itu, yang tidak hanya berperan ikut melestarikan, tetapi juga mengembangkannya. Sebagai mana dikatakan Garvin dan Mathiot¹⁵, perlunya ada kesetiaan bahasa (*language loyalty*) dan kebanggaan bahasa (*language pride*), yang dimiliki oleh pendukung bahasa. Kesetiaan bahasa maksudnya di sini adalah keinginan masyarakat mendukung bahasa dengan tujuan memelihara dan mempertahankan bahasa. Kebanggaan bahasa mendorong seseorang atau masyarakat pendukung bahasa itu untuk menjadikannya sebagai penanda jati diri. Ini penting, sebab suatu bahasa tidak dengan sendirinya akan hidup begitu saja tanpa ada yang mendukungnya. Sikap pendukung menjadi aspek yang penting bagi keberlangsungan hidup bahasa.

Dalam kasus di Indonesia, banyak bahasa daerah yang semakin menipis pendukungnya, yang membuat bahasa ini sekarat dan kemudian lama-kelamaan punah. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia sangat riskan mengalami kepunahan semacam ini. Bahasa Indonesia yang memiliki pendukung sangat besar di seantero tanah air ini pun tidak akan luput dari kepunahan jika sikap berbahasa para pendukungnya menunjukkan dukungan yang kurang sehat. Di negara kita proses peminggiran (*marginalisasi*) bahasa Indonesia dari bahasa asing (*internasional*), lambat-laun juga akan mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.

¹⁴ (http://blog.unnes.ac.id/karatikahernawan/2010/04/30/sikap_bahasa/09/08/2011).

¹⁵ (http://blog.unnes.ac.id/karatikahernawan/2010/04/30/sikap_bahasa/09/08/2011).

Oleh karena itulah, pengguna bahasa harus bersedia mengoptimalkan tanggung jawab moralnya untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa. Dalam pengertian, sikap berbahasa para pendukung menjadi kunci utama menuju langkah pelestarian dan pengembangan bahasa. Bahasa daerah akan tetap dapat eksis jika masih memiliki pendukung yang kuat. Demikian juga halnya dengan bahasa Indonesia dan asing. Pada diri pendukung atau pengguna bahasa, bahasa yang digunakan sebenarnya tidak lain adalah pengejawantahan kepribadian pengguna bahasa itu sendiri.

Hal terpenting yang juga perlu diketengahkan di sini adalah perlunya penggunaan bahasa sesuai dengan konteks berbahasa. Jika kita menyadari soal konteks ini, pastilah kita akan memiliki kemampuan untuk menentukan bahasa mana yang paling representatif dipakai dalam tindak berkomunikasi.

Jadi, penggunaan bahasa ini, sebenarnya harus lebih dikaitkan dengan soal tuntutan konteks kondisi berbahasa, dan bukan cenderung menstratakan secara vertikal seperti sistem kasta. Artinya, kita harus berbahasa secara proporsional. Kapan kita harus menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing dalam tindak komunikasi. Inilah sikap yang seharusnya secara konsisten dimiliki bagi setiap pengguna bahasa. Dengan demikian, sebagai pengguna bahasa, kita tidak bersikap menstratakan bahasa-bahasa secara vertikal (atas-bawah). Selanjutnya, bahasa-bahasa yang ada, dalam sikap ini, masing-masing tetap diakui kebermanfaatannya dan keunggulannya. Sebaliknya, menggunakan atau memilih bahasa karena alasan gengsi, kuasa, atau ketidakbanggaan, sebenarnya merupakan sebuah bentuk penyimpangan atas keberadaan bahasa-bahasa yang niscaya memiliki orientasi yang berbeda itu.

Apabila keberadaan sebuah bahasa sangat ditentukan oleh sikap berbahasanya, si pengguna bahasa seyogianya tidak hanya semata-mata sebagai yang memakai bahasa, tetapi juga sebagai yang memiliki tanggung jawab untuk menjadikan bahasa itu lestari dan berkembang sebagai wahana komunikasi. Selama ini, mungkin kita hanya memosisikan diri sebagai pengguna bahasa (konsumen bahasa), tanpa pernah menyadari secara bersamaan memiliki tanggung jawab sebagai pemilik bahasa

(produsen bahasa). Artinya, kita cenderung berada *di luar* bahasa, bukan berada *di dalam* bahasa itu sendiri. Dengan adanya pemosisian diri semacam itu, pengguna bahasa acap kali merasa bukan sebagai bagian dari yang harus bertanggung jawab atas kelestarian dan pengembangan bahasa itu. Implikasi lebih jauhnya, pengguna bahasa menyimpang dari tujuan berkomunikasi, karena ada keinginan-keinginan lain yang hendak dicapai.

Adanya sikap berbahasa inilah yang secara tidak langsung mendorong pengguna bahasa tidak memosisikan bahasa-bahasa secara horizontal tetapi vertikal. Adanya sikap terpisah sebagai pengguna bahasa inilah yang menimbulkan *kastanisasi bahasa*. Bahasa-bahasa yang ada tidak digunakan dalam berkomunikasi, tetapi sebagai sebuah gengsi, kuasa, dan prestise. Pengguna bahasa berbahasa bukan untuk berkomunikasi secara wajar, tetapi agar terciptakan sebagai orang yang modern, global, dan prestise. Oleh karena itu, berbahasa akan memiliki dua kecenderungan yang tidak sama, yang sampai saat ini masih dapat dilihat dalam kenyataan empiris bagaimana pengguna bahasa menggunakan bahasa. Dua kecenderungan inilah yang mengakibatkan adanya pemosisian bahasa secara vertikal dan horizontal.

Untuk lebih menerangkan sikap berbahasa yang memiliki dua kecenderungan ini, dapat juga disimak dalam Bagan 1.1 berikut.



Bagan 1.1 Sikap Berbahasa dan Orientasi Berbahasa

Dalam Bagan 1.1, sikap berbahasa si pengguna bahasa sangat ditentukan oleh orientasinya dalam berkomunikasi. Jika si pengguna bahasa berorientasi pada suatu kepentingan komunikasi yang berdasar atas gengsi, kuasa (*power*), dan degradasi kecintaan (kebanggaan) maka cenderung akan mengakibatkan terjadinya proses pengkastaan (kastanisasi). Namun, jika si pengguna bahasa berorientasi berkomunikasi untuk suatu kepentingan tertentu, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional maka tidak akan terjadi "pengkastaan" (dekastanisasi). Dengan demikian, pengkastaan bahasa-bahasa bukan merupakan sesuatu yang alami, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu, yakni sikap dan orientasi si pengguna bahasa itu sendiri. Adapun keberadaan bahasa-bahasa sebenarnya niscaya adalah nirkasta dan adanya bahasa yang mengenal *unggah-ungguh* bahasa itu pun juga tidak terstratakan secara vertikal.

Beberapa Sikap Berbahasa sebagai Penyebab Kastanisasi Bahasa

Ada beberapa sikap berbahasa yang menyebabkan terjadinya "pengkastaan" bahasa-bahasa. Beberapa sikap tersebut adalah seperti berikut. *Pertama*, pengguna bahasa memang ingin disebut modern, prestise, mengglobal, dan seterusnya, sehingga ia cenderung memilih bahasa mana yang dianggap lebih tinggi nilainya di tengah masyarakat.¹⁶ Jika ia berada dalam masyarakat daerah yang sehari-harinya berbahasa daerah, ia akan memilih sebagian atau keseluruhan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing. Selanjutnya, apabila ia berada di dalam masyarakat yang berbahasa Indonesia, ia akan memilih sebagian atau keseluruhan dalam bahasa asing. Dalam hal ini, akan ada banyak kosakata bahasa Indonesia atau bahasa asing, kendatipun sebenarnya dalam bahasa daerah kosakata itu sudah ada dan cukup mewakili. Tampaknya, si pengguna bahasa ingin lebih "mencari perhatian" saja.

¹⁶ I. B. Putera Manuaba, "Dekastanisasi Bahasa-bahasa", dalam *Warta Unair*, diterbitkan oleh Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Kedua, adanya sikap yang memosisikan diri hanya sebagai pengguna bahasa (konsumen) dan bukan sebagai pemilik bahasa (produsen). Dalam sikap ini, si pengguna bahasa tidak pernah memikirkan bagaimana bahasa yang dipakai untuk dilestarikan dan dikembangkan dalam tindak komunikasi. Artinya, bahasa di sini dipahami hanyalah sebatas sebagai alat (wahana), dan tanpa pernah dianggap sebagai bagian dari kebudayaan yang juga sarat dengan nilai-nilai yang penting diperhatikan oleh si pengguna bahasa itu sendiri. Tampaknya, tidak pernah tersadari bahwa berbahasa adalah cerminan kepribadian si pengguna bahasa. Pada gilirannya, si pengguna bahasa dalam berkomunikasi hanya menganggap tindak berbahasa itu sebagai transfer isi informasi saja, tanpa pernah menyadari bahwa berbahasa sebagai *wujud diri berkebudayaan*, yang di dalamnya harus memperhatikan soal kepantasan, keetisan, dan nilai rasa. Ini membawa dampak langsung pada kecenderungan ia mengkastakan bahasa.

Ketiga, tidak menyadari bahwa setiap bahasa memiliki nilainya sendiri. Nilai bahasa tidaklah didasarkan pada nilai yang ada di dalam diri masing-masing bahasa, tetapi nilai ditentukan dengan membandingkan antara bahasa yang satu dan yang lain. Ini mengakibatkan, bahasa asing dipandang memiliki nilai yang lebih tinggi (prestise) ketimbang bahasa Indonesia; bahasa Indonesia memiliki nilai yang lebih tinggi ketimbang bahasa daerah. Begitulah fenomena praksis berbahasa orang-orang sehingga terjadi pemosisian bahasa-bahasa yang tak seharusnya.

Adanya sikap-sikap berbahasa seperti itu, disadari atau tidak disadari, membuat bahasa yang dianggap memiliki "kasta" lebih rendah menjadi dianggap kurang penting sehingga membuat si pengguna bahasa kurang memperhatikannya. Misalnya, masyarakat memang berlomba-lomba mempelajari bahasa asing ketimbang bahasa daerah dan Indonesia. Bahasa daerah dan Indonesia, dipandang sebagai bahasa yang tidak perlu dipelajari secara khusus seperti halnya bahasa asing. Ini membuat masyarakat tidak mempelajari bahasa Indonesia dan daerah secara baik. Ini berakibat masyarakat justru menjadi asing dengan bahasa daerah dan mungkin juga bahasa Indonesia. Inilah sikap berbahasa yang menggejala secara terus-menerus sampai saat ini di negeri ini.

Pengkastaan bahasa-bahasa terus terjadi, mulai dari tindak komunikasi sehari-hari hingga tindak komunikasi akademis. Dalam komunikasi akademis, sering dapat dijumpai tulisan yang lebih gandrung menggunakan istilah-istilah bahasa asing (Inggris), padahal sebetulnya padanan kata dalam bahasa Indonesianya sudah ada dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Hal yang sering terjadi dalam hal ini adalah kata bahasa Inggris yang kurang terpahami dengan baik digunakan untuk menggantikan kata bahasa Indonesia yang sebetulnya sudah sangat jelas. Tulisan dalam bahasa Indonesia yang keinggris-inggrisan terjadi dengan nuansa yang lucu. Seharusnya, mungkin, dapat saja menggunakan kata bahasa Inggrisnya manakala ingin lebih menegaskan atau menguatkan kata bahasa Indonesia yang dirasa perlu dikuatkan dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, jika itu harus dilakukan, teknis penulisannya juga harus diperhatikan. Artinya, jika mau menulis seperti itu, tulislah dulu kata bahasa Indonesianya, barulah kemudian ditulis kata bahasa Inggrisnya. Misalnya, dalam dunia politik sering digunakan istilah “dari atas ke bawah” (*top-down*) atau “dari bawah ke atas” (*bottom-up*); dalam dunia usaha sering digunakan istilah kewirausahaan (*entrepreneurship*); dan seterusnya.

Reaktualisasi Dekastanisasi Berbahasa dalam Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia

Bertitik-tolak dari kenyataan sebagaimana yang digambarkan dalam bagian sebelumnya, jelaslah bahwa dalam bahasa-bahasa sebenarnya tidak dikenal adanya “pengkastaan” sebagaimana yang dikenal dalam sistem kasta. Pengkastaan terjadi bukan oleh keniscayaan bahasa-bahasa yang ada, tetapi karena sikap si pengguna bahasa sendiri yang memiliki kepentingan komunikasi yang seharusnya. Untuk itu, ada baiknya, guna memperjelas pemahaman ini dikaitkan dengan pemahaman fungsi laten dan fungsi manifes yang ada dalam pemahaman sosiologi. Pemahaman ini menjadi penting disinggung di sini karena dapat mengarahkan pada kesadaran orang untuk senantiasa berbahasa dalam kerangka fungsi manifesnya dan bukan fungsi latennya.

Fungsi Laten dan Manifes Bahasa

Setiap pengguna bahasa perlu melakukan introspeksi diri. Apakah ketika berkomunikasi ia lebih menggunakan fungsi laten atau manifes? Dengan bidang ilmu sosiologi, aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh si pengguna bahasa akan dapat mengarah pada adanya dua kecenderungan, yakni kecenderungan pada *fungsi laten* dan *fungsi manifes*. Fungsi laten komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah suatu tindak komunikasi yang menyimpang dari fungsi yang tidak seharusnya dilakukan dalam tindak komunikasi, sedangkan fungsi manifes yang dimaksudkan di sini adalah fungsi tindak komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh si pengguna bahasa.

Si pengguna bahasa yang menggunakan bahasa dengan tujuan gengsi, kuasa, dan prestise dapat dikatakan mengarah ke fungsi laten. Dalam hal ini, si pengguna bahasa lebih menggunakan pertimbangan itu untuk menentukan bahasa apa yang akan digunakan karena tujuannya adalah agar dirinya selaku si pengguna bahasa dinilai memiliki gengsi, kuasa, dan prestise yang tinggi. Si pengguna bahasa tidak cenderung berpikir soal keefektifan dan keefisienan berbahasa dalam konteksnya.

Berlawanan dengan penggunaan bahasa dengan tujuan, kuasa, dan prestise, si pengguna bahasa yang menggunakan bahasa dengan arah fungsi manifes, cenderung berkomunikasi untuk kepentingan menyampaikan informasi secara kontekstual. Artinya, tindak komunikasi yang mengarah pada keefektifan dan keefisienan dalam konteks berbahasa yang kontekstual. Dalam arah fungsi manifes ini, si pengguna bahasa memilih bahasa dengan pertimbangan untuk tujuan komunikasi yang seharusnya dilakukan, bukan untuk gengsi, kuasa, atau prestise.

Pemilihan bahasa (baik menyangkut kata, kalimat, maupun wacana) yang dilakukan si pengguna bahasa, ditentukan oleh arah tujuannya berbahasa. Bagi si pengguna bahasa yang tujuan komunikasinya untuk gengsi, kuasa, dan prestise, ia cenderung memahami keberadaan bahasa-bahasa memiliki derajat yang berbeda atau berada dalam ketidaksetaraan. Oleh karena itu, suatu hal yang terpikirkan si pengguna bahasa adalah ia memilih bahasa apa agar dirinya lebih bergengsi, berkuasa, dan

prestise? Sebaliknya, si pengguna bahasa yang tujuan komunikasinya untuk penyampaian informasi yang efektif dan efisien serta penyerapan nilai-nilai, ia cenderung memahami keberadaan bahasa-bahasa itu berada dalam kesederajatan dan kesetaraan. Dalam hal ini, si pengguna bahasa menganggap bahasa-bahasa yang ada memiliki keluhuran nilai masing-masing sesuai dengan konteksnya.

Sederhananya, berbahasa yang dinilai baik, manakala berbahasa pada tempatnya (sesuai konteksnya). Seorang komunikator bahasa daerah akan sangat dihargai oleh komunikannya, manakala ia dapat berkomunikasi dengan baik dalam konteks kondisi orang harus berbicara dalam bahasa daerah. Namun, apabila seorang komunikator ber bahasa Inggris di tengah masyarakat yang seharusnya lebih cocok berbahasa daerah, maka sangat mungkin akan menciptakan diskomunikasi dan ketidakpantasan. Jadi, berbahasa itu sendiri sesungguhnya juga menyangkut soal kepantasan.

Kepantasan berbahasa mungkin tidak hanya menyangkut kepantasan memilih bahasa apa (daerah, Indonesia atau Inggris), tetapi juga ragam apa (ilmiah, sastra, jurnalistik, sehari-hari). Misalnya, seorang komunikator berbicara dalam forum ilmiah dengan menggunakan nonilmiah. Sudah tentu kondisi berbahasa yang tidak mengindahkan ragam ini juga dianggap kurang memenuhi kepantasan berbahasa. Tentunya, akan menjadi sangat lucu, dan tentu tidak pantas juga, jika seorang komunikator yang berbicara dengan orang-orang di pasar menggunakan bahasa baku. Rasanya sangat aneh jika ada seseorang berbelanja dengan bertanya, "Berapakah harga seikat sayur ini, Bu?" Jika kalimat itu diganti agar memenuhi kepantasan bahasa di pasar, sesungguhnya seseorang cukup bertanya, "Sayurnya berapa, Bu?" Sebaliknya juga, tentu akan sangat janggal dan tidak pantas, jika seorang komunikator berbahasa dengan menggunakan ragam sehari-hari dalam sebuah forum ilmiah yang dihadiri oleh para ilmuwan. Dalam tradisi budaya Jawa atau Bali, yang mengenal *unggah-ungguh* bahasa, seorang komunikator akan menjadi tidak pantas jika ia bicara tanpa memperhatikan *unggah-ungguh* berbahasa ini. Di tengah forum berbahasa daerah yang dihadiri oleh orang-orang terhormat, rasanya tidak mungkin seorang komunikator menggunakan bahasa daerah yang kasar. Jika itu dilakukan, jelas dinilai kurang atau tidak pantas.

Demikianlah sesungguhnya tindak dan sikap berbahasa, yang memerlukan kepantasan-kepantasan berbahasa. Seorang pengguna bahasa yang baik, adalah seorang yang sadar, mau, dan mampu berbahasa yang pantas. Selanjutnya, untuk dapat berbahasa yang pantas, seorang pengguna bahasa harus memiliki kesadaran untuk memosisikan diri dan membaca situasi yang menjadi konteks berbahasa. Artinya, dalam tindak komunikasi yang baik, ada banyak hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah kebenaran kaidah kebahasaan, kesesuaian konteks berbahasa, ketepatan ragam bahasa, ketepatan kelompok bahasa, pelibatan nilai rasa bahasa, kejelasan informasi, serta pemahaman kandungan nilai budaya bahasa.

Jadi, persoalan kualitas berbahasa, bukan terletak pada bahasa apa yang digunakan, tetapi dalam konteks yang bagaimanakah bahasa itu digunakan oleh pemakai bahasa. Bukankah berbahasa yang baik (baik secara tertulis maupun lisan) adalah yang sesuai dengan konteksnya? Jika demikian halnya, pengguna bahasa tidak perlu merasa rendah diri jika menggunakan bahasa daerah atau Indonesia. Dengan pengertian, bukan karena status bahasa asing dinilai memiliki kualitas tinggi atau berkasta tinggi.

Kesetaraan bahasa-bahasa dalam konteks komunikasi

Sebagaimana dikemukakan, kesetaraan dan ketidaksetaraan bahasa-bahasa, ditentukan oleh sikap si pengguna bahasa. Sebab, keberadaan bahasa-bahasa, niscaya setara. Pengguna bahasa memiliki karakteristik multilingual (menggunakan bahasa lebih dari satu). Ia juga sangat menentukan apakah dalam berkomunikasi akan menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Pilihan soal apakah akan menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing itu akan dilakukan oleh pengguna bahasa yang memegang fungsi manifes komunikasi.

Oleh karena itu, konteks dan kondisi berbahasa menjadi pertimbangan pengguna dalam menentukan pilihan bahasa yang akan dipakai. Ia juga menyadari bahwa di samping bahasa-bahasa itu setara, keberfungsianya

juga akan sangat ditentukan oleh konteks berbahasa (apakah dalam rangka konteks lokal, nasional, atau internasional). Dengan perkataan lain, apakah pengguna bahasa tengah berkomunikasi dengan orang lokal (intersuku), sesama bangsa (antarsuku), atau orang luar negeri (global). Apabila kondisi berbahasa telah tersadari oleh pengguna bahasa maka ia pasti akan memilih bahasa yang sesuai dengan kondisi tersebut dan juga tidak cenderung melakukan pengkastaan atas bahasa-bahasa.

Perihal kesetaraan, cara pengguna bahasa yang multilingual menentukan bahasa yang akan dipakai dalam tindak komunikasi, dan kesadaran nilai yang dimiliki dalam bahasa-bahasa tersebut, dapat dicermati dalam Bagan 1.2 berikut.



Bagan 1.2. Kesetaraan Bahasa-bahasa dan Konteks Komunikasi

Pengguna bahasa, khususnya warga Indonesia, memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa secara multilingual. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi antarsesama, tidak hanya bahasa daerah, tetapi juga bahasa Indonesia dan bahasa asing. Ini terjadi karena memang dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia, ada tiga kelompok

bahasa. Namun, yang patut dicatat, posisi bahasa-bahasa tersebut seharusnya setara dan sederajat.

Dikatakan setara dan sederajat, karena ketiga kelompok bahasa memiliki eksistensi sendiri-sendiri dengan kekhasannya masing-masing. Hal yang membedakan di antara ketiga kelompok bahasa sebenarnya hanyalah karena perbedaan konteks komunikasi. Apakah pengguna bahasa akan berkomunikasi pada konteks lokal, nasional, atau global? Konteks inilah yang menentukan pengguna bahasa harus memilih kelompok bahasa yang mana untuk berkomunikasi dan dengan lawan bicara siapa pengguna bahasa akan melakukan tindak berkomunikasi.

Dengan demikian, sekali lagi, pemosisian bahasa-bahasa seharusnya tidak terstratakan secara vertikal—seperti halnya dalam sistem kasta—tetapi secara horizontal karena bahasa-bahasa pada dasarnya setara dan sederajat. Selanjutnya, hal yang patut dicatat di sini bahwa setiap kelompok bahasa memiliki arah dan nilai sendiri-sendiri. Bahasa daerah yang dipakai pada konteks lokal memiliki nilai lokalitas; bahasa Indonesia yang dipakai pada konteks nasional memiliki nilai kebangsaan; dan bahasa asing (yang diakui PBB) dipakai pada konteks internasional memiliki nilai globalitas. Nilai-nilai itu yang digunakan oleh pengguna bahasa itu, pada gilirannya sekaligus dapat menjadi identitas diri pengguna bahasa.

Reaktualisasi Dekastanisasi Berbahasa

Apabila pengkastaan atas bahasa-bahasa dipahami sebagai suatu penyimpangan dari kodratnya yang terjadi akibat sikap berbahasa pengguna bahasa sendiri, maka perlu ada langkah-langkah solutif untuk mengembalikannya pada kesetaraan bahasa-bahasa. Untuk pengembalian pada kesetaraan bahasa-bahasa, pengguna bahasa perlu melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan. Reaktualisasi yang dimaksudkan di sini bukan hanya pengembalian kesetaraan itu tetapi penyegaran kembali bahasa-bahasa. Berikut adalah beberapa sikap yang dapat dilakukan pengguna bahasa untuk melakukan reaktualisasi dekastanisasi berbahasa.

1. Pengguna bahasa dalam berkomunikasi perlu menanamkan kesadaran tentang keniscayaan bahasa-bahasa yang berada dalam kesetaraan. Misalnya, pengguna bahasa tidak perlu merasa rendah diri jika menggunakan bahasa daerah jika memang dalam konteks komunikasi memang memerlukan bahasa daerah sebagai wahana komunikasi.
2. Memilih bahasa yang akan digunakan dalam tindak komunikasi bukan didasarkan pada gengsi, kuasa, atau prestise, tetapi didasarkan pada keefektifan dan keefisienan berbahasa dalam konteks yang diperlukan. Dalam hal ini, pengguna bahasa tidak hanya menganggap penting transfer isi informasi yang disampaikan dalam tindak berbahasa, tetapi menganggap penting bahasa itu sendiri sebagai bagian dari kebudayaan yang patut dilestarikan dan dikembangkan.
3. Pengguna bahasa perlu menyadari bahwa setiap bahasa dalam kelompok bahasa yang ada memiliki nilai tersendiri yang penting artinya bagi pengguna bahasa. Nilai yang dimaksudkan di sini sangat ditentukan oleh kelompok bahasanya. Bahasa lokal (daerah) mengandung nilai budaya daerah; bahasa nasional (Indonesia) mengandung nilai nasional (keindonesiaan); dan bahasa internasional (asing yang diakui PBB) mengandung nilai global.

Dalam konteks berbahasa dalam kehidupan nyata, sikap-sikap berbahasa itu tidak hanya perlu ditanamkan pada siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti; tetapi juga kalangan masyarakat secara menyeluruh. Seorang pejabat negara, wakil rakyat, dan siapa pun yang melaksanakan tindak komunikasi perlu secara konsisten melakukan sikap komunikasi seperti ini. Untuk itu, diperlukan sebuah pembiasaan (*habitualization*) agar “pengkastaan” atas bahasa-bahasa tidak terwariskan secara terus-menerus dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Hal ini penting karena berbahasa sebenarnya juga merupakan pencerminan kepribadian seseorang. Maka itu, untuk melihat kepribadian seseorang, dapat juga diketahui dari sikap berbahasanya. Orang yang berbahasa atau bertutur kata yang baik, biasanya mencerminkan bagaimana kepribadian

seseorang. Orang yang selalu bicara berapi-api pastilah jiwa juga memiliki gejolak berapi-api. Orang yang bicaranya santun, bisanya juga mencerminkan orangnya yang memiliki jiwanya lembut. Hal ini dapat dipakai sebagai indikator, kendatipun tidak selalu seperti itu. Jadi, bahasa sesungguhnya tidak terlepas dengan kepribadian seseorang sehingga jika ingin mengetahui kepribadian seseorang salah satunya dapat disimak dari bagaimana bahasanya.

Penutup

Dekastanisasi merupakan bentuk kebijaksanaan sikap dan tindakan pengguna bahasa yang mau dan dapat menghargai keberadaan bahasa-bahasa dalam posisinya yang setara atau horizontal. Pengkastaan atas bahasa-bahasa menyebabkan bahasa-bahasa tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar, sehingga pengguna bahasa perlu melakukan reaktualisasi dekastanisasi atas bahasa-bahasa.

Pengguna bahasa memiliki kedudukan penting bagi tumbuh-kembangnya bahasa-bahasa yang ada, sehingga setiap pengguna bahasa seyogianya memosisikan dirinya sebagai pendukung bahasa tersebut. Dalam pengertian, pengguna bahasa seyogianya tidak hanya berperan sebagai konsumen bahasa tetapi juga pemilik bahasa, sehingga pengguna bahasa perlu juga memiliki tanggung jawab moral bagi kelestarian dan dinamika bahasa-bahasa yang dipakainya itu.

Untuk mereaktualisasikan dekastanisasi bahasa, diperlukan sikap konsisten dan berkesinambungan. Dalam memilih bahasa mana yang akan dipakai, seyogianya menggunakan pertimbangan keefektifan dan keefisienan dalam konteks berbahasa; bukan atas dasar gengsi, kuasa, dan prestise. Sikap berbahasa yang memuliakan bahasa-bahasa dalam kesetaraannya, perlu dilakukan oleh segenap pengguna bahasa sebagai bentuk reaktualisasi dekastanisasi bahasa dan agar bahasa-bahasa yang ada tetap lestari dan mengalami perkembangannya yang signifikan.

Penguatan Bahasa Ibu Melalui Pembiasaan Baca-Tulis

Pengantar: Bahasa Ibu dan Dinamika Masyarakatnya

Realitas berbahasa ibu (*mother language reality*)¹⁷ pada era global, secara praksis-pragmatik, memperlihatkan kondisinya yang sangat variatif. Kondisi berbahasa ibu yang variatif disebabkan oleh adanya perubahan; dan perubahan merupakan sebuah keniscayaan sebagai dampak dari masyarakat yang juga berubah secara dinamis. Setidaknya, ada tiga perubahan besar yang berimplikasi pada peminggiran bahasa ibu yakni bahasa daerah.

Pertama, adanya dinamika masyarakat yang pesat—mulai dari masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industri-modern—yang membawa implikasi logis kepada pergeseran tindak berbahasa ibu. Kebiasaan memakai bahasa ibu yang dahulunya dilakukan secara taat asas dan tertata pada masyarakat adat tradisional-pedesaan dalam perjalanan waktu yang semakin modern, mengalami pergeseran, perubahan, bahkan pengalihan bahasa.

Kedua, perubahan mata pencarian masyarakat dari bertani ke pekerjaan lain berbagai bidang, membuat masyarakat tidak memungkinkan lagi tinggal di tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi masyarakat saling bermigrasi dan kemudian tinggal di tempat di mana

¹⁷ Pengertian bahasa ibu di sini adalah bahasa daerah (dan/atau bahasa Indonesia) dan bahasa daerah tidak selalu identik dengan geneologis keturunannya. Bahasa ibu yaitu bahasa yang digunakan oleh seorang anak tempat ia dilahirkan dan dibesarkan dan menjadi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi beserta nilai-nilai lokalitas yang diinternalisasi.

ia bekerja. Dengan demikian, jelaslah bahwa pekerjaan seseorang itulah yang kemudian menentukan tempat tinggal seseorang. Realitas inilah yang membuat bahwa genealogi keturunan pada daerah tidak selalu linier lagi dengan pemakaian bahasa ibunya. Misalnya, orang Bali yang bermigrasi dan tinggal di Jawa, Padang, Bandung, dan Jakarta, otomatis akan beradaptasi dengan bahasa-bahasa daerah Jawa, Minang, Sunda, dan Betawi. Orang Jawa, Dayak, Aceh, dan Madura yang lahir dan tinggal di Bali, dengan sendirinya juga akan menggunakan bahasa ibu yakni bahasa Bali. Hanya saja, penggunaan bahasa ibu yang bukan daerah geneologis keturunannya itu dapat terjadi secara sebagian atau seluruhnya.

Ketiga, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ICT (*information, communication, technology*) yang tanpa terbendung, telah menerobos ke semua "dinding" tradisi berbahasa masyarakat adat di mana pun masyarakat itu berada. Sekarang ini, pesatnya perkembangan ICT dengan dunia maya menjadikan masyarakat merasa sangat akrab dengan bahasa yang umumnya dipakai di dunia maya sebagai penanda sebuah masyarakat global.

Dari praksis berbahasa dalam masyarakat global seperti yang terjadi sekarang, sepertinya ada *kontestasi* bahasa-bahasa dan sekaligus juga *kompetisi* bahasa-bahasa. Akibatnya, bahasa yang lekat dengan ICT dan juga kemajuan industri akan dengan sendirinya menjadi lebih unggul dan jelas menjadi pemenang karena masyarakat lebih akrab dengan bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa yang tidak lekat dengan ICT akan mengalami degradasi atau alienasi dari masyarakat yang dahulu sangat akrab menjadi asing dengannya.

Bahasa daerah yang habitatnya lebih berada pada dunia kelisanan atau tutur dan naskah—sebagaimana yang dulu sangat efektif ada dalam masyarakat tradisional—kini semakin mengalami keruntuhan peran karena generasi muda sekarang jauh lebih banyak yang tidak menggunakan lagi bahasa ibu. Ini sebagai konsekuensi logis dari budaya generasi muda sekarang yang lebih banyak berkomunikasi secara intens melalui dunia maya sebagai media sosialnya.

Bahkan, sekarang ini, generasi muda tidak hanya mengakrabi bahasanya saja, tetapi hampir semua nilai yang membangun kedirian atau jati dirinya dapat dikatakan terbangun dari media sosial itu. Mereka lebih percaya dengan apa yang ada di dalam media sosial itu. Bahkan, nasihat dan *pitutur* orang tua pun sekarang telah tergantikan karena sepertinya generasi muda sudah memiliki media tempat bertanya tentang segala apa pun, termasuk mata pelajaran dan mereka lebih banyak bertanya misalnya kepada "*mbah Google*".

Dalam realitas sehari-hari, banyak orang tua yang mengeluh dengan kondisi ini, tetapi dalam kondisi yang didominasi ICT yang begitu pesat, orang tua harus dapat mengimbangi penguasaan ICT anak-anaknya, dan banyak juga yang tidak berdaya lagi. Hal ini merupakan realitas empiris yang terjadi pada hampir seluruh daerah di negara kita, yang tidak terelakkan karena kekuatan global yang ditandai dengan kemajuan ICT-nya telah "*merampas*" peran bahasa ibu, orang tua, *pitutur*, dan sebagainya. Perlu disadari bahwa di samping membawa dampak positif globalisasi juga sekaligus membawa dampak negatif. Akankah kendala ini dapat diatasi dan bagaimanakah strateginya?

Satu hal yang pasti, secara jujur dapat dikatakan, ketika kita sekarang kembali memikirkan dan membicarakan bahasa ibu, memang terasa begitu berat. Kita di sini seperti lebih melakukan *romantisme* kejayaan bahasa ibu yang dahulu sangat efektif menjadi media komunikasi sehari-hari dan penanaman nilai-nilai kedaerahan (lokal) masyarakat dapat ditumbuhkan kembali. Namun, *romantisme* ini perlu dilanjutkan terus. Betapa pesatnya bahasa-bahasa asing yang menyertai kemajuan ICT terutama bahasa Inggris yang secara tidak langsung menenggelamkan bahasa ibu, sebenarnya bahasa ibu tetap penting dan tidak tergantikan.

Oleh karena itu, jika kita konsisten dan memiliki komitmen budaya secara menyeluruh, bahasa ibu tetap harus dapat dilestarikan, dipahami, dihayati, dan diajarkan kepada generasi muda sekarang. Pentingnya bahasa daerah sebenarnya sudah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan "... bahasa-bahasa daerah yang dipelihara

dengan baik oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara karena bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.”¹⁸

Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom juga disebutkan: “... pengembangan bahasa dan budaya daerah termasuk ke dalam kewenangan Pemerintah Daerah”¹⁹ Lebih jauh, pentingnya bahasa daerah sebagai bahasa ibu juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.”²⁰

Bahasa ibu menjadi lebih penting lagi jika kita mengaitkan dengan identitas bangsa atau jati diri bangsa. Menyitir apa yang ditulis oleh Bawa,²¹ bahasa-bahasa daerah di Indonesia adalah unsur kebudayaan Indonesia, yang telah dikatakan dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Dalam penjelasan itu disebutkan (1) budaya bangsa (kebudayaan Indonesia) adalah buah budinya seluruh rakyat Indonesia, (2) bahasa-bahasa daerah yang terdapat di seluruh Indonesia termasuk budaya bangsa, (3) unsur budaya bangsa itu tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.

¹⁸ Hasan Alwi dan Dendy Sugondo (Ed.), *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011), halaman xvii.

¹⁹ Hasan Alwi dan Dendy Sugondo (Ed.), *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011), halaman xvii–xviii.

²⁰ Pasal-pasal dan ayat-ayat tentang bahasa secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²¹ Lihat Yeyen Maryani dan S.R.H. Sitanggang (Ed.), *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkokuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), halaman 333.

Dari apa yang dijelaskan tersebut, bahasa ibu—yang dalam hal ini—sebagai salah satu kekayaan bangsa, harus tetap diperkenalkan dan diajarkan kepada generasi muda agar mereka tidak asing dengan bahasa daerahnya sendiri. Namun, sekali lagi, bahasa ibu yang dimaksudkan di sini adalah bahasa daerah yang digunakan tempat anak dilahirkan dan dibesarkan. Maka itu, di sini tidak selalu identik antara geneologis keturunan dengan bahasa daerahnya.

Bahasa itu memiliki keniscayaan berkait dengan lingkungan. Di mana anak lahir dan dibesarkan, bahasa ibu itulah yang pasti akan digunakan. Seorang anak bangsa Australia akan berbahasa ibu bahasa Bali jika ia dilahirkan dan besar di Bali, kecuali si orang tua secara sistemik, ketat, dan fanatik mengarahkan bahasa anaknya agar berbahasa Inggris seperti orang tuanya. Pada keluarga campuran Bali-Jawa, Belanda-Jawa, Bali-Jepang, Bali-Betawi, dan seterusnya juga akan berdampak secara otomatis pada penggunaan bahasa ibu.

Dengan demikian, bahasa ibu seperti apa yang digunakan sangat bergantung pada lingkungan, entah keluarga atau sosial. Inilah yang menyebabkan adanya banyak variasi bahwa kita tidak dapat mengklaim bahwa bahasa ibu sebuah keluarga itu pasti bahasa daerah. Artinya, akan dapat berupa bahasa ibu: bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau dapat juga bahasa campuran (antardaerah atau antarnegara). Namun, sebagai sebuah patokan, bahasa ibu secara alamiah adalah bahasa yang paling awal dikenal oleh seorang anak sebagai akibat bahasa itulah yang diinternalisasi pertama kali. Namun, bagi keluarga yang sadar pada fakta kemanusiaan bahwa manusia itu adalah makhluk yang beradaptasi, bahasa ibu adalah bahasa yang mengitari di mana ia hidup dan mengembangkan dirinya. Jelasnya, bahasa yang ada dalam suatu lokal daerah tertentu, di mana seseorang itu hidup dan mengembangkan diri.

Keberadaan Bahasa Ibu: Dahulu, Kini, dan Mendatang

Keberadaan bahasa ibu yakni bahasa daerah merupakan salah satu kelompok bahasa yang sederajat dengan kelompok bahasa Indonesia dan kelompok bahasa asing. Ketiga kelompok bahasa tersebut memiliki fungsi

sendiri-sendiri yang tidak tergantikan satu sama lain, dan juga memiliki nilai tersendiri. Bahasa daerah memiliki nilai kedaerahan (lokal), bahasa Indonesia memiliki nilai keindonesiaan (nasionalisme), dan bahasa asing memiliki nilai global.²²

Dalam keberadaannya yang demikian, bahasa daerah sejak dulu, kini, dan mendatang harus tetap ada serta tidak ada alasan apa pun untuk menafikannya. Oleh karena itu, draf kurikulum 2013 yang tidak lagi mencantumkan bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran, kendatipun dikatakan sama sekali tidak dihapuskan karena diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya, sebenarnya merupakan sebuah pengingkaran terhadap komitmen bangsa pada internalisasi bahasa ibu dan pewarisan nilai budaya bangsa.²³

Pada daerah-daerah di Indonesia—yang jumlahnya 1.128 etnis (suku) yang merupakan bagian dari NKRI—dengan jumlah bahasa daerah 746 menjadi wahana komunikasi yang mengakrabkan antaretnis (suku). Bahasa ini menjadi wahana komunikasi yang membuat interaksi terjadi dengan penuh keakraban. Dalam budaya Bali misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan resmi masyarakat adat seperti melamar pengantin, menjadi bahasa yang sangat penting dan harus digunakan dan tidak tergantikan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Begitu juga dalam aktivitas masyarakat adat Jawa, misalnya juga dalam perkawinan masyarakat Jawa, bahasa daerah menjadi bahasa resmi. Kemudian, dalam pelaksanaan berbagai aktivitas tradisi dalam masyarakat adat Tengger, bahasa daerah Jawa subkultur Tengger menjadi bahasa resmi yang tidak tergantikan. Demikian juga halnya dalam masyarakat adat lainnya, seperti Minang, Bugis, Batak, Dayak, dan seterusnya pasti juga tidak akan tergantikan dengan bahasa lainnya.

²² I.B. Putera Manuaba, "Reaktualisasi Dekastanisasi Berbahasa dalam Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia" Makalah disampaikan dalam Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI 2011) di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, tanggal 9 s.d. 12 Oktober, 2011), halaman 8.

²³ Sama halnya ketika mata pelajaran Pancasila dihapus dalam kurikulum karena diintegrasikan dalam salah satu mata pelajaran PPKn, pembelajaran atas Pancasila mengalami kegamangan dan cenderung kemudian tidak dipahami, dihayati, dan diamalkan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penggunaan bahasa ibu yakni bahasa daerah itulah terjadi pewarisan nilai-nilai kedaerahan (lokal) yang memberikan pijakan pada setiap anak bangsa. Proses internalisasi nilai-nilai lokal mula-mula terjadi melalui bahasa daerah sehingga bahasa daerah tidak hanya berfungsi sekadar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat tradisional tetapi sebagai sebuah wahana ganda yang di dalamnya juga mengandung nilai yang menandai kedaerahannya. Sekali lagi, bahasa daerah dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dipahami bukan sebagai sesuatu yang mengarahkan pada keprimordialan tetapi pada semangat kedaerahan yang nantinya menjadi pijakan penting yang menjadi akar tradisinya. Oleh karena itu, belajar bahasa daerah sebenarnya sekaligus dapat diartikan sebagai pewarisan nilai-nilai tradisi karena semua yang tradisi mula-mula tersampaikan melalui bahasa daerah.

Dengan demikian, mempertahankan bahasa ibu—yakni bahasa daerah—berarti juga mempertahankan kekayaan dan sekaligus keragaman budaya bangsa. Budaya bangsa akan tetap eksis manakala masyarakat adat yang berbahasa daerah masih ada, dan masyarakat adat menjadi penopang utama identitas bangsa. Tanpa adanya masyarakat adat yang kokoh, budaya bangsa tidak akan hidup dengan baik karena budaya bangsa integral dengan bahasa daerah yang dipakai oleh masyarakat adat itu. Satu contoh masyarakat adat yang sangat kuat dan masih menggunakan bahasa ibu adalah masyarakat adat Tengger yang masih mewariskan nilai-nilai budaya ketenggerannya.²⁴ Dalam masyarakat adat yang berbahasa ibu, karakteristik kedaerahan akan mendapat tempat dengan baik.

Kendatipun dinamika masyarakat semakin mengglobal, keberadaan bahasa ibu yakni bahasa daerah tidak kemudian serta merta ditinggalkan, dianggap kuno, dan dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Anggapan seperti ini merupakan pandangan yang kurang menghargai kekayaan budaya bangsa; dan tentu saja nantinya merugikan bangsa kita sendiri karena bahasa ini tidak digunakan sebagai pijakan (landasan) untuk berkompetisi dalam kontestasi masyarakat global.

²⁴ Tim Peneliti, *Elemen-elemen Karakter Bangsa Masyarakat Adat Tengger*. Hasil Penelitian Kelompok Peneliti UK2D Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Sebagai sebuah perbandingan, negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Korea, dan berbagai negara lainnya tidak meninggalkan tradisi dan budaya bangsanya, tetapi mereka justru menaruh perhatian dan komitmen yang tinggi agar mendasari anak bangsa dengan budayanya sendiri.

Dengan demikian, yang seharusnya dilakukan bukanlah menghilangkan tradisi menuju masyarakat global tetapi mengglobalkan tradisi yang dimiliki. Dengan perkataan lain, bagaimana di tengah masyarakat global ini kita bersikap kompetitif dengan kekhasan tradisi dan budaya kita. Itulah sesungguhnya yang seharusnya terjadi dan kita lakukan dalam era global ini. Lihatlah bangsa-bangsa lain di dunia, seperti India juga memiliki kebijakan yang melindungi kehidupan dan perkembangan bahasa daerahnya, sebagaimana tertuang dalam Bab XVII Konstitusi India, yang di antaranya berorientasi mendorong warga negara India menggunakan bahasa ibu mereka di tingkat dan wilayah tertentu melalui beberapa proses dan tujuan kebijakan ini adalah membantu seluruh bahasa untuk berkembang.²⁵

Betapa pun masyarakat dunia semakin mengglobal, justru tradisi budaya bangsa harus semakin kuat ditanamkan pada generasi muda, agar mereka memiliki daya kompetitif yang kuat dalam kancah pertarungan nilai dalam dunia internasional. Ini berarti, kejatidirian manusia Indonesia harus menjadi yang menandai kekhasan dalam pertarungan nilai dan kualitas dalam dunia internasional.

Pembiasaan *Membaca* untuk Mengakrabi Bacaan dalam Bahasa Ibu

Agar bahasa ibu menjadi lebih menarik, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih kondusif dan kontekstual yang membuat pembelajar tertarik. Apabila selama ini pembelajaran lebih menonjolkan pada pengetahuan,

²⁵ M.K. Singh, "Pidato selaku Direktur Pusat Kebudayaan India Jawaharlal Nehru Kedutaan Besar India di Jakarta", dalam Sugiono dan Veven Maryani (ed.) *Perencanaan Bahasa Abad ke-21: Kendala dan Tantangan (Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa)* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), halaman 5.

penghafalan, atau tingkat kognitif maka ke depan diperlukan model pembelajaran yang lebih inovatif²⁶ dengan jalan lebih banyak mengajak pembelajar membaca teks-teks secara langsung dan sebanyak mungkin. Pembelajaran dengan sambil menyimak cerita, penarasian, pendeskripsian, dan apresiasi, memang menjadi model-model pembelajaran yang relatif nantinya membuat pembelajar lebih bergairah dan menarik untuk mempelajari bahasa ibu yakni bahasa daerah. Hal itu terjadi karena dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut, pembelajar tidak merasa didikte, didoktrin, atau yang sejenisnya.

Dengan perkataan lain, pembelajar diajak masuk dalam proses pembelajaran yang berada dalam tataran afektif dan psikomotorik.²⁷ Maksudnya, pembelajaran dengan menghayati, menerapkan, dan mengalami langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membaca teks-teks berbahasa ibu, bahasa daerah apa pun, jika dibiasakan sejak kecil akan membuat pembelajar sangat menikmati bacaan. Oleh karena itu, idealnya, dalam pembelajaran bahasa, seharusnya juga melakukan pembelajaran sastra sehingga judul mata pelajaran mungkin akan sangat ideal jika menggunakan judul *bahasa dan sastra daerah* atau *bahasa dan sastra Indonesia*.

Dalam proses pembacaan tersebut juga, akan terjadi internalisasi nilai-nilai kedaerahan yang terdapat dalam bahasa ibu. Membaca sambil menginternalisasi nilai-nilai kedaerahan, tentu saja akan dapat memberi manfaat yang besar bagi pembelajar karena di situlah pembelajar secara langsung mengalami sendiri, mempertimbangkan sendiri, dan menilai sendiri.

²⁶ Kata *inovatif* itu adalah ajektif (kata sifat) dari *inovasi*. *Inovasi* (*innovation*) di sini dibedakan dengan penemuan (*discovery*) meskipun secara umum sama-sama berarti "penemuan". *Inovasi* lebih berupa penemuan yang sebelumnya belum ada (yang bisa berupa suatu ide, barang, kejadian, metode, atau model); sedangkan penemuan (dalam arti *discovery*) lebih berarti penemuan yang sebenarnya memang sudah ada seperti Columbus menemukan benua Amerika. Lihat Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2010), halaman 2-3.

²⁷ Secara lebih jauh dapat disimak model-model pembelajaran yang inovatif dalam buku yang ditulis oleh Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), halaman 9-10.

Apabila proses membaca telah mentradisi dan terjadi dengan baik seperti itu, kita sebenarnya tidak perlu secara sengaja dan bersusah payah lagi melakukan pembelajaran karakter bangsa atau membangun identitas bangsa. Karakter bangsa atau identitas bangsa itu akan dengan sendirinya terbangun jika kita membaca bahasa dan sastra kita sendiri dengan baik²⁸ karena proses pembentukan karakter bangsa atau pembangunan karakter bangsa akan terjadi dengan sendirinya; salah satunya yang penting adalah dengan membaca sastra.

Lalu, mengapa sekarang ini kita harus melakukan pembelajaran karakter bangsa atau identitas bangsa secara khusus dan terencana? Semua itu terjadi karena selama ini kita kurang akrab membaca karya-karya berbahasa daerah (dan juga Indonesia) yang di dalamnya sarat dengan kearifan lokal, sebagai pembentuk karakter bangsa atau identitas bangsa tersebut. Strategi pembelajaran yang tidak berjarak dengan teks-teks berbahasa ibu (daerah) merupakan strategi pembelajaran yang sangat efektif yang perlu dikembangkan.

Namun, persoalannya, semua itu harus didukung dengan bahan bacaan berbahasa ibu (daerah) yang memadai, pentradisian membaca yang baik, dan pengkondisian yang mendukung. Membaca sambil menikmati dan menghayati nilai-nilai ini merupakan strategi yang paling efektif, yang nantinya sekaligus membuat pembelajar sangat akrab dengan bahasa ibu (daerah) yang digunakan dalam teks-teks yang dipelajari.

Pembiasaan dan Pembangunan Infrastruktur *Menulis* dengan Bahasa Ibu

Di samping pembelajaran dengan strategi membaca, hal yang tidak kalah pentingnya juga, adalah strategi menulis langsung (entah cerita, atau teks apa pun). Selama ini, kita telah mengetahui bahwa menulis merupakan tingkatan yang tertinggi dalam aktivitas berbahasa, selain sebelumnya ada aktivitas membaca, menyimak, dan berbicara. Dalam pembelajaran

²⁸ Pandangan yang pernah saya sampaikan ketika saya diundang sebagai pembicara dalam Seminar Bahasa dan Sastra di Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Sastra dan Sains Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, pada tanggal 4 Januari 2013.

menulis, pembelajar akan secara langsung melibatkan diri dan berkreasi dalam aktivitas menulis. Dalam menulis, pembelajar akan menggunakan bahasa, khususnya dalam hal ini bahasa ibu (daerah).

Dalam menulis, pembelajar memiliki peluang yang lebih terbuka untuk mengekspresikan apa pun yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Di sini, pembelajar akan merasa sangat berdaya karena memiliki kebebasan mencipta.²⁹ Belajar dengan menulis langsung, dapat memberi kenikmatan karena pembelajar diajak dan diharapkan untuk selalu kreatif. Dalam konteks ini, jika yang digunakan adalah bahasa ibu (daerah) maka ia juga akan secara tidak langsung mengakrabi bahasa ibu (daerah) yang mesti digunakannya.

Pembelajaran dengan menulis dapat menjadi pembelajaran yang strategis dan komprehensif karena pembelajaran ini akan dapat membuat apa pun yang dipelajari menjadi melekat dan tidak mudah dilupakan. Dengan menggunakan bahasa ibu (daerah), pembelajar akan merasa memiliki bahasa daerah sebagai bagian dari dunianya. Dengan demikian, strategi yang cukup efektif untuk melakukan pembelajaran bahasa ibu (daerah) adalah dengan praksis atau pragmatik berbahasa. Maksudnya, pembelajaran yang secara langsung melaksanakan praktik menggunakan bahasa dalam penulisan teks apa pun. Dengan menulis pulalah pembelajar akan terasah kemahiran berbahasanya sehingga bahasa daerah tidak lagi menjadi bahasa yang asing atau sulit,³⁰ tetapi justru akan menjadi bahasa yang sangat diakrabi pembelajar. Belajar bahasa yang baik adalah dengan mengunakannya.

Membangun infrastruktur menulis dalam bahasa ibu (daerah) menjadi bagian pembelajaran bahasa yang sangat penting. Jika pembelajar bahasa sudah memiliki keterampilan dan kemahiran dalam menggunakan bahasa daerah dalam tulisannya, niscaya pembelajar tidak akan kesulitan

²⁹ Kebebasan mencipta ini dalam dunia sastra sering diistilahkan dengan *licentia poetica*, kebebasan yang dimiliki oleh pengarang untuk mengekspresikan apa yang harus diekspresikan dalam karya yang diciptakannya tanpa terbatas atau terkungkung oleh sesuatu apa pun.

³⁰ Sekarang ini di sekolah-sekolah ada anggapan menonjol bahwa bahasa daerah itu sebagai bahasa yang sulit sehingga dianggap menyulitkan dan menimbulkan banyak masalah.

dalam menciptakan karya-karya selanjutnya. Jika infrastruktur menulis sudah dimiliki pembelajar maka sebenarnya hanya tinggal mencari atau menemukan ide baru yang akan ditulis. Untuk itulah, aktivitas berbahasa dengan menulis, merupakan aktivitas yang harus ditradisikan. Dengan demikian, melalui praksis berbahasa, bahasa daerah pasti akan tetap dapat eksis di tengah masyarakat pendukungnya. Implikasinya, bahasa ibu (daerah) tidak akan cepat punah.

Penutup: Refleksi dan Rekomendasi Menuju Penguatan Bahasa Ibu

Belajar bahasa daerah, tetap sangat penting, baik yang dilakukan secara informal maupun formal. Secara informal, bahasa daerah dapat dipelajari dalam keluarga dan masyarakat. Pembelajaran ini memang tidak sistemik, tetapi lebih berupa pembiasaan atau pragmatik berbahasa sehari-hari dengan bahasa daerah untuk kepentingan tertentu dalam kehidupan yang akan membuat bahasa daerah tetap eksis. Pembelajaran secara formal, dalam dunia pendidikan, tentu saja juga menjadi sangat penting, karena pembelajar secara sengaja dan sistemik memang diarahkan untuk belajar bahasa daerah dengan materi dan metode yang telah disiapkan. Dalam hal ini, pembelajaran lebih efektif diarahkan pada kemampuan pembelajar untuk membaca teks dan menulis teks secara langsung.

Kendatipun dunia semakin mengglobal, sebenarnya tidak ada alasan apa pun bagi pembelajar dan pihak terkait untuk tidak mempelajari bahasa daerah. Hal ini mengingat bahasa daerah memang merupakan bahasa leluhur yang harus diwariskan agar tidak mengalami kepunahan. Bahasa daerah menjadi penting karena di dalamnya sarat dengan nilai-nilai kedaerahan (lokal) atau budaya tertentu.

Membangun kecintaan pada bahasa daerah di tengah globalisasi perlu dilakukan karena melalui bahasa daerahlah salah satunya kita dapat menggali karakter bangsa atau identitas bangsa. Bahasa daerah bukan bahasa yang kuno sehingga perlu tetap dipelajari. Bahasa daerah dapat dimodernkan dan dapat diarahkan menjadi bahasa yang tetap eksis sepanjang zaman di tengah globalisasi. Oleh karena inilah identitas bangsa akan dikenal oleh generasi muda kita.

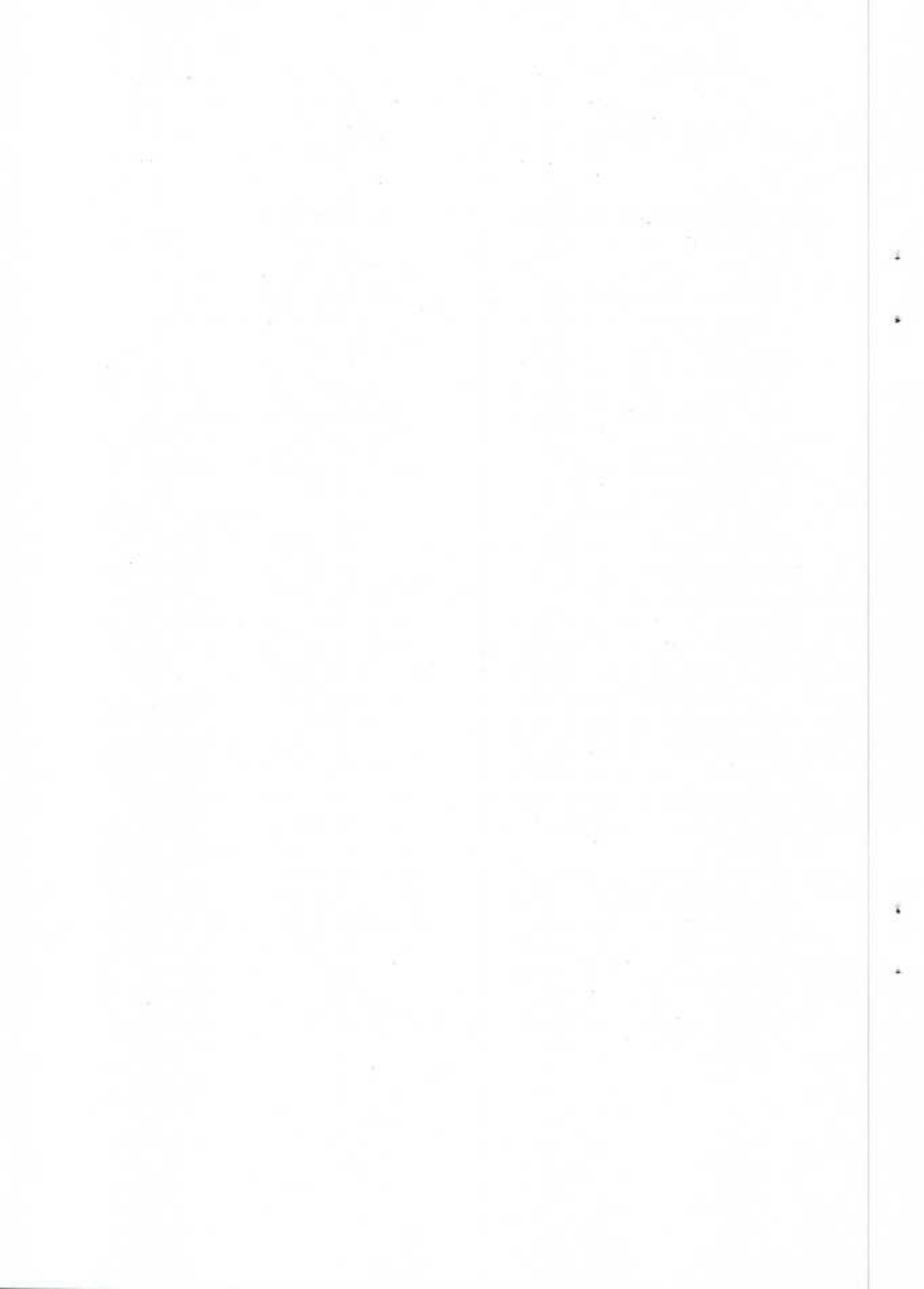
Dalam pembelajaran bahasa ibu (daerah), model-model pembelajaran yang lebih membuat pembelajar tertarik, perlu dikembangkan. Pembelajaran dengan lebih dominan mengajak pembelajar terlibat langsung secara pragmatis dengan membaca dan menulis, menjadi strategi yang dapat membuat pembelajaran bahasa daerah menjadi menarik. Untuk itu, pembelajaran pada tataran kognitif perlu sekaligus ditingkatkan pada pembelajaran secara afektif dan psikomotorik.

Bahasa daerah memiliki arti penting sebagai media mengakrabkan antaranggota etnis (suku) dalam masyarakat daerah sehingga akan terikat tali persaudaraan yang sangat erat yang sangat penting artinya untuk membangun rasa keakraban dan kebersamaan dan nilai-nilai komunal masih dapat dipertahankan.

Adanya tradisi berbahasa daerah dengan baik akan membawa manfaat yang baik juga pada terjadinya proses internalisasi nilai-nilai kedaerahan (lokal) secara alamiah karena sekali lagi, dalam bahasa daerah, juga terkandung nilai-nilai kedaerahan (lokal) yang perlu diketahui dan diinternalisasi sehingga seseorang tidak akan terasing dengan nilai-nilai yang terdapat di daerahnya. Nilai-nilai lokal ini, akan membangun landasan yang kuat, karena dapat membangun identitas bangsa.

Agar bahasa ibu (daerah) tetap eksis dalam masyarakat pendukungnya, perlu juga diikuti dengan kebijakan pemerintah yang memihak pada keberadaan bahasa daerah. Bukan justru sebaliknya, menghilangkan bahasa daerah dalam mata pelajaran sekolah. Pembelajaran bahasa daerah secara informal dan formal tetap harus digalakkan agar bahasa daerah tetap dikenal, diakrabi, dan digunakan sebagai bahasa komunikasi di tingkat daerah.

Dalam era global, justru menginternasionalkan bahasa daerah sebagai warisan budaya dunia mesti diikhtiarkan. Kekayaan bahasa daerah yang kita miliki, sebenarnya merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan secara kreatif sehingga bahasa daerah semakin menjadi bahasa ibu yang menarik yang melandasi karakter bangsa. Sebab, bahasa daerah juga menjadi bagian dari identitas bangsa. Untuk itu, kita perlu secara terus-menerus menghidupkan bahasa daerah dalam praksis dan pragmatik berbahasa sehari-hari.



Internalisasi Nilai Lokal melalui Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa)

Pengantar

Salah satu potensi unggul keindonesiaan kita adalah kekayaan nilai lokal (*local values*). Setiap daerah di wilayah Indonesia, pasti mempunyai ciri kedaerahan. Ciri ini sebagai penanda bahwa setiap daerah memiliki kekhasan nilai. Jika ditelusuri ciri kedaerahan yang ada di wilayah Indonesia—mulai dari daerah paling ujung Barat hingga ujung Timur—yang terdiri atas 17 ribu pulau besar dan kecil, dapat dipastikan bahwa daerah-daerah yang membentang di kepulauan Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai lokalnya masing-masing. Daerah Aceh diwarnai dengan keacehannya, daerah Minang dengan keminangannya, daerah Jawa dengan kejawaannya, daerah Bali dengan kebalianannya, daerah Bugis dengan kebugisannya, daerah Ambon dengan keambonannya, daerah Manado dengan kemanadoannya, daerah Papua dengan kepapuaannya, dan seterusnya.

Bahkan daerah-daerah, sebagaimana disebutkan, mungkin masih terlalu luas karena jika dilihat dalam skop daerah yang lebih kecil lagi, akan tampak juga kekhususannya lagi. Misalnya, daerah Jawa terbagi-bagi lagi dalam skop-skop yang lebih spesifik lagi. Ada Jawa Banyumasan, Jawa Ngayogyakarta, Jawa Suroboyoan, dan seterusnya.³¹ Bahkan, tidak hanya sampai sebatas itu, masih dapat dilihat dalam skop lebih kecil lagi

³¹ Ayu Sutarto dan Yuwono Sudikan, *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif* (Jember: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bekerjasama dengan Kompyawisda Jatim-Jember, 2008).

sampai ke subkultur yang terkecil. Ini membuat kekayaan berada pada tingkat variatif yang sangat tinggi.

Adanya nilai lokal yang variatif tersebut, merupakan keniscayaan dan bahkan (mungkin) dapat dikatakan sebagai suatu hal yang kodrati dari kondisi Indonesia. Oleh karena itu, nilai lokal inilah yang justru sebenarnya menjadi potensi dan yang—jika dimanfaatkan dengan baik—akan dapat membangun karakter diri seseorang atau masyarakat, setelah sebelumnya juga dibangun dari nilai yang paling dasar yakni yang dibangun dari keluarga. Berkaitan dengan hal itu, Matullada³² pernah mengatakan bahwa ketika manusia lahir dalam keluarga, pertama-tama ia akan menjadi urusan keluarga. Dahulu—sebelum era teknologi, komunikasi, dan informasi (ICT)—masuk ke ruang-ruang keluarga, internalisasi nilai keluarga memang terjadi sangat intensif, lancar, efektif, optimal, dan dominan. Begitu juga halnya dengan internalisasi nilai lokal, berjalan efektif. Ini membuat setiap orang dapat dikenali identitas kulturalnya karena mencerminkan karakter diri lokalnya. Identitas kultural seseorang memang tampak begitu tegas, berasal dari daerah mana dan dibentuk oleh nilai kedaerahan seperti apa. Kenyataan tersebut ada, karena pada saat itu karakteristik seseorang memang begitu dominan terbangun terlebih dahulu melalui nilai keluarga dengan lokalnya yang relatif homogen.

Apa yang dikatakan tersebut, berkait-erat dengan suatu realitas manakala seseorang memang terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan lokal yang sama. Artinya, secara genetik dan lokalitas, seseorang itu ada pada daerah asal-muasalnya; di mana ia lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Ketika seseorang menetap dan tidak berpindah daerah (bermigrasi), tentu saja, proses internalisasi nilai keluarga dan lokal dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

Namun, perlu dicatat, proses itu ada dalam masa masyarakat tradisional yang belum banyak mengalami proses migrasi. Lalu, tentu kemudian menimbulkan masalah, ketika seseorang tidak lagi hidup dalam masa tradisional dan migrasi terjadi sangat deras karena dalam

³² Matullada, "Kebudayaan Tradisional: Sekelumit tentang Sulawesi Selatan" dalam *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Selo Soemardjan* (Jakarta: Jambatan, 1998), halaman 388; Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: Grafitipress, 1982).

masa masyarakat tradisional, batas kota-desa memang dapat dilihat dengan tegas; mana orang kota, mana orang desa. Desa-kota acap kali mengalami dikotomi yang tajam. Dalam konteks itu, acap kali juga ada *ledakan*, “Kamu orang desa atau orang kampung” juga ada sikap arogansi, “Aku ini orang kota”.

Pada masa masyarakat pascatradisional, ketika era ICT tidak hanya mewarnai kota tetapi juga desa, dikotomi itu cair. Hal itu menyebabkan hampir sulit membedakan mana kota dan mana desa, mana orang desa mana orang kota. Sebab, pada masa ini, ICT telah merasuk ke seluruh pelosok, tidak peduli apakah ke kota atau desa. Masa dengan kemajuan ICT memang dapat menembus daerah mana saja, seperti tanpa seleksi atas keberadaan kota dan desa. Era dengan kemajuan inilah sesungguhnya yang kita sebut sebagai era global. Pada masa masyarakat tradisional, kekuatan lokal memang masih memiliki “kuasa” karena belum ada intervensi nilai masa global. Namun, kejayaan masa ini, kemudian segera tergeser secara drastis dengan kekuatan era global. Inilah sesungguhnya yang sedang terjadi, terutama sejak kemajuan ICT itu.

Sekarang ini, proses internalisasi nilai terjadi secara simultan. Bahkan, dalam kenyataan empiris, nilai global lebih dahulu diinternalisasi sebelum nilai lokal. Akibatnya, karakter diri seseorang tidak lagi dibangun secara gradasional (bertahap) sebagaimana yang terjadi pada masa tradisional. Padahal, dalam perkembangan kepribadian, pembangunan karakter secara gradasional sangat ideal. Sebelum para orang yang dituakan (*sesepuh*) masyarakat mendapat giliran menanamkan nilai-nilai pada anak, nilai global sudah lebih dulu menerobos dinding-dinding keluarga dan masyarakat kita, serta mendahului keinginan mereka. Menerobosnya lebih dahulu nilai-nilai global melalui kemajuan ICT memang tidak dapat dielakkan (dibendung) lagi karena memang masanya sudah seperti ini. Jika demikian, apa yang lalu dapat dilakukan?

Inilah kenyataan yang sedang terjadi di tengah romantisme kita menanamkan nilai-nilai lokal. Romantisme ini juga didasari atas adanya pengakuan kita yang masih sangat kuat bahwa nilai-nilai lokal mengandung kearifan lokal, keagungan, peradaban luhur, dan sejenisnya yang patut diketahui atau diinternalisasi. Apakah ini berarti kita memang tengah hidup dalam alam romantisme? Ataukah kita memang perlu

mengatur strategi baru dalam internalisasi nilai di tengah sistem nilai yang begitu kompleks?

Sehubungan dengan kenyataan itu, kita perlu memperbincangkan secara objektif perihal tersebut. Ini agar kita dapat menyikapi secara lebih konkret dan kondusif, terutama dalam mengelola nilai-nilai yang ada (lokal dan global) yang sekarang ini ada secara nyata dalam kehidupan kita.

Internalisasi Nilai Lokal melalui Bahasa dan Sastra (Jawa)

Untuk memahami bagaimana nilai lokal diinternalisasi melalui bahasa dan sastra (Jawa khususnya) dalam masyarakat, mula-mula bahasa dan sastra (Jawa) yang ada, dapat dipandang sebagai sistem nilai. Sistem nilai itu, terkait dengan karakteristik masyarakatnya di mana bahasa dan sastra itu tumbuh dan berkembang. Nilai lokal yang diinternalisasi itu merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi.

Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) sebagai Sistem Nilai

Dalam pemikiran ini, kita memang mengakui bahwa bahasa dan sastra daerah (khususnya Jawa) merupakan bentuk objektivasi dari nilai lokal. Di dalam bahasa dan sastra daerah (Jawa) terkandung nilai-nilai lokal yang patut diinternalisasi oleh anak-anak yang hidup di lingkungan daerah Jawa. Bahasa dan sastra Jawa secara genetis tidak jauh berbeda dengan bahasa dan sastra daerah lainnya, khususnya Bali. Bahkan dalam aksaranya pun tidak jauh berbeda.

Dalam kenyataan saat ini, ada kecenderungan bahwa sebuah daerah dihuni oleh masyarakat heterogen. Artinya, ada beberapa suku yang tinggal di suatu daerah karena biasanya disebabkan oleh pekerjaan. Daerah Jawa, tidak hanya dihuni oleh orang Jawa saja, tetapi juga dari berbagai daerah mengingat kita ini ada dalam lingkup NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Begitu juga yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Orang saling melakukan migrasi akibat suatu kepentingan atau pekerjaan.

Implikasinya, sangat mungkin internalisasi lokal melalui bahasa dan sastra (Jawa) tidak hanya dialami oleh orang yang memang bergenetis Jawa, tetapi juga dari suku-suku lain yang memang tinggal dan lahir di Jawa. Ini pulalah yang juga menyebabkan bahwa identitas kedaerahan seseorang memang menjadi kompleks. Secara genetis dan lokalis, bisa jadi tidak sama. Orang Jawa yang lahir di Bali, menginternalisasi nilai-nilai keballiannya; orang Bali yang tinggal di Jawa menginternalisasi kejawaannya. Mencermati kenyataan tersebut, kita dapat menyatakan bahwa tidak selalu nilai kedaerahan itu diinternalisasi oleh suku daerah itu sendiri. Nilai lokalitas akan diinternalisasi oleh siapa saja yang menghuni daerah tersebut. Maka itu, dapat saja misalnya kemudian orang Minang yang sangat *njawani*, orang Bali yang *njawani*, dan seterusnya.

Bahasa dan sastra daerah (Jawa) menjadi sumber penting terjadinya internalisasi nilai lokal karena dalam bahasa dan sastra (Jawa) itulah terdapat sistem nilai yang dengan mudah diinternalisasi. Orang yang mempelajari dan menggunakan bahasa Jawa, membuat orang dapat menghayati dan memahami kejawaannya. Begitu juga dalam mempelajari sastra Jawa, akan dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai kejawaan yang ada, yang menyangkut nilai filosofis, nilai sosial, nilai moral, dan sebagainya.³³ Oleh karena itu, bahasa dan sastra daerah (Jawa) menjadi sumber yang paling kuat dan efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai kejawaan.

Mengapa dikatakan seperti itu? Oleh karena di dalam bahasa dan sastra daerah (Jawa) terkandung sistem nilai yang dianut dalam masyarakat Jawa. Jika seseorang ingin mengetahui tentang dunia kehidupan (*labenswelt*) orang Jawa maka seseorang itu dapat mempelajari melalui bahasa dan sastranya. Di dalam bahasa dan sastra Jawa itu terdokumentasi atau terepresentasi dunia kehidupan orang Jawa.

Nilai lokal dan karakteristik masyarakat

Adakah hubungan antara nilai lokal dengan karakteristik masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat kembali melihat apakah

³³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), halaman 435.

proses internalisasi atas nilai lokal terjadi pada masyarakat. Jika terjadi proses internalisasi pada masyarakat berarti nilai lokal memang ada hubungannya dengan karakteristik masyarakat. Dikatakan demikian, karena ketika nilai lokal diinternalisasi tentu saja akan berimplikasi pada pembangunan karakter (*character building*).

Orang yang melakukan internalisasi nilai lokal sejak kecil, tentu saja akan memiliki landasan kedaerahan yang kuat, yang kemudian akan dapat menjadi fundamen bagi proses internalisasi nilai berikutnya. Misalnya, ketika menginternalisasi nilai daerah-daerah lain atau nilai global. Bagi siapa saja yang sempat melakukan internalisasi atas nilai lokal, tentu akan lebih mampu bersikap selektif dalam menerima nilai-nilai. Ia akan lebih mampu menilai mana nilai yang perlu diserap dan yang harus ditolak. Ini dapat terjadi karena nilai lokal memberi landasan yang kuat karena sadar akan identitas dirinya dalam suatu daerah atau bangsa.

Internalisasi nilai lokal: sebuah keniscayaan

Kalau kita mengikuti pandangan Berger dan Luckmann,³⁴ kita akan memahami bahwa internalisasi atas nilai-nilai merupakan suatu keniscayaan yang terjadi bagi siapa pun. Dengan perkataan lain, ia merupakan suatu proses yang sangat alami, karena manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Mereka mengatakan bahwa manusia melakukan internalisasi dalam dua tahap, yakni tahap internalisasi primer dan internalisasi sekunder. Dalam internalisasi primer, bagaimana manusia sejak awal mengenal atau menginternalisasi nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya yang paling dekat. Kemudian, dalam internalisasi sekunder, manusia—lebih lanjut atau lebih luas—melakukan internalisasi sampai pada ketika seseorang telah bekerja atau mengembangkan profesinya.

Dalam dua pembagian proses internalisasi, internalisasi primer merupakan yang sangat menentukan karena nilai awal yang diinternalisasi itulah yang paling membentuk karakter diri seseorang dan sekaligus

³⁴ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari Jakarta (Jakarta: LP3ES, 1990), halaman 87.

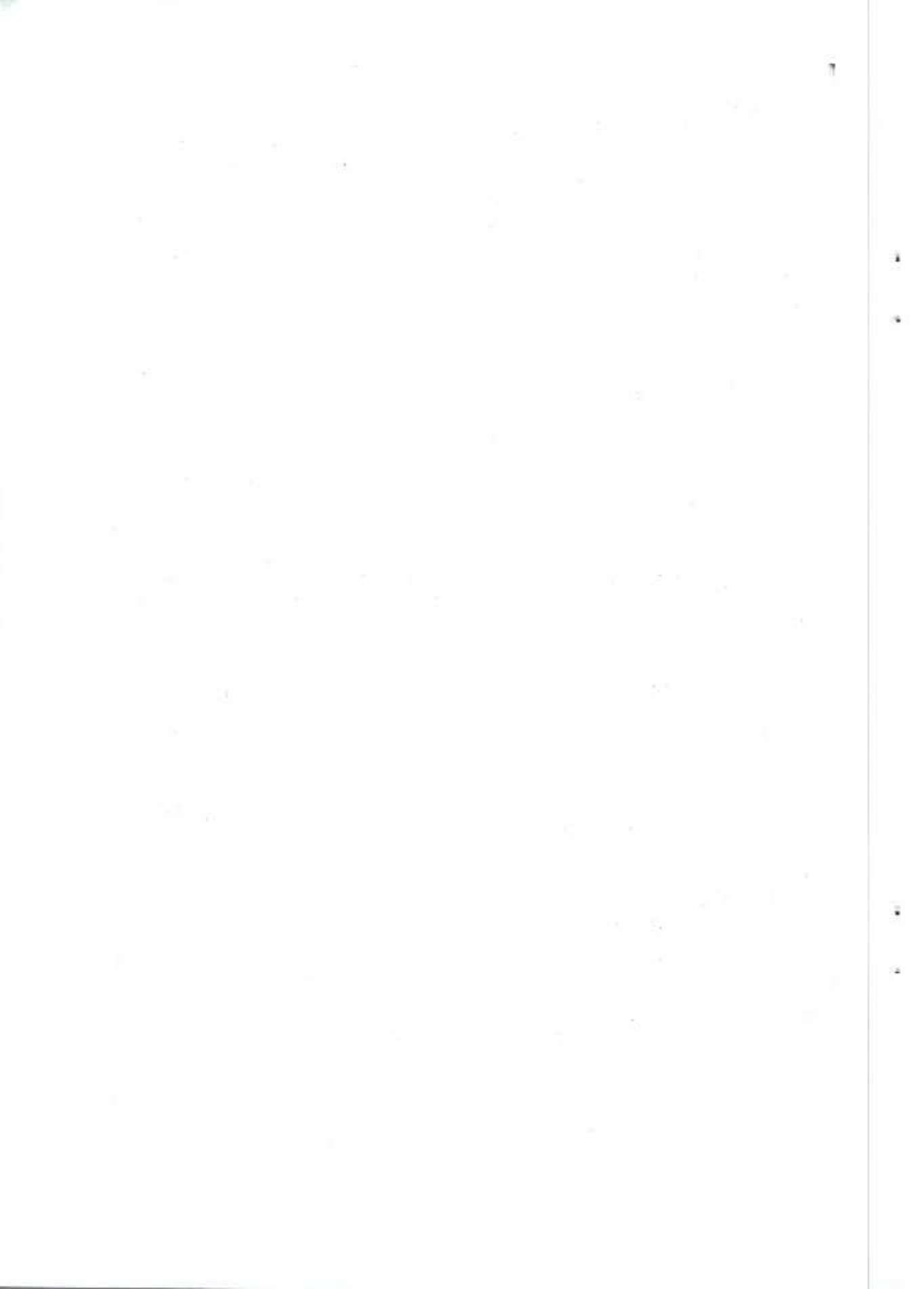
yang berpengaruh pada perkembangan diri selanjutnya. Nilai lokal, kalau dilihat dari pembagian Berger dan Luckmann ini,³⁵ termasuk diinternalisasi dalam proses internalisasi primer. Namun, ketika nilai keluarga dan lokal yang seharusnya diinternalisasi di awal tergantikan oleh nilai global yang lebih dahulu masuk, akan menimbulkan masalah karena proses internalisasi nilai tidak terjadi lagi secara gradual seperti itu lagi.

Dalam konteks itu, bahasa dan sastra (Jawa) sebagai nilai lokal yang mengandung sistem nilai, harus berkompetisi dengan nilai global yang secara bersamaan atau lebih dahulu masuk ke ruang keluarga. Sebelum anak sempat mengenali dan menginternalisasi nilai keluarga dan lokalnya, mereka sudah mengenal terlebih dahulu nilai budaya global yang tersajikan melalui media yang lebih mutakhir. Suatu hal yang patut diketahui juga bahwa nilai lokal itu tidak hanya mengandung sesuatu yang bersifat kontekstual saja, tetapi juga mengandung sesuatu yang bersifat universal. Banyak karya-karya sastra daerah (Jawa) yang menyajikan universalitas gagasan atau pemikiran kendatipun disajikan dalam konteks kedaerahannya.

Penutup

Dalam pemikiran ini, tentu belum banyak yang dapat diungkapkan di sini menyangkut problem yang dihadapi bahasa dan sastra daerah (Jawa), strategi pengembangan bahasa dan sastra daerah (Jawa), dan sosialisasi bahasa dan sastra daerah (Jawa) kepada generasi muda kita. Dapat dikatakan juga, nilai lokal merupakan nilai yang penting untuk diinternalisasi karena dapat membentuk karakter diri atau identitas diri di tengah nilai global yang tak terelakkan. Ciri kedaerahan dan keindonesiaan dapat memberikan landasan yang kuat dalam kepribadian sebelum lebih jauh melakukan internalisasi nilai-nilai global. Dalam konteks ini, bahasa dan sastra daerah (Jawa) merupakan sumber internalisasi nilai lokal, yang di dalamnya terkandung sistem nilai dan juga makna yang patut diketahui.

³⁵ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *op.cit.*, halaman 6.



Pergeseran Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokal dan Global

Bahasa Indonesia: Sejarah, Keberadaan, dan Problematikanya

Bahasa Indonesia memiliki geneologi yang berkait dengan bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu Riau. Oleh karena bahasa Melayu inilah yang menjadi cikal-bakal pembentukan bahasa Indonesia. Dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, paling tidak didasari atas dua alasan penting, yakni *pertama*, sebagai bahasa daerah yang paling demokratis karena bahasa ini tidak mengenal adanya tingkatan bahasa (*unggah-ungguh* bahasa); dan *kedua*, sebagai bahasa *lingua franca*, bahasa pergaulan sehari-hari dan perdagangan yang sudah diakrabi berabad-abad secara lintas-daerah di kawasan tanah air.

Bahasa Melayu tersebut menjadi bahasa perantara dalam komunikasi sehari-hari antardaerah. Ketika itu, bahasa Melayu sangat diperlukan di tengah heterogenitas budaya di kawasan tanah air yang setiap daerahnya juga memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri yang dikuasai hanya oleh penutur terbatas. Dalam masa awal pembentukan dan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu memang menjadi materi utama ditambah materi bahasa-bahasa daerah lain dan bahasa-bahasa asing sebagai pengayaannya.

Dilihat dari proses terbentuknya, bahasa Indonesia sejak awal dapat juga dikatakan sebagai bahasa yang dinamis. Kedinamisannya menjadi karakteristik bahasa Indonesia, yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan bahasa

daerah dan asing, seiring dengan dinamika masyarakat. Di samping itu, sejak awal bahasa Indonesia juga diakui sebagai dialek baku dari bahasa Melayu sebagaimana pernah diungkapkan Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah, seperti berikut:

"... yang dinamakan 'Bahasa Indonesia' jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknya berasal dari 'Melajoe Riaoe', akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dikoerangi menoeroet keperluan zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat di seloeroeh Indonesia; pembaharoean bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia."³⁶

Dari pernyataan tersebut tersirat harapan agar ada para ahli yang mampu selalu mengelola kedinamisan bahasa Indonesia. Saat ini, sudah direalisasikan oleh para ahli bahasa terutama yang berada di bawah institusi Pusat Bahasa Jakarta dan Balai Bahasa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dari sekilas proses kesejarahan lahirnya bahasa Indonesia tersebut, dapat dilihat bahasa Indonesia tetap berakar-kuat pada bahasa budaya bangsa, khususnya bahasa Melayu Riau yang diperkaya dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Ditambah lagi, bahasa Indonesia yang sudah mengalami lima tingkat penyempurnaan ejaan, yakni (1) Ejaan van Ophuijsen, (2) Ejaan Soewandi, (3) Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia), (4) Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Bahasa Indonesia juga telah memiliki struktur kebahasaan yang logis dan konsisten sehingga dengan bahasa Indonesia kita dapat menulis dengan "benar dan baik".³⁷ Proses-proses yang dialami bahasa Indonesia itulah yang semakin mematangkan dirinya sebagai bahasa modern, yang penting artinya dalam membangun jiwa kebangsaan

³⁶ https://wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia, akses tanggal 9 Juni 2009.

³⁷ Di dalam tulisan ini, penulis cenderung mendahulukan kata *benar* ketimbang *baik*, karena menurut pemahaman penulis, kata *baik* memiliki filosofi arti yang lebih tinggi daripada kata *benar*; baik pasti benar, benar belum tentu baik.

dan penguasaan iptek. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek.³⁸

Ditilik dari keberadaannya, bahasa Indonesia telah dikukuhkan menjadi bahasa yang penting bagi bangsa Indonesia. Secara sosiologis, kendatipun proses pemakaian bahasa Indonesia sudah berlangsung sejak zaman lampau atau berabad-abad lamanya, tetapi bahasa Indonesia baru dianggap “lahir” atau diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Momentum itu merupakan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda, yang salah satu isi sumpahnya mengikrarkan “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Adapun secara yuridis, baru tanggal 17 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36. Dua momen bersejarah penting itulah yang perlu secara konsisten dipegang-teguh untuk mengembangkan bahasa Indonesia dalam konteks dinamika masyarakat yang terus berubah.

Dua momen itulah yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan bahasa Indonesia, yang memiliki dua kedudukan penting, yakni *pertama*, sebagai bahasa nasional, dan *kedua*, sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai *bahasa nasional*, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Dalam kedudukannya sebagai *bahasa negara*, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi³⁹.

³⁸ I. B. Putera Manuaba, 1992, “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ipteks”, dalam *Surabaya Post*, 22 Oktober, halaman 4.

³⁹ Amran Halim, (ed.), *Politik Bahasa Nasional 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), halaman 21–28.

Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dengan fungsinya masing-masing itu berarti memosisikan bahasa Indonesia sebagai “bahasa utama” sedangkan bahasa daerah dan asing sebagai “bahasa yang melengkapi”.⁴⁰

Kendatipun bahasa Indonesia diposisikan dalam keberadaannya sebagai “bahasa utama”, tetapi dalam kenyataan empiris menunjukkan terjadinya pergeseran peran bahasa Indonesia, baik dalam konteks lokal maupun global. Adanya pergeseran peran tersebut bukan karena hakikat bahasa Indonesia sendiri, tetapi karena *sikap penuturnya* yang tampak tidak konsisten memosisikan bahasa Indonesia sebagai “bahasa utama” bangsa. Adanya pergeseran peran bahasa, seperti yang dialami bahasa Indonesia, dalam amatan sepintas dapat dipastikan dialami juga oleh bahasa-bahasa lainnya di dunia. Oleh karena itu, pergeseran peran bahasa itu sesungguhnya dapat dikatakan sebagai “sebuah gejala universal”. Dalam hal ini, pergeseran peran bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan negara, tampak tidak hanya sebagai konsekuensi dari adanya perubahan sosial masyarakat dalam konteks lokal dan global.

Pergeseran Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokal

Sebagaimana dikemukakan, dalam konteks lokal, ada pergeseran peran bahasa Indonesia. Pergeseran yang paling menonjol adalah diposisikannya bahasa Indonesia oleh masyarakat daerah sebagai bahasa ibu (*mother language*), yang menggantikan bahasa daerah. Dalam konteks lokal ini, tampak masyarakat berpandangan bahwa menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki *prestise* kehidupan yang lebih modern, sebagai orang modern atau orang kota. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dianggap sebagai penanda modernitas (kemodernan). Berbahasa Indonesia identik dengan menjadi orang yang modern. Adanya situasi berbahasa daerah-Indonesia diartikan sebagai pemberian label sebagai orang desa-kota. Orang desa

⁴⁰ Pandangan ini juga menjadi rumusan dari Seminar Internasional “Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa” yang diselenggarakan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional di Bandung, 26 Mei 2009.

dianggap lebih akrab dengan bahasa daerah, sedangkan orang kota lebih akrab dengan bahasa Indonesia. Kondisi ini sangat kental tampak ketika sarana informasi dan komunikasi, terutama televisi swasta belum menjamur masuk dan menjadi "panduan" masyarakat seperti sekarang ini.

Hingga sekitar tahun 1980-an, ketika tradisi lisan dan tutur masyarakat masih kuat dalam kehidupan masyarakat kita, bahasa daerah memang dapat berperan sebagai bahasa ibu. Dalam tindak komunikasi sehari-hari masyarakat lebih kental menggunakan bahasa daerahnya masing-masing; dan hanya dalam situasi tertentu saja orang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, yakni terutama ketika orang harus berkomunikasi dengan orang yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda. Bahkan, program pemerintah yang mengharuskan menggunakan bahasa daerah sampai kelas 3 Sekolah Dasar, masih dapat dilaksanakan dengan baik sehingga nilai-nilai lokal juga sangat diakrabi dan dapat dihayati oleh anak-anak di mana ia menjadi bagian dari masyarakat daerahnya. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa budaya informasi, komunikasi, dan teknologi (*information, communication, and technology, ICT*) memiliki pengaruh yang sangat besar bagi terjadinya pergeseran peran bahasa Indonesia dalam masyarakat kita.

Menjamurnya televisi swasta di Indonesia, yang *notabene* dominan menggunakan bahasa Indonesia, secara otomatis menyebabkan adanya perubahan tradisi berbahasa dalam masyarakat daerah di Indonesia. Kehidupan masyarakat, entah kota maupun daerah, sekarang ini yang dari waktu ke waktu, dari pagi hingga malam dan dari malam hingga pagi, menyaksikan tayangan televisi yang dominan menggunakan bahasa Indonesia. Keadaan tersebut dengan sendirinya membentuk tradisi baru bahasa masyarakat yang tidak jauh dari apa yang diakrabinya setiap hari. Kendatipun dalam televisi ada jam tayang dengan menggunakan bahasa daerah, tetapi kapasitasnya yang kecil tetap membuat masyarakat tidak mengakrabi bahasa daerahnya masing-masing. Akibatnya, tindak berkomunikasi keluarga sekarang lebih banyak menggunakan bahasa ibu bahasa Indonesia. Di kampung-kampung dan di desa-desa di berbagai daerah di Indonesia, anak-anak dengan fasih telah menggunakan bahasa

Indonesia. Bahasa ibu mereka tidak lagi bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia. Kendatipun mereka juga bisa berbahasa daerah, namun tampak sebagai bahasa yang terposisikan sebagai bahasa lain dari bahasa Indonesia. Jadi, ada semacam *bilingualisme* bahasa ibu, namun dengan porsi lebih besar pada bahasa Indonesia.

Fenomena sosial berbahasa lainnya tampak juga karena sekarang ini budaya migrasi begitu kuat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang mengakibatkan mereka harus pergi dari daerahnya masing-masing. Alasan yang utamanya adalah karena pekerjaan. Orang Sulawesi harus bermigrasi karena bekerja di Jakarta, orang Banyuwangi bekerja di Papua, orang Lombok bekerja di Surabaya, orang Bali bekerja di Yogyakarta, dan seterusnya. Kondisi migrasi membuat tradisi berbahasa ibu dengan menggunakan bahasa daerah tidak lagi bisa dipertahankan seperti yang dulu diidealkan.

Suatu keniscayaan juga bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat perlu melakukan komunikasi. Untuk dapat melakukan komunikasi, dalam proses interaksi, harus ada bahasa yang dapat dipahami bersama. Bahasa tersebut tidak lain adalah *bahasa Indonesia*. Bahasa-bahasa daerah tentu saja tidak memiliki kapabilitas untuk sebuah tindak komunikasi lintas-daerah dan hanya dapat digunakan dalam konteks komunikasi yang terbatas, yakni dalam lingkup internal keluarga sendiri. Kemudian, jika orang yang bermigrasi ini memiliki anak-anak, dengan sendirinya anak-anaknya akan menggunakan bahasa yang hidup di lingkungannya. Anak orang Ambon yang hidup di Jawa, dengan sendirinya akan menggunakan bahasa ibu lingkungannya. Jika lingkungannya menggunakan bahasa Jawa maka anak orang Ambon tersebut juga akan berbahasa Jawa, betapapun orang tuanya memaksa untuk berbahasa Ambon. Semua itu tentu tidak mungkin. Anak orang Ambon yang hidup di Jawa, yang tidak pernah mengenal dan hidup di lingkungan masyarakat Ambon, tidak akan pernah mampu menggunakan bahasa ibunya (bahasa Ambon). Nilai-nilai lokal yang diinternalisasinya pun juga adalah yang terkandung dalam bahasa yang menjadi bahasa ibu. Jika lingkungannya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ini

dapat menggantikan sebagai bahasa ibu. Uniknyalagi, ada anak yang sejak lahirnya menginternalisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan bukan bahasa daerah. Kecenderungan ini sangat kuat terjadi dalam kehidupan masyarakat kota.

Kondisi itu juga akan menentukan identitas diri yang sesungguhnya dari anak bangsa. Hal yang menyangkut identitas diri, tentunya menarik juga dibahas. Misalnya, ada anak yang secara geneologis orang Bali, namun secara kultur orang Jawa. Orang Bali yang hidup di Jawa yang tidak menggunakan bahasa Bali, tetapi menggunakan bahasa Jawa. Identitas semacam ini tentu unik sehingga konstruksi identitas yang sepenuhnya Jawa, Bali, Lombok, dan seterusnya tidak terjadi pada anak-anak yang hidup migrasi. Bagi kaum migrasi, ada kecenderungan identitas yang membanggunya, yakni identitas yang variatif atau kompleks.

Menjamurnya kompleks perumahan, sebagai tempat hunian warga masyarakat sekarang ini, juga berimplikasi pada tindak berbahasa. Dalam kompleks perumahan, umumnya ada kecenderungan masyarakat yang tinggal berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Mereka hidup dalam satu kesatuan RT/RW. Anak-anak yang lahir di perumahan tersebut juga beragam dan dengan kondisi beragam, kembali bahasa Indonesia mengambil peran menjadi bahasa perantara di dalam perumahan. Bahkan bahasa Indonesialah yang pertama kali dikenal oleh anak-anak yang lahir di kompleks perumahan. Maka, bahasa ibu anak-anak kompleks perumahan itu bisa jadi bukan bahasa daerah lagi, tetapi justru bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Dalam konteks inilah bahasa Indonesia mengalami pergeseran peran, yang tidak terbatas sebagaimana diungkapkan dalam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, tetapi juga berperan sebagai bahasa ibu dalam masyarakat kompleks perumahan.

Pada anak-anak yang berbahasa ibu bahasa Indonesia atau yang hidup dalam lingkungan masyarakat penutur yang *bilingual* atau *multilingual*, tidak akan terjadi penguatan primordialisme karena mereka sejak dini sudah mengalami pembiasaan hidup dalam keberagaman. Anak-anak bangsa yang kebetulan hidup dalam lingkungan semacam ini, cenderung memiliki sikap toleransi yang relatif lebih tinggi dari masyarakat yang

homogen karena mereka tidak lagi mengalami keterkejutan budaya (*shock-culture*); dan sejak awal mereka juga telah mengalami dan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang beragam yang tidak asing lagi dari dunianya. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan keadaan yang nantinya dialami oleh masyarakat yang homogen karena mereka harus mengalami penyesuaian secara sosial dan budaya, yang dapat saja membuat dirinya melakukan resistansi karena tidak terbiasa dengan apa yang diakrabi dalam kehidupannya sehari-hari.

Pergeseran Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Global

Berbeda dalam konteks lokal, dalam konteks global bahasa Indonesia justru mengalami degradasi peran, sebagai akibat dari sikap penuturnya yang memiliki anggapan bahwa masyarakat global yang diidentikkan dengan penggunaan bahasa internasional—khususnya bahasa Inggris. Dalam konteks global, bahasa Inggris dianggap memiliki *prestise* atau terciptakan sebagai bahasa yang memiliki derajat yang jauh melampaui bahasa Indonesia dan berkualitas dunia (*world quality*) sehingga segala sesuatu jika menggunakan bahasa Inggris dianggap jauh lebih maju dan canggih.

Implikasinya, dalam tindak berbahasa di masyarakat, baik menyangkut penulisan pada papan nama, baliho, rumah makan, hotel, perusahaan, rumah sakit, institusi pendidikan, dan lainnya jika menggunakan bahasa Inggris dianggap lebih laku jual (*marketable*) dan memiliki harga tinggi.⁴¹ Contohnya, sebuah “warung” cenderung menggunakan istilah *cafe* karena dianggap lebih laku jual. Berbahasa Inggris berarti memiliki citra global atau mendunia. Anggapan pengguna bahasa ini memang terjadi di hampir seluruh kota di wilayah Indonesia.

⁴¹ Ari Subagio, dosen Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, juga pernah menulis dalam sebuah artikelnya “Masalah Utama Bahasa Indonesia” di *Kompas*, yang mengungkap ketaksetiaan bangsa kita menggunakan bahasa nasionalnya, dengan menggunakan secara campur-aduk dalam iklan, nama perusahaan, pengumuman, dan acara-acara televisi yang terlalu melayani selera pasar.

Sekolah berstandar internasional dan universitas berkelas dunia juga gencar menggantikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Padahal dalam politik bahasa nasional, sebagaimana yang telah dikemukakan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan adalah bahasa Indonesia. Tentang hal ini, tampaknya, belum ada kejelasan, apakah dalam sekolah internasional atau universitas kelas dunia harus menghapus begitu saja bahasa pengantar bahasa Indonesia? Atau mungkin perlu menggunakan dua bahasa (*bilingual*) sebagai pengantar? Haruskah dipahami bahwa kualitas internasional itu indikatornya hanya diukur dari standar bahasa Inggris? Lalu bagaimana dukungan untuk perjuangan teman-teman Pusat Bahasa yang bercita-cita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional?

Suatu kenyataan lain yang kiranya perlu diwacanakan juga di sini bahwa mahasiswa asing justru sangat tertarik belajar bahasa Indonesia atau budaya Indonesia. Malahan mahasiswa asing, dari berbagai negara (Jepang, Cina, Jerman, Pakistan, Iran, Irak, dan sebagainya) yang ada di universitas-universitas di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Udayana, dan sebagainya dengan tekunnya mempelajari bahasa Indonesia. Begitu pun di negaranya sendiri, pada beberapa universitas di antaranya di Amerika, Jerman, Cina, dan Jepang, ada program *Indonesian Studies* yang juga memprogram pembelajaran bahasa Indonesia. Dari beberapa teman asing yang saya ketahui, diketahui mereka sudah mampu menjadi penutur atau pemakai bahasa Indonesia yang baik—yang mungkin lebih baik bahasanya dari orang Indonesia sendiri. Lalu, bagaimana kita memahami kenyataan berbahasa Indonesia semacam ini? Apakah ini sebuah ironisme?

Kenyataan tersebut penting kita renungkan dalam-dalam, agar kita sebagai orang Indonesia yang seharusnya justru paling bangga berbahasa Indonesia, tidak mengalami degradasi kebanggaan berbahasa kita sendiri. Ini penting dan menjadi persoalan yang serius. Apabila kita menengok negara kita yakni Malaysia yang jauh lebih belakang mulai membangun negaranya, kini mereka sudah menggeliat menjadi negara maju jauh melampaui Indonesia, yang tetap menghargai bahasa nasionalnya yakni

bahasa Melayu, kendatipun warga Malaysia juga berbahasa Inggris.⁴² Kita pun seharusnya tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia karena tugas kita sesungguhnya mengangkat *prestise* bahasa Indonesia sehingga kita tak perlu merasa malu atau rendah diri menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus ingat bahwa bahasa Indonesia merupakan media utama dalam pendidikan kita, dan juga mengandung nilai-nilai budaya bangsa.⁴³

Secara lebih jauh dalam tulisan yang lain pernah penulis katakan juga jauh sebelum tulisan ini bahwa bahasa bukan semata-mata alat komunikasi, tetapi lebih dari itu. Para filsuf Yunani memandang bahasa sebagai alat untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran untuk mengekspresikan hal-hal yang bersifat artistik dan untuk persuasif. Dalam pandangan hidup orang Athena abad ke-5, bahasa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang konkret dan praktis. Bahasa dianggap sebagai senjata ampuh tingkat tinggi. Kemudian, sastrawan Shakespeare dari Inggris menekankan fungsi bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan kebijaksanaan, memperoleh penghargaan, dan untuk meyakinkan.⁴⁴

Dengan demikian, jika kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita tidak menjunjung nilai budaya bangsa karena bahasa Indonesia di dalamnya juga mengandung nilai-nilai budaya bangsa. Begitu sebaliknya, kebanggaan berbahasa Indonesia berarti menjunjung nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Degradasi kebanggaan berbahasa Indonesia yang terjadi, mungkin saja akibat kita sebagai penutur terpengaruh oleh adanya suatu pandangan bahwa kemajuan itu identik dengan Barat atau asing. Maka itu, apa saja yang serba asing, yang berbahasa Inggris, dianggap sebagai suatu kemajuan. Padahal, kalau kita mau jujur, belumlah tentu seperti

⁴² Baru-baru ini ada pemberitaan di media massa yang belum pernah terjadi, yakni masyarakat Malaysia melakukan demo agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa yang utama.

⁴³ I. B. Putera Manuaba, "Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Proses Dialektika", dalam *Nusa Tenggara*, 1996.

⁴⁴ I. B. Putera Manuaba, "Evolusi Bahasa Politik Kita", dalam *Surabaya Post*, 18 Oktober 1999, halaman 4.

itu. Kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari penggunaan bahasa yang harus Inggris, kendatipun bahasa Inggris juga penting dikuasai. Ini suatu pandangan yang sangat simplistis. Oleh karena itu, jika kita merasa sebagai orang Indonesia, kita perlu menyadari kembali keberadaan bahasa nasional kita yakni bahasa Indonesia. Pada taraf ini, kita tidak hanya memosisikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi lebih dari sekedar alat komunikasi.

Di tengah masyarakat dunia yang makin mengglobal, kita memang harus memperkuat bahasa nasional kita dengan memperkaya dan melengkapi dengan bahasa asing. Dalam pergaulan ke dalam (internal) kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan dalam pergaulan ke luar (eksternal) kita dapat saja menggunakan bahasa internasional—khususnya bahasa Inggris. Suatu kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah hanya karena ingin mengejar dan ingin dicap berkelas dunia kita menafikan bahasa Indonesia. Bukankah ini sebuah pengingkaran pada sejarah bangsa? Dalam konteks ini, yang terpenting adalah kesadaran dan kemampuan kita dalam hal bagaimana memosisikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tengah pergaulan bahasa Inggris.

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pemosisian tiga bahasa di Indonesia, yakni bahasa daerah, Indonesia, dan bahasa Inggris sebagaimana yang direkomendasikan Pusat Bahasa sebagai hasil seminar internasional di Bandung pada bulan Mei 2009. Ketiga bahasa itu harus disadari memiliki peran yang berbeda-beda dan tidak harus saling mematikan. Bahasa daerah berperan untuk membangun kesadaran lokalitas dan sistem nilai sosial budaya lokal. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun jiwa kebangsaan, sedangkan bahasa Inggris memiliki peran penting dalam pergaulan global. Singkatnya, kita harus menggunakan ketiga bahasa itu secara kontekstual dan secara situasional. Artinya, kapan kita menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, harus sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya.

Apabila telah tumbuh kesadaran semacam itu, ketiga bahasa tersebut seharusnya memiliki keberadaannya yang sederajat yang hanya terbedakan dari perannya masing-masing. Ketiganya juga memiliki peran

penting karena kehidupan kita sebagai manusia selalu berkait dengan konteks daerah, negara, dan dunia. Dalam hal ini, kita harus membangun kembali kesadaran pada kecintaan berbahasa Indonesia, yang selama ini telah memosisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki kelas yang lebih rendah dalam jajaran bahasa-bahasa internasional.

Dalam hal ini, sudah saatnya pula kita memosisikan ketiga bahasa tersebut dalam posisinya yang horizontal, dan bukan yang vertikal. Dengan demikian, tidak ada bahasa yang memiliki derajat yang lebih tinggi dan juga tidak ada bahasa yang memiliki derajat yang lebih rendah. Seharusnya, semua bahasa setara, yang membedakan adalah situasi dan konteksnya. Maka itu, bangsa Indonesialah yang seharusnya pertama merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia karena kitalah pemilik bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, barangkali dapat dilihat bagaimana posisi ketiga bahasa tersebut dalam Bagan 1.3.



Bagan 4.1 Posisi Horizontal Tiga Kelompok Bahasa

Dalam Bagan 4.1, tampak bagaimana masing-masing bahasa itu membentuk kedirian orang Indonesia sehingga ia tidak tercerabut dari nilai-nilai lokalnya, memiliki nilai-nilai nasionalisme, dan juga tidak terisolir dari nilai-nilai global. Jika bahasa-bahasa tersebut disadari posisinya dalam garis horizontal semacam itu, niscaya akan lahir orang-

orang Indonesia yang siap untuk mencapai keunggulannya dan tetap bangga sebagai bagian dari daerah dan bangsanya.

Selanjutnya, perlu ada refungsionalisasi bahasa Indonesia dalam tindak berbahasa sehari-hari. Ungkapan klasik "bahasa menunjukkan bangsa" memang seharusnya tetap menjadi strategi peneguhan bahasa Indonesia meskipun arus global begitu kuat mendesak bahasa Indonesia. Penulis sangat setuju dengan hasil pengamatan Taufik Abdullah⁴⁵ yang menyatakan bahwa situasi kebahasaan saat ini yang lebih mengagungkan bahasa internasional sebagai akibat dari kepuangan eksternal. Mungkin kepuangan itulah yang membuat banyak orang Indonesia meninggalkan bahasa Indonesia dan hanya menganggap bahasa internasional sebagai bahasa yang layak dipakai dalam pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Ambisi untuk disebut menginternasional juga menjadi pemicu adanya sikap penutur yang lebih gandrung menggunakan bahasa internasional (Inggris) dalam situasi apa pun.

Bahasa Indonesia dalam konteks global sekarang ini tampak mengalami pergeseran peran. Bahasa Indonesia dianggap kurang memiliki kapabilitas dalam konteks global sehingga harus digantikan oleh bahasa internasional, khususnya Inggris. Kondisi ini tentu saja dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia dalam dua kedudukannya sebagai bahasa nasional dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya solutif agar keberadaan bahasa Indonesia di tengah bangsa kita tidak semakin terpinggirkan. Perlu dipikirkan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar bahasa Indonesia tetap menjadi "bahasa utama" di tengah kepuangan eksternal tadi. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan sejak dini pada anak-anak bangsa, mungkin dalam bentuk strategi pembelajaran bahasa mulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

⁴⁵ Lihat Taufik Abdullah, "Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, ed., *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), halaman 345.

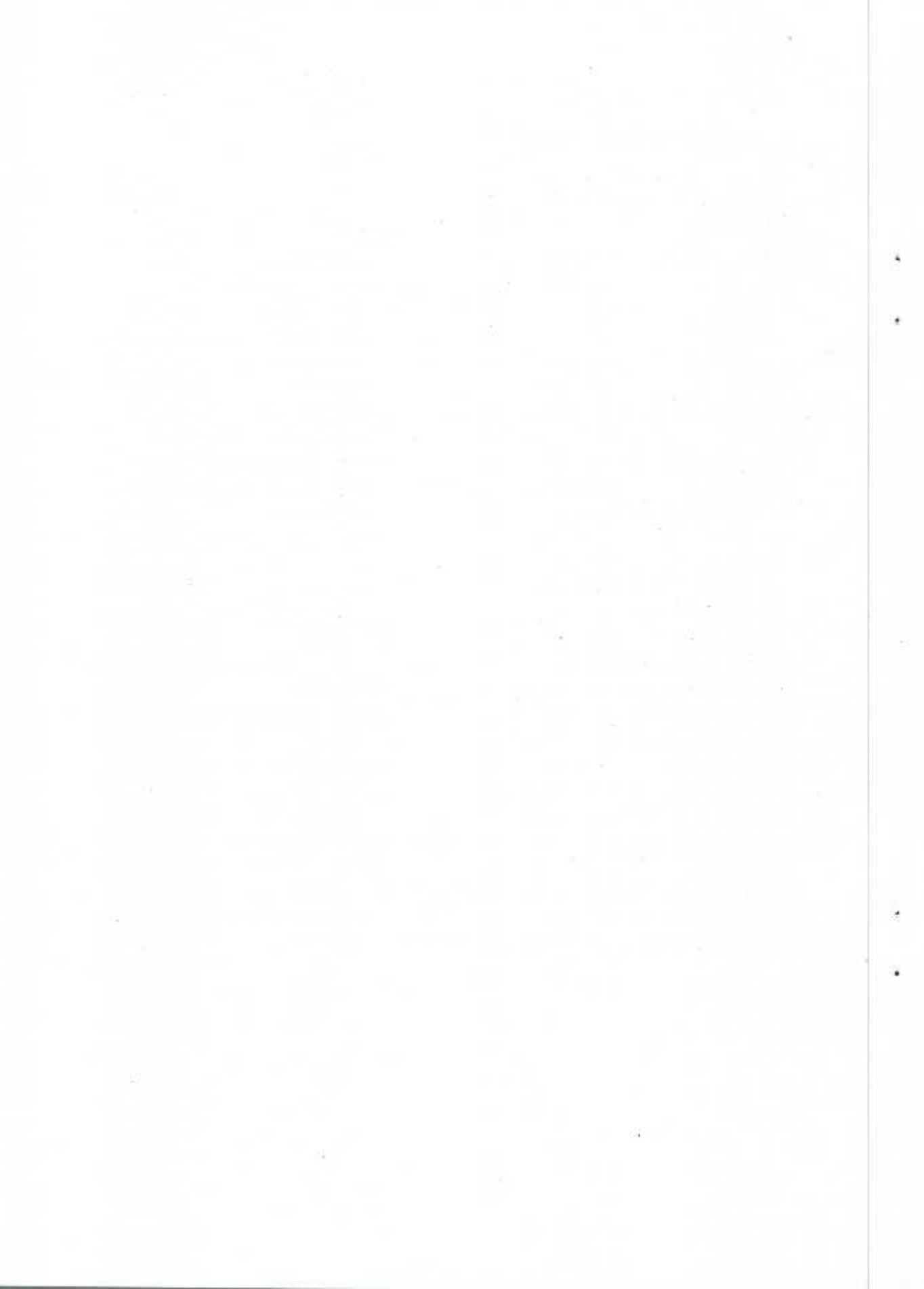
Jika Bahasa Indonesia tidak hanya merupakan alat komunikasi tetapi mengandung nilai-nilai, maka tentu saja perlu secara hati-hati dalam memulai memberikan pelajaran bahasa kepada anak-anak kita, terutama di sekolah formal. Misalnya, mungkin diawali dengan menekankan penggunaan bahasa daerah, diteruskan penggunaan bahasa Indonesia, dan baru bahasa asing. Gradasi pembelajaran bahasa sedikit-tidaknya memengaruhi pembangunan sistem nilai budaya pada anak bangsa kita. Tidak seperti sekarang ini, pembelajaran bahasa tidak jelas gradasinya sehingga ketika anak bangsa belum mengenali budayanya sendiri, tetapi sudah diperkenalkan dengan bahasa asing. Bagaimana kita lalu menuntut anak bangsa untuk membangun semangat lokalitas dan nasionalismenya?

Dalam kenyataan empiris, sejak anak-anak tingkat sekolah play grup A sudah diberikan bahasa Inggris, padahal mereka belum tahu sama sekali bahasa daerah atau Indonesia. Persoalan ini tampaknya remeh, tetapi sangat prinsip, terutama bagi anak bangsa. Ada baiknya barangkali jika kita mau menengok bangsa Jepang dalam memberikan pelajaran bahasa. Bangsa Jepang mula-mula “menjepangkan” anak bangsanya dengan memperkenalkan pertama kali dengan budayanya sendiri (termasuk bahasa Jepang) sehingga jiwa keJepangannya benar-benar merasuk ke dalam jiwanya, baru kemudian pada tingkat sekolah menengah mereka diberikan pengetahuan bahasa Inggris. Oleh karena itu, tidak heran jika orang-orang Jepang memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi terhadap bangsanya. Lalu, bagaimana bangsa kita sendiri? Adakah desain besar untuk “mengindonesiakan” anak Indonesia? Barangkali kita perlu membuat desain besar agar regenerasi bangsa dapat terbentuk secara baik. Hal ini penting karena dengan adanya generasi yang terbangun dari akar budaya bangsa dan nilai nasionalisme, tentu akan sangat berpengaruh kepada sikap berbangsa dari anak bangsa kita dan tentu saja selanjutnya berpengaruh pada kemajuan bangsa kita. Kita perlu memikirkan bagaimana melahirkan anak bangsa yang memiliki kearifan lokal dan bangsa dan sekaligus memiliki daya saing global.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, terdapat pergeseran peran bahasa Indonesia dalam konteks lokal dan global sebagai akibat dari adanya dinamika masyarakat yang terus berubah seiring dengan akselerasi pemanfaatan sarana informasi, komunikasi, dan teknologi. *Kedua*, dalam kondisi masyarakat yang mengalami migrasi dari satu daerah ke daerah lain dan *trend* adanya kompleks perumahan, menyebabkan heterogenitas masyarakat, yang selanjutnya berimplikasi pada adanya pergeseran bahasa ibu (*mother language*). *Ketiga*, ada berbagai kecenderungan bahasa ibu yang diakibatkan oleh heterogenitas masyarakat tersebut, yakni berbahasa ibu bahasa daerah, bahasa daerah lain, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah dan Indonesia. Dengan perkataan lain, menggunakan bilingual dan juga multilingual.

Keempat, dalam konteks lokal bahasa Indonesia cenderung dianggap sebagai bahasa modern, yang kemudian banyak menggantikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Penggantian bahasa ibu bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan. *Kelima*, dalam konteks global, para penutur bahasa Indonesia mengalami degradasi kebanggaan sehingga peran bahasa Indonesia banyak tergantikan oleh bahasa internasional (Inggris) sebagai akibat adanya anggapan bahwa indikator kemajuan dan kualitas dunia diukur dari penggunaan bahasa internasional (Inggris). *Keenam*, bahasa-bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris harus diposisikan dalam posisi yang horizontal dan bukan vertikal sehingga semua bahasa tersebut dipahami memiliki derajat yang sama yang hanya terbedakan oleh fungsi dan konteksnya. *Ketujuh*, perlu adanya upaya-upaya untuk mengembalikan keberadaan bahasa Indonesia dalam keberadaannya sebagai "bahasa utama" serta bahasa daerah dan asing sebagai bahasa pelengkap.



Pengutamaan Bahasa Indonesia

Pengantar

Jiwa dan spirit nasionalisme kita perlu dipupuk salah satunya melalui sikap berbahasa. Mencintai, menghargai, dan memuliakan bahasa Indonesia, merupakan sikap yang wajib kita tumbuhkan sebagai warga bangsa Indonesia. Namun, dalam masyarakat kita, terjadi krisis nasionalisme berbahasa Indonesia yang makin tak terkendali. Sudah menjadi wacana klasik, kita kurang punya sikap bangga terhadap bahasa Indonesia. Padahal, kita sebagai si pemilik dan penutur asli (*native*) bahasa Indonesia, semestinya menjadi barisan terdepan dalam menggunakan dan mempromosikan bahasa Indonesia. Kita juga seharusnya yang paling bangga menggunakan bahasa Indonesia. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Kita ternyata lebih gandrung memakai kosakata bahasa asing, meskipun padanan kosakatanya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Mengapa terjadi seperti itu?

Historisitas Bahasa Indonesia

Jika kita telusuri historisitasnya, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang, yang sarat nilai nasionalisme. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia seiring dengan sejarah perjuangan bangsa kita. Pada awal kelahirannya, bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa nasional, menggantikan bahasa imperialisme Belanda dan Jepang. Bahasa Indonesia menjadi pilihan, sekaligus mampu menyatukan masyarakat kita yang niscaya beragam suku dan budaya lokal. Bahasa Indonesia mampu mengambil peran itu.

Kita tahu cikal-bakal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu (Riau) yang diperkaya secara dinamis dengan kosakata bahasa asing dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia mula-mula lahir dan tumbuh dari kesadaran kebangsaan sehingga pada 20 Mei 1908 bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan yang sarat dengan nilai nasionalisme. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai bahasa perekat bangsa. Maka itu, ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928, salah satu ikrarnya menjunjung bahasa Indonesia, yang menjadi sumber hukum sebagai bahasa nasional. Kemudian dalam Pasal 36 Bab XV UUD 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan lagi sebagai bahasa negara. Itulah kedudukan penting bahasa Indonesia.

Sikap Berbahasa Indonesia

Bertolak dari sejarah panjang bahasa Indonesia, kita perlu bangga dengan keberadaan bahasa Indonesia. Terlebih lagi di tengah keragaman bangsa. Kita patut bersyukur memiliki satu bahasa persatuan yang mampu memediasi hubungan antardaerah dan antarsuku di Indonesia. Kebanggaan itu semestinya diikuti dengan ketaatan praksis berbahasa Indonesia, baik dalam komunikasi tulis maupun lisan. Sebab, hanya dengan kebanggaan dan ketaatan praksis berbahasa itulah kita secara nyata akan turut menghidupkan bahasa Indonesia dan memosisikannya sebagai bahasa yang sangat penting dalam bangsa dan negara kita.

Sikap bangga terhadap bahasa Indonesia penting kita tumbuh suburkan karena bahasa menandai jati diri bangsa. Bahasa menjadi salah satu penanda jati diri yang nyata. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata BI belumlah kita sikapi seperti itu. Kita tampak kurang memperhatikan, mempedulikan, dan menghargai bahasa kita sendiri. Uniknyanya, bahasa Indonesia justru sangat diminati oleh orang asing. Banyak orang asing yang antusias belajar bahasa Indonesia. Dalam berbagai pertemuan internasional, bahasa Indonesia sering mereka katakan sebagai bahasa yang menarik. Kata-kata itu justru keluar dari perkataan orang asing sendiri dan orang asing justru mempertanyakan sikap kita, "Mengapa orang Indonesia kurang perhatian terhadap bahasanya?"

Jika kita amati di tingkat dunia pun bahasa Indonesia juga sangat dipelajari dan dihargai di berbagai negara. Terbukti dari banyaknya pendirian bidang bahasa Indonesia atau studi Indonesia (*Indonesian studies*). Beberapa negara itu di antaranya, Korea, Jepang, Australia, Jerman, Polandia, Amerika, dan Cina. Tentu masih banyak negara lainnya. Dari bahasa Indonesia, mereka juga kemudian tertarik mempelajari budaya Indonesia. Tak heran jika sekarang banyak orang asing yang sangat mahir berbahasa Indonesia standar.

Namun, ironisnya, kita sebagai penutur asli, justru kurang menghargai bahasa kita sendiri. Dalam keseharian berbahasa misalnya, kita terlalu silau dengan bahasa asing. Berbagai kosakata yang sudah jelas-jelas ada serapan atau padanannya dalam bahasa Indonesia, justru kita ganti kembali dengan kosakata bahasa asing. Misalnya *unggul* menjadi *excellence*, *rapat* menjadi *meeting*, *ruang* menjadi *room*, *siswa* menjadi *student*, *perhatian* menjadi *care*, *sarapan* menjadi *breakfast*, *makan malam* menjadi *dinner*, *tutup* menjadi *close*, *buka* menjadi *open*, *tempat tinggal* diganti *residence*, *jual* menjadi *sale*, dan masih banyak lagi lainnya.

Melihat realitas berbahasa itu, boleh-boleh saja kita menggunakan kata bahasa asing, asalkan kata bahasa Indonesia ditulis terlebih dahulu—sebagaimana yang dilakukan Korea dan Cina. Begitu pula halnya jika kita melihat bahasa di ruang publik yang tertera dalam papan nama, nama jalan, nama pertokoan, perumahan, promosi, dan sebagainya. Kata bahasa Indonesia tampak tenggelam dan yang lebih ditonjolkan justru kata bahasa asing.

Penutup

Mengamati sikap dan praksis berbahasa Indonesia seperti itu, kita terasa tak tinggal di negara sendiri. Adanya realitas seperti itu, tentu saja memprihatinkan. Kita seperti sama sekali tak bangga menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Padahal ruang publik Indonesia seharusnya jelas-jelas menjadi tempat utama mempromosikan bahasa Indonesia. Melalui nasionalisme berbahasa Indonesia, kita mesti bisa menguatkan jati diri keindonesiaan kita.

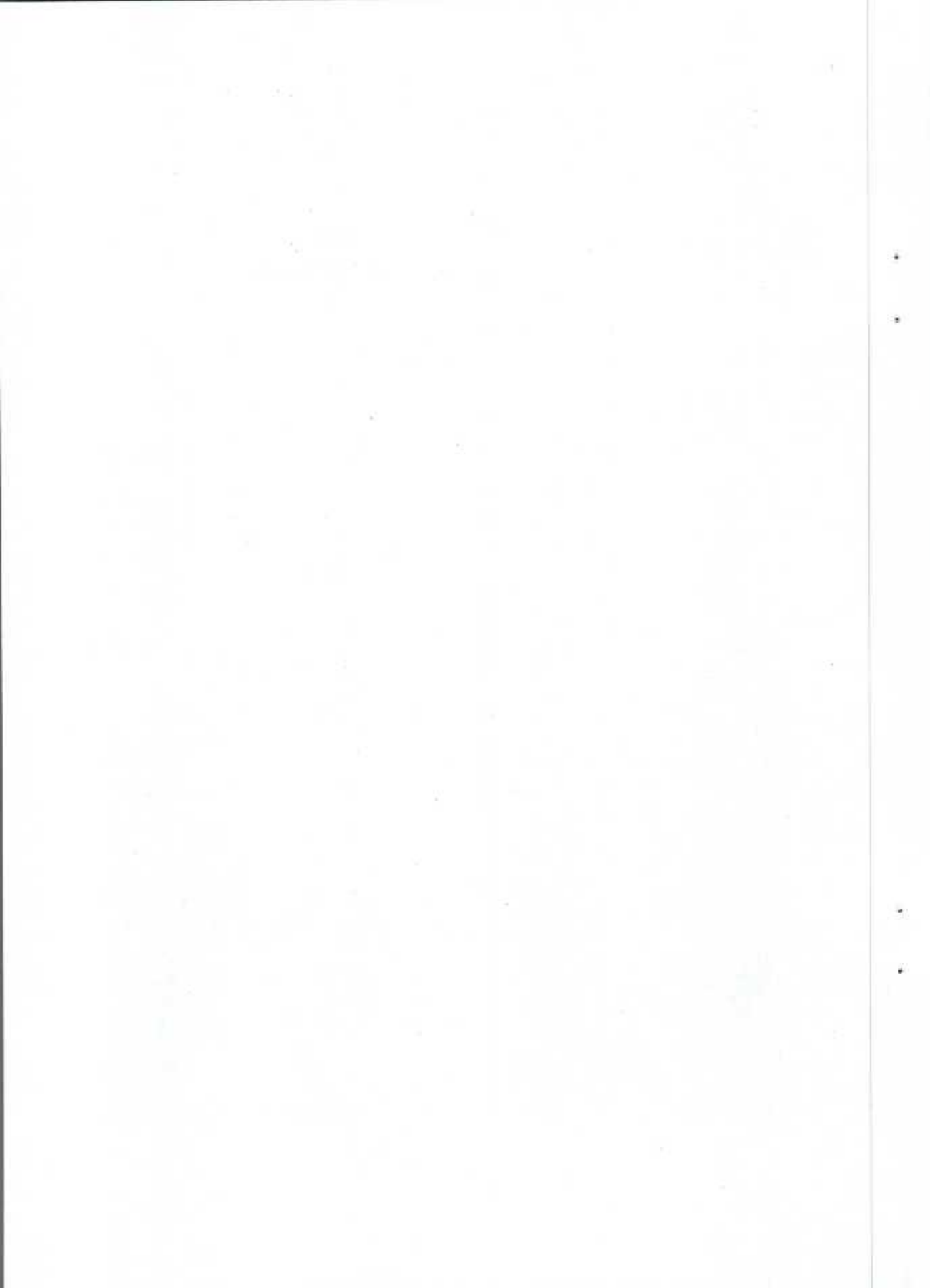
Untuk mengantisipasi krisis kebanggaan berbahasa Indonesia, kita mesti memiliki kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia. Kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia dalam berbagai even, guna meneguhkan jati diri berbangsa. Kita mesti bangga dan mau mendayagunakan bahasa Indonesia.⁴⁶

⁴⁶ Tulisan I.B. Putera Manuaba, "Pengutamaan Bahasa Indonesia", *Kompas*, 27 Oktober 2018, halaman 5

BAGIAN 2

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of a dark, textured vertical bar on the left and a series of white, wavy lines that curve from the top left towards the right, creating a sense of movement and depth.

**WACAN
SASTR** **A**



Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Sastra dan Budaya di Jawa Timur

Pengantar

Pemikiran ini, sebenarnya, sudah penulis tulis dalam waktu yang cukup lama, yakni tahun 2006. Ketika itu, tim dari Kemenristekdikti (penamaan sekarang) datang ke Fakultas Ilmu Budaya (yang saat itu bernama Fakultas Sastra) Universitas Airlangga, ingin mengetahui tentang perkembangan dan pengembangan sastra di Jawa Timur. Fenomena yang ditunjukkan Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Menristekdikti RI) adalah fenomena kita bersama. Bagi Menristekdikti RI, di Indonesia tidak hanya terjadi menurunnya perhatian pada soal pengembangan ilmu sastra dan budaya, tetapi bahkan sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Hal ini di antaranya dapat dibuktikan dengan makin sedikitnya jumlah mahasiswa yang mengambil bidang ilmu sastra dan budaya. Padahal keberadaan bidang ilmu ini, sangat besar perannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁷

Kalau kita cermati, bidang ilmu sastra dan budaya, sebenarnya, memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. Menristekdikti menyatakan, bidang ini dapat membentuk karakter manusia Indonesia dalam menciptakan kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab.⁴⁸ Senada dengan itu, budayawan dari Surabaya Budi

⁴⁷ Merujuk pada TOR kegiatan "Diskusi Ilmu Sastra dan Budaya" dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2006.

⁴⁸ *Ibid.*

Darma, jauh dalam dua dasawarsa sebelumnya, sudah pernah menyatakan juga, bidang ini penting artinya dalam menumbuhkan jiwa “humanitat”, jiwa yang halus, manusiawi, dan berbudaya.⁴⁹

Selain itu juga, peran bidang ilmu sastra dan budaya, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan juga masyarakat multikultural, mengingat karakter bangsa kita yang memang memiliki keniscayaan beragam dari suku (etnis), budaya, agama, seni, adat-istiadat, dan tradisi. Keberagaman itu juga, telah ditegaskan pada moto bangsa “*Bhinneka Tunggal Ika*” di dalam lambang negara kita yakni Burung Garuda.⁵⁰ Lambang negara yang mottonya bermakna keragaman dalam kesatuan dan juga memuat falsafah atau ideologi Pancasila, suatu hal yang sudah final (paripurna) karena semua kebutuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya sudah terakumulasi di dalamnya.⁵¹

Sehubungan dengan hal itu, penulis yang bergerak dalam bidang ilmu sastra dan budaya ini, sangat apresiatif atas niat baik Menristekdikti RI untuk melakukan pembinaan atas bidang ilmu ini. Hal itu sangat penting, karena tanpa ada pembinaan, perhatian, dan komitmen bersama, semua kekayaan budaya bangsa akan ditelan masa)—yang begitu cepat berubah)—karena akhir-akhir ini begitu banyak kekuatan atau pengaruh yang sarat kepentingan ingin menekan apa yang telah menjadi konsensus dan komitmen bangsa.

Sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu sastra dan budaya, kita tentu seharusnya tidak mudah larut begitu saja dan meninggalkan kekayaan budaya bangsa. Kita secara terus-menerus perlu melakukan upaya-upaya terbaik guna menyelamatkan dan

⁴⁹ Budi Darma, “Moral dalam Sastra” dalam Andy Zoeltom (ed.), *Budaya Sastra* (Jakarta: Rajawali, 1984), halaman 79.

⁵⁰ Merujuk pada TOR kegiatan “Diskusi Ilmu Sastra dan Budaya” dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2006.

⁵¹ Munculnya kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain akhir-akhir ini, sebagaimana yang kuat menjadi wacana publik, sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran dari komitmen bersama kita untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.

mempertahankan kekayaan budaya bangsa serta membangun bangsa yang berkarakter baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini, penulis mencoba menyampaikan perkembangan ilmu sastra dan budaya di Jawa Timur sampai tahun 2006. Untuk itu, penyampaian ini mungkin baru dapat dianggap sebagai sebatas pengantar atau "kran" pembuka saja, yang untuk selanjutnya peta substansi informasi diharapkan lebih banyak lagi dapat terungkap lewat diskusi-diskusi interaktif.

Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Sastra dan Budaya di Jawa Timur

Perlu penulis kritisi sebelumnya, bahwa istilah *perkembangan* dan *pengembangan* yang digunakan dalam *term of reference* (TOR) Menristekdikti secara bergantian, merupakan dua kata bahasa Indonesia yang saya pahami berbeda konsep atau orientasinya. Kata *perkembangan* lebih berorientasi pada bagaimana peta perjalanan ilmu sastra dan budaya ini dari waktu ke waktu sejak awal hingga keberadaannya yang terakhir; sedangkan *pengembangan* lebih berorientasi pada bagaimana ikhtiar atau upaya-upaya yang dilakukan oleh para *agent* (pelaku) atau yang terkait dengan ilmu sastra dan budaya)—khususnya di Jawa Timur)—dalam konteks memajukan bidang ilmu ini.

Untuk itu, pembicaraan dipilah menjadi dua hal, yakni *perkembangan* dan *pengembangan* ilmu sastra dan budaya di Jawa Timur. Hanya saja, kurun waktu yang ingin diketahui juga tidak ada batasan dalam TOR tersebut. Namun, dari deskripsi yang disampaikan, keinginan implisit yang dapat penulis perkirakan adalah mungkin perkembangan bidang ilmu tersebut pada akhir-akhir ini (masa 2006).

Di samping itu, perlu juga penulis kritisi, bahwa penyebutan ilmu sastra dan budaya juga menimbulkan multi-interpretasi karena ia dapat diinterpretasi sebagai dua entitas ilmu yang berbeda. Penulis memahami, ilmu sastra dan budaya itu, sebagai dua entitas ilmu yang memiliki satu-kesatuan, yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Penulis memahami kajian-kajian dalam ilmu sastra, pastilah akan sampai pada kajian budaya.

Artinya, kita sulit memisahkan sastra dengan budaya, karena dua bidang itu berkait-erat dan bersentuhan satu sama lain.

Dengan demikian, kajian yang dilakukan dalam bidang ilmu sastra, pada dasarnya juga adalah kajian ilmu budaya, menuju ke arah kajian-kajian budaya. Oleh karena itu, penulis sangat setuju jika UI dan UGM menamakan fakultasnya dengan "Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya" dan "Fakultas Ilmu Budaya". Penamaan Fakultas Sastra rasanya begitu sempit konotasi maknanya jika digunakan untuk menaungi kajian-kajian sastra yang dalam kenyataannya adalah merupakan kajian-kajian budaya. Atas dasar alasan (*reasoning*) itulah di sini penulis tidak hanya menitikberatkan pada perkembangan dan pengembangan ilmu sastra saja, tetapi berkait dengan kajian ilmu budaya juga.⁵²

Perkembangan Ilmu Sastra di Jawa Timur

Di dalam buku-buku literatur ilmu sastra, dinyatakan bahwa ilmu sastra itu menyangkut sub-bidang (1) teori sastra, (2) kritik sastra, dan (3) sejarah sastra. Teori sastra, menyangkut perkembangan teori sastra; kritik sastra, menyangkut kajian-kajian atau telaah-telaah atas karya sastra; dan sejarah sastra, menyangkut perjalanan sastrawan dan karya-karyanya)—baik secara sinkronis maupun diakronis.

Perkembangan Teori Sastra di Jawa Timur

Perkembangan teori sastra di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, memang tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Sebagaimana yang sering menjadi wacana umum bahwa dalam bidang ilmu sastra, kita belum pernah melahirkan teori sastra sendiri yang khas Indonesia, dan itu juga tidak terjadi di Jawa Timur. Dalam riset-riset yang dilakukan selama ini, baik tingkat strata 1, 2, dan 3 serta riset-riset mandiri dan

⁵² Selain bidang ilmu sastra, tentu ada juga bidang ilmu-ilmu lain yang tercakup di dalam ilmu budaya, misalnya ilmu seni, ilmu bahasa (linguistik), ilmu arkeologi, ilmu antropologi (budaya), dan kajian budaya (*cultural studies*).

kelompok, memang belum pernah tercipta teori dengan penamaan sendiri. Dalam strata 3 misalnya, mungkin baru sampai dalam tingkat proposisi-proposisi dan belum pada teori.⁵³ Mungkin ada elaborasi atas teori sastra di dalamnya, tetapi tidaklah muncul ke permukaan secara menonjol sebagai teori baru.

Merupakan suatu realitas pula, dalam konteks perkembangan teori sastra di Jawa Timur, berdasarkan pengamatan, tampak masih dalam taraf pemanfaatan teori-teori sastra saja yang ditransfer dari teori-teori sastra Barat (dari strukturalisme hingga post-modernisme). Teori-teori sastra yang ada, yang kesemuanya dari Barat, telah dijadikan sebagai "pisau" kajian dalam telaah-telaah sastra, sebagaimana yang dilakukan dalam telaah-telaah di fakultas-fakultas sastra di Jawa Timur.

Jika dicermati teori-teori sastra yang ada dan berkembang sekarang ini di Indonesia (khususnya di Jawa Timur), teori-teori sastra itu sebenarnya kebanyakan berasal dari Prancis. Hal itu karena memang ada perkembangan besar dalam teori sastra Prancis yang bertolak dari karya-karya sastra Prancis itu sendiri. Namun, kapan kah ada perkembangan teori sastra yang lahir dari telaah atas karya-karya sastra Indonesia—khususnya Jawa Timur? Lahirnya teori, memang ada kaitannya dengan corak karya, kualitas kritik atau telaah, dan kemampuan kritikus atau ilmuwan mengangkat sisi keilmuannya.

Perkembangan Kritik Sastra di Jawa Timur

Perkembangan kritik sastra (dan apresiasi sastra) di Jawa Timur mengalami perkembangan yang juga tidak cukup berarti. Namun jika dikomparasikan dengan perkembangan teori sastra, relatif memang lebih mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua tipologi kritik sastra di Jawa Timur, yakni (1) kritik sastra akademik dan (2) kritik sastra nonakademik. Kritik sastra akademik, dapat kita lihat dalam telaah-telaah

⁵³ Proposisi merupakan kebenaran yang belum teruji kebenarannya secara umum; teori merupakan kebenaran yang sudah teruji kebenarannya secara umum bersifat konseptual, sistematis, dan metodologis.

yang dikerjakan di berbagai fakultas sastra dan juga lembaga-lembaga penelitian yang mengkaji sastra. Adapun kritik sastra nonakademik (kewartawanan) dapat dilihat melalui kritik-kritik yang disajikan melalui media massa, diskusi, atau apresiasi nonilmiah.

Dalam perkembangan kritik sastra di Jawa Timur, para kritikus tidak hanya masih mayoritas menggunakan objek karya yang diterbitkan di luar Jawa Timur dan hanya sedikit saja yang mengambil objek sastra yang terbit di Jawa Timur—meskipun sekarang ini karya pengarang Jawa Timur melimpah. Di samping itu, hampir semua peneliti (mahasiswa) di berbagai fakultas di Jawa Timur juga melakukan kritik menggunakan teori dan metode yang serupa. Pekerjaan kritik sastra ini tentu saja sama juga dengan kota-kota lain di Indonesia. Namun, masalahnya, hasil kritik sastra (berupa telaah sastra) yang dilakukan, selama ini seluruhnya masih tersimpan (pada rujukan atau perpustakaan), dan masih belum ada yang tertarik menerbitkannya. Jadinya, hasil kritik akademik para kritikus akademik ini, hanya dinikmati terbatas pada lingkaran kecil saja dan tidak terpublikasi. Akibatnya, kita sulit melihat perkembangan kritik akademik ini. Sebenarnya, bagi hasil kritik sastra akademik yang berkualitas, mungkin perlu juga diterbitkan. Namun, lagi-lagi, pasti tidak akan ada penerbit yang tertarik menerbitkannya mungkin karena pertimbangan pasar.

Bagi penulis sendiri, publikasi sangat penting perannya dalam mensosialisasikan hasil-hasil kritik sastra akademik. Jika ini sudah dilakukan, peta perkembangan kritik sastra di Jawa Timur tentunya akan tampak lebih terang. Selama upaya itu tidak dilakukan maka selama itu pula kritik sastra masih akan tampak mendung)—belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Namun, tampaknya sedikit berbeda dengan perkembangan kritik sastra nonakademik karena, kritik ini banyak memanfaatkan media massa (ruang-ruang budaya) dan juga diskusi-diskusi yang relatif terbuka maka kritik ini cenderung tampak sepintas lebih berkembang. Media massa menjadi media efektif untuk melihat perkembangan kritik sastra (khususnya di Jawa Timur). Namun, secara jujur perlu dikatakan bahwa Jawa Timur masih belum memiliki kritikus-

kritikus yang handal atau menonjol. Hal ini barangkali disebabkan karena belum adanya orang yang secara khusus menekuni bidang ini.

Kritikus yang ada, tampak masih setengah hati untuk melakukan pekerjaan kritik sastranya. Misalnya, cerpenis menjadi kritikus, novelis menjadi kritikus, atau penyair menjadi kritikus. Dapat saja orang merangkap sekaligus, tetapi intensitas pekerjaan kritik sastranya haruslah dikerjakan secara optimal. Adapun hasil kritik nonakademik yang dihasilkan adalah berupa kritik atau esai sastra, dan juga timbangan buku. Hasil kritik ini tidak hanya dimuat pada koran-koran yang terbit di Jawa Timur, yang terbit juga di luar Jawa Timur.

Di samping itu, perkembangan kritik sastra ketika itu juga dapat dilihat dari terbitnya beberapa buku kecil atau jurnal sastra dan budaya sebagai produk dari forum-forum pencinta sastra (yang pernah ada), misalnya jurnal *Anarki*.⁵⁴ Namun, sayangnya lagi, karena tidak adanya dukungan, maka jurnal yang sebenarnya dapat menjadi aset itu sulit melanjutkan kesinambungannya. Teman-teman yang memiliki idealisme cukup bagus pada akhirnya juga kandas. Mungkin di Jawa Timur banyak terbitan yang mengalami nasib serupa. Dulu, seingat penulis, pernah juga ada majalah budaya *Kalimas*, yang kini sudah tidak ada kabarnya lagi. Hal ini juga mungkin di antaranya karena manajemen pengelolannya yang kurang profesional, sehingga sebaran jurnal belum menjangkau ke para pencinta sastra. Akan tetapi, yang paling menjadi faktor penyebab kemacetannya barangkali adalah kurangnya dukungan. Aset semacam ini sebenarnya perlu mendapatkan dukungan, sehingga kritik sastra dapat berkembang di Indonesia (khususnya di Jawa Timur). Kalau boleh penulis mengusulkan melalui tulisan ini, sangatlah perlu ada perhatian dari pihak-pihak tertentu (misalnya mungkin pemerintah daerah) yang membidangi seni budaya, terutama menyangkut dukungan fisik atau nonfisik tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Jurnal ini dulu terbit atas inisiatif teman-teman Forum Seni dan Sastra Luar Pagar, Surabaya.

⁵⁵ Bagi penulis, perlu ada perubahan paradigma dalam mengelola daerah bahwa yang perlu dikelola adalah tidak hanya aset yang membawa keuntungan finansial, tetapi juga aset-aset yang membawa keuntungan nonfinansial. Namun, perlu ada optimisme, kendatipun daerah-daerah di Jawa Timur ini lebih mengedepankan karakter sebagai kota perdagangan dan industri.

Perkembangan Sejarah Sastra di Jawa Timur

Di Jawa Timur, sampai tahun 2006, kendatipun mulai banyak bermunculan karya-karya sastra yang ditulis oleh sastrawan Jawa Timur, tetapi perkembangan sejarah sastra masih belum dapat dikatakan menggemirakan. Hal ini karena dari sekian banyak sastrawan dan karya sastra—yang ditulis—belum banyak yang karya-karyanya muncul sebagai karya-karya yang monumental, sehingga mudah terlupakan orang (*audiens*).

Dapat dikatakan, sampai tahun 2006, karya sastra yang monumental masih berada dalam karya-karya yang diciptakan dari kelompok sastrawan senior, seperti Budi Darma, Akhudiat, Suparto Broto, dan Zamawi Imran. Karya-karya para sastrawan itu masih menjadi ikon dalam khazanah sastra Jawa Timur. Kebesaran karya-karya *Orang-orang Bloomington*, *Olenka*, *Rafilus*, *Ny. Talis*, *Joko Tarub*, *Kremil*, *Clurit Emas*, masih belum tertandingi. Namun, di balik itu, sebenarnya juga sudah banyak geliat kreativitas sastra yang kemudian mewarnai sejarah sastra Jawa Timur. Munculnya, para sastrawan (entah penyair, novelis, cerpenis) dan karya-karya sastra yang ditulis oleh sastrawan, seperti Ratna Indraswari Ibrahim, Shoim Anwar, Aming Aminuddin, (almh.) Lan Fang, Mardi Luhung, Indra Tjahyadi, W. Hariyanto, S. Yoga, Mashuri, Aziz Manna, dan lainnya, mungkin menjadi generasi baru dalam perkembangan sejarah sastra di Jawa Timur.⁵⁶

Berdasarkan pengamatan, karya-karya yang paling banyak ditulis oleh sastrawan Jawa Timur akhir-akhir ini adalah berupa “puisi” dan “cerpen”. Ketika diadakan Festival Seni Surabaya (FSS) tahun 2004 yang diikuti dengan penerbitan antologi puisi, kita mengetahui ada banyak penyair yang teridentifikasi, yakni Amal Sejati, Anas Yusuf, Ayu Kartika Dewi, Beni Setia, Deny Tri Aryanti, Dian Aristya Dewi, F. Aziz Manna, Fina Lutfiana Rahmawati, H.U. Mardi Luhung, Herry Lamongan, Hidayat Raharja, Ibnu Hajar, Jeni Indri, Kardiman Suryono, Luska Vitri A., Helmy Prasetya, Muhlash MR, Mashuri, Muhammd Aris, Nursihati, Panji Kuncoro

⁵⁶ Perkembangan penciptaan karya sastra di Jawa Timur setelah tahun 2006 ini, tentu terus berkembang, dan bermunculan karya-karya baru.

Hadi, Pudwianto Arisanto, Puput Amiranti, Purnawan Setiawan, Putri Bafaqih, Timur Budi Raja, Ribut Wiyoto, Rio FR, S. Yoga, Saiful Hadjar, Salis Susmiati, ST Fatimar, Syaf Anton W, Taufiq Bahamisah, Tjahyono Widarmanto, Winarti, dan Widi Asy'ri.⁵⁷ Perlu disampaikan pula, bahwa di antara nama-nama penyair tersebut, ada juga yang sudah cukup lama bergelut dalam penulisan puisi dan ada juga yang baru terlibat dalam penulisan puisi.

Dari pengamatan diketahui, tidak semua penyair itu terus-menerus menulis puisi, ada yang datang dan pergi, serta ada juga yang konsisten terus-menerus menulis puisi. Di samping itu, ada satu perkembangan menarik dari karya yang mulai muncul, yang menandai satu komunitas penyair muda Jawa Timur, yakni pada Kelompok Forum Seni dan Sastra Luar Pagar yakni adanya kecenderungan karya-karyanya beraliran surealisme.⁵⁸ Mereka ini kebanyakan berasal dari alumnus atau jebolan Fakultas Sastra (sekarang: Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Airlangga Surabaya yang biasanya kumpul-kumpul di pinggir pagar utara Universitas Airlangga sambil menikmati kopi dan gorengan. Namun, yang cukup diacungi jempol, justru dari komunitas kecil itulah muncul para sastrawan kreatif (penyair dan cerpenis muda) yang karya-karyanya banyak tersebar pada media massa di Jawa Timur dan bahkan hingga tingkat kota-kota lain seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

Kemudian, ketika diadakan FSS 2005, juga diketahui ada banyak cerpenis Jawa Timur. Para cerpenis tersebut adalah Bonari Nabonelar, S. Yoga, M. Shoim Anwar, Ratna Indraswari Ibrahim, Leonardus Onny Wiranda, Mashuri, Tan Tjin Siong, Lan Fang, Dewey Setiawan, Anas Yusuf, A Elwiq Pr, Bagus Putu Parto, Sirikit Syah, dan M. Jupri.⁵⁹ Dari nama-nama tersebut, dapat diketahui ada cerpenis yang sebenarnya sudah senior dan

⁵⁷ W. Hariyanto dan Imam Muhtarum (Kurator), *Antologi Penyair Jawa Timur* (Surabaya: Panitia FSS, 2004).

⁵⁸ Tentang pendirian surealisme dari forum studi seni dan sastra ini dapat disimak juga dalam artikel-artikel yang tertuang dalam jurnal sastra dan budaya *Anarki*.

⁵⁹ Budi Darma (Kurator), *Black Forest: Antologi Cerpen Jawa Timur* (Surabaya: Logung Pustaka, 2005).

juga yang masih junior. Masing-masing cerpenis itu memiliki gaya dan warna cerpen berbeda. Namun, kecenderungan karya-karyanya memang sangat variatif, entah dari topik-topik cerpen yang diangkat ataupun sajian cerpennya. Namun, yang jelas, tidak ada yang kita dapat gunakan untuk menandai ke-Jawa Timur-an-nya. Walaupun mereka berasal dari Jawa Timur, tetapi karya-karyanya tidak bersifat lokalitas Jawa Timur.

Satu hal yang patut dicatat dan penulis sampaikan dalam perkembangan sejarah sastra di Jawa Timur sampai tahun 2006 ini adalah tidak banyaknya dukungan penerbit yang tertarik pada karya-karya sastra dan budaya.⁶⁰ Tidak seperti di Yogyakarta atau Jakarta, di Surabaya belum ada penerbit yang menaruh perhatian pada penerbitan karya-karya sastra. Penerbitan yang dilakukan sekarang ini di Jawa Timur masih terbatas berasal dari forum-forum studi, dewan-dewan kesenian, dan kepanitiaan lomba atau festival. Itu pun baru dalam oplah terbitan yang terbatas.

Sebenarnya, soal penerbitan ini, perlu ditangani secara serius, karena menyangkut dokumentasi karya; dan mungkin perlu juga setiap karya yang terbit itu didokumentasikan pada pusat-pusat dokumentasi, perpustakaan-perpustakaan, dan sejenisnya. Tidak hanya pusat-pusat dokumentasi sastra di tingkat nasional, juga di Jawa Timur (kalau memang ada). Hal ini penting dilakukan agar karya-karya yang ditulis tidak cepat terlupakan orang. Saya tidak tahu, apakah selama ini sudah dilakukan pendokumentasian atas karya-karya tersebut?

Kesadaran pentingnya dokumentasi di Jawa Timur hingga tahun 2006 ini, juga cukup rendah. Penulis hanya baru tahu bahwa hanya ada perpustakaan daerah, perpustakaan universitas, dan DKJT, yang mungkin mendokumentasi. Untuk mendokumentasikan karya-karya para sastrawan Jawa Timur ini tidakkah sebenarnya juga perlu pusat dokumentasi seperti Pusat Dokumentasi H.B. Jassin di Jakarta? Keberadaan pusat dokumentasi yang khusus mendokumentasi sastra dan budaya ini tentu ke depan penting artinya untuk melihat peta perkembangan (ilmu) sastra dan budaya di Jawa Timur. Ketiadaan dokumentasi, tentu

⁶⁰ Ini mungkin ada hubungannya dengan corak kota-kota di Jawa Timur yang lebih berorientasi pada perdagangan dan industri.

membuat apa yang dengan susah payah diciptakan oleh para sastrawan Jawa Timur sia-sia dan sirna begitu saja. Jika memiliki komitmen membina dan mengembangkan ilmu sastra dan budaya di Jawa Timur, tentunya perlu ada pusat dokumentasi sastra dan budaya. Persoalannya, siapakah yang bersedia memulai untuk mendirikan pusat dokumentasi sastra dan budaya ini? Apakah ini akan menjadi satu bagian dalam pembinaan ilmu sastra dan budaya?

Pengembangan Ilmu Sastra di Jawa Timur dan Kendalanya

Kendatipun perkembangan ilmu sastra di Jawa Timur masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan sampai tahun 2006, tetapi sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh institusi, komunitas, atau perorangan tertentu. Namun, dalam upaya itu, ada juga kendala-kendala yang cukup berarti, sehingga upaya-upaya yang dilakukan juga menghadapi hambatan yang perlu diatasi.

Selama ini, di Jawa Timur, sudah ada beberapa upaya pengembangan ilmu sastra. Beberapa di antaranya adalah melakukan (1) kajian-kajian ilmiah sastra di Perguruan Tinggi yang ada fakultas sastranya; (2) penulisan dan penerbit sastra kreatif (seperti oleh Dewan Kesenian Surabaya, forum studi, dan JP Books); (3) penulisan artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal ilmiah, (4) penulisan artikel sastra atau esai sastra; (5) diskusi-diskusi sastra; (6) bedah buku sastra; (7) pengabdian kepada masyarakat tentang sastra oleh kelompok dosen; (8) lomba penulisan sastra; (9) pentas teater dan apresiasinya; dan (10) festival seperti FSS.

Dalam upaya pengembangan ilmu sastra itu, masih banyak mengalami kendala. Kondisi kota yang lebih mementingkan bidang perdagangan dan industri, menjadi penyebab utama kurang mampu berkembangnya ilmu sastra. Kondisi kota yang kurang memberi ruang bagi perkembangan budaya, berekses pada kurangnya *support* atas kegiatan-kegiatan budaya (terutama sastra). Kurangnya kesadaran mendokumentasi karya sastra juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sastra di Jawa Timur. Ditambah lagi dengan belum adanya pusat dokumentasi sastra yang mampu mendokumentasi semua karya sastra sebagai karya budaya

Jawa Timur. Akibatnya, kalau kita ingin mengetahui perkembangan sastra dan budaya Jawa Timur tentu sangat sulit karena kita tidak tahu harus mencari informasi. Apalagi jika peneliti ingin mencari data, tentu kesulitan. Meskipun ada Dewan Kesenian Jawa Timur dan juga Dewan Kesenian Surabaya, mungkin dokumentasinya juga masih belum lengkap.

Kemudian, apresiasi masyarakat Jawa Timur memang masih kurang karena masih kuatnya pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa sastra masih belum dianggap sebagai bagian penting dalam hidupnya. Suatu realitas bahwa masyarakat memang masih mementingkan kebutuhan primer sehari-hari. Maka itu, perlu dimaklumi, masyarakat memang belum menjangkau (dari segi waktu dan finansial) untuk terlibat dalam aktivitas sastra dan juga budaya karena bidang sastra tidak menjanjikan dari segi finansial inilah barangkali mengapa kemudian jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan ini makin menyusut pada tahun itu. Penulis kira, jika menyangkut soal kecintaan ini nampaknya kita masih punya harapan. Artinya, mungkin masih banyak yang mencintai jurusan ini.

SDM dan Peran Kelembagaan dalam Ilmu Sastra di Jawa Timur

Sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam pengembangan ilmu sastra di Jawa Timur, memang rata-rata sudah menempuh strata 2, sebagian kecilnya masih berstrata 1, dan sebagian kecil ada juga yang sudah menempuh strata 3 dan menyandang jabatan guru besar. Komposisi SDM semacam ini mungkin tidak hanya tampak dalam bidang ilmu sastra, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang lain seperti budaya, bahasa, filsafat, dan agama.

Dari SDM, sebenarnya sudah tidak menjadi masalah, karena standar minimal untuk pengembangan ilmu sastra, sebenarnya sudah terpenuhi. Namun, persoalannya, apakah SDM yang ada ini kemudian tetap punya komitmen untuk mengembangkan ilmu sastra. Penulis melihat, sangat sedikit yang berkomitmen dalam pengembangan ilmu sastra, dan kebanyakan kemudian lebih menekuni sebagai praktisnya. Maksudnya, minat meneliti jauh lebih kecil daripada mengajar. Akibatnya, orientasi

terampil berbahasa (entah bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Belanda, Mandarin, dan sebagainya) lebih berkembang ketimbang menjadi pemikir bidang ilmunya.

Kelembagaan Bidang Ilmu Sastra

Ada dua kelompok kelembagaan di Jawa Timur yang berperan dalam pengembangan ilmu sastra. Kedua kelompok kelembagaan tersebut adalah kelembagaan akademik dan nonakademik. Kelembagaan akademik, meliputi semua fakultas sastra yang ada di berbagai universitas di Jawa Timur, di antaranya adalah Fakultas Sastra Unair Surabaya (yang sekarang sudah berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya), Fakultas Bahasa dan Seni Unesa Surabaya, Fakultas Sastra Untag Surabaya, Fakultas Sastra Unibraw Malang, Fakultas Bahasa dan Seni UNM Malang, Fakultas Budaya dan Humaniora UIN Malang, Fakultas Sastra Universitas Jember (sekarang Fakultas Ilmu Budaya), Fakultas Sastra Universitas Kristen Petra, dan seterusnya.⁶¹ Adapun jurusan yang tercakup di dalam masing-masing fakultas itu sangat bervariasi.

Di samping itu, ada juga lembaga-lembaga khusus yang turut berperan dalam mengembangkan ilmu sastra, yakni Balai Bahasa Surabaya (sekarang Balai bahasa Jawa Timur), Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT), dan Dewan Kesenian Surabaya (DKS). Di samping itu juga, terdapat forum-forum studi seni dan sastra, seperti Forum Seni dan Sastra Luar Pagar, serta Forum Lingkar Sastra. Kemudian, ada juga lembar-lembar budaya dalam media massa seperti *Jawa Pos* (Minggu), dulu *Surabaya Post* (Minggu), *Malang Post*, dan *Penyebar Semangat* (berbahasa Jawa), dan lainnya.⁶²

⁶¹ Mungkin masih banyak lembaga akademik lainnya di Jawa Timur yang belum disebutkan di sini, yang juga memiliki peran dalam pengembangan ilmu sastra di Jawa Timur.

⁶² Mungkin masih ada lembaga-lembaga nonakademik yang belum tercantum dalam tulisan ini, yang juga turut berperan dalam pengembangan ilmu sastra di Jawa Timur.

Penutup

Perkembangan dan pengembangan ilmu sastra di Jawa Timur sampai tahun 2006, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun demikian, aktivitas dan kreativitas bersastra (telaah sastra dan penulisan sastra kreatif) memang masih berjalan dan melahirkan para sastrawan muda. Hal ini mungkin saja sebagai kurangnya kritikus sastra yang berwibawa mampu membahas karya-karya sastrawan muda itu. Belum begitu signifikannya perkembangan dan pengembangan ilmu sastra di Jawa Timur mungkin disebabkan karena masih kurangnya dukungan instansi dan apresiasi atas karya-karya yang ada. Di samping itu juga karena belum adanya pusat dokumentasi sastra di Jawa Timur dan juga belum adanya penerbit yang menaruh perhatian serius pada ilmu sastra. Mungkin banyak karya ilmiah sastra yang sebetulnya menarik, tetapi tidak terpublikasi. SDM dan kelembagaan ilmu sastra sudah cukup memadai dari segi kuantitas, tetapi tampak belum dioptimalkan untuk menekuni bidangnya. Dunia akademik kurang tampak memberi andil bagi perkembangan ilmu sastra.

Perubahan Sosial pada Masyarakat Perkotaan dalam Cerpen Indonesia Mutakhir

Pengantar

Cerita pendek, merupakan satu bentuk genre prosa yang paling responsif terhadap problem dan dinamika kehidupan masyarakat,⁶³ khususnya masyarakat perkotaan. Entitas perkotaan sangat dominan menginspirasi pengarang dalam menuliskan cerpen-cerpen Indonesia mutakhir. Perkotaan, menarik bagi pengarang karena entitas ini ditandai dengan karakter masyarakatnya yang heterogen, diwarnai dinamika masyarakat yang cepat, serta mengalami kompleksitas kehidupan. Karena pengarang lebih banyak tinggal di perkotaan maka lingkungan sosial yang paling banyak digambarkan adalah lingkungan di mana pengarang hidup dan mengembangkan dirinya.

Dalam cerpen Indonesia mutakhir, sebagaimana di antaranya yang terhimpun dalam buku kumpulan cerpen Indonesia terbaik tahun 2008 dan 2009, tampak berbagai problematik kehidupan dialami oleh tokoh-tokoh cerita, baik tokoh utama, tokoh sekunder, maupun tokoh lainnya. Di dalam cerpen, tokoh-tokoh cerita tidak hanya dilukiskan menghadapi kondisi masyarakat yang berubah, namun juga tokoh-tokohnya yang mengalami pergulatan psikologis. Berbagai problematik yang diekspresikan dalam cerpen-cerpen Indonesia mutakhir, mencerminkan perubahan sosial masyarakat perkotaan yang juga semakin kompleks dan penuh tantangan.

⁶³ Lihat Robert Stanton, *An Introduction to Fiction* (New York: Chicago, San Francisco, Toronto, London: Holt, Rinehart and Winston, 1956), page 3–4.

Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam masyarakat perkotaan, secara pelan ataupun cepat, sebagai dampak dari corak kehidupan perkotaan yang juga semakin kompleks dan mengalami perubahan sosial yang sangat cepat.

Cerpen menjadi menarik dalam konteks perubahan sosial karena dalam dimensi sosialnya cerpen justru dapat menginformasikan berbagai perubahan sosial, khususnya masyarakat perkotaan. Berbagai fenomena terkini yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat perkotaan biasanya tidak lepas dari pengamatan dan penghayatan pengarang. Oleh karena itulah, untuk melihat fenomena terkini dari kondisi sosial masyarakat perkotaan, cerpen memiliki peran yang sangat penting karena bersifat responsif. Dalam dimensi sosiologis ini, cerpen tidak lagi diletakkan hanya sekadar sebagai fiksi, yang dalam anggapan umum acap kali dipandang hanya berisi khayalan pengarang.

Dalam perkataan lain, cerpen sebagai karya fiksi, tentunya tidak memotret dunia kehidupan masyarakat perkotaan begitu saja. Namun, dalam hakikatnya sebagai karya fiksi, cerpen di satu sisi hadir sebagai dunia baru yang imajinatif. Sebagai karya fiksi, cerpen mengandung kekuatan reflektif dan imajinatif sehingga realitas yang dicerminkan tidak lagi berupa realitas *an sich*, sesuai dengan yang ada dalam realitas empiris, tetapi sudah menjadi realitas baru di mana di dalamnya sudah bercampur interpretasi, gagasan, dan pemikiran pengarang sebagai pencipta karya sastra. Selain ada keterlibatan pengarang sebagai individu di dalamnya, cerpen dapat juga hadir sebagai ekspresi dari kelas atau kelompok sosial, sebagaimana yang diungkap salah satu tokoh para Marxis Lucien Goldmann dari Prancis.⁶⁴

Dengan demikian, memahami cerpen sesungguhnya secara tidak langsung juga berarti memahami perubahan sosial masyarakat yang terjadi. Jika cerpen itu diciptakan dalam konteks masyarakat perkotaan, kita pun secara otomatis akan memahami perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Sebab, dalam pemahaman sosiologi sastra,

⁶⁴ Lucien Goldmann, *Method in Sociology of Literature* (London: Blackwell, 1981), halaman 14.

sudah sering kita pahami bahwa sastra, sastrawan, dan masyarakat itu tidak dapat dilepaskan satu sama lain, ketiganya saling berkorelasi.⁶⁵

Perubahan sosial yang dilihat dari beberapa cerpen terpilih ini memang sangat kental mengungkap perubahan sosial masyarakat perkotaan di Indonesia. Dari pembahasan atas cerpen-cerpen tersebut akan dikonkretisasi berbagai bentuk perubahan sosial dengan perspektif sosiologi sastra.

Cerpen Indonesia Mutakhir dan Perubahan Sosial

Dalam perkembangan kesusastraan Indonesia, cerita pendek merupakan salah satu bentuk prosa yang banyak ditulis pengarang Indonesia. Kita tentu telah mengetahui, cerpen sudah ditulis sejak masa kesusastraan Balai Pustaka (BP), bahkan mungkin sudah ada jauh sebelum itu. Dalam masa-masa selanjutnya, yakni dalam masa kesusastraan Pujangga Baru (PB), masa kesusastraan tahun 45-an, 66-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Bahkan pada masa kesusastraan tahun 2000-an, cerpen dapat dipandang paling mendominasi perkembangan kesusastraan Indonesia. Dalam hal ini, media massa cetak merupakan wahana yang paling mendukung perkembangan penciptaan cerpen. Hampir seluruh terbitan di Indonesia menyediakan ruang budaya. Sekarang ini, di Indonesia, koran-koran budaya berperan sebagai legitimator sastra. Cerpen-cerpen terbaik dinilai dari kualitas cerpen yang pernah diterbitkan di media koran.

Dengan demikian, cerpen terbaik pasti berasal dari cerpen yang pernah diterbitkan di salah satu koran, yang dianggap telah mendapat pengakuan publik. Kecuali hasil sayembara, cerpen yang dinilai sebagai cerpen terbaik tidak akan pernah muncul dari karya yang tidak pernah dimuat di koran. Konon, sekarang ini, buku-buku kumpulan cerpen juga baru dapat diterbitkan manakala memuat sekitar 60% cerpen yang pernah diterbitkan di koran. Mungkin tidak hanya cerpen yang mendapat legitimasi melalui koran, juga karya puisi dan novel. Novel yang terbit

⁶⁵ Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984) halaman 2-4.

biasanya diawali sebagai cerita bersambung yang dimuat di koran. Di sini teks drama agak berbeda, karena biasanya dilegitimasi melalui pentas yang telah dilaksanakan oleh kelompok teater.

Perlu disampaikan di sini bahwa cerpen-cerpen yang diterbitkan di media massa, biasanya sarat dengan pengungkapan gambaran perubahan sosial yang terjadi. Untuk itulah, dalam melihat perubahan sosial terkini yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, digunakan beberapa cerpen terbaik yang sebelumnya pernah diterbitkan di media massa.

Gambaran Perubahan Sosial pada Masyarakat Perkotaan dalam Cerpen

Untuk melihat perubahan sosial pada masyarakat perkotaan dalam cerpen digunakan dua kumpulan cerpen Indonesia terbaik 2008 dan 2009. Dari kumpulan cerpen terbaik 2008, diambil dua buah cerpen, yakni karya Gus tf Sakai berjudul "Kami Lepas Anak Kami" dan Lan Fang berjudul "Dua Perempuan". Dari kumpulan cerpen terbaik 2009, diambil satu buah cerpen, yakni karya Putu Wijaya "Suap".

Dalam cerpen Gus tf Sakai yang berjudul "Kami Lepas Anak Kami", dikisahkan tentang kekhawatiran orang tua pada anaknya yang tampak tumbuh bagaikan mesin. Kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini dipandang pengarang telah terdehumanisasi, membuat anak-anak tampak bukan lagi sebagai anak manusia. Karakternya seakan terbentuk bagaikan mesin, sebab sejak kecil anak sudah dijejali dengan buku-buku, tugas-tugas, dan pekerjaan rumah secara berlebihan. Dalam kondisi pendidikan seperti ini, kita terkadang lupa bahwa mendidik anak tidak harus dengan memaksa berlebihan seperti itu. Dari sudut psikologi perkembangan, anak tentu saja memerlukan dunianya, menikmati dunia anak dan dunia bermain. Lewat cerpen ini, pengarang melontarkan perubahan sosial tentang adanya kondisi pendidikan anak semacam itu. Jika hal itu terus terjadi, akan membuat anak-anak Indonesia menjadi pintar tetapi kehilangan kemanusiaannya. Dalam cerpen Gus tf Sakai tersebut dapat disimak dalam petikan berikut ini.

"... Telah berapa ratus bukukah yang bertimpa masuk ke kepalanya? Atau telah berapa ribukah? Dan, telah sejak kapankah? Sejak TK? Atau sejak sebelum sekolah? Kami tak ingat. Tetapi, sampai di usianya kini, 10 tahun, kelas 5 SD, hampir tak ada waktu yang ia lewati tanpa menulis atau membaca buku. Di sekolah. Di rumah. PR-PR itu. Tak henti-henti tak putus-putus⁶⁶

Kondisi pendidikan semacam itu cenderung membuat tindak-tanduk dan karakter anak tampak terbangun seperti mesin. Inilah persoalan utama yang dilihat dalam masyarakat perkotaan kini. Belum lagi anak harus mengikuti les-les yang juga memberikan tugas-tugas pada anak.

Lan Fang dalam cerpennya berjudul "Dua Perempuan", menyajikan kisah tentang seorang perempuan kota yang lebih suka memilih lelaki yang sudah mapan walaupun sudah tua dan bapak-bapak. Perempuan yang dikisahkan ini lebih rela dikawini oleh lelaki mapan walaupun sudah beristri, ketimbang harus menikahi lelaki muda yang belum jelas penghasilannya. Ini adalah satu gaya hidup perempuan kota yang mencoba hidup realistik dan tidak lagi menganggap penting cinta romantis. Perbincangan terjadi antara perempuan yang satu dan yang lain dalam kamar yang berbeda di hotel.

"Selisih usia kami memang jauh. Bapak sudah lima puluh lima tahun dan usiaku dua puluh lima tahun"... Tetapi enak kok, Mbak, kalau punya suami yang usianya lebih tua. Bisa ngemong dan lebih pengertian." sambungnya santai. "Bapak juga sangat adil dalam membagi waktu, perhatian dan keuangan.... Kukatakan bahwa aku adalah perempuan yang paling berbahagia ketika dikawini bapak. Walaupun pada saat mengenal bapak, aku sudah mempunyai pacar yang seusia denganku⁶⁷

Jika kutipan itu dicermati, tampak terjadi pergeseran yang sangat radikal pada keinginan perempuan di perkotaan yang tengah menghadapi hidup yang dipenuhi berbagai kebutuhan. Meskipun perempuan itu sadar dengan keberadaan dirinya yang masih muda, tetapi ia tetap memilih lelaki yang bapak-bapak. Ia menertawai kalau ada yang bilang cinta bisa bikin mati merana.

⁶⁶ Sakai, Gus tf. "Kami Lepas Anak Kami", dalam *20 Cerpen Indonesia Terbaik 2008* (Jakarta: Pena Kencana, 2008), halaman 86–87.

⁶⁷ Lan Fang, "Dua Perempuan", dalam *20 Cerpen Indonesia Terbaik 2008* (Jakarta: Pena Kencana, 2008), halaman 121.

"Aku bisa tertawa kalau ada yang bilang cinta bisa bikin orang mati merana. Yang benar adalah orang bisa mati kalau tidak punya uang. Karena itulah, aku memutuskan untuk menerima lamaran bapak dan memutuskan pacarku yang kerjanya saja masih tanda tanya. Walaupun ia lebih pantas menjadi bapakku daripada suamiku, tetapi yang jelas hidupnya sudah mapan. Daripada pacarku yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Kapan aku bisa menikmati libur ke luar negeri, mobil mahal, dan rumah mewah? Aku tidak mengurangi jatah istrinya. Karena milik bapak sudah berlimpah ruah. Aku hanya mengambilnya sedikit. Kurasa aku tidak salah".

Begitulah terjadinya perubahan pada perempuan di perkotaan yang pikirannya lebih dipenuhi dengan keinginan-keinginan material di tengah godaan kemewahan kota.

Cerpen Putu Wijaya yang berjudul "Suap", mengisahkan tentang fatalnya seseorang lelaki yang terpaksa berniat menerima suap. Ini padahal baru berupa niat untuk mau menerima suap atau disuap yang berakibat ia mengalami masalah dan membuat dirinya ditangkap. Lelaki itu semula memang begitu takut menerima suap, namun sekaligus suap itu menggodanya karena mengingat dirinya yang tidak berharga karena miskin. Ia ingin dihargai oleh anak dan istrinya jika memiliki uang sehingga bisa membelikan sepeda motor dan memperbaiki rumah sama dengan tetangganya.

Di dalam cerpen ini dikisahkan bahwa cukup banyak lelaki di perkotaan yang minder hanya karena dirinya miskin. Dan ketika ia ingin menjadi kaya dengan cara yang tidak halal, ia menerima celaka. Lelaki yang ingin cepat kaya dengan menerima suap itu kemudian justru terperosok ke dalam kegelapan hidup. Ia mengira istri dan anaknya mengharuskan dirinya kaya, padahal istrinya tidak capek miskin.

"Aku tidak capek karena kita miskin, tapi karena aku sakit. Aku juga sudah mulai tua sekarang, Bang. Aku diam karena tidak mau memberati perasaan Abang. Bukan apa-apa. Aku tidak mau Abang memaksa diri menerima suap hanya untuk menyenangkan hatiku. Jangan. Aku masih kuat menderita kok. Masih banyak orang lain yang lebih jelek nasibnya dari kita".⁶⁸

⁶⁸ Putu Wijaya, "Suap", dalam *20 Cerpen Indonesia Terbaik 2009* (Jakarta: Pena Kencana), halaman 127.

Di tengah gemerlapnya godaan kota, dikisahkan ternyata masih ada perempuan yang tidak silau dengan kekayaan. Dalam benak lelaki kota ada pemahaman bahwa untuk membahagiakan keluarganya harus dengan uang dan kekayaan. Oleh karena itu, acap kali iman lelaki perkotaan tertantang dan terkadang menjadi goyah dari apa yang semula diyakininya. Uang telah menjerumuskan diri lelaki yang berambisi mau cepat kaya dengan jalan yang tidak halal. Cerpen ini seperti memperingatkan kita agar tidak silau dengan uang dan kekayaan serta mengabaikan nilai hidup yang harus dipertahankan dan diperjuangkan.

Respons dan Pemikiran Pengarang dalam Cerpen

Tiga cerpen yang dibahas ini merupakan sebagian gambaran dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Tiga cerpen tersebut mencoba merespons kondisi sosial yang ada dalam masyarakat dewasa ini. Fenomena anak yang dijejali dengan pelajaran dan menyita waktu istirahat dan bermainnya, menjadi realitas sosial yang memang tampak dalam masyarakat perkotaan dewasa ini. Kondisi ini mengkhawatirkan para orang tua tetapi juga bangsa yang mendambakan anaknya untuk dapat tumbuh sesuai potensi dirinya dengan kondisi pendidikan yang bernuansa manusiawi, tanpa harus dijejali dengan pelajaran dan tugas-tugas yang justru membuat anak tumbuh dengan karakter seperti mesin. Pengarang memikirkan nasib anak bangsa ke depan agar tumbuh menjadi insan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang baik sebagai manusia.

Selain merespons kondisi pendidikan anak, pengarang juga merespons adanya perempuan perkotaan yang hidup terlalu realistis dan materialistis. Pengarang dengan kisah cerpennya, sebenarnya secara implisit menyampaikan ironi kehidupan seorang perempuan di tengah masyarakat perkotaan yang diiming-imingi uang dan kekayaan. Di sini pengarang mengajak perempuan untuk menyadari kembali dan menanyakan kepada dirinya bahwa haruskah perempuan menjalani kehidupan materialis hanya karena memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup. Perempuan diajak berpikir lebih panjang dan agar mampu menentukan teman hidup berdasarkan cinta yang seharusnya.

Dalam cerpennya yang lain, ada juga direspons tentang kuasa uang yang membuat orang melupakan apa yang sebelumnya diyakini. Melalui cerpen ini, sepertinya pengarang mengajak kita untuk tidak diperalat dengan uang, sebab jika sudah diperalat kita pasti akan terjerumus ke dalam kegelapan hidup. Pengarang menyampaikan amanat bahwa kitalah yang seharusnya mengatur uang dan bukan sebaliknya kita yang diatur uang.

Penutup

Sebagai akhir dapat dikatakan bahwa cerpen-cerpen Indonesia mutakhir merespons problematik terkini yang perlu direnungkan dan dipikirkan pemecahannya. Problematik yang dikemukakan merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan dewasa ini. Di sini pengarang memberikan pemikiran yang berguna untuk penyadaran masyarakat perkotaan agar tidak terjebak dalam godaan hidup yang mudah menjerumuskan kita. Satu hal prinsip lagi yang disampaikan pengarang melalui cerpen-cerpennya bahwa dalam menjalani hidup senantiasa diingatkan agar kita tidak mengabaikan proses menjadi manusia. Betapapun pintar dan kayanya seseorang, sisi kemanusiaan merupakan satu hal yang sangat utama dalam hidup ini.

Urgensi Masyarakat Sastra dalam Perkembangan dan Pengembangan Sastra

Pengantar

Pertama-tama, penulis ingin menegaskan pelbagai wacana yang pernah ditulis dan kita baca dalam berbagai buku kritik dan apresiasi sastra bahwa perkembangan dan pengembangan sastra, sungguh amat ditentukan oleh respons masyarakat sastra. Pengarang, kritikus sastra, teoretisi sastra, penerbit, dan apresiator sastra pada umumnya adalah jalinan-erat yang tak dapat diabaikan jika memperbincangkan revitalisasi sastra. Unsur yang satu dengan yang lain harus dapat berjalan simultan, dan peniadaan salah satu di antaranya akan berekses stagnasi. Karena itu, sastrawan, kampus, dan penerbit harusnya saling menjadi kerabat. Sastrawan akan mati secara pelan atau cepat jika mengabaikan jalinan itu. Sebaliknya, kritikus sastra, juga akan tak ada artinya jika tak ada pengarang; dan begitu seterusnya. Betapa pun besarnya ciptaan karya sastra, jika tak ada pembaca yang membaca, mengapresiasi, dan merespons niscaya karya tersebut hanya akan menjadi *artefact* 'benda mati'.

Untuk itu, sastrawan yang mencipta harus sadar-diri sebagai bagian dari masyarakat sastra. Ia harus sadar memiliki kebebasan mencipta (*licentia poetica*), tapi harus sadar pula bahwa ada komunitas-komunitas lainnya di tengah masyarakat selain dirinya. Maka itu, sebagai pengarang, ia harus sadar pada kontekstualitas dan universalitas. Banyaknya respons pembaca (yang menulis), acap kali menjadi salah satu ukuran bagusya kualitas karya. Masih ingatkah ketika terbitnya *Para Priyayi* Umar Kayam? Dalam waktu tak lebih setahun, hampir 60 karya kritik ditulis oleh esais sastra. Karya itu memiliki sejarah. Adalah suatu kenyataan pula

betapa banyaknya karya diterbitkan tak ada yang memberi komentar. Itu pertanda, karya itu tak memiliki sejarah. Keterpengaruhannya karya itu pun dengan sendirinya juga tak akan ada di tengah masyarakat.

Namun, realitas lain juga menunjukkan bahwa banyak pengarang baru menulis jika ada lomba. Kemenangannya acap kali kemudian dianggapnya sebagai puncak. Artinya, masih belum banyak pengarang yang menulis karena kebutuhan atau obsesi dari dalam karena persentuhannya dengan realitas kehidupan. Banyak juga yang suka bermain kata-kata dan tak peka terhadap lingkungan sekitar, kendatipun sastra itu adalah permainan bahasa (*language game*). Dengan tetap menaruh rasa hormat pada para sastrawan kita, kita bisa mengomparasi dengan William Shakespeare, sastrawan Inggris, menulis dengan mengerahkan segalanya sebagai sastrawan. Responsif terhadap lingkungan dan juga dengan penghayatan keempuannya.

Intinya, sastrawan juga manusia yang pasti hidup bersama masyarakat, mengalami kehidupan sekitarnya, dan mencurahkan kediriannya secara terus-menerus ke dalam dunia kehidupan (*labenswelt*). Apa pun yang terjadi, akan menjadi bahan perenungan, refleksi, dan terpercik pikiran-pikiran alternatif. Karena itu, karya sastra yang lahir, selalu saya pahami sebagai karya budaya manusia yang hidup di bumi.

Komunitas Kampus sebagai Apresiasi Sastra

Dalam hubungan ini penulis ingin menyatakan bahwa karya sastra adalah karya yang terbuka, yang dapat dibaca oleh siapa pun, tanpa harus orang sastra. Ini karena pada hakikatnya semua manusia memiliki potensi sebagai makhluk bersastra (*homo fabulans*) sebagaimana halnya setiap manusia butuh hiburan. Dunia sastra bukan monopoli orang sastra. Maka itu, setiap orang juga berhak melakukan kontestasi hasil apresiasinya. Hanya saja, perlu penulis sampaikan, ada tingkatan-tingkatan membaca sastra, yang kemudian menjadi penanda asal dan latar dari komunitas manakah pembaca-pembaca itu.

Setidaknya ada tiga tingkatan yang dimaksud, yakni (1) pembaca yang menikmati, (2) pembaca yang memahami secara mendalam, dan (3)

pembaca yang sampai mengangkat sisi keilmuannya. Pembaca umum, adalah pembaca yang mampu menikmati dan mungkin sampai taraf memahami secara mendalam. Namun, komunitas kampus tentu tak sekadar pembaca umum yang hanya memahami secara mendalam seperti itu saja, tetapi juga dituntut sampai pada kemampuan mengangkat sisi keilmuannya. Ini karena komunitas kampus dilatari oleh bekal pembacaan ilmu sastra (teori, metode, dan sejarah sastra). Di sini sastra diandaikan sebagai objek estetik, yang setara dengan objek-objek kajian bidang lainnya.

Dalam komunitas kampus, karya sastra dipelajari, dianalisis, dan diinterpretasi berdasar berbagai pendekatan yang kesemuanya bermuara pada proses pemaknaan. Karena karakteristik sastra yang khas dan berurusan pada bagaimana pembaca memberi atau memproduksi makna maka kajian sastra jelas apostivistik. Kajian sastra tak dilakukan secara matematis, eksak, tapi penuh varian, plural, dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif. Dalam prosesnya juga harus melibatkan subjektivitas penghayatan, imajinasi, dan kemampuan interpretatif yang *unlimited*. Maka, teori hermeneutis, mau tak mau harus dikuasai oleh penginterpretasi. Seorang penginterpretasi dapat saja menginterpretasikan karya di luar apa yang tak terbayangkan sastrawan ketika mencipta karyanya. Kajian ilmiah atas sastra—juga dengan demikian—dilakukan dengan keilmiahannya sendiri. Artinya, objektivitas atau keilmiahannya kajian sastra harus mendapat pengakuan, karena cara-cara yang dilakukan memenuhi syarat keilmiahannya (menggunakan teori dan metode).

Dalam konteks itu, seorang pembaca komunitas kampus dilihat dari cara kerjanya berperan sebagai analis akademik, yang bisa juga menjadi kritikus akademis atau nonakademis. Ia mampu mengkaji sastra dan sekaligus mampu melakukan penilaian atas karya yang dikajinya. Atas perannya ini, idealnya seorang kritikus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang sastrawan sehingga ia dapat menunjukkan kelemahan dan kelebihan karya yang dihadapinya. Belum proporsionalnya peran kritikus sastra, membuat sastrawan tak mendapat masukan dari kritikus untuk meningkatkan karyanya.

Kurikulum Sastra

Sebagaimana dikemukakan, untuk menyiapkan diri sebagai analis dan kritikus sastra, diperlukan pendidikan yang terencana. Komunitas kampus sastra, merupakan komunitas yang mencoba membangun kemampuan-kemampuan itu agar dapat merespons karya sastra yang ada. Untuk itu, di fakultas sastra, ada berbagai mata kuliah, seperti puisi, prosa, drama, teori sastra, metode penelitian sastra, sastra bandingan, sejarah sastra, apresiasi sastra, sosiologi sastra, psikologi sastra, seminar sastra, dan kritik sastra. Selain itu, masih ada juga penulisan sastra kreatif dan dramaturgi. Juga, mungkin justru sangat penting sebenarnya ada mata kuliah hermeneutika sastra karena semua proses analisis yang dilakukan harus punya fundamen yang kuat dalam cara-cara menginterpretasi.

Kurikulum tersebut, tentunya akan lebih baik lagi jika dalam proses pelaksanaannya juga melibatkan unsur-unsur masyarakat sastra. Ini penting, supaya akademikus sastra tak hanya berhadapan dengan karya semata-mata, tapi juga perlu melibatkan sastrawan dan penerbit. Dalam proses tersebut, menghadirkan sastrawan dan penerbit dapat membantu dalam memperkaya kompetensi pembelajaran sastra. Fakultas sastra, yang mengelola pendidikan ini, sekali waktu perlu mendatangkan dosen tamu, pada mata kuliah-mata kuliah yang memang membutuhkan. Semakin sering mendatangkan dosen tamu, tentu semakin bagus untuk kompetensi.

Penutup

Dalam hal ini, penulis menawarkan cara pengembangan dan pengembangan sastra yang bersinergi. Keunggulan karya sastra harus diimbangi oleh hasil telaah atau kritik yang unggul juga. Penerbit juga harus turut memainkan peran dalam perkembangan dan pengembangan sastra. Antarunsur masyarakat sastra itu harus punya wahana agar dapat berkomunikasi secara berkesinambungan.

Kritik Sastra Indonesia dalam Idealitas Siklus Ilmu Sastra

Pengantar

Dalam tataran teoretis, *kritik sastra* diposisikan sebagai salah satu dari *triangle* ilmu sastra yang disandingkan dengan *teori sastra* dan *sejarah sastra*. Ketiganya (*kritik sastra*, *teori sastra*, dan *sejarah*) diandaikan sebagai sebuah siklus yang saling mengisi dan *counterpart*. Jika sinergisitas ketiganya dapat berjalan normal, fungsional, dan optimal maka di situlah kemajuan ilmu sastra akan tercapai. Kemajuan tersebut diharapkan berimplikasi bagi peningkatan kualitas penciptaan karya sastra (entah puisi, prosa, atau drama). Idealitas itu dijadikan pijakan dalam pembelajaran sastra pada bidang ilmu susastra di berbagai perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun luar negeri.

Implikasi lebih jauh juga, diharapkan ada sinergi antara pengarang (*authors*) dengan kritikus sastra. Keduanya seharusnya saling membutuhkan, bahwa karya sastra harus ada yang mengkritisinya dan sebaliknya tak mungkin kritikus berkreativitas tanpa karya sastra. Namun, sudahkah keduanya berlaku seperti itu? Ataukah sampai saat ini keduanya saling bertolak punggung? Artinya, pengarang merasa tak memerlukan kritikus setelah karyanya diterbitkan, dan kritikus tak terlalu jelas untuk apa mengkritik karya tertentu? Tentu saja, idealnya, pengarang dan kritikus yang baik, memandang perlu sinergisitas itu.

Fenomena Stagnasi Kritik Sastra

Fenomena stagnasi kritik sastra yang banyak diwacanakan, entah di forum-forum sastra atau media, sebenarnya bukan hal baru karena penulis sendiri sudah mendengar fenomena itu pertama kali ketika di penghujung tahun 1980-an ketika dilaksanakan seminar kritik sastra Indonesia di Yogyakarta. Pada saat itu, dalam acara khusus membicarakan kritik sastra Indonesia, berkumpul sejumlah pengarang, kritikus, dan ilmuwan sastra. Penulis masih ingat ketika itu di antaranya ada Umar Kayam, Danarto, Subagio Sastrowardoyo, dan A.A. Navis.

Mereka semua memikirkan bagaimana mengatasi stagnasi kritik sastra Indonesia. Nampaknya, kegalauan dan kegelisahan pada kritik sastra mereka itu tetap ada sampai saat ini, bahwa sampai saat ini diwacanakan belum ada lahir kritikus sastra dan hasil kritik sastra yang berwibawa selain H.B. Jassin (paus sastra kita). Nama H.B. Jassin sang paus sastra kita itu nampaknya mengental menjadi mitos, seperti tak tertandingi. Kendatipun sesungguhnya telah ada juga kritikus dengan hasil-hasil kritiknya, seperti yang dilakukan Yakob Sumardjo, Korrie Layun Rampan, Dami N. Toda, Maman S. Mahayana, dan sebagainya. Namun, setiap kali orang menyebut kritik sastra maka nama H.B. Jassin tetap tak terkalahkan.

Dambaan hasil kritik sastra yang bagaimana yang sesungguhnya diharapkan dari para pengamat atau pengarang? Mula-mula, tentunya kita tak menyatakan tak ada kritik sastra di Indonesia. Sebab yang disebut sebagai kritik sastra sekarang ini tak hanya kritik sastra model sebagaimana yang dikerjakan H.B. Jassin. Ada hasil kritik yang lahir dari dunia akademis dan dari dunia jurnalistik. Pada dua wilayah pemroduksi hasil kritik sastra itu mungkin terdapat problem sehingga gaungnya kurang terdengar. Ironisnya, dua wilayah itu kemudian dilabeli *kritikus akademik* (dengan hasil kritik akademiknya) dan *kritikus sastrawan* (dengan hasil kritik esainya). Tampaknya, keduanya belum cukup diakui ampuh dalam mengkritik karya sastra Indonesia. Bahkan sangat kuat pula ada anggapan bahwa dunia kritik sastra dipandang jauh ketinggalan dari dunia penciptaan karya sastra. Begitu banyak karya-karya sastra yang

lahir namun tak cukup banyak kritik sastra yang lahir yang mengimbangi. Inilah kondisi yang sering diwacanakan di mana-mana.

Penulis menjadi bertanya, di manakah sebenarnya letak persoalannya? Apakah pada karya sastranya ataukah pada hasil kritik sastranya? Mungkin, sementara, keduanya, seharusnya saling introspeksi? Sebab, tentunya pengarang tak serta-merta menyalahkan kritikus sastra, karena sangat mungkin karena problem ada di pengarangnya. Contohnya, kalau ditilik dari banyaknya karya sastra yang terbit memang bisa di-"iya"-kan. Namun, apakah karya-karya yang terbit itu cukup menginspirasi untuk mengkritisi? Sebab, dalam dekade ini, banyak juga karya sastra yang ditulis hanya sebagai "akrobat kata-kata", "kenikmatan pengarangnya", dan sebagainya sehingga kurang mampu memancing minat kritikus untuk mengkritiknya.

Jausz, teoretikus reseptif, menyatakan bahwa karya yang baik dan berkualitas pasti memiliki sejarah. Karya Umar Kayam berjudul *Para Priyayi* misalnya, begitu lahir langsung dikritisi oleh para kritikus sastra. Ini terjadi juga dalam karya-karya Chairil Anwar, Iwan Simatupang, Dee Lestari, dan sederet karya yang dipandang membawa pembaruan. Namun, tentu banyak karya-karya sastra yang lahir sepi peminat kritikus sastra walau sebagai pemenang lomba penulisan novel sekalipun, seperti karya Dewi Sartika.

Mencari Akar Permasalahan

Terjadinya stagnasi kritik sastra Indonesia, tampaknya perlu dicari akar permasalahannya. Mungkin terletak pada kritikusnya sendiri dan mungkin juga pada pengarangnya. *Pertama*, untuk menghasilkan hasil kritik yang berwibawa, tentu butuh kritikus yang handal dan dedikatif. Tidak hanya mengkritik secara sambil lalu, atau mengkritik jika ingat saja, atau tiba-tiba. Seorang kritikus mau tidak mau memerlukan seperangkat kemampuan menyangkut: kemahiran menulis, pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, kecemerlangan imajinasi, ketajaman intuitif, dan sejenisnya. Bahkan, ekstremnya, mungkin perlu keterlibatan partisipatif kritikus pada karya yang dikritiknya. Hasil kritik yang dibuat juga perlu dipublikasikan

karena tanpa itu orang tak akan pernah tahu apa yang dikerjakannya. Mungkin banyak hasil kritik yang bagus (di dunia akademis) tapi kalau tak sampai dipublikasikan, tentu akan bernasib sama. Kondisi ini mungkin turut menjadi penyebab stagnasi kritik sastra.

Kedua, kapabilitas pengarang juga dipertanyakan jika karya-karya yang dilahirkan tak mampu menghadirkan inovasi-inovasi kreatif. Di sini juga diperlukan dedikasi pengarang, yang menulis tidak hanya sekedar menulis atau berakrobat kata-kata dan asyik sendiri karena idealnya memang karya sastra itu ditulis oleh pengarang yang punya gagasan, berpikir untuk kebaikan dunia, kemanusiaan, dan sejenisnya. Karya-karya "masturbasi" semacam itu tentu tak menginspirasi kritikus untuk mengkritiknya. Maka itu, seharusnya ada inspirasi dari karya karena kata Budi Darma kritik sastra itu adalah "penemuan sambil berjalan".

Penulis meyakini bahwa hasil kritik sastra itu adalah karya baru atau karya kreatif. Maksudnya, kritikus itu juga sesungguhnya adalah "pengarang" juga yang menulis karya baru atau sebagai karya kedua yakni karya kritik sastra. Ini penting, karena acap kali kebesaran karya dan juga pengarangnya disebabkan karena kemampuan brilian dari kritikus sastranya untuk mengkritisi karya tertentu sehingga diakui atau tidak, harus ada relasi antara pengarang, kritikus, dan juga ilmuwan sastra.

Kesalingpahaman atas dunia kepengarangan, kritikus, dan ilmuwan itu mungkin dapat menjadi solusi untuk keluar dari stagnasi kritik sastra kita. Maka tak heran jika para kritikus itu sekaligus adalah pengarang dan atau ilmuwan sastra. Di sini saya ingin menyatakan bahwa tak adanya kesalingpahaman antarsemua itu cenderung menghasilkan hubungan oposisi antara pengarang dengan kritikus dan ilmuwan sastra. Mereka merasa berdiri sendiri-sendiri, tanpa pernah dapat disinergiskan. Ini tentunya cenderung menghasilkan atmosfer perkembangan sastra yang kurang baik. Jadi, untuk kemajuan pengembangan sastra, khususnya di Indonesia, diperlukan kearifan antara pengarang dan kritikus untuk saling bersinergi, bukan saling beroposisi.

Penutup

Kritikus dan pengarang perlu memiliki kerelaan untuk saling mau membaca karya masing-masing. Kritikus tentu harus membaca karya sastra dari pengarang dan pengarang pun harus mau juga membaca karya kritik dari kritikus sastra. Oleh karena itu, karya kritik harus sampai kepada pengarang. Sebab, tanpa itu, mungkin kebermanfaatan karya kritik yang ditulis kritikus kurang dapat dirasakan oleh pengarang. Seperti pernyataan klasik, bukankah salah satu tujuan dibuatnya hasil kritik sastra adalah untuk peningkatan kualitas karya pengarang? Maka itu, kritikus sastra sedapat mungkin mengusahakan agar hasil kritiknya sampai pada pengarang yang dikritiknya, selain dibaca oleh pembaca yang luas. Ini mungkin perlu ditradisikan jika kita memiliki komitmen dalam pengembangan sastra kita.

Karya Sastra sebagai Sumber Sejarah Bangsa

Pengantar

Karya sastra merupakan karya yang kompleks dan multidimensional. Ini pulalah yang membuat A. Teeuw⁶⁹ menyatakan karya sastra sulit didefinisikan. Sampai saat ini sedemikian banyak para teoretisi dan ahli sastra yang berusaha untuk mendefinisikan atau memberikan pengertian terhadap karya sastra. Namun, definisi dan pengertian yang diberikan mereka, selalu saja tidak berkecukupan bagi sebuah eksistensi sastra. Oleh karena itu, sastra memang tidak akan pernah dapat didefinisikan secara tunggal (*an sich*) karena karakteristik sastra sangat dinamik, berubah dari masa ke masa. Pada saat tertentu, misalnya orang sudah berupaya mendefinisikan dan pada saat berikutnya muncul karya sastra baru sehingga definisi yang dirumuskan sudah tidak memadai lagi, menuntut dilakukannya redefinisi atas keberadaan karya sastra yang baru tersebut. Begitu terjadi seterusnya sehingga—mungkin dapat dikatakan—sampai kapan pun karya sastra memang sulit didefinisikan secara tunggal sebagai sebuah definisi yang disepakati bersama. Oleh karena itulah, langkah yang seharusnya kita lakukan untuk memahami karya sastra bukanlah mendefinisikan karya sastra tersebut, tetapi mengenali dan memahami sifat-sifat dari karya sastra tersebut.

Keniscayaan sulitnya mendefinisikan karya sastra tersebut, tentu saja karena memang senyatanya karya sastra itu mengandung kompleksitas fenomena kehidupan manusia dan kemanusiaan yang selalu berubah

⁶⁹ A. Teeuw, *Membaca dan Menilai Sastra* (Jakarta: Gramedia, 1983), halaman 10.

dari masa ke masa. Ini terutama karena sastrawannya adalah "manusia budaya" yang selalu mencoba menghayati dunia dan kehidupannya secara utuh. Karena itulah maka berbagai aspek kehidupan terepresentasikan ke dalam karya sastra. Artinya, apa pun yang menjadi aspek yang ada dalam kaitannya dengan manusia dan kehidupannya, akan terepresentasikan dalam karya sastra. Di dalamnya ada aspek sosial, budaya, psikologi, politik, dan sebagainya yang menjadi masalah yang mewarnai kehidupan manusia.

Implikasinya, berbagai fenomena yang ada yang dialami oleh manusia juga menunjukkan kekompleksannya. Untuk itu, dalam karya sastra, tidak hanya tersaji masalah sastra, tetap juga menyangkut masalah-masalah bidang lainnya. Itulah sebabnya karya sastra juga menarik dijadikan objek kajian oleh bidang-bidang ilmu lain. Kekompleksan karya sastra tersebut membuat karya sastra hadir sebagai karya multidimensional, yang di dalamnya mengungkap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Misalnya, perempuan diperjuangkan kedudukannya, memanusiasikan kaum papa, ketidakadilan ditentang, kejujuran diperjuangkan, individu manusia mencari jati dirinya, dan sebagainya. Semua persoalan kehidupan yang dialami manusia di dunia dengan segala problematikanya disajikan secara estetik oleh pengarang di dalam karya sastra.

Di samping itu, karya sastra juga tidak hadir dalam wujudnya yang konvensional. Di awal-awal kelahiran karya sastra Indonesia, puisi, novel, dan drama hadir dengan konvensinya yang merujuk pada wujud karya yang sesuai konvensinya pada saat itu, namun dalam perkembangan sejarah sastra selanjutnya karya-karya sastra dalam berbagai genrenya juga menunjukkan wujudnya yang berubah. Bahkan, mungkin dapat berbeda sama sekali. Misalnya, jika dalam karya-karya jenis puisi, konvensi yang dikenali tidak ada menonjolkan unsur tokoh, namun misalnya ketika dalam karya-karya puisi W.S. Rendra yang sangat kuat menonjolkan unsur ketokohnya, tentu saja menuntut juga bahwa wujud puisi yang seperti konvensi yang dipahami sudah menjadi tidak berlaku lagi. Berbagai kecenderungan seperti inilah yang menjadi karakteristik karya sastra sehingga karya sastra memang hadir dengan kekompleksan dan kemultidimensionalannya.

Fungsi Karya Sastra: Dari Perspektif Sastra dan Nonsastra

Sastrawan, sastra, dan masyarakat merupakan tiga elemen yang saling berkorelasi. Damono⁷⁰ mengatakan bahwa karya sastra diciptakan oleh sastrawan adalah untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastrawan sebagai individu adalah anggota masyarakat, sehingga ia juga terikat dengan status sosial tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium utamanya. Sastra menggambarkan kehidupan, dan kehidupan yang digambarkan itu tidak dapat dilepaskan dari masyarakat lingkungannya. Kehidupan itu sendiri menyangkut hubungan antarindividu manusia, antarperistiwa, antarmasyarakat, dan antarindividu manusia dalam batin seseorang. Semua itulah yang menjadi "bahan" sastra yang terepresentasikan dalam karya sastra yang ditulis pengarang.

Mengingat adanya hubungan yang korelatif antara sastrawan, sastra, dan masyarakat maka apa yang dilukiskan dalam karya sastra itu sendiri mencakup problematik yang memang dialami dan diakrabi manusia, baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah yang membuat bahwa karya sastra memiliki fungsi bagi siapa saja yang membacanya, tidak dibatasi hanya pada orang sastra saja. Dengan perkataan lain, fungsi sastra sebenarnya tidak hanya dirasakan penting bagi orang sastra sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang menekuni bidang-bidang nonsastra, seperti sosiologi, politik, psikologi, dan sejarah. Selanjutnya, dapat dikatakan, hampir semua bidang berkepentingan dengan karya sastra untuk melihat berbagai fenomena hidup dan kehidupan manusia, baik secara kontekstual maupun universal.

Dari kompleksnya fungsi karya sastra, sebagaimana dikemukakan, saya mencoba mengelompokkan fungsi sastra dengan melihat dari dua perspektif yakni sastra dan nonsastra. Perspektif sastra yang menganggap karya sastra sebagai objek estetik, memfungsikan karya

⁷⁰ Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Teori Sastra* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984), halaman 1.

sastra menurut perspektif ini; dan perspektif nonsastra yang menganggap sebagai dokumentasi sosial juga memfungsikan karya sastra menurut kepentingannya.

Karya Sastra sebagai Objek Estetik

Karya sastra yang kendatipun lahir dari persentuhan sastrawan dengan masyarakat, dari perspektif sastra tidak pernah dipahami bahwa apa yang tertuang dalam karya sastra itu identik dengan masyarakat yang melahirkannya. Karya sastra, yang kendatipun lahir dari masyarakat, adalah dunia otonom yang tidak identik dengan dunia sosial empiris. Keotonoman karya sastra itulah yang membuat karya sastra dipahami sebagai objek estetik. Karya sastra memang terkait dengan masyarakat. Akan tetapi, seberapa miripnya karya sastra dengan kenyataan sosial, tetap saja tidak dapat dipakai untuk membenarkan (menjustifikasi) bahwa karya sastra itu identik dengan kenyataan sosial. Dunia sosial empiris dan dunia karya sastra, yang tentu saja berbeda, dan memang tidak dapat disamakan satu sama lain.

Oleh karena itu, karya sastra sebagai objek estetik, mesti dipahami sebagai dunia baru. Dunia baru ini memiliki hakikat sendiri, yang berkarakter fiksi, simbolik, asosiatif, multi-interpretatif, konotatif, kontemplatif, dan sebagainya. Karakteristik dunia baru ini juga pernah diberikan pengertiannya secara detail oleh Wellek dan Warren⁷¹ dalam buku klasiknya, khususnya di bagian "*The Nature of Literature*", mereka tidak hanya mengungkap beberapa karakteristik sastranya atau sastra memiliki "*aesthetic elements*" tetapi juga memiliki "*aesthetic function*". Dalam pemosisian karya sastra sebagai objek estetik inilah studi sastra ini dilakukan. Di sini orang yang melakukan kajian atas karya sastra berpijak pada pemahaman hakikat sastra sebagai objek estetik.

⁷¹ Rene Wellek and Austin Warren, *Theory of Literature*. England: Penguin Books, 1978), halaman 20-28.

Karya Sastra sebagai Dokumen Sosial

Apabila perspektif sastra menempatkan karya sastra sebagai objek estetika maka bidang-bidang lainnya (seperti sosiologi, psikologi, politik, dan sejarah) menempatkan karya sastra sebagai dokumen sosial dan gejala kedua (*ephipenomenon*). Dalam bidang sejarah, khususnya, fungsi sastra tidak sekedar sebagai dokumen dan gejala kedua, namun ia acap kali dijadikan sebagai sumber sejarah bangsa. Ini karena pengarang dalam proses kreatifnya, juga melakukan pengamatan dan penghayatan kehidupan yang intens, mencatat kejadian demi kejadian dalam zamannya masing-masing kemudian merekamnya dalam narasi sastra. Oleh karena itu, sesungguhnya sastrawan itu adalah sejarawan juga.

Pengarang juga adalah manusia, sama dengan manusia lainnya. Sebagai manusia dan anggota masyarakat, pengarang melakukan internalisasi dan interaksi sosial, yang kemudian semuanya diekspresikan dalam sastra. Namun demikian, tentu saja ada yang tidak sama antara pengarang dan "manusia" lainnya karena pengarang tidak hanya memiliki kemampuan kreatif tetapi juga kepekaan, penghayatan, dan imajinasi yang melampaui manusia pada umumnya. Maka itu, karya sastra yang ditulis pengarang dapat juga berkapasitas sebagai sumber sejarah bangsa, mengungkap semangat zamannya. Maka itu, mempelajari sastra berarti juga mempelajari sejarah bangsa. Pengarang menulis sejarah bangsa menurut versinya, yang mungkin lebih mendekati realitas sejarah. Karya-karyanya yang mengungkap tentang nasionalisme melalui tokoh-tokoh cerita dapat menggelorakan jiwa kebangsaan karena menyajikan data dan semangat sejarah.

Dalam kesusastraan Indonesia modern, kita dapat menyimak begitu saratnya sejarah bangsa terungkap di dalamnya. Untuk itulah, dalam tulisan ini, selanjutnya dibahas bagaimana karya sastra Indonesia menjadi sumber sejarah bangsa, yang akan dilihat dari karya-karya dua pengarang besar Indonesia yakni karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan Y.B. Mangunwijaya.

Karya Sastra sebagai Sumber Sejarah Bangsa: Representasi dan Dekonstruksi

Para ilmuwan sejarah memerlukan dokumen, tanpa dokumen tentu saja mereka tidak dapat berbuat banyak mengerjakan kajian-kajiannya, kecuali mungkin melalui kajian terhadap sejarah lisan (*oral history*) karena dalam sejarah lisan data dicari dari informasi yang disampaikan informan. Dalam konteks ini, karya sastra sebagai dokumen penting artinya karena karya sastra merepresentasikan peristiwa sejarah yang begitu kompleks. Bahkan mungkin dapat saja terjadi, sejarah yang ditulis atau diungkap melalui karya sastra dapat lebih lengkap ditulis oleh seorang sastrawan ketimbang penulis sejarah.

Dalam kaitan ini, tulisan ini sama sekali tidak berarti mengingkari hakikat sastra sebagai objek estetis, tetapi mengakui karya sastra yang juga memiliki kemungkinan atau dimensi yang dapat dipergunakan sebagai dokumen untuk melihat sejarah bangsa. Ini memang unik karena kerap kali pengarang tidak secara sengaja menulis sejarah dalam bentuk karya sastra, tetapi dalam kenyataannya pengarang memang justru menulis sejarah yang mungkin lebih lengkap dan mendalam. Untuk itulah, sebenarnya, mempelajari karya sastra itu sebenarnya sekaligus berarti juga mempelajari sejarah. Jika sebuah karya dilahirkan dalam konteks Indonesia—karena pengarangnya yang tidak bisa dilepaskan dengan masyarakatnya—pastilah karya sastra itu akan sarat dengan muatan sejarah Indonesia.

Dalam dua bagian subbab tulisan ini kita dapat menyimak bagaimana para pengarang Indonesia yang memiliki komitmen pada tanah air dan bangsanya berkisah dalam karya-karya-karya monumentalnya. Pengarang Pramoedya Ananta Toer (alm.) dan Y.B. Mangunwijaya (alm.) merupakan dua anak bangsa yang pernah hidup di negeri ini yang sangat mencintai bangsanya, terlepas dari bagaimana orang-orang memandang dan mempersepsi kedua pengarang tersebut. Artinya, yang terpenting adalah karyanya, karena karya tidak selalu identik dengan pengarangnya.

Pramoedya dan Sejarah Bangsa dalam Karya-karyanya

Pengarang Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya disebut Pramoedya) adalah tokoh yang sangat fenomenal dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Sebagai pengarang, ia memang mengalami kejadian-kejadian sejarah, sekaligus juga memiliki kepedulian atas sejarah bangsanya. Ia banyak bertutur dalam karya-karyanya bagaimana yang seharusnya diketahui oleh rakyat Indonesia, berdasarkan apa yang ia ketahui dan alami dalam kehidupannya.

Di luar profesinya sebagai seorang pengarang besar, yang karya-karyanya diakui berkualitas—baik di Indonesia maupun luar negeri—ia juga memang pernah terlibat dalam organisasi yakni Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang kemudian membuat dirinya banyak dikecam oleh lawan politiknya. Orang-orang yang berada pada organisasi yang berseberangan yakni Manikebu (Manifes Kebudayaan) mengklaimnya sebagai “orang kiri”. Bahkan ia pernah diasingkan sebagai tapol (tahanan politik) dan dibuang ke Pulau Buru. Di sinilah justru karya-karya besarnya lahir, di samping sebelumnya ia memang telah menjadi salah satu pengarang terbaik Indonesia, seperti dapat dibaca dalam karyanya *Cerita dari Blora (Kumpulan Cerita Pendek)* (1994).

Ketika di Pulau Buru, ia menulis banyak karya monumental yakni *Bumi Manusia* (1980), *Jejak Langkah* (1985), *Anak Semua Bangsa* (1981), dan *Rumah Kaca* (1990), yang disebut sebagai “Karya Tetralogi Pramoedya Ananta Toer”. Pramoedya juga menulis karya lainnya, yang juga merupakan karya sastra besar yakni *Arus Balik* (1995), *Arok Dedes* (1999), dan *Gadis Pantai* (2000). Kalau dicermati, karya-karyanya hampir keseluruhannya sangat kental dengan nuansa sejarah bangsa. Novel *Bumi Manusia* misalnya, berkisah tentang bagaimana dunia kehidupan zaman Hindia Belanda. Kisah-kisah yang dialami oleh tokoh Minke, Nyai Ontosoroh, Tuan Mellema, dan Annelies menggambarkan orang-orang yang hidup pada masa tahun 1898 hingga 1918. Masa-masa itu adalah masa Kebangkitan Nasional, masa awal masuknya pikiran rasional, dan mulai dikenalnya organisasi sosial. Kalau dikaitkan dengan perkembangan dunia, masa itu adalah masa demokrasi pada Revolusi Prancis.

Kendatipun Pramoedya menulis sekitar tahun 1980-an, tetapi latar ceritanya sangatlah lampau, dalam masa pra Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, novel ini tentu saja penting artinya untuk mengetahui sejarah bangsa pra Kemerdekaan Indonesia. Dunia kehidupan (*labenswelt*) masa Kebangkitan Indonesia itu seperti apa, dapat disimak melalui apa yang dikisahkan Pramoedya. Barangkali saja dokumen lain tidak ada yang berkisah tentang tahun-tahun itu sehingga novel *Bumi Manusia* ini juga dapat dijadikan sebagai sumber sejarah bangsa.

Demikian juga halnya dalam novel *Jejak Langkah*, sebagai lanjutan dari karya sebelumnya yakni *Bumi Manusia*, masih berkisah tentang sejarah bangsa Indonesia pada masa Kebangkitan Indonesia. Tampaknya, bagi Pramoedya, sejarah adalah harta terpendam yang selalu mengilhami dirinya untuk terus menulis dan menulis. Pramoedya memang sangat tertarik dengan sejarah sehingga tidak heran jika dalam karya-karyanya juga mengisahkan tentang sejarah kendatipun tokoh-tokoh yang dihadirkannya adalah tokoh fiktif. Tahun-tahun awal kesadaran nasional sebagai bangsa itulah yang tampaknya menarik bagi Pramoedya. Dalam karya-karyanya memang ia menghadirkan tokoh fiktif, tetapi sesungguhnya ia bercerita tentang pahlawan yang belum ditempatkan selayaknya. Namun demikian, sebenarnya sangat jelas siapa yang hendak dikisahkan di dalam novelnya. Tokoh pahlawan yang menurut Pramoedya dianggap sebagai perintis yang tidak pernah dicatat sebagai pahlawan seperti Tirta Adhi Suryo (1880–1918) adalah salah satu tokoh yang dikisahkan dalam novelnya. Melalui *Jejak Langkah* ini, Pramoedya seakan-akan ingin mendudukan bahwa Tirta Adhi Suryo sebagai pahlawan. Mungkin hanya Pramoedya yang mengetahui tentang tokoh ini sebagai seorang pahlawan, mungkin orang lain tidak pernah tahu dan mencatatnya. Tentang tokoh ini, Pramoedya sebenarnya sudah pernah menulis secara khusus dalam bukunya *Sang Pemula*.

Persoalannya kemudian, bagaimanakah bangsa ini kemudian menyikapi setelah mengetahui bahwa ada tokoh perintis kemerdekaan dan kesadaran nasional yang seharusnya dijadikan pahlawan. Dalam ceritanya ini, Pramoedya mengabarkan kepada bangsa ini bahwa sejarah bangsa kita harus dicermati lagi agar bangsa ini memiliki sejarah yang

lebih benar. Artinya, ketidaklengkapan data sejarah yang ada harus dapat dilengkapi dan karya sastra merupakan salah satu dokumen atau data yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyempurnaan sejarah bangsa tersebut.

Novel-novel besar lainnya karya Pramoedya juga menyuguhkan informasi sejarah yang berbeda dan beragam. Dalam novel *Arus Balik*, ia berkisah tentang negara kita yang sesungguhnya juga memiliki kekuatan maritim, tidak hanya daratan. Dalam novel *Arok Dedes*, ia mendekonstruksi dan menyindir masalah perebutan kekuasaan yang terjadi di negeri ini, yang *notabene* diwacanakan bukan sebagai perebutan kekuasaan dalam wacana umum. Selanjutnya, juga dalam *Gadis Pantai*, konservatisme kerajaan di negeri ini yang mendegradasi kemanusiaan perempuan desa. Berbagai sejarah bangsa digambarkan secara apik dalam kisah-kisah novel Pramoedya. Novel *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, yang juga pernah ditulisnya merupakan karya yang mengisahkan kemanusiaan didegradasi di negeri ini, yang secara kebetulan dialaminya sendiri ketika ia dibawa ke Pulau Buru dan ketika ia sudah berada di Pulau Buru.

Pramoedya, sebagai pengarang yang karya-karyanya sarat sejarah bangsa, tentu saja sangat ditentukan oleh kapabilitas Pramoedya sendiri. Ia tentu saja sangat menguasai sejarah bangsanya karena kalau dilihat dari kesehariannya, Pramoedya adalah seorang pembaca sejarah yang otodidak dan sangat tekun mempelajari sejarah, terutama sejarah Indonesia. Ia juga adalah seorang kolektor buku, tetapi dari pengakuannya, buku-bukunya banyak yang dibakar oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Mangunwijaya dan Sejarah Bangsa dalam Karya-karyanya

Mangunwijaya, yang memiliki nama lengkap Y.B. Mangunwijaya, juga adalah seorang pengarang besar Indonesia, yang karya-karyanya juga banyak berkisah tentang sejarah bangsa. Karya-karya besarnya seperti *Roro Mendut* (1983), *Burung-Burung Manyar* (1981), *Burung-Burung Rantau* (1992), dan *Durga Umayi* (1994) merupakan sebagian karyanya yang kental dengan nuansa sejarah bangsa. Dalam *Roro Mendut*, Mangunwijaya berkisah tentang sejarah kerajaan dengan menyelipkan dekonstruksi atas

tokoh Roro Mendut yang tidak dikisahkan bunuh diri, tetapi ia melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sebagai perempuan, ia tidak digambarkan sebagai perempuan yang lemah, tetapi sebagai perempuan yang kuat dan penuh perjuangan.

Dalam novel *Burung-burung Manyar*, Mangunwijaya juga mengungkapkan bagaimana tokoh-tokoh perempuan mencoba untuk melakukan perjuangan, agar memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Di dalam kisah ini, ia memang banyak merepresentasikan latar Indonesia dan kondisi Indonesia pada masa Kemerdekaan, yang sangat dicintainya. Dalam *Burung-burung Rantau*, sebagaimana yang dilukiskan Mangunwijaya, ia menggambarkan orang-orang Indonesia yang melintas batas dan budaya. Sedangkan dalam *Durga Umayi*, melalui tokoh-tokoh fiktifnya, Mangunwijaya menggambarkan tentang sejarah bangsa yang telah merdeka, tetapi orang-orang yang ada justru membalik kemerdekaan itu menjadi ketidakmerdekaan. Kemerdekaan yang seharusnya diisi dengan sesuatu yang bermakna bagi bangsa ini, ternyata banyak yang disalahgunakan. Kondisi sejarah bangsa itulah yang banyak dikritik oleh Mangunwijaya melalui novel ini.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini ada beberapa hal yang dapat dirumuskan. Beberapa hal tersebut adalah seperti berikut. *Pertama*, karya sastra memiliki wajah yang kompleks dan multidimensional; sebagai implikasi dari keberadaannya yang memiliki berbagai dimensi. Karya sastra memiliki fungsi bagi seluruh pembaca sastra, tidak hanya bagi orang yang menekuni bidang sastra tetapi juga bidang nonsastra. *Kedua*, karya sastra dipandang sebagai sumber sejarah sastra, bukan berarti mengabaikan hakikat sastra, melainkan karena karya sastra itu memang dapat dipersepsikan dari berbagai perspektif sastra dan nonsastra.

Ketiga, para pengarang yang karya-karyanya kental dengan nuansa sejarah, sebagai implikasi dari pengarangnya yang memiliki penguasaan sejarah bangsa yang baik, dan memiliki komitmen kepada bangsanya. *Keempat*, karya sastra merupakan dokumen penting untuk menyempurnakan sejarah bangsa yang umum dan karya sastra sangat potensial mengandung data sejarah.

Politik Identitas, Kearifan Masyarakat, dan Sastra

Pengantar: Menengok “Dunia Sunyi” Sastra

Meskipun produksi sastra telah ribuan jumlahnya di Indonesia—sejak awal masa kesusastraan Indonesia (Balai Pustaka) hingga masa kesusastraan Indonesia mutakhir—namun dunia sastra tetap diposisikan sebagai “dunia sunyi”, dunia yang dianggap tidak memberi pengaruh apa-apa dalam pengembangan masyarakat bangsa.⁷² Namun, sastra pun terus dan terus diproduksi, diciptakan dengan kreatif dari generasi ke generasi pengarang. Generasi pengarang tidak ambil pusing apakah sastra yang terus-menerus diciptakan dan diproduksi dibaca atau tidak, mereka terus mencipta dan mencipta, karena baginya mencipta adalah sebuah kewajiban.

Di masa lampau, ketika zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, karya-karya klasik sastra yang berbahasa Jawa Kuna dan Jawa, seperti *Negarakertagama* dan *Pararaton* yang dicipta para pujangga kraton memang menjadi karya untuk menopang status sosial dan tata nilai yang ada pada kerajaan zaman itu. Pujangga melalui karya-karyanya seringkali menjadi rujukan raja dalam mengambil kebijakan karena ada kesadaran pada raja bahwa apa yang ditulis dalam karya-karya itu mengandung kebijaksanaan yang penting bagi masyarakat. Pujangga—selaku sang pencipta karya—dipandang sebagai orang-orang bijaksana sehingga kerap karya sastra pada zaman itu dipahami sebagai “suara sang nabi”—seorang bijak. Zaman

⁷² Berapa jumlah persisnya karya sastra tercatat di Perpustakaan Nasional, Jakarta karena semua izin penerbitan buku (ISBN) diperoleh dari lembaga ini dan setelah buku terbit wajib dikirim dan disimpan di lembaga ini.

berubah, pemosisian sastra pun berubah seiring dengan ke mana arah kepemimpinan itu. Lalu, sekarang ini, kita mungkin masing-masing bisa menjawab pertanyaan, "seperti apakah sastra diposisikan?" Jika di masa lampau kepemimpinan raja memimpin dengan sastra, di masa sekarang kepemimpinan penguasa negara memimpin tanpa sastra.

Namun, realitas lain yang dapat diamati berkait dengan respons masyarakat pembaca pada umumnya terutama dalam komunitas bidang-bidang ilmu yang ada, ternyata karya sastra tidak hanya dipandang penting bagi komunitas bidang ilmu sastra, tetapi juga bagi komunitas bidang ilmu nonsastra. Bidang-bidang yang dimaksudkan di antaranya psikologi, sejarah, sosiologi, politik, filsafat, agama, dan juga hukum. Jika komunitas bidang ilmu sastra memosisikan karya sastra sebagai objek estetis (fiksi) maka yang nonsastra menyatakannya sebagai dokumen sosial (fakta).⁷³ Bahkan, sebagian masyarakat pembaca ada juga yang merespons karya sastra sebagai sumber kearifan masyarakat karena melalui karya sastra ditawarkan nilai-nilai.

Pentingnya sastra tidak saja karena menawarkan nilai-nilai, tetapi karena keberadaan sastra itu sendiri sebagai karya yang terbuka, bebas, adaptif, responsif, dan kritis. Maka itu, kerap kali sastra menjadi pilihan bagi siapa pun yang hendak mengekspresikan idealisme dan gagasannya tanpa terkungkung oleh struktur, adat-istiadat, dan berbagai aturan lainnya yang membatasi. Sastra adalah dunia yang memungkinkan orang untuk menggagas pemikiran yang kurang terwadahi dalam bidang lain seperti bidang sosial, politik, filsafat, dan bahkan agama. Barangkali itulah yang membuat mengapa beberapa pengarang yang dulunya bukan sebagai pengarang sastra, seperti Umar Kayam, Mangunwijaya, Mustofa Bisri, Mochtar Pabotinggi, Muji Sutrisno, dan Eef Saifulloh menuliskan gagasan-gagasannya melalui sastra. Tampaknya, dalam sastra mereka seperti menemukan dunia pengucapannya yang pas, yang tidak diperolehnya dalam bidang nonsastra.

⁷³ Ignas Kleden dan Clifford Geertz pernah memperbincangkan soal fakta dan fiksi ini sebagai dua hal yang terbedakan tetapi dalam keduanya yang saling ada; di dalam fiksi ada fakta, di dalam fakta ada fiksi.

Diakui atau tidak, dunia sastra memiliki strategi pengucapan yang elegan. Melalui strategi pendeskripsian, penarasian, dan pendramatisasian, sastra mengajarkan berbagai nilai tanpa melakukan pemaksaan, atau pendoktrinan kepada masyarakat pembaca. Sastra mengajarkan nilai-nilai dengan menyenangkan dan bahkan indah dalam bentuk berbagai pengalaman dan kejadian yang disajikan dalam cerita. Masyarakat pembaca pun dipersilakan menikmati, merefleksi, dan menyeleksi sendiri tentang apa pun nilai yang terbaca dalam sastra.

Keunikan strategi pewacanaan gagasan atau nilai dalam sastra inilah yang seringkali menjadi dasar mengapa sastra dipandang sebagai karya yang penting dalam politik identitas. Politik identitas sebagai terminologi yang relatif baru digunakan dalam diskursus akademis acap kali juga mengimbas sampai ke sastra.

Politik Identitas: Dari Wacana Sosial ke Sastra

Ahmad Safii Maarif dalam tulisannya yang berasal dari orasi ilmiah "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme"⁷⁴ menerangkan bahwa ilmuwan sosial baru tertarik dengan politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat ketika menghadapi masalah minoritas, gender, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok lainnya yang merasa terpinggirkan dan teraniaya. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili oleh para elite. Gerakan pemekaran daerah, merupakan salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu keadilan dan pembangunan daerah menjadi isu sentral dalam wacana politik mereka. Akan tetapi, apakah semuanya itu murni atautkah hanya lebih karena ambisi para elite lokal untuk tampil

⁷⁴ Safii Maarif, "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita", dalam Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (eds.), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), halaman 3.

sebagai pemimpin, ini memang sulit dijelaskan.⁷⁵ Apakah politik identitas ini membahayakan nasionalisme dan pluralisme di Indonesia? Lalu, bagaimana politik identitas itu dalam karya sastra Indonesia?

Soal sejarah politik identitas ini sudah secara panjang-lebar dijelaskan oleh Maarif (2012:4–18), sejak bermula di negara-negara lain hingga ke negara Indonesia. Ia menyebut Kauffman adalah tokoh yang pertama menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (The Student Nonviolent Coordinating Committee)—sebuah gerakan nonsipil di Amerika Serikat di awal 1960-an. Perihal siapakah yang menciptakan istilah politik identitas itu memang masih belum jelas.

Namun, secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar (*mainstream*) dalam sebuah negara-bangsa. Di sinilah ide-ide tentang keadilan dipandang sangat relevan. Di Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berprinsip bahwa praktik pemerasaanlah yang membangun kesadaran golongan yang diperas (kulit hitam) yang berbahasa Spanyol dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih.⁷⁶ Bentuk-bentuk politik identitas ini kemudian mencuat juga sampai batas gagasan separatisme di Amerika, gerakan Islam di Amerika, federasi di Uni Soviet, gerakan mujahidin di Afghanistan, berbagai corak politik identitas yang terlihat di kalangan diaspora Muslim di belahan dunia Barat, dan sebagainya.

Kemudian, bagaimana dengan politik identitas di Indonesia? Kultur Indonesia yang memiliki keniscayaan pluralis atau multi kulturalis dalam soal etnis, bahasa lokal, agama (kepercayaan), sejarah lokal, dan bahasa daerah, perlu dipahami sebagai mosaik atau tenunan yang kalau dikelola secara baik akan mendatangkan kebaikan, dan apabila kurang dikelola dengan baik akan mendatangkan konflik. Akan tetapi, sesungguhnya,

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 4.

para pendiri bangsa (*the founding fathers*) telah merangkai keniscayaan itu dan diwadahi dengan ideologi Pancasila dan simbol *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebetulnya, jika semua warga bangsa konsisten dan berpedoman pada hal itu, tentunya keniscayaan masyarakat pluralis dan multi kulturalis itu tidak perlu menjadi kendala. Namun, dalam realitasnya, ada keinginan-keinginan mengubah ideologi yang telah memayungi kepluralisan atau kemultikulturalisan itu. Atas kondisi itu, terkadang muncullah letupan-letupan yang timbul dan tenggelam, yang biasanya terwujud dalam gerakan yang mengakibatkan adanya pihak "yang mendominasi dan terdominasi" atau "yang menghegemoni dan yang terhegemoni". Dalam kasus-kasus yang ada dan terjadi di Indonesia, tidak hanya berkait dengan etnis, agama (kepercayaan), dan suku, tetapi ada juga yang berkait dengan gender. Kondisi riil tentang itu tersebar terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi-kondisi itu tidak hanya menjadi keprihatinan dari orang-orang yang menghargai keadilan dan pluralisme (seperti Cak Nur dan Gus Dur), tetapi juga sarat tercermin juga dalam karya sastra Indonesia. Politik identitas yang berprinsip memperjuangkan pihak-pihak yang tertindas atau terpinggirkan itu tertuang dalam berbagai karya sastra Indonesia. Proses penciptaan sastra semacam ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan kritikus jalur para Marxis Lucien Goldmann bahwa karya sastra akan lahir di mana masyarakat itu terdegradasi (terendahkan).⁷⁷ Jika ada perendahan atas kaum minoritas, akan lahir karya-karya perlawanan terhadap mayoritas; jika ada perempuan terendahkan atau pemosisian perempuan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, akan lahir karya-karya feminis yang menyuarakan penyeteraan gender; jika ada penindasan kepada kaum papa oleh sang penguasa, akan lahir karya-karya perlawanan terhadap sang penguasa.

⁷⁷ Lucien Goldmann, Lucien, *Method in the Sociology of Literature*, terjemahan ke dalam bahasa Inggris dan diedit oleh William Q. Boelhower (Oxford: Basil Blackwell), halaman 1981.

Kearifan Masyarakat dan Sastra

Dalam tulisan ini, *kearifan* dipahami sebagai suatu nilai kebaikan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, negara, dan kemanusiaan. Karya sastra diyakini sebagai sebuah karya yang senantiasa berupaya melakukan pencarian atas nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam suatu masyarakat bangsa. Pencarian atas nilai-nilai itu dalam sastra terwacanakan dalam tanda karena karya itu memang terbangun dari tanda. Lewat tanda itu terungkap pencarian-pencarian berupa perlawanan, kritik sosial, simbolisme, ironi, metafor, dan juga imaji-imaji. Oleh karena sastra bersifat abstrak, maka segala pencarian nilai itu mesti diinterpretasi dan dimaknakan oleh siapa pun yang membacanya. Singkatnya, pembaca mesti mengonkretkan karya dalam interpretasi dan pemaknaannya. Pencarian nilai dalam sastra dalam berbagai wujudnya itu, sesungguhnya dapat dipahami juga sebagai wujud politik identitas.

Apabila dicermati kembali, mulai karya awal sastra Indonesia yakni sejak karya-karya masa Balai Pustaka, sudah tampak bagaimana pengarang mengejawantahkan politik identitas. Novel *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli, *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar, *Belenggu* karya Armijn Pane, *Layar Terkembang* karya Sutan Takdir Alisjahbana, menjadi karya-karya awal yang patut dicatat. Bahkan, karya-karya pra-Balai Pustaka, seperti sastra inspiratif masa Hindia Belanda yakni *Max Havelaar* karya Multatuli, sebenarnya sudah mengumandangkan politik identitas itu, sebelum konsep politik identitas itu lahir di Barat. Sejak roman karya Multatuli, dan juga karya-karya yang ada pada masa kesusastraan 30-an, '45, dan '66, karya-karya yang tercipta sudah menggaungkan politik identitas. Hanya saja, ketika itu, belum diberi penyebutan khusus yang bernama *politik identitas*. Padahal secara substantif, apa yang digaungkan karya-karya sastra pada masa itu sudah merupakan semangat yang sekarang disebut politik identitas.

Dalam roman karya Multatuli (alias Douwes Dekker) *Max Havelaar* 'Aku yang Menderita', sangat kuat mengumandangkan politik identitas. Di dalam karya itu, bagaimana Multatuli—selaku pengarangnya—mengisahkan dalam karyanya penindasan yang terjadi pada kaum papa,

rakyat miskin yang terjajah, dan terendahkan derajat kemanusiaannya dalam belenggu penjajahan Belanda. Karya-karya masa Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan Angkatan '45, dengan tipologi karyanya melakukan perlawanan atas pembelengguan kaum perempuan dan penindasan penjajah.

Tidak hanya berhenti pada masa '66, politik identitas dalam sastra terus berlanjut terus ke masa-masa setelahnya dan bahkan sampai karya-karya sastra hari ini. Hampir dapat dikatakan, penciptaan karya sastra Indonesia tidak sepi dari politik identitas. Emha Ainun Nadjib dalam *Pak Kanjeng*, Romo Mangun dalam karyanya *Durga Umayi*, Rendra dengan "Balada Orang-orang Tercinta" dalam *Potret Pembangunan dalam Puisi*, Widji Thukul (*Aku Ingin Jadi Peluru*), dan Pramoeodya Ananta Toer (dalam karya Tetralogi dan *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*) merupakan pengarang yang dalam karya-karyanya mewujudkan politik identitas, yakni membela dan mengangkat derajat kemanusiaan kaum papa di Kedung Ombo, di Kali Code, di Pulau Buru; keadilan dari kuasa penguasa Orde Baru; serta berbagai penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan di seluruh bumi Indonesia. Kemudian, Ayu Utami (dalam karyanya *Saman*) mewujudkan politik identitas untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki secara total, sampai-sampai tanpa menabukan lagi soal seksualitas pada perempuan. Demikian juga Oka Rusmini (*Tarian Bumi* dan *Sagra*) yang dengan gigihnya melakukan perlawanan atas belenggu perempuan dalam adat dan kasta pada perempuan Bali. Sudah tentu masih banyak lagi karya-karya lainnya dari yang sekedar terungkap di sini, yang sebenarnya juga mewujudkan politik identitas. Tampaknya, disadari atau tanpa disadari oleh para pengarang, karya-karya sastra Indonesia ini memang memiliki ketertarikan dalam politik identitas dan bahkan dalam karya-karya yang ada tampak sangat intens mengungkap politik identitas itu.

Dari besar dan intensnya pewujudan politik identitas dalam karya sastra Indonesia sejak awal kesusastraan Indonesia sampai pada karya-karya sastra Indonesia mutakhir, tentunya berbagai kearifan masyarakat telah terdapat dan terimplisit dalam karya sastra. Berbagai kearifan masyarakat yang tertuang dalam karya sastra itu menjadi nilai-nilai yang ditawarkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu dan masyarakat.

Penutup

Karya sastra Indonesia yang diproduksi pengarang tampak tidak hanya penting sebagai objek estetik, tetapi dari berbagai bidang nonsastra juga penting sebagai karya dokumen sosial. Dengan demikian, sastra ini memiliki dwifungsi. Melalui karya sastra, orang belajar banyak tentang apa yang tertuang dalam karya sastra.

Sebelum orang mewacanakan politik identitas yang diambil dari diskursus ilmu sosial, sebenarnya karya sastra yang diciptakan pengarang Indonesia sejak masa Balai Pustaka hingga sastra Indonesia mutakhir, sudah banyak mewujudkan apa yang disebut politik identitas. Realitasnya, memang karya sastra sudah melakukan perlawanan, pembelaan, dan pengkritikan atas segala yang mengungkung, menindas, dan meminggirkan.

Melalui karya sastra yang berkomitmen melakukan perlawanan atas ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan perendahan kemanusiaan, banyak nilai kearifan yang dapat diteladani dan dijadikan sebagai acuan dalam mengelola kehidupan dalam dunia empiris agar dapat menjadi lebih baik. Hanya saja nilai itu perlu diinterpretasi dan dimaknakan pembaca.

Meskipun ada penyebutan yang relatif baru dengan istilah *politik identitas*—termasuk dalam dunia sastra yang baru hangat-hangatnya digunakan—tetapi dalam realisasinya hampir semua yang diperjuangkan dalam karya sastra itu sudah merupakan perwujudan dari politik identitas. Dengan demikian, politik identitas, sebagai istilah yang relatif baru dan mengimbas pada sastra, bukanlah sesuatu yang asing dalam dunia sastra Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan sejak dahulu kala, sastra pada umumnya memang sudah memiliki semangat sebagaimana yang terkandung dalam politik identitas itu.

Pendidikan Sastra dan Identitas Bangsa

Pengantar: Sastra sebagai Produk Budaya

Sastra merupakan produk budaya manusia dalam sebuah masyarakat dan bangsa yang menggunakan sarana bahasa. Setiap masyarakat dan bangsa yang berkebudayaan di dunia pastilah menciptakan dan memiliki sastra. Sastra yang diciptakan dalam setiap masyarakat dan bangsa bermacam-macam dan memiliki kekhasannya sendiri, yang ditentukan oleh lingkungan sosial, alam, dan kultur masyarakatnya. Manusia hidup bermasyarakat secara kodrati sebagai makhluk sosial (*homo socius*) dan sekaligus makhluk bercerita (*homo fabulans*). Dalam kehidupan bermasyarakat, antara manusia yang satu dan yang lain selalu berinteraksi. Mereka saling menyapa, merasa, memikirkan, dan menuturkan tentang apa pun yang dialami dalam kehidupannya. Kemudian, ada yang mendengarkan, dan secara intens ada yang berkisah, yang kemudian menjadi cipta sastra, mulai dari yang lisan ke tulis. Inilah ihwal kehadiran sastra dalam masyarakat. Sastra dibutuhkan sebagaimana halnya produk budaya lainnya.

Lalu, apakah budaya? Kalau menyitir pandangan Berger, seorang sosiolog kontemporer, dalam sebuah bukunya *Langit Suci: Agama sebagai Realitas* (1994) dikatakan budaya itu sebagai yang diciptakan dan dikonstruksi. Untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, mula-mula manusia dibedakan dengan binatang.⁷⁸ Dikatakannya, binatang diciptakan sebagai

⁷⁸ Sang Pencipta (Tuhan, dengan berbagai penyebutan dalam berbagai keyakinan di dunia) menciptakan tiga makhluk hidup di dunia ini yakni tumbuhan (diberi jiwa), binatang (diberi jiwa dan suara), manusia (diberi jiwa, suara, dan akal-budi/pikiran).

mahluk *yang selesai* dan memiliki dunianya sendiri. Adapun manusia diciptakan sebagai makhluk *yang belum selesai* dan tidak memiliki dunianya sendiri. Oleh karena itu, manusia harus menciptakan dunianya sendiri agar dapat *survive* dalam kehidupannya, mulai dari taraf budaya yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Apakah yang diciptakan manusia sejak zaman primitif sampai era global sekarang ini? Oleh karena itu, semua yang semula tidak ada dan tidak menyertai manusia sebagai sebuah budaya (*culture*); dan budaya itu sebagai yang diciptakan manusia, yang dikonstruksi. Semua yang menyertai manusia apa adanya sejak lahir adalah sesuatu yang alami (*nature*). Perubahan, dinamika, dan kemajuan dalam dunia manusia membutuhkan budaya. Tanpa budaya, kehidupan manusia akan stagnan, dunia tidak berkembang, seperti halnya kehidupan binatang dan juga tumbuhan yang statis. Ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan seterusnya termasuk sastra, yang pasti merupakan hasil budaya dari manusia yang berakal budi atau yang berkebudayaan.

Lingkup Sastra

Sebagai masyarakat dan bangsa yang berkebudayaan, sastra dibutuhkan dan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan sastra, kehidupan akan menjadi lebih indah dan tidak kering. Sastra dalam pengertian yang luas, mencakup wilayah yang sangat luas, yakni sastra lisan (tutur, cerita rakyat), sastra klasik (naskah kuno), sastra daerah (nusantara), sastra Hindia-Belanda, sastra Cina Peranakan, dan sastra Indonesia.

Sastra Indonesia kemudian diklasifikasi lagi dalam genre sastra, yaitu puisi (dahulu pantun dan syair), prosa (cerpen, novel, roman, prosa lirik, cerber), dan teks drama (monolog, dialog).⁷⁹ Lalu, sering juga disebut adanya sastra serius (S besar), sastra populer (s kecil), sastra anak, sastra koran (jurnalisme sastra), ciklit, tinlit, dan siberastra. Dengan demikian, sastra Indonesia itu mempelajari karya sastra tentang Indonesia yang diciptakan oleh pengarang Indonesia yang berbahasa Indonesia.

⁷⁹ Khusus genre drama baru diakui sebagai salah satu genre dalam kesusastraan Indonesia sejak zaman kesusastraan Jepang, sekitar tahun 1941–1942.

Kendatipun ada realitas pembedaan karya sastra semacam itu, dalam perspektif sosiologi sastra, semua diakui sebagai karya yang memiliki derajat dan posisi yang sama. Sosiologi sastra tidak mengenal adanya dikotomi sastra serius *versus* sastra populer, sebagaimana halnya sosiologi sastra tidak mengenal adanya karya budaya adiluhung (*high culture*) dan budaya rendah (*low culture*).⁸⁰ Semua merupakan data ilmiah yang layak dikaji, karena setiap karya yang dianggap berbeda itu memiliki fungsi dan pendukungnya sendiri. Dengan demikian, sosiologi sastra mendudukan sastra dalam variannya sendiri.

Masyarakat dan Sastra

Sastra sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang menekuni pendidikan (pembelajaran) sastra dan akademisi sastra, tetapi semua masyarakat memerlukan sastra. Siapa pun yang ingin meningkatkan jiwa humanitasnya, perlu menghayati sastra karena sastra itu merefleksikan kehidupan yang kompleks tentang hubungan manusia secara vertikal dan horizontal.

Sastra bukan merupakan aspek yang eksklusif, tetapi sebagai sesuatu yang sangat manusiawi, yang bermanfaat untuk memberadabkan manusia dan masyarakat. Pada manusia dan masyarakat yang melek sastra, niscaya terbuka peluang menjadi manusia yang berkemanusiaan dan masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menyediakan ruang terbuka untuk terjadinya tindakan ideal, harmonis, dan kedamaian rohani. Sebab, secara tidak langsung, sastra mengajarkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan (*truthiness, goodness, and beauty*) sekaligus, dengan cara yang tidak memaksa, yang tidak mendoktrin, tetapi dengan pengisahan (penarasian), pendramaan, dan pendeskripsian yang membuka dan menyentuh perasaan dan penghayatan manusia tentang segala hal yang menyangkut kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik.

⁸⁰ J. Herbert Gans, *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluations of Taste* (USA: Basic Books, 1974).

Sastra juga sebenarnya tidak terbatas merefleksikan, tetapi di dalam sastra akan tertuang konstruksi-konstruksi pola pikir, tindakan-tindakan solutif, dan model-model kehidupan ideal-prediktif yang dapat membantu manusia (yang membaca sastra) dalam mengatasi segala problem kehidupannya. Oleh karena itu, belajar sastra sebenarnya tanpa disadari membuat orang masuk menyelami dunia kehidupan yang membawa penyadaran-penyadaran akan sesuatu yang sebelumnya tidak tersadari. Di sinilah manusia dan masyarakat tercerahkan oleh bacaan sastra. Dengan meminjam istilah-istilah yang dikemukakan Iser,⁸¹ bagi pembaca *real* (pada umumnya) orang akan menikmati dan menghayati dan bagi pembaca *ideal* (ahli, berbekal ilmu sastra) ia akan membaca sampai pada tingkatan aktivitas mengonkretisasi dan mengangkat sisi keilmuannya. Sastra terbuka bagi siapa pun yang berkeinginan mengembangkan kediriannya sebagai manusia dan masyarakat yang berperadaban, meninggalkan segala bentuk kebiadaban, kejahatan, tindakan koruptif, dan sejenisnya. Sastra menghaluskan kekerasan, meneguhkan keyakinan, menguatkan mentalitas, memanusiation manusia, dan berbagai manfaat lainnya lagi.

Negara dan Sastra

Sastra yang telah diciptakan oleh pengarang perlu dihargai dengan cara membaca dan menghayatinya. Membaca dan menghayati sastra, tidak hanya penting bagi mereka yang menekuni bidang sastra, tetapi para pemegang kuasa negara seperti elite politik dan pemimpin bangsa perlu membaca sastra. Ini penting karena dalam sastra tertuang aspirasi dan pikiran yang mewakili jiwa zaman dan bangsanya.

Untuk kondisi di Indonesia, tampaknya tradisi membaca sastra di kalangan pemimpin bangsa ini perlu dipertanyakan. Pemimpin bangsa harusnya membaca karya-karya sastra bangsanya. Adakah pemimpin bangsa kita yang membaca sastra? Dahulu, bangsa kita pernah memiliki pemimpin bangsa yang memiliki tradisi membaca yang sangat menonjol,

⁸¹ Wolfgang Iser, *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response* (Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1978).

yakni Soekarno dan Hatta. Soekarno yang menguasai enam bahasa asing, memiliki tradisi membaca karya-karya terbaik dunia termasuk karya-karya sastra bangsanya.

Sekarang ini sepertinya sastra kurang dianggap penting, para elite politik dan pengelola negara tampaknya lebih disibukkan dengan politik praktis dan kurang menoleh sastra. Di satu sisi, sekarang ini tampaknya tergambar "negara tanpa sastra". Jarang sekali karya-karya sastra terbaik yang diciptakan anak bangsa mendapatkan penghargaan dari pihak pemerintah (negara) apalagi diterbitkan oleh pemerintah dan penghargaan atas karya-karya sastra terbaik lebih banyak diberikan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah. Kondisi ini pulalah yang membuat pikiran-pikiran, solusi-solusi, dan model-model kehidupan dalam sebuah bangsa kurang terakumulasi dalam kebijakan pemerintah.

Namun demikian, diakui atau tidak, di sisi lain, masyarakat yang membaca sastra menyerap konstruksi-konstruksi kehidupan yang bersifat dinamik agar apa yang dipikirkan masyarakat sejalan dengan apa yang diketahui pemerintah, sebenarnya sama-sama perlu membaca sastra. Negara kuat apabila apa yang menjadi tujuan negara sejalan dengan keinginan seluruh bangsanya. Sebaliknya, negara menjadi lemah jika tujuan negara tidak sejalan dengan keinginan bangsanya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bangsa, penyelenggara negara harus dapat berperan sebagai nakhoda yang mengantarkan pada tujuan yang sama.

Pendidikan Sastra dan Identitas Bangsa

Pendidikan (pembelajaran) sastra, selain terjadi secara alamiah dalam masyarakat juga perlu ditingkatkan secara sistemik, yakni dengan mempelajari sastra dalam pendidikan-pendidikan formal di sekolah atau universitas. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah pendidikan sastra ini tidak hanya bertujuan terbatas untuk menikmati dan menghayati sastra, namun harus ditingkatkan ke taraf yang lebih jauh yakni menginterpretasi makna, mengkritisi, dan sekaligus mengungkap sisi keilmuannya.

Secara sistemik pendidikan sastra sudah ditandai dengan pencantuman pendidikan sastra dalam kurikulum sekolah yang digandeng mata ajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk capaian target mutu pendidikan sastra, apakah sudah memadai? Tampaknya, sampai saat ini pembelajaran sastra masih dominan berupa hafalan. Dalam pendidikan sastra di sekolah, masih perlu strategi yang lebih mengena, yakni menguatkan pada *membaca* dan *menulis* sastranya. Dua aktivitas dalam pendidikan sastra ini mungkin masih terasa berat, karena juga memerlukan guru-guru sastra yang memiliki kompetensi dalam *membaca* dan *menulis* sastra yang baik. Apabila tidak memungkinkan, dapat saja sebenarnya untuk memberikan kompetensi itu, melibatkan para profesional yakni pengarang terutama dalam soal menulis karya sastra. Pengarang tidak harus yang terkenal dari Jakarta, tetapi memberdayakan pengarang-pengarang daerah yang potensial itu pun menjadi strategi yang sangat baik untuk membangun tradisi menulis sastra. Untuk di Surabaya, misalnya, cukup banyak pengarang muda yang mulai memiliki nama, yang dapat ditimba pengetahuannya, karena mereka sudah berproses lebih dahulu dan memiliki pengalaman proses kreatif.

Pendidikan sastra dengan menggiatkan aktivitas membaca dan menulis ini sangat penting artinya karena dapat menjaga kesinambungan tradisi bersastra dalam masyarakat. Di samping muncul pengarang-pengarang yang secara otodidak belajar menulis sastra, sebenarnya perlu juga menciptakan para profesional yang lahir dari dunia akademik sastra. Biasanya, masyarakat (*stakeholders*) selalu membayangkan bahwa orang yang berkuliah di Fakultas Sastra pastilah memiliki kemahiran menulis karya sastra.

Adanya tradisi membaca dan menulis yang kuat tentang sastra di Indonesia, dengan sendirinya akan mampu membangun identitas bangsa. Karya sastra merupakan salah satu hasil cipta budaya utama yang dapat digunakan untuk mengetahui identitas bangsa. Itulah sebabnya, mengapa para orientalis dahulu, ketika mau masuk ke Indonesia pra penjajahan terlebih dahulu belajar bahasa dan sastranya—dan sampai sekarang pun bahasa, sastra, dan budaya masyarakat kita menjadi bahan yang tidak henti-hentinya dipelajari dan dikaji oleh orang-orang asing.

Dalam karya-karya sastra Indonesia, akan tertuang soal adat-istiadat, norma-norma sosial, perilaku sosial, psikologi masyarakat, karakter bangsa, jati diri bangsa, dan sejenisnya yang menandai identitas bangsa kita. Para peneliti asing sadar bahwa untuk belajar tentang Indonesia, karya sastra menjadi dokumen yang sangat penting yang merefleksikan keindonesiaan kita. Untuk itu, di tengah gencar-gencarnya orang bicara dan membahas tentang karakter bangsa, sebenarnya kita tidak perlu susah-susah melakukan aktivitas untuk membangun karakter bangsa. Karakter bangsa itu akan terbangun dengan sendirinya jika kita mau membaca karya sastra secara baik. Persoalannya sekarang adalah kita memang kurang mau membaca karya kita sendiri dengan baik, sehingga kita seakan-akan belum memiliki karakter bangsa.

Romantisisme untuk kembali kepada budaya sendiri setelah lama mengabaikan budaya sendiri inilah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat kita. Sebenarnya kita sangat kaya dengan hasil budaya bangsa sendiri, tetapi kita kurang menghargai dengan baik sehingga budaya sendiri yang seharusnya membentuk karakter bangsa atau identitas bangsa ini seakan-akan jauh dari diri kita. Kita seakan-akan menghadapi budaya sendiri sebagai sesuatu yang asing, yang berjarak. Obsesi global kita acap kali menenggelamkan budaya sendiri. Padahal budaya sendiri itu banyak yang sesungguhnya dapat diglobalkan. Misalnya, gamelan, wayang, lukisan, ukiran, dan tarian yang berasal dari Indonesia di luar negeri dipelajari dengan baik, termasuk bahasa Indonesia sekarang ini sudah dipelajari di berbagai negara, seperti Australia, Jepang, Jerman, Polandia, Amerika, Cina, dan sebagainya. Inferioritas kebangsaan kita memang harus disembuhkan terlebih dahulu agar kita tidak mudah meninggalkan budaya sendiri. Kita harus bangga dengan bahasa dan sastra Indonesia karena kenyataannya bahasa dan sastra Indonesia di luar negeri banyak dipelajari, digunakan, dan dikaji.

Sastra Indonesia, sebagaimana halnya lebih luas kebudayaan Indonesia, harus kita posisikan sebagai produk budaya yang mewarnai identitas bangsa, bukan sebagai yang berada di luar kita. Kebudayaan, dan termasuk sastra di dalamnya, tidak semata-mata untuk dipromosikan dan dikomersialkan ke luar negeri dalam kaitan dengan program pariwisata,

tetapi yang juga harus diinternalisasi oleh setiap anak bangsa sebagai bagian dari identitas bangsa kita. Ini penting dilakukan agar kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Budaya agar membudayakan bangsa, serta sastra agar memperadabkan dan memanusiakan bangsa.

Penutup

Sebagai penutup penulis ingin mengatakan bahwa tidak ada negara yang kuat tanpa sastra. Sebuah bangsa tidak memiliki identitas tanpa sastra. Sastra bukanlah karya yang tendensius tetapi karya yang dengan elegan mengajarkan nilai-nilai, yang pembacanya tanpa pernah merasa dipaksa dan diindoktrinasi. Dalam pendidikan sastra, kita juga perlu mengajarkan sastra dengan penuh kesenangan dan kecintaan. Orang-orang yang dapat belajar sastra dengan baik didasari atas rasa kesenangan dan kecintaan akan sastra. Kesenangan dan kecintaan akan sastra ini merupakan strategi yang penting dalam pembelajaran sastra. Pembelajaran yang didasari atas rasa senang dan cinta itulah yang memungkinkan pembaca sastra menyerap nilai-nilai apa pun yang ditawarkan di dalamnya yang akan membentuk dan menguatkan identitas bangsa.

Memaknai Jejak Kritik Sastra Rawamangun vs Ganzheit: dari Polemik ke Kolaborasi

Pengantar

Sejarah kritik sastra di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang. Pada tahun 1970-an, tercatat pernah ada peristiwa polemik tajam berkait dengan pendirian politik kritik sastra, yakni antara kelompok kritik sastra Rawamangun *vs* Ganzheit. Kelompok kritik sastra Rawamangun itu beranggotakan para akademisi sastra yang berada di Kampus Universitas Indonesia, Jakarta, yakni kritikus M.S. Hutagalung, J.U. Nasution, Boen S. Oemarjati, dan M. Saleh Saad.⁸² Adapun kelompok kritik sastra Ganzheit dipelopori Arif Budiman dan Goenawan Mohamad. Masing-masing kelompok kritik sastra itu, mengklaim pendirian kritik sastranya masing-masing sebagai yang paling cocok dalam pelaksanaan kritik atas karya sastra.

Polemik atas pendirian kritik sastra dari dua kelompok kritik sastra itu, tidak diketahui kelanjutannya dan tampaknya memang tidak ada simpulan yang final yang ditinggalkan dari polemik itu. Akan tetapi, sebagai sebuah diskursus kritik sastra yang pernah ada, peristiwa polemik antara kelompok kritik sastra Rawamangun *vs* Ganzheit itu, memiliki arti penting bagi arah dan perkembangan kritik sastra di Indonesia. Paling tidak, dalam pelaksanaan kritik sastra, kritikus misalnya mengingat pada dua pendirian dalam polemik itu, dan kemudian hendak melaksanakan

⁸² Disebut *Rawamangun* karena ketika itu Universitas Indonesia berada di daerah Rawamangun (kampus lama dan kampus baru sekarang berada di daerah Depok).

kritik yang seperti apa. Meskipun tidak ada simpulan, namun dampak yang ditimbulkan dari adanya polemik pendirian itu, dapat dikatakan berpengaruh terhadap model kritik sastra di Indonesia.

Sebelum di sini lebih jauh dipahami proses perihal bagaimana polemik pertentangan pendirian itu menjadi sebuah kolaborasi menuju kritik sastra yang ideal di Indonesia, dalam tulisan ini ada baiknya diungkap selayang-pandang tentang pendirian masing-masing kelompok kritik sastra Rawamangun dan Ganzheit ketika itu sehingga sampai menimbulkan polemik pertentangan yang tajam. Dalam perkataan lain, bagaimanakah prinsip-prinsip yang dimiliki (dianut) dalam pelaksanaan kritik sastra oleh kedua kelompok kritik sastra itu? Dalam relevansinya dengan konteks kekinian, tulisan tentang kolaborasi kelompok kritik sastra Rawamangun-Ganzheit ini, lebih merupakan sebuah pemaknaan atas polemik itu.

Pendirian Kelompok Kritik Sastra Rawamangun

Sebagaimana telah dikemukakan, M.S. Hutagalung, J.J. Nasution, Boen S. Oemarjati, dan M. Saleh Saad adalah tokoh pemrakarsa kritik sastra Rawamangun. Mereka adalah para sarjana sastra Universitas Indonesia yang berkampus di Rawamangun, Jakarta. Pada mereka, tampak ada pendirian yang sama yang dimiliki pada soal hasil kritik sastra. Bagi mereka, yang disebut hasil kritik sastra itu berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

Hasil itu merupakan penerapan dari teori (kritik) sastra yang diajarkan secara sistemik di kampus, sehingga dapat diketahui teori dasar yang digunakan dalam pelaksanaan kritiknya. Dengan perkataan lain, dalam pelaksanaan kritik sastra pada metode Rawamangun itu, teori dasarnya eksplisit. Metode inilah yang sekarang disebut sebagai kritik sastra akademik atau ilmiah.

Kemudian, untuk mempertegas keilmiahannya, kritik sastra Rawamangun juga menggunakan sistematik dan teknik penulisan ilmiahnya. Untuk mengkritik karya sastra, digunakan teori-teori (kritik)

sastra dari para ahli terkait (yang mungkin kebanyakan dari Barat). Model kritik sastra Rawamangun ini, kalau dikaitkan dengan kerangka Abrams (1958) dimasukkan ke dalam pendekatan objektif.

Oleh karena, kritik-kritik sastra Rawamangun lebih mengutamakan pada karya sastra sebagai objek kritik (kajian). Para penganut metode kritik sastra ini beranggapan bahwa peneliti (kritikus akademik) harus bertolak dari eksistensi karya sastranya sendiri. M.S. Hutagalung, J.J. Nasution, Boen S. Oemarjati, dan M. Saleh Saad sepertinya berada dalam satu pemahaman dalam konteks mengatakan bahwa kritik atas karya sastra harus dilakukan pada karya sastra saja dan tidak mendasarkan diri pada hal-hal di luar sastra (masyarakat, politik, pengarang, atau lainnya).

Namun, dalam realitasnya, meskipun memiliki pendirian seperti itu, kelompok sastra Rawamangun tampaknya kurang taat asas, kalau dilihat dari karya-karya kritik sastra yang dihasilkannya. Ternyata ketika mereka mengkritik (mengkaji) novel *Atheis* karya Achdiat Kartamihardja, digunakan juga pendekatan ekspresif, pragmatik, dan mimetik secara bercampur-campur. Ketiga pendekatan itu tentulah sangat membutuhkan hal-hal di luar teks untuk mengkritik (mengkaji)-nya. Mengkaji secara ekspresif, tentulah perlu mengaitkan dengan pengarangnya; mengkaji secara pragmatik tentulah perlu melibatkan pembacanya; dan mengkaji secara mimetik, tentulah perlu melihat keterkaitannya dengan realitas sosial (*universe*).⁸³

Pencampuran atau penggabungan bermacam-macam teori (kritik) sastra dalam kritik sastra itu tentu saja menunjukkan adanya tidak taat asasnya kelompok kritik sastra Rawamangun dalam pendirian kritik objektif. Namun, apa yang dilakukan M.S. Hutagalung, J.J. Nasution, Boen S. Oemarjati, dan M. Saleh Saad dalam kajian-kajiannya, dapat dipahami bahwa mereka menekankan pada kajian objektif.

⁸³ Khusus dalam keterkaitannya dengan realitas sosial ini, karena karya sastra itu sebagai akibat (*effect*) dari sebab (*cause*). Lihat I. B. Putera Manuaba, "Perihal Sastra, Institusi, dan Perubahan Sosial". Makalah dalam Seminar Sehari dengan tema "Sastra, Institusi dan Perubahan Sosial" yang diselenggarakan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Arlangga Surabaya bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Timur, di Fakultas Ilmu Budaya, pada tanggal 22 September 2015.

Dalam kerja kritik sastra, kelompok kritik sastra Rawamangun menyadari bahwa meskipun karya sastra dipahami sebagai sebuah karya otonom, namun acap kali tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari hal-hal di luar teks sehingga mungkin karena itu pendekatan sastra itu dicampur-campur. Di samping itu, tampaknya yang ingin dikatakan mereka sebagai sebuah pendirian adalah kritik objektiflah yang mendominasi dalam pelaksanaan kritik. Artinya, dalam kritik sastra Rawamangun, kritik lebih diarahkan pada pemahaman struktur karya sastra.

Dengan lebih menekankan pada kajian struktur, kritik sastra Rawamangun telah membangun satu paradigma kajian yang diberlakukan khususnya di kalangan akademik sastra.⁸⁴ Dengan penekanan pada analisis struktur ini, paradigma Rawamangun menyasar kerja kritiknya pada soal analisis struktur sebagai yang pokok (utama). Jadi, kerja atas karya sastra dari mana pun harus diawali dengan analisis struktur sebagai tugas pokok atau kerja pendahuluan.

Jika dipahami secara lebih jauh, dapat diketahui bahwa kelompok kritik sastra Rawamangun memandang karya sastra merupakan dunia dalam kata yang memiliki kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat digali dari karya sastra itu sendiri. Perihal pendirian kritik sastra Rawamangun yang pernah ada pada tahun 1970-an inilah barangkali yang membuat A. Teeuw juga mengungkap dalam salah satu bukunya *Membaca dan Menilai Sastra*⁸⁵ yang mengatakan bahwa dari mana pun analisis karya sastra dilakukan, harus diawali dengan membongkar analisis strukturnya.

Apabila pekerjaan analisis struktur sebagai tugas pokok dalam kritik sastra, makna unsur-unsur karya sastra hanya dapat dipahami sepenuhnya atas pemahaman bagaimana fungsi unsur-unsur struktur itu dalam keseluruhan (keutuhan) karya sastra. Inilah yang kemudian

⁸⁴ Hasil kritik seperti inilah yang sekarang disebut dengan *Kritik Akademik*, yang dibedakan dengan *Kritik Media Massa*. Lihat I.B. Putera Manuaba, "Kritik Sastra Indonesia Dalam Idealitas Siklus Ilmu Sastra: Beberapa Catatan Pinggir". Makalah disampaikan dalam Seminar "Perdebatan Kritik Sastra" di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya, pada tanggal 12 November 2008.

⁸⁵ A. Teeuw, *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia, 1983).

membuat kelompok kritik sastra Rawamangun berpendirian bahwa analisis struktur ini tidak dapat dilewati sebelum melakukan pemaknaan atas keseluruhan karya sastra. Sebab, hanya dengan mengawali dengan analisis struktur itulah akan memungkinkan adanya pengertian yang optimal. Pendirian tentang analisis struktur yang paling menentukan ini, kemudian diikuti dan diteruskan dalam pandangan para teoretisi sastra lainnya yang memosisikan struktur itu yang paling utama, seperti Mursal Esten, Zaimar, Bekker, Prihatmi, Teeuw, Pradopo, dan sederetan nama lainnya yang menganut pemahaman ini.

Dapat diketahui bahwa kelompok kritik sastra Rawamangun menggunakan pendekatan objektif sebagai andalan. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang lebih berorientasi pada kajian atau kritik atas karya sastra itu sendiri sebagai objek kajian. Kajian dan kritik atas karya itu operasionalnya adalah analisis struktur teks, yang di dalamnya dilakukan analisis unsur-unsur struktur untuk mendapatkan pemahaman keseluruhan (keutuhan) karya sastra. Fokus utamanya terletak pada kajian tekstual, tekalah yang paling penting dalam rangka pemaknaan atas karya itu.

Dengan penekanan pada analisis tekstual, terang saja analisis akan sangat intens dalam kajian struktur. Struktur karya sastra dikaji secara lebih detail dan mendalam. Oleh karena itu, analisis struktur karya sastra ini menjadi analisis yang sangat penting, yang tidak dapat dilampai. Konsekuensinya, analisis apa pun yang dilakukan atas karya sastra dengan berbagai metode analisis, haruslah terlebih dahulu melalui analisis struktur karya sastra. Pendirian inilah yang dapat dikatakan menjadi keunggulan dari pendirian kelompok kritik sastra Rawamangun.

Di samping keunggulan tersebut, ada kelemahannya. Ini mengingatkan setiap teori (kritik) sastra pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Jadi, yang dapat dipandang sebagai kelemahan kritik sastra ini adalah analisis dan hasil analisisnya yang hanya merupakan analisis atau hasil analisis secara tekstual, dan kurang luas penafsirannya karena tidak menyentuh atau melibatkan kekayaan yang ada di balik karya sastra itu. Di balik karya sastra itu, ada kekayaan yang dapat diinterpretasi dan dimaknakan secara lebih luas lagi. Tampaknya, pendirian kelompok kritik sastra

Rawamangun ini hanya memahami *karya sastra* hanya sebagai sebuah *tanda*, belum pada pemahaman bahwa karya sastra adalah *petanda*. Sebagai *petanda*, karya sastra perlu dimaknakan di balik yang menampak dalam *tanda*. Pendirian kelompok kritik sastra Rawamangun yang cenderung lebih berkuat pada teks ini, belum mampu menguak kekayaan sosio-kultural yang menjikai teks itu.

Adanya keterbatasan analisis dan kritik sastra Rawamangun pada analisis dan kritik tekstual inilah yang kiranya memantik adanya pendirian kelompok kritik sastra Ganzheit, yang berpendirian berbeda dengan kelompok kritik sastra Rawamangun. Atas dasar itulah, berikut diungkap pendirian kelompok kritik sastra Ganzheit.

Pendirian Kelompok Kritik Sastra Ganzheit

Pendirian kritik sastra Ganzheit berbeda dengan pendirian kritik sastra Rawamangun. Kelompok kritik sastra Ganzheit dimotori Arif Budiman dan Goenawan Muhamad. Ketika itu, Arif Budiman yang memiliki latar pendidikan psikologi, lebih menggunakan dasar pemikiran psikologi Gestalt dalam mengkritik karya sastra.

Bertolak belakang dengan metode kritik sastra Rawamangun, metode Ganzheit ini melakukan kritik atas karya sastra bukan lagi dari analisis per unsur, melainkan berdasarkan keutuhan (totalitas). Kelompok ini memandang apa yang dilakukan kelompok kritik sastra Rawamangun, cenderung mencincang-cincang karya sastra, dan penghayatan karya sastra tidaklah dapat dilakukan dengan memulai dari analisis unsur-unsur seperti itu.

Bagi Arif Budiman dan Goenawan Mohamad,⁸⁶ proses peristiwa kritik itu pada mulanya adalah semacam pertemuan antara manusia dan karya sastra. Pertemuan itu tidaklah terjadi melalui proses bagian-bagian, tetapi berlangsung dalam suatu dialog atau interaksi yang utuh terhadap karya sastra. Dengan demikian, di sini terjadi *Einfuhlung*, suatu

⁸⁶ Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, "Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian", dalam Lukman Ali (ed.), *Tentang Kritik sastra: Sebuah Diskusi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978), halaman 4.

penghayatan langsung, tanpa terlebih dahulu melalui analisis yang detail dan pendekatan diskursif.

Arif Budiman dan Goenawan Mohamad⁸⁷ lebih lanjut memandang bahwa memahami sebuah karya sastra itu seperti memahami seorang manusia. Artinya, tidaklah memahami karya sastra dengan jalan setapak demi setapak atau unsur demi unsur. Dipahami seperti itu, karena bukan elemen-elemen karya sastra itu yang datang terlebih dahulu pada kita selaku pembaca, melainkan totalitasnya. Hal ini sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang dengan jelaskan dibuktikan oleh psikologi Gestalt.

Dengan mendasarkan pada pemahaman psikologi Gestalt,⁸⁸ Arif Budiman dan Goenawan Mohamad⁸⁹ cenderung memandang penting penghayatan keseluruhan (totalitas) atas karya sastra. Dipahami seperti itu, karena dasar pemikiran psikologi Gestalt dengan jelas mengatakan bahwa suatu keseluruhan (totalitas) memiliki kualitas baru, dan kualitas baru ini tidak sama dengan jumlah semua elemen-elemennya. Misalnya, jika kita membaca sebuah kata tanpa disadari bahwa pada kata itu ada sebuah huruf yang hilang atau salah cetak. Begitu pun ketika dalam mengenali wajah yang sangat intim sekali, dan mungkin pada suatu saat apabila timbul pertanyaan bagaimanakah bentuk bibir atau hidung dan wajah tersebut secara tepat, maka kita kewalahan untuk mencoba mengonstruksikan bentuk-bentuk bibir hidung yang ditanyakan tadi. Bahkan sangat mungkin juga untuk mengenalinya akan mengalami kegagalan, kendatipun sebenarnya kita sudah benar-benar kenal dengan wajah itu dalam keseluruhannya. Begitulah menurut Arif Budiman dan Goenawan Muhamad, jika kita menggunakan analisis unsur demi unsur dipandang tidak mampu memberikan hasil kritik yang total tentang karya sastra yang dikritik.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Gestalt merupakan satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas sehingga data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena (gejala), serupa dengan filsafat fenomenologi. Gestalt cenderung berupaya meminimalisasi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil, dan cenderung melihatnya sebagai kesatuan yang utuh.

⁸⁹ Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, *op.cit.*, halaman 4–5.

*Semua itu karena pada hakikatnya, yang kita hayati ialah sebuah totalitas. Sebuah totalitas bukanlah elemen-elemen yang kita susun satu demi satu. Sebuah totalitas langsung kita hayati sebagai keseluruhan, bukan melalui penghayatan unsur-unsurnya satu demi satu.*⁹⁰

Pada prinsipnya, cara penghayatan menyeluruh (totalitas) itulah yang lebih diutamakan dalam kerja kritik sastra Ganzheit. Ketika kita berhadapan dengan karya seni apa pun, cara penghayatan Ganzheit inilah yang dipandang paling representatif oleh Budiman dan Mohamad. Arief Budiman⁹¹ (melalui Budiman dan Mohamad, lebih tegasnya membandingkan dalam menghayati lagu sebagai bagian karya seni. Arif Budiman menyatakan bahwa sebuah lagu tidak kita hayati melalui nada pertama ditambah dengan nada kedua dan seterusnya. Dalam hal ini, tentu kita berhadapan langsung dengan sebuah lagu sebagai keseluruhan. Elemen-elemen yang ada di dalamnya akan secara dinamis mengadakan interferensi yang menghasilkan sebuah kualitas baru. Kualitas baru inilah yang kita hayati, yang kita tangkap pertama kali. Elemen-elemen baru muncul kemudian, setelah kita mengadakan analisis secara keseluruhan (totalitas).

Cukup menarik juga yang kemudian dikatakan Arif Budiman dan Goenawan Mohamad⁹²

... setiap penghayatan merupakan sebuah rekreasi, penciptaan kembali, dan karya seni datang sebagai keseluruhan tersendiri, dan bersama kita sebagai subjek penikmat, membentuk satu keseluruhan baru. Inilah Ganzheit: suatu keseluruhan di mana faktor manusia yang menghayati

Selanjutnya, dengan meyakinkan Arif Budiman dan Goenawan Mohamad,⁹³ menyampaikan perihal bagaimana cara kita menilai sebuah karya sastra yang baik dan yang kurang berhasil. Ia berpatokan pada

⁹⁰ Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, *op.cit.*, halaman 4-5.

⁹¹ Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, *op.cit.*, halaman 5.

⁹² Arief Budiman dan Goenawan Mohammad, *op.cit.*, halaman 5.

⁹³ Arief Budiman dan Goenawan Mohammad, *op.cit.*, halaman 6.

cara penilaian Ganzheit. Jika karya sastra yang kita hayati dapat secara langsung menenggelamkan kita dalam satu pertemuan yang akrab, maka kita dapat menilai karya sastra itu sebagai karya sastra yang baik. Artinya, keseluruhan kesan yang hidup atau Ganzheit itu sejak mula sampai akhir benar-benar hidup dan padu. Sebaliknya, jika karya itu datang secara terbata-bata, terasa retak-retak. Atau, dengan perkataan lain, jika sebuah karya sastra yang kita nilai tidak dapat menggugah satu keakraban yang padat melainkan memperlihatkan satu disharmoni, maka kita pun dapat menilai karya itu tidak berhasil.

Dalam kritik sastra Ganzheit, sebagaimana yang dikatakan Arif Budiman dan Mohamad⁹⁴ (1978:6), dalam pengungkapan kembali dalam bentuk karya kritik—yang penting adalah bukan kriteria objektif. Lalu, apakah hal yang penting itu? Hal yang penting bukanlah sebuah keputusan yang dapat disetujui bersama oleh semua orang, melainkan bagaimana kritikus mempertanggungjawabkan keputusannya itu. Satu keputusan dapat saja mungkin tidak diyakini bagi orang lain—satu kebenaran internal yang diyakini. Satu lagi yang penting, kritik sastra dalam pandangan Ganzheit bukanlah dipahami sebagai satu penelaahan atau penyiasatan dan bukan pula dipahami sebagai penelitian, tetapi semata-mata kecakapan pengungkapan kembali suatu pengalaman estetik.

Dalam hal ini Arif Budiman dan Goenawan Mohamad,⁹⁵ memang juga memandang perlu ada analisis, tetapi analisis adalah semata-mata berkapasitas sebagai upaya untuk membantu pengungkapan hasil penghayatan totalitas. Analisis yang dimaksudkan dalam kritik Ganzheit adalah analisis pengalaman estetik tersebut, bukan analisis karya sastra secara dingin. Karena itulah maka analisis dalam kritik sastra Ganzheit ini lebih tepat dinamakan refleksi, dalam arti sesuatu yang dilakukan sesudah pengalaman.

Dengan pendirian kritik sastra Ganzheit yang dilatarbelakangi psikologi Gestalt ini, Arif budiman menawarkan metode kritik sastra

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

yang tidak terlebih dahulu menggunakan patokan-patokan umum untuk menilainya. Maksudnya, tidak menggunakan teori-teori (kritik) sastra yang ada. Adapun yang diperlukan dalam kerja kritik sastranya adalah kemampuan kritikus untuk menghidupkan kembali secara utuh pengalaman-pengalamannya ketika bertemu dengan karya sastra. Kritik sastra Ganzheit Arif Budiman menghayati karya sastra secara keseluruhan, tidak dicincang-cincang dalam analisis unsur per unsur. Aktivitas mengkritik sastra itu sesungguhnya mengadakan pertemuan yang mesra dengan karya sastranya, tidak ada hubungan subjek atau objek, melainkan pertemuan antara subjek dan subjek.

Jika dicermati, meskipun model kritik sastra yang ditawarkan kritik sastra Ganzheit Arif Budiman seperti itu, sebetulnya juga masih berkesesuaian dengan kerja strukturalisme. Dikatakan demikian, karena strukturalisme juga memandang unsur-unsur karya sastra itu tidak bermakna secara sendiri-sendiri, tetapi sangat ditentukan oleh hubungan antarunsur dan keseluruhannya.

Demikianlah pendirian kritik sastra Ganzheit, yang dalam kerja kritik sastranya lebih mengutamakan penghayatan keseluruhan (totalitas) atas karya sastra, sedangkan analisis itu hanya digunakan sebagai pendukung untuk sampai ke hasil kritik totalitas.

Kolaborasi Kritik Sastra Rawamangun-Ganzheit

Kelompok kritik sastra Rawamangun dan Ganzheit ini masing-masing menawarkan metode kerja kritik sastra yang berbeda dan bahkan dapat dikatakan bertentangan. Akan tetapi, jika kita cermati, kedua kelompok kritik sastra itu memiliki tujuan yang sama yakni ingin mendapatkan hasil kritik sastra yang optimal dan ideal. Oleh karena itu, perlu ada mediasi, agar kritik sastra itu dapat dilaksanakan secara ideal. Dalam hal ini, kedua pendirian kritik sastra Rawamangun dan Ganzheit dipadukan dengan mengambil keunggulan masing-masing pendirian kritik sastra Rawamangun dan Ganzheit.

Dalam prinsip kerja kelompok kritik sastra Rawamangun, kritik dilakukan dengan mencoba mengenali dan menganalisis secara detail dan

mendalam unsur demi unsur untuk mencapai pemahaman keseluruhan. Hal itu terjadi karena dalam prinsipnya, keseluruhan hanya dapat dipahami jika dapat dijelaskan unsur-unsurnya. Sebab, unsur-unsur itulah yang membangun keseluruhan (totalitas) karya sastra—sebagaimana yang menjadi orientasi kelompok kritik sastra Ganzheit. Maka, patokannya, kritikus yang mampu menjelaskan unsur demi unsur secara detail dan mendalam itu akan mampu memahami karya itu secara utuh. Orientasi kerja kritik sastra Rawamangun seperti itu, dapat dipandang sebagai keunggulan yang tentu saja patut diperhatikan guna membangun dasar kerja kritik sastra yang ideal.

Kritik sastra Ganzheit yang menggunakan latar belakang aliran psikologi Gestalt ini juga memiliki prinsip yang penting. Sebagaimana dikemukakan dan kembali disampaikan secara singkat, kelompok kritik sastra ini memandang prinsip keutuhan (totalitas) sebagai dasar kerja yang utama dalam pelaksanaan kritik sastra. Dengan prinsip ini, terlebih dahulu, ketika pertama kali kritikus (subjek) berhadapan dengan karya (objek), harus terjadi “pertemuan” yang total, apakah karya itu sebagai karya yang baik atau belum berhasil. Cara untuk penilaian ini adalah dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman estetik (*traces*) dalam menghayati karya. Sama seperti menilai seorang gadis, ketika pertama kali bertemu dinilai secara utuh misalnya sebagai gadis yang cantik. Baru setelah itu barulah melihat detailnya mungkin ada jerawatnya atau lainnya lagi. Untuk menyebut atau menilai seorang gadis itu cantik, orang haruslah tahu memori sebelumnya tentang seorang gadis dikatakan cantik. Cantik itu seperti siapa dan dengan ciri-ciri yang bagaimana. Inilah yang dilakukan kelompok kritik sastra Ganzheit dalam pelaksanaan kritik sastra. Melihat cara kerja kritik sastra Ganzheit ini sepertinya jelas ada tuntutan bagi kritikus sebagai orang yang memiliki kompetensi sebagai seorang kritikus yang punya pengalaman, wawasan, ketajaman penghayatan dan seterusnya.

Dua kelompok kritik sastra yang berbeda dan memiliki prinsip kerja kritik sastra itu potensial untuk disatukan. Keunggulan yang dimiliki kedua kelompok kritik sastra itu dapat dikolaborasikan menjadi kekuatan baru dan dijadikan sebagai dasar kerja kritik sastra di Indonesia,

yang barangkali kita namakan sekarang dengan "Kritik Kolaborasi Rawamangun-Ganzheit". Dalam kritik sastra kolaborasi ini, kritik sastra penting dilakukan dengan analisis yang detail dan mendalam unsur demi unsur sebagai pembentuk keutuhan karya, dan penting dilakukan penghayatan yang utuh (totalitas) atas karya sastra dengan kompetensi yang dimiliki si kritikus. Perpaduan keduanya ini, entah yang mana didahulukan dalam proses kerjanya, sangat potensial menghasilkan hasil kritik yang optimal dan ideal. Kemudian, apabila kita hubungkan dengan kerja strukturalisme yang dikenal sekarang ini, sebenarnya perpaduan antara keduanya itu memang menghasilkan hasil yang sesuai dengan strukturalisme. Sebab, dalam strukturalisme, dikenal adanya prinsip *penjelasan-pemahaman*. Menjelaskan dengan menganalisis secara detail dan mendalam unsur-unsur pembentuk struktur untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang karya sastra dan memahami untuk keseluruhan agar dapat menjelaskan bagian-bagian atau unsur-unsur pembentuk struktur karya sastra. Jika sebuah karya sastra dalam keutuhan karyanya dipahami sebagai sebuah karya yang koheren maka karya sastra itu sebagai sebuah *sistem*, seperti halnya *mesin* yang memiliki sistem. Jika di dalam mesin ada bagian yang tidak ada maka mesin itu akan bermasalah. Dalam karya sastra, jika ada unsur yang tidak mendukung dalam rangka keutuhan karya maka karya itu akan menjadi tidak koheren.

Penutup

Demikianlah kritik sastra yang kolaboratif yang digali dari keunggulan pendirian kritik sastra Rawamangun dan Ganzheit. Di balik polemik pertentangan yang ada pada kedua model kritik sastra itu, sesungguhnya tersembunyi "mutiara terpendam" yang saling melengkapi menuju kritik sastra yang ideal. "Mutiara terpendam" itu sejak adanya polemik pertentangan kritik sastra Rawamangun *vs* Ganzheit pada tahun 1970-an itu hingga saat ini, rasanya belum pernah ada upaya secara eksplisit menyinergikan menjadi kekuatan baru kritik sastra yang penting artinya bagi pengembangan kritik sastra di Indonesia.

Warna Lokal dan Internasionalisasi Sastra Indonesia

Pengantar: Sastra Indonesia dalam Era MEA

Sastra Indonesia memiliki komunitas pembaca yang cukup besar saat ini. Realitas ini menarik diperbincangkan dalam tulisan ini, berkait dengan adanya kemungkinan sastra Indonesia menjadi sastra ASEAN di era MEA.⁹⁶ Komunitas pembaca sastra Indonesia tersebut tidak hanya terdapat di dalam negeri (sebagai pembaca nasional), tetapi juga di luar negeri yakni pembaca di beberapa negara (sebagai pembaca internasional dan khususnya pembaca ASEAN).

Besarnya komunitas pembaca sastra Indonesia tersebut, sangat berkait dengan realitas produktivitas karya sastra Indonesia yang juga besar. Realitas produktivitas sastra Indonesia tersebut dikatakan besar, akan makin jelas lagi jika dikomparasi dengan produktivitas sastra daerah atau sastra klasik di Indonesia. Apabila ada realitas bahwa komunitas pembaca sastra Indonesia yang besar tersebut, tentu kita mempertanyakan apa yang menyebabkannya?

Secara spontan dapat dijawab bahwa besarnya komunitas pembaca sastra Indonesia karena karya sastra Indonesia yang terus-menerus ditulis oleh pengarang dan diterbitkan oleh penerbit dalam jumlah yang banyak dan bervariasi dalam berbagai genre. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam setiap masa lahir sastrawan baru dengan corak

⁹⁶ Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan diberlakukan pada tahun 2015 ini, tepatnya mulai tanggal 31 Desember 2015.

karya yang juga baru. Jika dicermati, hampir dalam setiap masa dalam sejarah kesusastraan Indonesia ada tren yang menandai karya-karya yang ditulisnya. Misalnya, jika kita menelusuri sejarah kesastraan Indonesia, yang dimulai dari awal kesusastraan Indonesia, yakni masa Balai Pustaka, masa Pujangga Baru, Angkatan '45, Angkatan '66, masa tahun 1970-an, masa tahun 1980-an, masa tahun 1990-an, masa tahun 2000-an, dan masa yang nantinya terus bergulir, seperti ada tren-tren yang menandai.

Secara umum dan dalam keterwakilan, mungkin dapat diketahui bahwa pada masa Balai Pustaka trennya adalah romantisme yang diwakili *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli, *Salah Asuhan* karya Abdul Muis, *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar, *Belenggu* oleh Armijn Pane; pada masa Pujangga Baru trennya adalah modernisme yang diwakili *Layar Terkembang* karya Sutan Takdir Alisjahbana; pada masa Angkatan '45 trennya adalah patriotisme yang diwakili puisi-puisi Chairil Anwar; pada masa Angkatan '66 trennya adalah kritik sosial yang diwakili *Tirani dan Benteng* karya Taufiq Ismail dan juga puisi-puisi karya Rendra; pada masa tahun 1970-an trennya adalah absurdisme yang diwakili *Ziarah, Merahnya Merah, dan Koong* karya Iwan Simatupang, Putu Wijaya, dan Arifin C. Noer; masa tahun 80-an trennya adalah humanisme yang diwakili *Tetralogi (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca)* karya Pramoedya Ananta Toer; pada masa tahun 1990-an trennya adalah humanisme-nasionalisme-religiositas diwakili *Burung-burung Manyar, Durga Umayi* karya Y.B. Mangunwijaya; pada masa tahun 2000-an adalah seksualisme yang diwakili *Saman* karya Ayu Utami dan *Jangan Bermain-main dengan Kelaminmu!* karya Jenar Mahesa Ayu; ada juga tren-tren berikutnya yang terbaca tentang pencarian jati diri pada karya-karya Anwar Fuadi, Dee Lestari, dan Eka Kurniawan, dan sebagainya. Tentunya penyebutan tren-tren tersebut masih dapat dibantah karena penyebutan itu baru didasarkan pada proses pembacaan sastra, belum pada penelitian yang komprehensif tentang kecenderungan tren-tren sastra Indonesia dari masa ke masa.

Realitas dalam Sastra Indonesia dan Penerjemahan

Selain itu, berdasarkan pengamatan, besarnya pembaca sastra Indonesia itu, disebabkan juga karena karya sastra yang terbit mengisahkan keterkaitan dengan realitas (sosial, ekonomi, politik, psikologi, dan budaya) yang ada. Dapat dikatakan, karya sastra Indonesia yang diciptakan sastrawan Indonesia, tidak ada yang terlepas dari realitas yang melingkunginya tempat sastrawannya hidup dan mengembangkan dirinya. Hal ini sudah lama pernah disampaikan Damono,⁹⁷ "Sastra menampilkan gambaran kehidupan; dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial ... kehidupan mencakup hubungan antarmasyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang."

Berbagai dinamika sosial, kondisi masyarakat, konflik sosial dan batin, kondisi politik, psikologi manusia Indonesia, pendegradasian kemanusiaan, dan problem yang ada di dalam masyarakat Indonesia menjadi persoalan yang mendapat respons dari sastrawan yang kemudian diekspresikan dalam karya cipta sastra Indonesia.⁹⁸ Banyak persoalan yang diekspresikan dalam karya sastra Indonesia yang tidak hanya dapat dirasakan oleh pembaca sastra Indonesia di Indonesia sendiri, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh pembaca sastra Indonesia di luar negeri, khususnya pembaca ASEAN. Misalnya, karya sastra Tetralogi yang ditulis oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer, yang sangat diresapi oleh pembaca luar negeri seperti di Malaysia (bahkan telah dijadikan bacaan wajib dalam pembelajaran sastra).

Banyaknya problematik kehidupan manusia Indonesia yang bersifat universal yang terekspresikan dalam karya sastra Indonesia itu, membuat karya sastra ini banyak dibaca, dipelajari, dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Menariknya lagi, penerjemahan karya ini merupakan suatu proses internasionalisasi karya sastra Indonesia menjadi karya

⁹⁷ Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, halaman 1978), halaman 1.

⁹⁸ Lihat juga selanjutnya Diana Laurenson and Alan Swingewood, *Sociology of Literature* (London: Paladin, 1972), halaman 16-18.

sastra dunia. Ini berarti, karya sastra Indonesia yang semula diciptakan oleh sastrawan Indonesia untuk pembaca Indonesia dalam lingkungan sastra tidak hanya dibaca oleh pembaca sastra Indonesia di dalam negeri tetapi juga di luar negeri (pembaca dunia). Bahkan, karya sastra Indonesia banyak yang dapat dipahami langsung dalam bahasa aslinya (bahasa Indonesia) oleh pembaca dari negara-negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Pemanfaatan wahana bahasa Indonesia dalam penulisan sastra Indonesia tersebut memberikan nilai tambah karena bahasa Indonesia yang *notabene* adalah bahasa Melayu juga⁹⁹ secara tidak langsung dapat mempermudah pembaca serumpun untuk memahami dan menghayati karya sastra Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan, keberadaan sastra Indonesia di tengah sastra ASEAN dapat dikatakan memiliki posisi yang sangat baik, karena sejak lama sudah dikenal oleh pembaca warga ASEAN.

Dengan perkataan lain, semua karya sastra Indonesia yang diciptakan sejak awal selalu terkait dengan realitas sosial masyarakatnya. Dapat dikatakan, tidak ada karya yang terlahir tidak berpijak di bumi, semuanya berpijak di bumi (realitas kehidupan sosial).¹⁰⁰ Pada dasarnya, semua karya sastra itu kontekstual sekaligus mengandung nilai-nilai universalitas. Karya-karya penting yang pernah ada di Indonesia, mengekspresikan dan menggambarkan berbagai kejadian, kondisi, dan gambaran sosial masyarakat pada zamannya di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran juga jika bidang-bidang ilmu di luar sastra memosisikan karya sastra sekaligus juga sebagai dokumen penting zamannya. Orang-orang dari berbagai bidang ilmu juga merasa berpentingan membaca sastra, bukan seperti dalam kacamata orang sastra membaca sastra, tetapi dengan kacamata sendiri.

⁹⁹ Perlu diingat kembali bahwa bahasa Indonesia cikal-bakalnya berasal dari Bahasa Melayu Riau yang diperkaya dengan bahasa asing dan bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu itu juga menjadi cikal-bakal bahasa Melayu yang berkembang di Malaysia, Singapura, dan Brunei, kendatipun mereka juga mencampurnya dengan bahasa Inggris.

¹⁰⁰ Tentang karya sastra yang berkaitan dengan realitas ini dapat juga dibandingkan dengan pernyataan Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas* (Jakarta: P4B, 1972), halaman 1. Ia menyatakan bahwa "... sastra tidak jatuh begitu saja dari langit, bahwa hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat bukanlah sesuatu yang dicari-cari".

Penciptaan Sastra Indonesia: *Cause* dan *Effect*

Dengan dikatakannya bahwa semua karya sastra yang diciptakan itu berpijak di bumi, membuat semua karya itu sesungguhnya tidak terlepas dari masyarakat di mana karya sastra itu diciptakan oleh sang sastrawannya. Sebagaimana dikatakan Damono, tidak ada karya sastra yang lahir dari awang-awang atau langit. Selanjutnya, menurut saya, kelahiran karya sastra itu semuanya adalah merupakan akibat (*effect*) dari adanya persentuhan dan interaksi sastrawan dengan masyarakatnya di mana sang sastrawan itu hidup dan mengembangkan kehidupannya. Maka itu, kelahiran sastra juga pastilah karena sebuah sebab (*cause*). Dari mana pun inspirasi penciptaan atas sastra itu, pastilah diawali dengan adanya sebab yang dapat ditangkap sastrawan kemudian berakibat pada ditulisnya karya. Sebab (penyebab) itu dapat saja bersumber dari pengalaman estetis yang ada, baik dalam hubungan horizontal dengan alam, manusia, masyarakat maupun secara vertikal dengan Sang Pencipta.

Dengan demikian, tidak ada karya sastra yang lahir tanpa sebab (*cause*). Semua karya sastra terlahir sebagai sebuah akibat dari sebab yang ada, dari kondisi sosial yang melingkunginya. Adapun sebab itu dapat sangat bervariasi; dari yang remeh-temeh, biasa-biasa saja, hingga yang paling rumit dan krusial sekalipun. Semuanya dapat menjadi penyebab terciptanya sastra. Dalam hal ini, sang sastrawan sesungguhnya juga tengah menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai seorang yang bertugas mengekspresikan, merefleksikan, serta memikirkan lebih jauh tentang berbagai kejadian dan kondisi yang dihadapi manusia dan masyarakat, dan kemudian mengekspresikannya ke dalam karya.

Oleh karena itulah dalam karya sastra orang dapat menyimak dan merasakan relasi-relasi antaramanusia, manusia, dan Tuhannya; dalam sastra orang dapat merasakan pahit-manisnya kehidupan yang berwujud perasaan-perasaan, aspirasi-aspirasi, dan gagasan-gagasan dalam karya. Maka itu, ketika suatu kejadian disembunyikan, ditutupi, atau dimanipulasi, sastra tetap hadir tegak menggugah perasaan pembaca dengan caranya sendiri. Sebab, eksistensi sastra akan selalu mengungkapkan kebenaran substantif, kejujuran, dan kebaikan melalui gaya kepengarangan masing-masing.

Penguatan Warna Lokal dalam Internasionalisasi Sastra Indonesia

Bertitik-tolak dari eksistensi sastra yang berpijak di bumi, hal yang perlu dikatakan di sini bahwa sastra Indonesia memiliki warna lokal yang kuat. Dapat juga dikatakan bahwa tentu tidak ada karya sastra Indonesia yang ditulis tanpa warna lokal—begitu pun karya sastra lainnya. Dalam berbagai variasinya, setiap karya sastra Indonesia yang diciptakan sang sastrawan yang lahir akan memuat warna lokalnya sendiri.¹⁰¹ Penyertaan warna lokal dalam penciptaan sastra, dapat dikatakan cenderung terjadi secara otomatis dan spontan juga karena warna lokal adalah sesuatu yang secara otomatis juga telah diakrabi dan telah menjadi bagian dari dunia sastrawannya. Sebagai layaknya manusia lainnya, sang sastrawan yang *notabene* adalah manusia biasa, tentu juga mengalami proses sosial internalisasi primer dan sekunder terhadap nilai, lembaga sosial, dan berbagai hal yang ada di lingkungan kehidupan yang mengitarinya.¹⁰²

Perlu diketengahkan juga dalam tulisan ini bahwa warna lokal dalam realitas penciptaan karya sastra bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sebagai sesuatu yang niscaya melekat ada dan bahkan sebagai yang kodrati dalam sebuah karya sastra. Kalau ditanyakan mulai kapan warna lokal itu ada dalam sastra Indonesia? Jawabannya tentu saja sejak karya sastra Indonesia itu diciptakan, bahkan warna lokal itu sudah ada sejak jauh sebelumnya yakni sejak masa kesusastraan yang paling klasik atau lampau sekalipun. Kalau dilanjutkan pertanyaannya, sampai kapan warna lokal itu akan ada? Jawabannya adalah sepanjang karya sastra itu diciptakan oleh sastrawannya. Lalu, kapan karya sastra itu tidak lagi ada warna lokalnya? Jawabannya adalah ketika karya itu tidak lagi diciptakan oleh sastrawannya.

¹⁰¹ Kondisi penciptaan sastra Indonesia itu menjadi menarik mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang mungkin belum tentu dimiliki negara-negara lainnya di dunia. Kekayaan budaya inilah yang turut mewarnai kualitas sastra Indonesia.

¹⁰² Lihat Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990) halaman 87; dan Peter Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, diterjemahkan dari buku asli *Sacred Canopy* oleh Hartono (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), halaman 5.

Apabila dicermati, warna lokal yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada latar budaya lokal atau daerah. Dalam kajian sastra yang ada selama ini, warna lokal cenderung hanya dikonsepsikan sebatas kajian *latar* dan *diksi*. Oleh karena itu, anggapan bahwa yang memiliki warna lokal hanya pada karya-karya tertentu saja yang dilatarbelakangi budaya lokal (daerah-pedesaan), seperti yang dibayangkan kekentalan warna lokal dalam karya-karya Ahmad Tohari berkaitan dengan budaya Jawa Banyumasan, tentulah tidak sesuai lagi untuk dimanfaatkan dalam kajian. Konseptual warna lokal seperti itu tentu saja perlu direkonseptualisasikan lagi. Warna lokal tidaklah memiliki lingkup yang sesempit seperti itu.

Jelaslah bahwa kajian tentang warna lokal dapat menyangkut lingkup yang sangat luas, dapat menyangkut ruh (tema) karya, semangat zaman karya, pesan (*message*), amanat, dan gagasan-gagasan sastrawan serta lokalitas dan budaya yang melatarbelakangi—entah berkaitan dengan lokalitas dan budaya tradisi kosmopolitan (urban). Jadi, dalam kondisi apa pun dan bagaimanapun yang ada dalam kaitan dengan lokal di mana karya tersebut diciptakan pada dasarnya merupakan warna lokal sehingga kajian atas warna lokal pun harus dilakukan secara luas seperti itu.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa karya-karya puisi Chairil Anwar yang ditulis pada dekade 1945-an yang menggelorakan semangat perjuangan dan kesadaran kebebasan juga dapat disebut didukung oleh kekuatan warna lokal tempat ia hidup dan mengembangkan kehidupannya. Chairil Anwar yang ketika itu hidup dan berkarya berada dalam lokal ibukota Jakarta menuangkan ekspresinya dalam puisi-puisi yang penuh perjuangan melawan penjajah yang mendegradasi bangsa Indonesia. Kondisi lokal kota Jakarta Chairil Anwar yang dilatarbelakangi warna lokal kegigihan para tokoh bangsa untuk melawan penjajah yang sebagian besar berdiam di Jakarta menginspirasi dirinya untuk menuliskan puisi-puisi yang menggelorakan perjuangan dan kebebasan.

Puisi "Aku" yang ditulis Chairil Anwar ini sebagai sebuah contoh yang baik. Puisi ini merupakan puisi yang dilatarbelakangi oleh semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah dari bumi Indonesia. Namun, perlu juga dikatakan bahwa sesungguhnya puisi itu merupakan puisi yang tidak hanya memiliki semangat patriotisme

nasional Indonesia, tetapi puisi itu juga secara tidak tersadari oleh Chairil ternyata telah menyuarakan semangat internasional untuk menumpas segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Puisi ini jika dibaca dan dihayati pembaca internasional juga akan dirasakan sangat penting karena dapat menggerakkan dan menggelorakan semangat perlawanan pada siapa pun yang melakukan penjajahan, semangat melawan ketika kemanusiaan diinjak-injak penjajah. "Aku" dalam puisi Chairil Anwar itu tidak saja mewakili Indonesia, tetapi juga mewakili "aku" dunia. Di sinilah ada nilai universalitas yang melintas batas negara, bangsa, dan budaya sebagai predikat kebesaran puisi Chairil Anwar. Oleh karena itu, sangat pantas jika sampai sekarang di Indonesia wafatnya Chairil Anwar itu diperingati sebagai Hari Sastra.

Di luar karya-karya Chairil Anwar, bahkan jauh sebelumnya, keberadaan karya sastra itu memiliki warna lokal yang sangat beragam. Di masa awal kesusastraan Indonesia, warna budaya Melayu (Minangkabau) sangat mendominasi dan mewarnai karya sastra Indonesia. Begitu juga dalam perkembangan selanjutnya, ketika perkembangan dan penulisan sastra Indonesia bergeser ke Pulau Jawa (terutama Jakarta), warna lokal kondisi Jakarta turut mewarnai. Kemudian, dalam sastra Indonesia muncul juga warna budaya Jawa (Yogyakarta), Jawa Tengah (Jawa Banyumasan), Jawa Timuran; kemudian juga ada warna lokal terkait dengan budaya Madura sebagaimana misalnya diwakili karya-karya Zawawi Imron dan warna budaya Bali sebagaimana misalnya diwakili karya-karya Panji Tisna, Oka Rusmini, dan Putu Fajar Arcana.

Dalam dokumen sejarah kesusastraan Indonesia, perkembangan sastra Indonesia dengan warna lokalnya, tampaknya lebih berkembang dalam wilayah-wilayah budaya sebagaimana dikemukakan. Sampai saat ini belum dapat diungkapkan soal penciptaan sastra yang berkembang di daerah-daerah budaya lainnya di Indonesia. Daerah-daerah lainnya di Indonesia sampai saat ini nampak lebih memperlihatkan perkembangan penciptaan sastra daerah atau klasiknya masing-masing. Atau kemungkinan juga ada perkembangan penulisan sastra di berbagai pelosok Tanah Air, tetapi kurang begitu terekspos ke permukaan.

Dalam sejarah sastra Indonesia dan amatan penulis melalui publikasi media massa, belum dapat dilihat perkembangan penulisan karya sastra Indonesia di daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁰³ Akan tetapi, kondisi ini tidak berarti tidak ada sastrawan sastra Indonesia di berbagai daerah di luar yang disebutkan tadi. Daerah Belitung yang terdapat di Sumatra misalnya, menjadi warna lokal tersendiri yang kuat pada karya-karya Andrea Hirata seperti *Laskar Pelangi* sehingga karya-karyanya diminati banyak pembaca, mampu menasional dengan dibantu pemopulerannya melalui media film. Diketahui juga bahwa karya-karya Andrea Hirata ini tidak hanya menasional, bahkan juga menginternasional, mungkin berkat terjemahan karya-karyanya ke dalam berbagai bahasa asing.

Selanjutnya, dalam pemberitaan media massa yang mutakhir, salah satu nama baru muncul sebagai generasi sastrawan yang unggul pada tahun 2015 ini yakni Faisal Oddang, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin, Makassar, yang baru berusia 20 tahun menerima penghargaan sebagai pemenang Cerpen Terbaik Kompas 2014,¹⁰⁴ dengan cerpennya yang ditulis berlatar Toraja berjudul "Di Tubuh Tarra, dalam Rahim Pohon". Dari panggung Bentara Budaya Jakarta (BBJ), pria kelahiran Wajo, Sumatra Selatan, mengungguli cerpenis terbaik, beken, dan kondang lainnya yang nama-namanya berada di urutan belakangnya, seperti Sapardi Djoko Damono, Afrizal Malna, Djenar Maesa Ayu, Budi Darma, Agus Noor, Triyanto Triwikromo dan sastrawan lainnya. Latar Toraja, sebagai salah satu daerah di Indonesia, tampaknya sangat menentukan keunggulan karya cerpennya.

¹⁰³ Selanjutnya lihat Ruang Literasi *Kompas* tanggal 12 Mei 2015 dalam tulisan berjudul "Kala Sastra Menggairahkan di Daerah", yang memberitakan bahwa kendatipun belum dapat dilihat adanya perkembangan penulisan sastra Indonesia di daerah-daerah, tetapi hal yang cukup mencengangkan pelatih penulisan sastra ke daerah (yang bernama Yanusa Nugroho) sebagai program Lokakarya Cerpen Kompas seperti yang telah dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat, disambut antusias oleh peserta yang datang dari berbagai pelosok dan menggembirakan dalam dunia sastra kita.

¹⁰⁴ Penghargaan ini diberikan pada bulan Juni 2015 oleh Kompas di Bentara Budaya, diberitakan Kompas dan beberapa media massa lainnya di Indonesia pada tanggal 11 Juni 2015.

Hasil tersebut membuktikan bahwa warna lokal daerah itu memegang peran yang sangat penting dalam kancah penulisan sastra menuju proses internasionalisasi sastra Indonesia. Warna lokal benar-benar menjadi kekuatan utama dalam kontestasi dan kompetisi penulisan sastra, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional.

Jika hal tersebut dicermati lebih dalam, dapat dikatakan bahwa sebuah karya sastra dapat menjadi sangat populer atau sangat diminati, dinilai berkualitas, dan dianggap membawa kebaruan, jika sebuah karya intens mengeksplorasi secara kreatif-inovatif kekayaan budaya dan peradaban yang ada pada lokal-lokal budaya beragam tertentu. Dalam proses penciptaan karya sastra Indonesia, pentingnya warna lokal bukan karena semakin banyak memuat perangkat tradisi, tetapi karena sastrawannya mampu “mengolah” atau “meramu” nilai budaya lokal menjadi kekuatan utama dalam karya-karya sastra yang diciptakannya.¹⁰⁵ Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa karya sastra yang berkualitas adalah karya yang respek dan peduli dengan apa yang terjadi dalam kondisi lokalnya—yang terjadi dalam lokal budaya tradisi (daerah) ataupun perkotaan (urban)—dan kondisi lokal itu telah diramu dan ditransformasi secara kreatif-inovatif.

Dapat dipahami bahwa karya-karya yang monumental dalam sastra Indonesia semuanya berpijak pada warna lokalnya. Karya-karya yang dimaksudkan di sini misalnya adalah karya-karya yang ditulis oleh Marah Rusli, Merari Siregar, Armijn Pane, A.A. Navis, Chairil Anwar, Iwan Simatupang, Rendra, Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, Putu Wijaya, Umar Kayam, Mangunwijaya, Ahmad Tohari, Taufiq Ismail, Mustofa Bisri, Linus Suryadi AG, Pramoedya Ananta Toer, Budi Darma, Sapardi Djoko Damono, Zamawi Imron, Ayu Utami, Panji Tisna, Oka Rusmini, Andrea Herata, dan beberapa deret sastrawan lainnya yang tidak disebutkan satu per satu. Belum lagi menyebut sastrawan daerah dengan subkulturnya yang sangat beragam itu.

¹⁰⁵ Sebagai sebuah analogi, seorang sastrawan perlu berperan sebagai “tukang masak yang profesional dan memiliki credo” yang mampu membuat makanan dengan citarasa yang berbeda dan luar biasa, karena ia tidak hanya secara rutin memasak, tetapi juga selalu ada upaya proaktif untuk mengeksplorasi, mengkreasi, dan menginovasi masakannya dengan mengerahkan segala potensi, kemampuan, keterampilan, dan daya imajinasinya.

Dengan demikian, kekayaan budaya dan peradaban yang ada pada kondisi lokal-lokal di Indonesia ini sebenarnya dapat menjadi sumber inspirasi dan potensi kultural untuk menciptakan karya sastra Indonesia yang berkualitas dan mendunia sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca nasional maupun internasional. Sastrawan Andrea Hirata¹⁰⁶ sudah membuktikan dan mencoba mengangkat sebagian kekayaan budaya Indonesia, dengan mengangkat salah satu kearifan budaya lokalnya yang berada di Belitung, Sumatra.

Masyarakat pembaca mungkin sangat tertarik dengan penggambaran Belitung dalam berbagai sisi, dari latar pedesaannya, kegigihan orang-orangnya dalam memberikan pendidikan pada anak-anak yang membutuhkan pendidikan, ketulusan para guru yang mengajar anak-anak Belitung dalam kondisi yang serba kekurangan, guru-gurunya yang begitu ikhlas mengajar anak-anak Belitung agar kelak akan menjadi anak yang pintar, berguna, dan seterusnya. Itu baru sebagian kecil saja dari "samudra" budaya Indonesia yang mewarnai penciptaan sastra Indonesia dari ribuan keragaman kekayaan budaya lainnya yang ada di Indonesia. Sastra Indonesia yang sudah ada sejak masa awal kesusastraan Indonesia di masa tahun 1920-an hingga kesusastraan mutakhir saat ini, tidak terlepas dari warna lokal semacam itu. Warna lokal yang merupakan representasi dari kekayaan budaya bangsa itulah yang membuat karya-karya sastra Indonesia diminati oleh pembaca nasional dan internasional.

Berkait dengan warna lokal, perlu diungkap juga bahwa warna lokal yang diungkap setiap sastrawan dalam karya-karyanya dapat saja ajek dan juga dapat tidak ajek. Artinya, suatu keniscayaan pula bahwa setiap sastrawan itu sangat bervariasi, karena setiap sastrawan itu memiliki gaya penceritaan sendiri-sendiri. Dalam warna lokal, ada sastrawan secara ajek menciptakan karya-karyanya dengan menggunakan warna lokal yang tetap (sama) yang tidak berubah dalam setiap karyanya,

¹⁰⁶ Di sini penulis menyebut Andrea Hirata sebagai sastrawan saja, karena ia memang nyata telah terbukti memiliki karya sastra yang mendapat pengakuan pembaca sangat banyak sampai ke tingkat internasional. Jadi, penyebutan sastrawan di sini terlepas dari adanya polemik yang pernah terjadi di beberapa media tentang pengakuan atau legalitas Andrea Hirata selaku sastrawan.

seperti telah menjadi semacam ciri dan pola berkaryanya. Sastrawan ini misalnya sangat tampak pada karya-karya Pramoedya Ananta Toer, Ahmad Tohari, Zawawi Imron, dan Oka Rusmini.¹⁰⁷ Namun, ada juga sastrawan yang tidak ajek yang menciptakan karya-karyanya dengan warna lokal yang berubah-ubah dan sangat tergantung pada kondisi lokal yang melingkunginya. Sastrawan ini misalnya NH Dini, Putu Wijaya, Y.B. Mangunwijaya, dan Budi Darma.¹⁰⁸

Penutup

Dalam bab ini, ada beberapa pernyataan dan rekomendasi yang dapat diungkapkan untuk mengakhirinya sebagai berikut. Warna lokal merupakan potensi utama yang dapat membuat karya sastra Indonesia memiliki kualitas yang kompetitif yang diminati oleh pembaca, baik pembaca nasional ataupun pembaca internasional. Warna lokal yang menyertai penciptaan sastra Indonesia menjadi menarik karena Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, sehingga banyak kekhasan yang dapat mewarnai karya sastra Indonesia. Pernyataan ini memiliki arti penting dalam proses penciptaan, pemertahanan, dan juga pengembangan sastra Indonesia dalam era MEA, sehingga sastra Indonesia ke depan juga turut memberi pencerahan pada masyarakat ASEAN dan mungkin juga nantinya untuk masyarakat dunia.

Penggunaan bahasa Indonesia—yang bercikal-bakal pada bahasa Melayu—sebagai bahasa modern dan dilaksanakannya penerjemahan atas karya sastra Indonesia ke dalam bahasa asing, sangat mendukung ke arah internasionalisasi sastra Indonesia. Bahasa Indonesia yang juga pada dasarnya merupakan bahasa Melayu ini, tentu saja dapat dengan mudah dipahami khususnya oleh negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei sehingga sastra Indonesia ke depan memiliki kontestasi dan kompetisi yang baik di Era MEA.

¹⁰⁷ Patut dicatat juga bahwa kendatipun cenderung ajek, pada sedikit karyanya sastrawan itu pernah juga tidak ajek, pernah menulis suatu warna lokal yang lain; mungkin sebagai akibat dari mereka pernah melakukan kunjungan ke wilayah atau daerah lain sehingga ia juga sangat mungkin menulis dengan warna lokal yang lain.

¹⁰⁸ Pada sastrawan yang tidak ajek ini, juga terkadang sedikit karyanya ditulis dengan warna lokal yang sama.

Di samping itu, sastra Indonesia yang telah diminati oleh pembaca nasional dan internasional, juga karena di dalamnya menyajikan realitas (sosial, ekonomi, politik, psikologi, dan budaya) dan berpijak di bumi, serta sangat mungkin juga sekaligus memberi gagasan-gagasan solutif. Berbagai realitas tersebut kendatipun secara kontekstual terjadi di bumi Indonesia, tetapi secara universal nilai dan semangatnya dapat dirasakan oleh pembaca di luar Indonesia karena berbagai permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia, misalnya yang diekspresikan dalam karya sastra Indonesia, mungkin menjadi permasalahan kemanusiaan yang juga dialami oleh warga dunia.



Sejarah dan Keunggulan Kritik Sastra Akademik

Pengantar: Apakah Kritik Sastra?

Kritik sastra merupakan sumbangan pemikiran sastra yang diberikan pembaca-peneliti (ahli) sastra (*ideal reader*)¹⁰⁹ bagi pengembangan dan pembinaan sastra. Dalam upaya memberi sumbangan ini, pembaca ahli memproduksi dan menentukan makna hakiki dan estetika karya sastra melalui proses pemahaman komprehensif dan interpretasi yang sistematis dengan wawasan ilmu sastra yang hasilnya disajikan dalam bentuk tulisan (karya) kritik kreatif-inovatif.

Pembaca ahli akan mampu menghasilkan karya kritik yang baik jika dilatarbelakangi *minat yang besar pada karya sastra, kecendekiaan ilmu sastra, dan pengalaman estetis-manusiawi*.¹¹⁰ Kualifikasi itu dapat diraih dengan menekuni sastra terus-menerus, senantiasa mengasah kepekaan atas dunia kehidupan yang dinamik, merasa bertanggung-jawab untuk memperbaiki dunia kehidupan, aktif dan intensif mengikuti perkembangan sastra, serta terus berinisiatif menambah dan memperluas wawasan. Adanya tuntutan latar belakang kritikus yang demikian, tentu saja membuat kerja kritik sastra harus dilakukan secara serius, sehingga sangat dibutuhkan daya intelektualitas, logika, rasionalitas, imajinasi, dan intuisi yang baik.

¹⁰⁹ Meminjam istilah Wolfgang Iser, *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response* (Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1980).

¹¹⁰ Pengalaman estetis-manusiawi ini maksudnya adalah pengalaman estetis dalam menyelami karya sastra dan juga pengalaman dirinya dalam dunia kehidupan manusia yang didasari atas kerelaan, kesungguhan, dan kejernihan budi untuk mengungkap berbagai macam nilai.

Kritik sastra merupakan salah satu dari tiga cabang ilmu sastra.¹¹¹ Dua cabang lainnya adalah *sejarah sastra* dan *teori sastra*. *Teori sastra* bersangkutan-paut dengan segala hal yang berkaitan dengan hakikat sastra, dasar-dasar sastra, elemen-elemen sastra, teori interpretasi dan penilaian, dan sebagainya. *Sejarah sastra* bersangkutan-paut dengan perkembangan sastra sejak awal hingga yang paling mutakhir, misalnya perkembangan pemikiran manusia dalam sastra, tema dalam sastra, gaya dalam sastra, narasi dalam sastra, dan sebagainya. *Kritik sastra* bersangkutan-paut dengan penyelidikan, penganalisisan, dan penilaian sastra. Ketiga cabang itu saling memerlukan dan melengkapi, misalnya dalam pelaksanaan kritik sastra diperlukan teori penilaian dan sejarah sastra; untuk merumuskan teori sastra diperlukan hasil kritik sastra dan sejarah sastra; serta dalam menyusun sejarah sastra diperlukan teori sastra dan hasil kritik sastra.

Kritik Sastra Akademik dan Nonakademik

Karya kritik sastra itu dapat dilaksanakan dalam dua ruang, yakni *pertama*, di ruang akademi (perguruan tinggi), yang disebut dengan *kritik sastra akademik*. Hasil kritik ini berupa skripsi, tesis, disertasi, dan hasil karya ilmiah lainnya yang objek kajiannya adalah karya sastra. Para penulis kritik sastra adalah para peneliti atau pembelajar sastra. Bentuk kritik sastranya biasanya mengikuti sistematis (gaya selingkung) yang digunakan di perguruan tinggi bersangkutan, dengan format penulisan ilmiah.

Kedua, di ruang media massa (khususnya ruang budaya), yang disebut dengan kritik *nonakademik*. Hasil kritik ini umumnya berupa esai sastra dan resensi atas karya sastra. Para penulis bisa dari kalangan wartawan, sastrawan, pemerhati, pembaca independen, atau pembelajar sastra. Bentuk kritik sastra nonakademik ini mengikuti kaidah jurnalistik, dan ada juga yang kemudian menyebut jurnalisme sastra.

¹¹¹ Rene Wellek dan Austin Warren, *Theory of Literature*, cet ke-2 (New York: A Harves Book, Harcourt Brace and Company, 1955), halaman 27; Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Gagasan dalam Bidang Kritik Sastra Indonesia Modern* (Yogyakarta: Lukman, 1988), halaman 12-13.

Di Indonesia, kedua kritik sastra berjalan seiring-sejalan. Berbagai perguruan tinggi yang memiliki jurusan sastra terus-menerus memproduksi model kritik akademik karena memang itu menjadi syarat kelulusan. Di berbagai media massa seperti *Kompas*, *Jawa Pos*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *Bali Post*, dan berbagai koran lainnya, juga menyajikan kritik sastra dalam ruang budaya koran hari Minggu. Tidak sedikit juga hasil-hasil kritik sastra akademik kemudian dikemas untuk penerbitan esai di media massa.

Di samping itu, jika pengertian kritik sastra diluaskan dari batas dua kritik sastra itu, sebenarnya masih ada aktivitas ke arah kritik sastra yang secara konkret dan praktik dilakukan. Ada juga hasil kritik sastra yang dilakukan dengan tidak mengeksplisitkan teori, tetapi dilakukan secara *eklitik* (mencampur teori dan disampaikan secara tersirat). Model kritik ini sebagaimana yang ditulis oleh paus kritik sastra kita, yakni H.B. Jassin yang kritik-kritiknya lebih dilakukan dengan mengimplisitkan teori namun kritiknya sangat tajam.

Kemudian ada juga kritik sastra yang berwujud kegiatan diskusi-diskusi, seminar-seminar, bedah buku, apresiasi, dan *cangkrukan* sastra yang dilakukan oleh berbagai kelompok sastra, komunitas sastra, pencinta sastra, dewan kesenian biro sastra, bahkan dalam siaran sastra di radio dan televisi. Hasil kritik sastra itu terkadang berhenti pada dialog dan ada juga yang kemudian meneruskan dengan menuliskan dalam hasil kritik sastra tertulis.

Demikianlah beberapa praktik kritik sastra yang dilakukan selama ini oleh pembaca ahli kita. Model dan praktik kritik sastra itu masih berlangsung hingga kini dalam kondisinya masing-masing.

Sejarah Kritik Sastra Akademik

Istilah *kritik sastra* bukanlah merupakan tradisi asli yang terdapat di tengah masyarakat Indonesia.¹¹² Istilah itu baru dikenal setelah para sastrawan mendapat pendidikan sistem Eropa pada awal abad ke-20. Sebelum itu, di Indonesia yang dikenal hanyalah model penilaian berupa *sensor* atas karya

¹¹² Andre Hardjana, *Kritik Sastra: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1988), halaman 6.

sastra berbahasa daerah yang dilihat berdasarkan hubungannya dengan kepercayaan, agama, dan mistik. Misalnya, pembakaran karya yang dilakukan terhadap syair-syair Nuruddin ar-Raniri karena di dalamnya dianggap mengandung ajaran mistik yang bertentangan dengan ajaran agama. Demikian juga terhadap sastra suluk dalam sastra Jawa, seperti *Kitab Darmogandul* dan *Kitab Suluk Gatoloco*, yang pernah dimusuhi secara sengit karena dipandang bertentangan dengan ajaran agama sebagaimana dianut Wali Sanga. Bahkan sensor itu pernah juga dilakukan terhadap cerpen Ki Panjikusmin yang berjudul *Langit Makin Mendung* yang berakibat kritikus sastra H.B. Jassin sampai dibawa ke pengadilan, meskipun kemudian dibebaskan.¹¹³

Di Indonesia, kritik sastra—baik kritik akademik maupun nonakademik—merupakan suatu praktik. Setiap praktik kritik yang dilakukan atas sastra pastilah berdampak politis tertentu terhadap masyarakat pembacanya. Dampak yang dimaksudkan itu dapat berupa pembentukan opini, legitimasi, relasi kuasa, dan seterusnya. Perlu diketahui juga bahwa kritik sastra di Indonesia tidak berdiri terpisah dari pembaca dan pengarangnya. Kritik sastra di Indonesia, langsung atau tak langsung, juga bersentuhan dengan ranah politis, terjadi kontestasi kepentingan pada kritikus, sastrawan, media, pembaca, dan pasar.

Merupakan sebuah realitas bahwa sejarah sastra Indonesia selalu tak lepas dari politik kritik sastra di dalamnya. Politik itu sudah terlihat sejak konflik ideologis Balai Pustaka dan “bacaan liar” Melayu Tionghoa tahun 1920-an, dan sejak itu kritik sastra terus bermunculan tanpa henti. Di antaranya, mulai dari soal konflik Pujangga Baru dan komunisme, Lekra *versus* Manikebu, Rawamangun *versus* Ghanzheit, polemik sastrawangi (sastra “lendir”), sastra profetik, sastra koran dan sastra pedalaman, yang mutakhir munculnya berbagai kritik sastra terkait kontroversi *33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh*, serta pro-kontra terhadap kehadiran karya yang ditulis Andrea Hirata dan eksistensi dirinya selaku sastrawan.

¹¹³ H.B. Jassin, *Heboh Sastra 1968: Suatu Pertanggungjawaban Jawab* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), halaman 54–58.

Kritik sastra akademik yang kita kenal sekarang ini, sebenarnya berkait-erat dengan sebuah aliran kritik sastra yang pernah ada di Indonesia (yang juga telah disebutkan) yakni kritik sastra Rawamangun. Kelompok aliran kritik sastra Rawamangun ini beranggotakan para akademisi sastra yang berada di Kampus Universitas Indonesia (UI) Jakarta, yakni kritikus M.S. Hutagalung, J.U. Nasution, Boen S. Oemarjati, dan M. Saleh Saad. Nama Rawamangun itu sendiri diambil dari nama kampus UI lama yang berlokasi di Rawamangun.¹¹⁴

Para sarjana (ilmuwan) sastra itu mengajarkan dan menerapkan teori (kritik) sastra secara sistemik di kampus. Pada aliran Rawamangun ini, teori dasar digunakan secara eksplisit dalam pelaksanaan kritiknya. Untuk meneguhkan keilmiahannya, kritik sastra Rawamangun juga ditulis secara sistematis dengan teknik penulisan ilmiah. Untuk mengkritik karya sastra, digunakan teori-teori (kritik) sastra dari para ahli sastra terkait—dan yang kebanyakan dari Barat. Aliran kritik sastra Rawamangun ini, kalau dibaca dengan kerangka Abrams tampak lebih berupa kajian dengan pendekatan objektif.¹¹⁵

Orientasi kelompok kritik sastra Rawamangun ini lebih mengutamakan karya sastra sebagai objek analisis. Para penganut kritik sastra Rawamangun ini mensyaratkan peneliti (kritikus) haruslah bertolak dari karyanya sendiri. Dalam hal ini, M.S. Hutagalung, J.J. Nasution, Boen S. Oemarjati, dan M. Saleh Saad berada dalam satu pemahaman yang sama. Kritik atas karya sastra harus dilakukan pada tataran tekstual saja dan tidak mendasarkan diri pada hal-hal yang ada di luar sastra (entah berkait dengan masyarakat, pembaca, pengarang, dan lainnya).

Adanya orientasi kritik sastra yang lebih menekankan pada kajian teks itu, menjadikan kritik sastra Rawamangun tampak telah membangun sebuah paradigma kajian yang diberlakukan khususnya pada kalangan

¹¹⁴ Kampus baru UI sekarang ini berlokasi di daerah Depok, Jakarta.

¹¹⁵ M.H. Abrams, *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and Critical Tradition*. (New York: Norton, 1958), halaman 2-3.

akademisi sastra.¹¹⁶ Ini berarti, analisis struktur menjadi sasaran kerja kritik dengan paradigma Rawamangun. Analisis struktur atau unsur-unsur itulah sebagai yang pokok. Konsekuensinya, kerja kritik atas karya sastra dari mana pun haruslah diawali dengan analisis struktur sebagai kerja pendahuluan. Pendirian kritik sastra Rawamangun ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan teoretisi sastra Belanda yang pernah bertugas sebagai *lecture exchange* di UI dan UGM yakni A. Teeuw¹¹⁷ yang mengatakan " ... dari mana pun analisis karya sastra dilakukan harus diawali dengan membongkar analisis strukturnya."

Dari pernyataan itu, jelaslah bahwa pekerjaan analisis tekstual atau struktur adalah tugas pokok dalam kritik sastra. Maka itu, makna unsur-unsur karya sastra hanya dapat dipahami sepenuhnya atas pemahaman atas fungsi unsur-unsur struktur itu dalam keutuhan karya sastra. Inilah yang kemudian membuat kelompok kritik sastra Rawamangun berpendirian bahwa analisis struktur ini tidak dapat dilewati sebelum melakukan pemaknaan atas keseluruhan karya sastra. Sebab, hanya mengawali dengan analisis struktur itulah akan memungkinkan adanya pengertian yang optimal.

Jika dicermati, teranglah kelompok kritik sastra Rawamangun menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang lebih berorientasi pada kajian atau kritik atas karya sastra itu sendiri sebagai objek kajian. Kajian dan kritik atas karya itu operasionalnya adalah analisis struktur teks, yang di dalamnya dilakukan analisis unsur-unsur struktur untuk mendapatkan pemahaman keutuhan karya sastra. Model kajian seperti ini tampak terus berkembang sampai sekarang di ruang akademik berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

¹¹⁶ Hasil kritik seperti inilah yang sekarang disebut dengan *Kritik Akademik*, yang dibedakan dengan *Kritik Media Massa*. Lihat I.B. Putera Manuaba, "Kritik Sastra Indonesia dalam Idealitas Siklus Ilmu Sastra: Beberapa Catatan Pinggir". Makalah disampaikan dalam Seminar "Perdebatan Kritik Sastra" di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya, 12 November 2008.

¹¹⁷ A. Teeuw, *Membaca dan Menilai Sastra* (Jakarta: Gramedia, 1983).

Keunggulan Kritik Sastra Akademik

Kritik sastra akademik—sebagaimana dikemukakan—merupakan kritik sastra yang dikerjakan di dunia akademik oleh para pembelajar atau peneliti karya sastra. Hasil kritiknya berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta berbagai karya ilmiah lainnya. Di awal kemunculannya, model kritik sastra ini terkait dengan aliran kritik sastra Rawamangun dan juga diarusi model *New Criticism* dan Strukturalisme.¹¹⁸ Model kritik sastra ini memusatkan kritiknya pada karya sastra itu sendiri; menganalisis unsur-unsur strukturnya guna mendapatkan pemahaman keutuhan karya sastra.

Pada awal kelahirannya, model kritik sastra akademik, sebagaimana yang dilakukan para pendukung kritik sastra Rawamangun, *New Criticism*, dan Strukturalisme hanya menggunakan karya sastra tanpa sama sekali melihat di luar karya sastra untuk menentukan nilai karya sastra. Namun, pada perkembangannya model kritiknya yang paling mutakhir tentu saja sudah sangat berkembang jauh apalagi dengan memanfaatkan berbagai teori yang memiliki karakteristik sendiri dan membutuhkan data yang juga bermacam-macam.

Jadi, yang jelas, penyebutan kritik sastra akademik itu berkaitan dengan penelitian-penelitian karya sastra yang dilakukan oleh para akademisi sastra di perguruan tinggi. Untuk mengenali secara lebih jauh, model kritik sastra itu biasanya (1) mengkaji karya sastra dan yang terkait dengan lingkungan sastra; (2) menggunakan teori dasar atau teori pengayaan secara eksplisit; (3) menggunakan metode penelitian yang operasional; (4) menggunakan gaya selingkung sehingga mengikuti aturan penulisan karya ilmiah; (5) disajikan secara sistematis, mulai dari pendahuluan hingga simpulan; (6) bentuk kritik sastra dituangkan dalam karya skripsi,

¹¹⁸ Pada tahun 1970-an, model kritik sastra Rawamangun dipertentangkan dengan kritik sastra *Ganzheit* yang dipelopori oleh Arif Budiman dan Goenawan Mohamad. Aliran kritik sastra yang berlatar belakang teori psikologi Gestalt ini lebih mementingkan keutuhan karya dalam menilai atau mengkritik karya sastra. Lihat Arif Budiman dan Goenawan Mohamad. 1978. "Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian", dalam Lukman Ali (ed.), *Tentang Kritik sastra: Sebuah Diskusi*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978), halaman 3-11.

tesis, disertasi, jurnal, dan penelitian mandiri atau kelompok; serta (7) teori-teori yang digunakan dari yang klasik, modern, postmodern, dan juga terjadi lintas teori sastra.

Sebagai sebuah model kritik sastra, kritik sastra akademik ini sebenarnya memiliki *beberapa keunggulan* yang dapat disebutkan seperti berikut.

1. Kritik sastra yang berupa analisis, interpretasi, dan pemaknaan dilakukan secara detail dan mendalam oleh akademisi (kritikus).
2. Pelaksanaan kritik sastra dilakukan dengan proses objektif dengan menggunakan kriteria keilmiah (menggunakan metode dan teori) yang representatif.
3. Kritik dilakukan oleh peneliti (kritikus) dengan bekal keilmuan sastra yang diperoleh secara sistemik di dunia akademik sehingga kritikusnya lebih handal dan kritik sastra yang dihasilkan dapat lebih mendalam.
4. Kritik sastra menghasilkan temuan-temuan, yang diperoleh dari proses yang ilmiah dan objektif.
5. Kritik disajikan dalam sebuah karya yang utuh berupa karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh pengarang dan kritikus lain.

Namun kalau dicermati, tentu saja ada kelemahannya juga, di antaranya

1. hasil kritik sastra cenderung kurang menarik karena disajikan dalam aturan yang baku dan ketat mengikuti teknis penulisan ilmiah;
2. hasil kritik harus menggunakan teori dan metode yang eksplisit, hasilnya cenderung dan bisa dikerjakan berupa penerapan teori-teori yang digunakan;
3. hasil kritik kurang dominan melibatkan kemampuan yang bersifat reflektif dan imajinatif; dan
4. pembacaan karya sastra acap kali cenderung lebih bersifat teknis dan kurang mengoptimalkan penghayatan total.

Penutup

Bertolak dari keunggulan dan kelemahan kritik sastra akademik itu, tentu saja perlu dipikirkan *strategi* yang lebih jitu agar kritik sastra akademik itu memiliki kewibawaan atau menurut Eagleton memiliki fungsi sosial.¹¹⁹ Dalam arti, bagaimana agar kritik sastra akademik itu lebih dapat dimanfaatkan dan difungsikan untuk meningkatkan perkembangan karya sastra teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra.

Strategi pertama, dalam melaksanakan kritik sastra akademik sebaiknya lebih melakukan kritik “penemuan sambil berjalan”, sebagaimana yang dikatakan Budi Darma.¹²⁰ Peneliti (kritikus) mencoba menemukan kemungkinan-kemungkinan teori atau metode baru yang berangkat dari proses kritik sastra sehingga kritik tidak hanya terbatas pada penerapan atau pembuktian teori.

Strategi kedua, kerja kritik sastra akademik merupakan kegiatan intelektual, sehingga peneliti (kritikus sastra) perlu mengadakan *refleksi* dan *renungan* untuk kemudian menuju kepada *abstraksi*. Abstraksi yang dimaksudkan di sini adalah usaha untuk mengintisarikan gagasan sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi pembaca. Karya kritik tidak dikerjakan dengan apresiasi yang dangkal, atau pesan yang dangkal. Terry Eagleton dalam *The Ideology of the Aesthetics*, mengatakan kritik sastra “... bukan sekadar ungkapan pesan tekstual kepada pembaca, bukan sekadar terjemahan-ulang atas apa yang dipahami dari teks. Ia adalah sebentuk usaha menyingkap apa yang tidak diungkap dalam teks”¹²¹

Strategi ketiga, setelah karya kritik berupa skripsi, tesis, dan disertasi dihasilkan, perlu ditindaklanjuti (*follow-up*) dengan menuliskan kembali dalam bentuk *jurnal* (nasional atau internasional), *buku teks* kritik sastra, atau dipresentasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Artinya, karya-karya itu tidak berhenti sampai tahap dikoleksi di perpustakaan,

¹¹⁹ Lihat Asep Saeful Anwar, “Kritik Sastra dan Peristiwa Kebudayaan”, dalam *Kompas*, 1 Oktober 2015, halaman 27. Terry Eagleton.

¹²⁰ Budi Darma. 1985. “Kritik Sastra dan Karya Sastra”. Makalah Seminar Perkembangan dan Pengembangan Sastra Indonesia di Universitas Diponegoro, 12–13 November.

¹²¹ Terry Eagleton, *Literary Theory: An Introduction* (England: Basil Blackwell, 1983).

tetapi perlu sosialisasi dan diseminasi ke luar dunia akademik. Setelah dijadikan buku teks kritik sastra (yang mungkin diperkaya lagi), buku kritik sastra itu dipublikasikan dan didistribusikan ke pembaca umum sehingga dapat memberikan sumbangan bagi para pembaca pengarang, kritikus, atau pembaca umum lainnya). Tentu saja, masyarakat pembaca tidak akan mengetahui apa temuan baru dalam kritik sastra jika tidak dipublikasikan. Sebab, sangat mungkin buku kritik sastra itu inspiratif baik bagi pengarang maupun kritikus lain. Kritik sastra yang baik akan dapat menstimulasi imajinasi pengarang lain untuk menulis karya yang baik dan dapat melantangkan intuisi penulis lain.

Perihal Sastra, Institusi, dan Perubahan Sosial

Pengantar: Sastra, Interaksi Pengarang dan Pembaca

Sebagai dunia karya (fiksi), sastra menyediakan kebebasan ekspresi total. Corak, wujud, dan jenis sastra, semuanya ditentukan oleh kekuatan ekspresi. Sastra tercipta sebagai buah *interaksi* dan *respons* pengarang dengan dan atas dunia nyata (lingkungan sosial), serta sebagai *akibat* dari *sebab* dunia sosial yang mengalami dinamika perubahan sosial.¹²² Karya sastra yang tercipta dipandang secara bervariasi pada kelompok pembaca. Dalam proses pemaknaan, ada kelompok pembaca memandang sastra perlu atau tidak perlu dikaitkan dengan aspek eksternal teks. Hal ini didukung lagi dengan adanya berbagai teori dengan substansi dan cara pandang masing-masing.

Sastra sebagai jiwa zaman (*zeitgeist*) peradaban bangsa, menjadi refleksi kehidupan sosial yang terus-menerus sepanjang bangsa ada. Sastra merupakan karya budaya yang respek dengan segala peristiwa penting bangsa, di dalamnya sarat dengan diskursus nilai (yang diperdebatkan, dihadirkan, ditawarkan, dilawan, dan dikritisi), seperti sangat kental dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Arah harmoni sosial manusia menjadi patokan utama kapan sistem nilai harus diterima atau ditolak. Proses-proses sosial dalam masyarakat dikawal oleh sastra agar

¹²² I. B. Putera Manuaba, "Warna Lokal dalam Internasionalisasi Sastra Indonesia", dalam Suhandano, Sudibyo, Saeful Anwar (ed.) *Kebersamaan dalam Keberagaman ASEAN: Persepektif Bahasa dan Sastra* (Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia UGM, Prodi S2 Ilmu Linguistik UGM, INCULS, dan ASALS, 2015), halaman 98.

berjalan dalam titian keadilan dan kebenaran. Perilaku sosial dehumanis, defeminis, derelegiusitas, patriarkis, egoistis, anarkis, sadistis, hierarkis, otoriter, demoralis, dan konservatif, menggerakkan sastra untuk pencarian nilai-nilai yang lebih cocok untuk masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang pernah digaungkan Goldmann¹²³ bahwa sastra hadir ketika terjadi pendegradasian atas nilai-nilai. Oleh karena itu, sastra dapat dikatakan mengungkap intisari kehidupan bangsa, yang mencerminkan jati diri bangsa, sehingga penting diinternalisasi dalam pembentukan karakter—dan internalisasi ini terjadi tanpa doktrin.¹²⁴ Proses ini akan terjadi jika sastra dibaca dan jika tidak dibaca maka sastra hanya akan berupa *artefak* (benda mati yang tak bermakna).

Mula-mula sastra dicipta tidak tendensius, namun kehadirannya di tengah masyarakat pembaca berdampak pada perubahan sosial (*social change*). Dengan kebebasan ekspresi totalnya, sastra menghadirkan kebenaran substantif yang tak mungkin dihadirkan di luar sastra.¹²⁵ Demi membangun makna dan menawarkan nilai-nilai, dalam sastra semuanya bisa terjadi, termasuk yang tak mungkin terjadi sekalipun dalam kehidupan nyata. Sastra juga bagaikan oase di tengah gurun yang tak habis-habisnya direguk karena kekuatan dunia makna, sastra mencerahkan dan menyediakan interpretasi dinamik sehingga sastra tak pernah kedaluwarsa dan akan selalu menarik.

Secara psikologis, sastra juga punya peran dalam penguatan jiwa. Moral dapat terbangun baik melalui proses penghayatan sastra. Atas sastra juga kesadaran moral akan tumbuh secara alami dan meresap ke dalam kalbu. Sastra memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

¹²³ Lucien Goldmann, *Method in the Sociology of Literature*, translated into English and edited by William Q. Boelhower (Oxford: Basil Blackwell, 1981).

¹²⁴ I. B. Putera Manuaba, "Eksotisme Sastra: Eksistensi dan Fungsi Sastra dalam Pembangunan Karakter dan Perubahan Sosial". Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Sidang Terbuka Rektor Universitas Airlangga, di Garuda Mukti Gedung Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya, pada 6 September 2014.

¹²⁵ I. B. Putera Manuaba, *Persepsi Pengarang tentang Masyarakat: Kajian tentang Cerpen-cerpen Karya Pengarang Bali dalam Persepektif Sosio-fenomenologis Bergerian* (Yogyakarta: Lugin, 2009), halaman 322.

Sastra juga dapat memberi keindahan dan keteduhan jiwa, serta kekuatan mental.

Sastra juga menjadi ajang berpikir dengan rasionalitasnya sendiri, dengan menghadirkan logika-logika yang bersifat positif yang dapat diterima. Sastra mencerdaskan pemikiran berspektif multibidang, menambah wawasan dan cakrawala budaya nasional dan internasional. Sastra bahkan dapat membuat orang mampu mengasah rasa, mematuhi nurani, meneguhkan independensi kepribadian personal, dan meningkatkan religiositas.

Demikianlah sastra yang dalam kehidupan praktis dan pragmatis, sering kali terpinggirkan namun sekaligus dirindukan. Sebab, sastra adalah dunia ciptaan, ideal, impian, realistik, dan inspiratif bagi kehidupan masyarakat. Maka itu, sastra akan tetap ada karena dalam sastra adalah sesungguhnya "terdokumentasi", terepresentasikan, dan terefleksikan sejarah pengalaman dan intelektual bangsa dan umat manusia. Oleh karena itu, sastra menjadi kekayaan budaya bermakna yang perlu dipupuk dan dikembangkan agar makin mampu menyuarakan intisari, nurani, dan hakikat kehidupan manusia.

Peran dan Sinergi Institusi, Akademisi dan Kritikus Sastra

Menyadari posisi penting sastra di tengah kehidupan, studi sastra sebagai bagian dalam studi rumpun sosio-humaniora, perlu mendapat perhatian lebih serius sekarang ini. Keberadaan sastra akan makin eksis juga manakala ditopang oleh agen-agen institusi yang melakukan studi, pembelajaran, atau apresiasi yang komprehensif di berbagai institusi. Institusi yang dimaksudkan di sini adalah lembaga-lembaga yang mengelola sastra, seperti perguruan tinggi, institut, sekolah, badan bahasa/balai bahasa, perpustakaan/museum, dewan kesenian, sanggar, penerbit, dan media.

Di perguruan tinggi, sastra yang dipelajari secara khusus, melahirkan karya skripsi, tesis, dan disertasi. Di Indonesia, jumlah program studi yang mempelajari sastra diketahui sangat banyak. Hasil-hasil studi

berupa skripsi, tesis, dan disertasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Namun sayangnya, jarang yang sampai ke tahapan publikasi, baik berupa jurnal ataupun buku. Padahal hasil studi itu, merupakan karya kritikus akademik, yang akan sangat berharga jika dikemas dalam bentuk buku. Karya itu selain memang untuk mengonkretkan makna sastra, sebenarnya juga harus sampai ke tangan pengarang sebagai karya umpan-balik agar penulisan sastra makin meningkat. Namun, realitasnya tidak seperti itu, banyak yang hanya selesai setelah diujikan, kemudian dikoleksi di perpustakaan, jarang yang dimanfaatkan untuk tujuan substantif untuk itu tadi. Hanya satu atau dua pelajar yang berupaya menerbitkan dan ini biasanya dilakukan dengan pembiayaan sendiri. Karya-karya terbaik yang berasal dari penelitian serius semacam ini akan bagus jika dikembangkan ke dalam buku atau dituliskan dalam berbagai artikel atau esai. Namun, jarang yang mampu melaksanakannya sehingga hasilnya kurang dirasakan di masyarakat. Dalam hal ini, diusulkan institusi perlu memberi dukungan bagi penerbitan karya-karya terbaik, terutama dari segi finansial, sebagaimana yang dilakukan Malaysia (dan mungkin sekarang di perguruan tinggi mulai melakukannya, tetapi biasanya setelah terbit baru ada bantuan finansial).

Sama halnya dengan perguruan tinggi, institut yang mengelola pembelajaran sastra juga cukup banyak. Institut sebagai lembaga yang mendidik untuk melahirkan pengajar yang terampil dalam mengajari sastra tampaknya juga masih kurang didukung oleh keahlian melahirkan calon guru yang mampu mengajarkan sastra dengan baik atau masih terbatas dalam penguasaan kepustakaan sastra. Materi membaca, menulis, dan menganalisis sastra memang masih perlu ditingkatkan.

Sekolah-sekolah (terutama di tingkat SMP dan SMA) dari segi kurikulum, juga tampak masih kurang menekankan pada pembelajaran *membaca dan menulis sastra*, sehingga budaya literasi belum tercipta di tahapan sekolah ini. Hal ini juga pernah disayangkan oleh Suparto Brata, peraih penghargaan sebagai sastrawan produktif Jawa Timur dari Balai

Bahasa Jawa Timur yang baru saja meninggal.¹²⁶ Dalam setiap orasinya di berbagai pertemuan sastra, termasuk ketika ia diundang ke Fakultas Ilmu Budaya Unair sebagai Dosen Tamu untuk mata kuliah Penulisan Prosa sekitar tahun 2012, ia selalu mendengungkan pentingnya membaca dan menulis karena melalui membaca dan menulis itulah pendidikan akan dapat maju.

Badan Bahasa dan Balai Bahasa memang memiliki peran yang cukup penting dalam membina dan mengembangkan sastra (terutama di daerah) dan sudah menghasilkan buku-buku terbitan. Namun, terbitan itu terbatas pendistribusiannya, sehingga institusi, seperti perguruan tinggi, institut, dan sekolah kurang banyak mengetahui hasilnya. Hasil-hasil buku terbitan itu juga sangat diperlukan di institusi-institusi yang secara langsung mengelola sastra, atau pada sanggar/komunitas, dewan kesenian, dan pengarang dalam kaitan dengan pengembangan sastra.

Sanggar atau komunitas sastra sudah tumbuh sangat banyak. Ada sanggar atau komunitas yang produktif dan kurang produktif, yang berkesinambungan dan kurang berkesinambungan memproduksi sastra. Sanggar atau komunitas itu perlu dihidupkan terus karena karya-karya sastra yang terlahir dari sanggar atau komunitas itu sangat potensial melahirkan karya-karya yang sarat dengan kearifan lokal. Demi kesinambungannya, perlu ada pembinaan dari institusi terkait dalam bentuk pengabdian masyarakat atau pelatihan (*workshop*) serta perlu didukung secara material oleh pemerintah daerah setempat. Sanggar atau komunitas sastra juga perlu bersinergi dengan perguruan tinggi dan

¹²⁶ Dari ketokohan, nama Suparto Brata telah tercatat dalam buku *Five Thousand Personalities of the Word* (1998) terbitan *The American Biographical Institute USA*. Ia juga telah mendapat berbagai penghargaan. Pertama, hadiah dari Gubernur Jawa Timur (Sularso) tahun 1993 sebagai seniman pengarang tradisional. Hadiah Rancage 2000 atas jasanya mengembangkan sastra dan bahasa Jawa. Hadiah Rancage 2001 atas karya sastra Jawanya yang berjudul *Trem*. Hadiah Rancage 2005 atas karya *Donyane Wong Culika*. Hadiah Gubernur Jawa Timur (Imam Utomo) 2002 sebagai seniman Jawa Timur (bersama 100 orang seniman lainnya). Hadiah dari Pusat Bahasa 2007 sebagai salah seorang dari tiga sastrawan Indonesia, dan ditunjuk sebagai penerima *The SEA Write Award 2007* di Bangkok. Dan yang terbaru mendapat Hadiah dari Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2013 sebagai sastrawan produktif (dalam Biodata Suparto Brata yang ditulis sendiri).

badan bahasa/balai bahasa serta pengarang senior agar pengembangan sastra dapat dilakukan secara optimal di masing-masing sanggar atau komunitas sastra yang ada.

Institusi penerbit (seperti Gramedia, Pustaka Pelajar, Erlangga, dan berbagai penerbit lainnya) memiliki peran sangat besar dalam pengembangan sastra. Institusi ini di samping memiliki visi profit atau bisnis, seharusnya juga tetap punya visi idealisme agar sastra dapat tumbuh subur sehingga bersedia menerbitkan karya sastra. Penghargaan penerbit pada pengarang juga perlu ada, misalnya dengan menaikkan *royalty* pengarang yang sekarang ini masih relatif sangat kecil dan belum layak. Meskipun tidak semata-mata soal finansial, tetapi perlu ada penghargaan yang lebih baik kepada pengarang Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas buah pikiran dan karya intelektual. Solusinya, mungkin institusi penerbit di Indonesia perlu studi banding ke penerbit-penerbit internasional menyangkut manajemen dan administrasinya, seperti apa penerbit luar negeri menghargai karya dari pengarang.

Media massa punya peran sangat besar bagi pengembangan sastra dewasa ini. Oleh karena media massa kini telah menjelma menjadi semacam lembaga yang memiliki otoritas melegitimasi kualitas karya. Dulu ada media majalah *Horizon*, *Basis*, *Kalam*, dan *Umul Quran* yang berperan sebagai institusi yang melegitimasi kualitas karya-karya. Namun sebagian media itu sekarang ada yang sudah tidak terbit dan juga kurang berperan dalam melegitimasi kualitas karya. Dalam kondisi seperti itu, koran yang memuat ruang seni dan budaya menjadi sangat penting. Saat ini, media *Kompas*, *Jawa Pos*, *Republika*, dan lainnya, melalui ruang seni dan budaya, memiliki peran penting dalam melegitimasi kualitas sastra. Pengarang-pengarang baru akan diklaim sebagai pengarang nasional, jika sudah mampu menerbitkan karyanya di ruang-ruang budaya koran-koran itu. Penerbitan di ruang budaya yang terkadang diikuti penerbitan buku cerpen-cerpen terbaik sebagaimana yang dilakukan *Kompas* sangat konkret melahirkan pengarang baru.¹²⁷

¹²⁷ Seperti pengarang muda yang bernama Faisal Oddang dalam karyanya berjudul "Di Tubuh Tarra dalam Rahim Pohon" yang memenangkan Cerpen Terbaik Kompas 2014. Pengarang yang baru bermur 20 tahun ini adalah Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Hassanudin Makasar.

Di institusi-institusi tersebutlah sebenarnya para kritikus berada, menggantikan kritikus sastra independen. Dalam berbagai pertemuan sastra, pernyataan klasik tiadanya kritikus sastra yang berwibawa seperti figur kritikus H. B. Jassin selalu dilontarkan dan dirindukan para pengarang. Di samping memang kenyataannya begitu, memang kritikus ideal dan independen seperti H. B. Jassin memang sulit lahir dan dicariandingannya. Namun, jika mencermati kinerja agen-agen institusi itu sebenarnya kritikus sastra itu masih ada. Mereka memainkan peran itu, hanya saja tidak ada yang ajek menekuni peran sebagai kritikus yang dedikatif, seperti kritikus yang berdedikasi seperti H.B. Jassin. Kritikus sastra yang ada sampai sekarang ini masih hanya "kritikus sambil lalu" (sebagai kritikus akademis, kritikus yang hanya sekali dua kali berkarya) sehingga kurang tampak perannya ke permukaan. Itulah sebabnya predikat kritikus semacam H.B. Jassin, tidak pernah melekat pada sosok seorang tokoh saat ini, ia cenderung tidak spesialis sebagai kritikus. Kini, peran kritikus ini juga dijalankan pada redaktur seni dan budaya di media massa karena mereka melakukan proses seleksi yang sangat ketat pada proses penerbitan karya sastranya, meskipun mereka tidak memberikan hasil kritiknya. Menariknya, di salah satu koran yakni di ruang budaya *Bali Post*, Uumbu Landu Paranggi—mantan Presiden Malioboro, sang motivator sastra yang melahirkan banyak pengarang muda—terkadang memberikan catatan-catatan pada karya-karya sastra (puisi) pengarang muda di media. Namun catatan-catatannya memang tidak mendalam, lebih berupa komentator yang memberi semangat berkarya pada para pengarang muda.

Belum adanya kritikus sastra yang berdedikasi seperti H.B. Jassin itu, mungkin sangat dipengaruhi oleh kultur yang belum mentradisi. Artinya, karya-karya kritik sastra dari kritikus sastra itu mungkin masih kurang mendapat tempat dalam ruang-ruang budaya. Atau mungkin masih ada pertanyaan menggajal di hati para kritikus, jika menulis kritik sastra, akankah cukup diperhatikan oleh pengarang atau pembaca pada umumnya? Untuk itu, mungkin juga perlu ada strategi, perlunya memberi penghargaan sebagai kritikus terbaik sehingga banyak yang mau mengambil peran ini. Pemberi penghargaan itu bisa dari institusi-

institusi itu tadi. Ini penting, sebab sastra tanpa kritikus tentu saja akan berdampak kurang baik bagi perkembangan dan pengembangan sastra. Di samping itu, agar terjadinya perkembangan sastra yang kondusif, perlu ada sinergi antarinststitusi itu sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan praktisi pengarang dan kritikus sastra dalam pembelajaran sastra misalnya, di samping sebagai sebuah penghargaan pada keberadaan pengarang juga akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran sastra. Selanjutnya, perlu juga lebih digalakkan atau digiatkan diskusi-diskusi sastra, entah di institusi sastra maupun di luar institusi sastra. Hal yang jelas, tradisi atau kultur diskusi sastra perlu ada terus karena biasanya dari situ pulalah akan lahir karya-karya berkualitas. Karya-karya berkualitas dan pengarang-pengarang berkualitas terkadang lahir dan terinspirasi dari pertemuan-pertemuan santai dan yang bersifat informal.¹²⁸

Korelasi Sastra dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial, diakui atau tidak, berkaitan dengan pentingnya keberadaan sastra dan pentingnya peran institusi dalam pengembangan sastra. Dapat dikatakan bahwa sastra dapat menyebabkan adanya perubahan sosial (*social change*), sebaliknya perubahan sosial yang ada dalam masyarakat juga akan terepresentasikan dalam sastra.

Peran pentingnya sastra yang berdampak pada perubahan sosial, mula-mula karena sastra dibaca bukan hanya oleh komunitas sastra saja, melainkan hampir banyak orang dari berbagai bidang membaca sastra. Saya sering berdiskusi dan berinteraksi secara formal maupun informal dengan teman-teman berlainan bidang. Penulis tercengang karena begitu banyak teman yang kebetulan penulis ketahui yang menekuni bidang-bidang lain sangat merasa perlu dan tertarik membaca sastra dan banyak juga di antara mereka yang telah menjadi pembaca sastra bahkan memiliki

¹²⁸ Kegiatan kumpul-kumpul para seniman di masa lalu di masa kepemimpinan Presiden Malioboro Umbu Landu Paranggi, *cangkruk* di pinggir jalan Komunitas Seni dan Sastra Luar Pagar Unair, kegiatan *Gradag-grudug* di Bali yang dimotori Umbu Landu Paranggi, dapat menjadi model berkeaktivitas.

koleksi sastra. Lebih salut lagi, mereka sangat bersemangat ketika berbicara tentang manfaat dan pentingnya sastra. Kecintaan mereka terhadap sastra bahkan bisa jadi melampaui teman-teman atau mahasiswa yang memang menggeluti studi sastra sebagai bidang ilmu mereka. Kecintaan mereka ini tampak tanpa pamrih karena memang mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dalam bidangnya sendiri. Beberapa teman yang kebetulan saya ketahui berasal dari bidang hukum, kedokteran, sosiologi, psikologi, sejarah, filsafat, agama, politik, hubungan internasional, dan berbagai bidang lainnya, ternyata banyak yang menggunakan sastra dalam memperkaya wawasannya.¹²⁹

Pikiran-pikiran gender baik menyangkut feminis, maskulin, dan transgender juga hadir dalam wacana sastra, dimulai dari karya sastra masa awal kesusastraan Indonesia, seperti *Sitti Nurbaja* hingga karya sastra terkini. Pemikiran politik juga banyak dituangkan seperti dalam karya-karya sastra mutakhir seperti karya Rendra dan N. Riantiarno. Pemikiran, rasa, dan sikap nasionalisme juga disajikan sangat kuat dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan Y.B. Mangunwijaya. Pemikiran filsafat dalam aliran Rasionalisme, Humanisme, Eksistensialisme, Absurdisme, Suralisme, serta berbagai aliran filsafat lainnya juga sangat kaya dihadirkan dalam karya-karya Pamoedya Ananta Toer, Iwan Simatupang, Putu Wijaya, dan Y.B. Mangunwijaya. Beberapa pengarang yang saya sebutkan itu adalah pengarang-pengarang yang memiliki wawasan keilmuan dan sosial yang luar biasa. Mereka menjadi pengarang didasari atas latar pengalaman dan pembacaan literatur yang luar biasa sehingga mereka tidak saja sekedar mampu bercerita tetapi juga menyajikan banyak pemikiran dan ilmu serta menawarkan sistem nilai. Bahkan, misalnya, pada pengarang Y.B. Mangunwijaya, ia menulis baru mulai pada masa tuanya sekitar umur 50-an karena sebelumnya ia belajar dan belajar, menguasai ilmu secara multidimensi untuk kemudian menuangkan hasil refleksi keilmuannya itu dalam karya sastra. Sebelum mengerahkan dunia kepengarangannya, ia telah menjadi manusia multi dimensionalis

¹²⁹ I. B. Putera Manuaba, "Politik Identitas dalam Sastra Indonesia", dalam Erfianti *Ragam Wacana: Bahasa, Sastra, dan Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015a) halaman 313.

(menjadi sosiawan, ilmuwan, rohaniawan, arsitek, dan budayawan). Begitu pun Umar Kayam dalam *Para Priyayi*, novel ini lahir dari pengendapan mendalam atas penelitiannya yang komprehensif terhadap transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat (khususnya masyarakat Jawa). Karya-karya yang lahir dari proses kreatif semacam itulah yang mampu menghadirkan perubahan sosial (*social change*).

Dalam tulisan ini penulis ingin mengatakan juga bahwa banyak pula karya-karya yang ditulis dengan asal tulis, mungkin itu baik sebagai pembiasaan dalam berkarya. Akan tetapi, karya-karya yang tak kaya renungan dan pengetahuan semacam itu tentu saja belum mampu ke taraf menghadirkan perubahan sosial pada masyarakat pembaca. Oleh karena itu, keberadaan karya-karya itu sebenarnya juga dapat dilihat dari level-level semacam itu. Ada karya yang hadir dengan level ringan (sebatas menghibur, baru mampu bercerita), level menengah (level yang sedang, bercerita biasa), dan level tertinggi (level sarat pemikiran, intelektual). Maka tidak heran jika ada karya yang hanya asyik bermain atau memainkan kata-kata dengan kegelapan makna, dan ada karya yang menceritakan sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, saya menghargai semua corak sastra itu karena ada yang masih berproses menjadi pengarang dan ada pengarang yang sudah melampaui dan menuju jenjang pemikiran yang lebih universal menyangkut keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Menyinggung tentang level-level sastra itu, sebenarnya juga sangat berkait dengan pendukung karya sastra itu, sebab setiap corak karya memiliki pendukungnya sendiri. Namun, di sini saya hanya menekankan bahwa karya-karya yang membawa perubahan sosial itu adalah karya-karya yang tak sebatas bercerita tetapi sudah sampai pada tingkat kontemplasi yang mendalam sehingga dalam tingkat karya itulah pengarang menawarkan nilai-nilai.

Namun, yang jelas, kehadiran karya sastra di tengah masyarakat, dapat mengubah atau mengakibatkan perubahan di masyarakat. Sastra dapat menggugah kesadaran inklusif masyarakat. Sistem nilai, konstruksi sosial, pandangan masyarakat, dan perilaku masyarakat, sangat mungkin berubah diakibatkan oleh kehadiran sastra. Alternatif-alternatif baru, gagasan, solusi, mediasi, dan resolusi itu sangat mungkin dihadirkan

melalui sastra. Begitu pun dengan pesan, amanat, kebijaksanaan, juga sangat mungkin dihadirkan dalam sastra. Sungguh banyak teman yang mengatakan bahwa setelah membaca sastra-sastra bermutu ia mendapat pencerahan, merasa lebih terang dan bijak dalam menjalani kehidupan, dan lebih percaya diri dalam kepribadiannya. Oleh karena itu, para elite yang belum bijak perlu membaca sastra agar lebih bijak mengelola bangsa dan negara agar mereka tak hanya menuntut hak tetapi sadar akan kewajibannya sebagai pelayan rakyat. Hal yang jelas bahwa karya sastra yang diciptakan pengarang-pengarang terbaik bangsa harus dibaca, dihayati, direnungkan, dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebab, sastra itu ditulis dari hasil kepekaan, respek, dan kepedulian pengarang menuju kehidupan negara bangsa yang lebih baik. Berbagai gaya termasuk ironisme, sinisme, kritisisme, bahkan sampai sarkasme digunakan untuk menggugah kesadaran manusia menuju kebaikan bersama. Nilai-nilai yang ditawarkan akan disajikan dalam berbagai saluran aliran dan gaya, sehingga sastra harus dimaknai dalam ketaklangsungan makna, pembaca harus dapat menjadi penginterpretasi yang perlu berjuang menemukan makna yang ada di balik kata-kata sastra. Soal fungsi sosial sastra ini pernah juga saya sampaikan seperti berikut.

Diakui atau tidak, sastra memiliki fungsi dalam perubahan sosial (social change). Apa pun jenis, corak, dan bentuk sastranya, akan memiliki fungsi mengubah pola hidup, pola pikir, dan struktur sosial masyarakat—kendatipun pengarang mencipta mula-mula tidak untuk itu. Dalam kesusastraan Indonesia misalnya, sejak kehadiran novel-novel Balai Pustaka seperti Siti Nurbaya karya Marah Rusli hingga karya-karya mutakhir pada saat ini, sudah banyak berimplikasi pada perubahan sosial. Bahkan sastra klasik dan lisan (mitos, legenda) juga memiliki fungsi sosial mengubah masyarakat.

.....

Dalam konteks ini, sastra dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Misalnya, dalam riset yang pernah saya laksanakan tentang fungsi sosial mitos di kawasan hutan Baluran dan Gilimanuk, mitos (sebagai sastra) yang dipercayai dapat menggerakkan masyarakat kawasan hutan untuk turut melestarikan hutan dan menjaga harmoni. Di mana mitos masih dipercaya masyarakat, di sana hutan lestari.

Sastra apa pun bentuknya memiliki fungsi sosial dalam masyarakat, yang perlu disimak, dihayati, dan direnungkan untuk mengelola bangsa, agar berada dalam rel kebaikan. Masyarakat, dan juga elite negara, seharusnya menghayati karya-karya sastrawannya, seperti halnya di masa lampau raja menyimak karya-karya pujangganya sebab sastra itu wujud keterwakilan ekspresi rakyat.

Dalam sastra akan selalu ada nilai kontekstual dan universalnya. Nilai-nilai itu bersifat relatif dan mengalami pergeseran seiring dengan dinamika zamannya. Keberadaan nilai-nilai itu ada dalam sastra dan berimplikasi pada perubahan sosial.¹³⁰

Selain fungsi membawa perubahan sosial pada masyarakat, sastra juga dengan setia merepresentasikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sastra adalah “anak zaman” dan menjadi sejarah intelektual dan kejadian yang ada dalam sebuah bangsa dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mengetahui karakter bangsa dapat juga diketahui melalui sastra. Setiap kejadian, terutama yang spektakuler dan monumental, pastilah akan terepresentasikan dalam sastra. Ini terjadi karena pengarang menulis memang bersumber dari interaksinya dengan kondisi sosial masyarakatnya tempat ia hidup dan mengembangkan kehidupannya. Bagaimana situasi dan kondisi dari zaman ke zaman, dari orde ke orde, dapat disimak dalam sastra. Oleh karena itulah, dalam bidang ilmu lain sekaligus juga dianggap sebagai dokumen sosial atau sumber informasi yang dapat memberi informasi tentang sejarah bangsa, sejarah pemikiran, dan sejarah intelektual suatu bangsa. Sama seperti kita dapat mengetahui bagaimana zaman lampau di zaman kerajaan-kerajaan, dapat diketahui melalui karya-karya pujangga yang ditinggalkan.

Mungkin nanti jauh ke depan, karya sastra yang telah terbit di Indonesia akan menjadi dokumen sejarah yang sangat penting untuk melihat zaman-zaman ini bagi generasi yang akan datang—seperti halnya

¹³⁰ I. B. Putera Manuaba, “Eksotisme Sastra: Eksistensi dan Fungsi Sastra dalam Pembangunan Karakter dan Perubahan Sosial”. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Sidang Terbuka Rektor Universitas Airlangga, di Garuda Mukti Gedung Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya, pada 6 September 2014.

kita saat ini melihat ke zaman lampau. Sebab berbagai kejadian, karakter kepemimpinan, dan kondisi sosial masyarakat saat ini, tercatat dan tergores dalam naskah-naskah sastra. Generasi yang akan datang akan mempelajarinya melalui sastra. Sastra sepertinya nanti dalam generasi yang akan datang akan menggantikan sejarah, karena karya sejarah kreatif di Indonesia sangat langka ditulis (kalau ilmuwan sejarah memang cukup banyak), tetapi penulis sejarah kreatifnya tampak belum mentradisi.

Sebagai "anak zaman", sastra selalu menyuarakan kehidupan masyarakat, sehingga bagaimana kondisi sosial masyarakat dari zaman ke zaman akan terbaca melalui karya-karya sastra (baik berbentuk prosa, puisi, dan teks drama). Bagaimana pemerintahan otoriter terjadi, bagaimana korupsi terjadi, bagaimana kemanusiaan diperlakukan, dan bagaimana keadilan dan kebenaran dalam hukum, semuanya terbaca dalam sastra. Dalam bab ini, saya juga hendak menyatakan bahwa sastra adalah "suara zaman" yang dilukiskan dengan semangat kreativitas pengarangnya, dan pengarang di sini meskipun ia seorang individu yang berkarya namun menurut saya ia tidaklah secara subjektif melukiskan situasi dan kondisi zamannya karena sesungguhnya ia berkapasitas sebagai keterwakilan masyarakat secara keseluruhan, ia adalah puncak-puncak keterwakilan nurani masyarakat karena hanya ialah yang mampu menyuarakannya dalam karya.

Penutup

Di akhir tulisan ini, penulis berpandangan bahwa sastra akan tetap ada dan ditulis sepanjang bangsa dan kehidupan manusia ada karena sastra adalah "anak zaman" yang berfungsi membangun peradaban bangsa yang lebih baik dan sekaligus menjadi "anak zaman" yang akan selalu setia menyuarakan segala perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sastra hadir ibarat "oase" di tengah gurun pasir, yang memberi pencerahan, membangun kesadaran inklusif, dan menyadarkan kemanusiaan hakiki. Untuk itu, sastra harus diposisikan sebagai bagian penting dan mesti didukung oleh institusi pengelola sastra secara sinergis, dan dapat dibaca oleh siapa saja yang ingin menjadi bijak dalam

menyikapi kehidupan di dunia. Kehadiran sastra, secara tidak langsung dapat membawa perubahan sosial dan sekaligus semua perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan tersuarakan dalam sastra. Sastra yang mengubah adalah sastra yang ditulis dengan tingkat kontemplasi pengetahuan dan intelektualitas yang mendalam. Orang-orang yang mencintai sastra adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan dan mencintai kebaikan bersama.

Pemikiran tentang Warna Lokal dalam Sastra Indonesia

Pengantar

Sebuah negara-bangsa akan diakui kebesarannya jika memiliki kebudayaan dan peradaban. Sastra merupakan satu produk kebudayaan dan hasil peradaban yang tidak boleh diabaikan begitu saja—meskipun sebagian orang tampak lebih banyak tertarik mengejar jabatan politik. Mengapa demikian? Karena di dalam sastra tertuang tawaran kristalisasi nilai dan pemikiran zamannya yang tak usang di makan zaman. Dengan demikian, untuk mengenali jatidiri negara-bangsa dari masa ke masa dapat dikenali melalui karya-karya sastranya. Ada sebagian orang menyebut sastra itu adalah jiwa zaman dari suatu negara-bangsa. Indonesia yang multietnis, multikultural, dan multireligi ini tentu saja memiliki kekayaan budaya dan peradaban.

Di masa lalu Indonesia—yang dulu lebih disebut dengan nama Nusantara—memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang berkait dengan keberadaan kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia. Dalam setiap kerajaan yang pernah berjaya, ada orang-orang bijaksana, yakni para Mpu, Kawi, dan Pujangga yang memiliki aktivitas bersastra yang memiliki nilai budaya, sastrawi, dan filosofi yang sangat penting bagi terbangunnya negara-bangsa Indonesia.

Sejarah Perjalanan Sastra Indonesia

Sastra Indonesia memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang, yang pada awalnya kebanyakan berkembang di Sumatera dan kemudian selanjutnya lebih berkembang di Jawa. Menyebut sastra Indonesia di masa awal, kita akan mengaitkan dengan masa tahun 1920-an pada masa Balai Pustaka yang ditandai dengan diciptakannya karya-karya *Sitti Nurbaja* karya Marah Rusli, *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar, dan sederetan karya lainnya pada masa itu. Namun, sesungguhnya, sebelum masa itu juga ada perkembangan sastra yang memiliki keterjalinan yang erat dengan sastra Indonesia, yakni sastra Cina Peranakan (yang ceritanya banyak terbit dalam majalah) dan juga sastra Hindia Belanda (seperti *Max Havelaar* karya Multatuli/Douwes Dekker). Kemudian di masa itu juga ada karya-karya seperti pantun, syair, seloka, dan gurindam yang sekarang ini mungkin tak banyak dikenal. Kita mengenal kesusastraan Melayu yang cikal-bakalnya, misalnya berkait nama Raja Ali Haji penulis Gurindam 12 (yang juga diakui menjadi cikal-bakal kesusastraan di Negeri Jiran Malaysia). Kemudian, jauh ke belakang lagi, ada karya-karya kakawin, pupuh, mantra, suluk, dan berbagai karya klasik lainnya yang ditulis dalam naskah seperti lontar.

Semua karya sastra yang diciptakan sejak masa lampau itu, selalu terkait dengan realitas sosial masyarakatnya. Dapat dikatakan, tidak ada karya yang terlahir dengan tidak berpijak di bumi, semuanya berpijak di bumi (realitas kehidupan sosial). Semuanya kontekstual, sekaligus mengandung nilai-nilai universal. Karya-karya penting yang pernah ada di Indonesia, mengekspresikan dan menggambarkan berbagai kejadian, kondisi, dan gambaran sosial masyarakat pada zamannya di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran juga jika bidang-bidang ilmu nonsastra memosisikan karya sastra sekaligus juga sebagai dokumen penting zamannya. Berbagai bidang ilmu juga merasa berkepentingan membaca sastra, bukan seperti dalam kacamata orang sastra membaca sastra, tetapi dengan kacamata mereka sendiri. Dengan dikatakannya bahwa semua karya sastra yang diciptakan itu berpijak di bumi, membuat semua karya itu sesungguhnya tidak terlepas dari masyarakat di mana karya sastra itu

diciptakan oleh sang sastrawannya. Tidak ada karya sastra yang lahir dari awang-awang atau langit, kelahiran karya sastra itu semuanya sebagai akibat (*effect*) dari adanya persentuhan dan interaksi sastrawan dengan masyarakatnya di mana sang sastrawan itu hidup dan mengembangkan kehidupannya.

Sastra sebagai Akibat (*Effect*) dari Sebab (*Cause*)

Dengan demikian, rasanya tidak ada karya sastra yang lahir tanpa sebab (*causa*). Semua karya sastra terlahir sebagai *akibat* dari *sebab* yang ada, dari adanya kondisi sosial yang melingkunginya. Adapun sebab itu bisa sangat bervariasi; dari yang remeh-temeh, biasa-biasa saja, hingga yang paling rumit dan krusial sekalipun dapat menjadi penyebab. Dalam hal ini, sang sastrawan sesungguhnya juga tengah menjalankan tanggung jawab sosialnya untuk mengekspresikan dan memikirkan lebih jauh tentang berbagai kejadian dan kondisi yang dihadapinya, dan mengekspresikan dalam karyanya.

Oleh karena itulah, dalam karya sastra seseorang dapat menyimak dan merasakan pahit-manisnya kehidupan yang berwujud perasaan-perasaan, aspirasi-aspirasi, dan gagasan-gagasan dalam karya. Ketika suatu kejadian disembunyikan, ditutupi, atau bahkan dimanipulasi, sastra tetap hadir tegak menggugah perasaan pembaca dengan caranya sendiri. Sebab, sastra yang baik itu akan selalu mengungkapkan kejujuran dan sampai pada tingkat kebenaran perifer (pinggiran).

Warna Lokal dalam Sastra

Pada gilirannya, di sini, dapat dikatakan, tidak ada karya sastra yang tanpa warna lokal. Dalam berbagai variasinya, setiap karya yang lahir akan memuat warna lokalnya sendiri. Maka, warna lokal itu dalam realitas karya sastra sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi sebagai sesuatu yang melekat ada dan yang kodrati dalam karya sastra. Kalau ditanyakan mulai kapan warna lokal itu ada dalam sastra Indonesia? Jawabannya tentu saja sejak karya sastra Indonesia itu diciptakan, dan

bahkan warna lokal itu sudah ada sejak jauh sebelumnya yakni sejak masa kesusastraan yang paling klasik. Kalau dilanjutkan pertanyaannya, sampai kapan warna lokal itu akan ada? Jawabannya sepanjang karya sastra itu diciptakan oleh sastrawannya. Lalu kapan karya sastra itu tak lagi diciptakan? Jawabannya: ketika kehidupan itu sudah tidak ada lagi.

Dalam kajian sastra, warna lokal selama ini yang cenderung dikonsepsikan sebatas *latar* dan *diksi* perlu didefinisi. Warna lokal dapat memiliki konsep yang jauh lebih luas dari itu, sehingga kajian warna lokal dapat juga menyangkut tema-tema karya, semangat zaman karya, pesan, amanat, dan gagasan-gagasan sastrawan serta budaya (tradisi, kosmopolitan atau urban), serta budaya adiluhung dan populer dalam karya. Jadi, dalam kondisi apa pun dan bagaimanapun yang ada dalam kaitan dengan lokal di mana karya tersebut diciptakan pada dasarnya merupakan warna lokal.

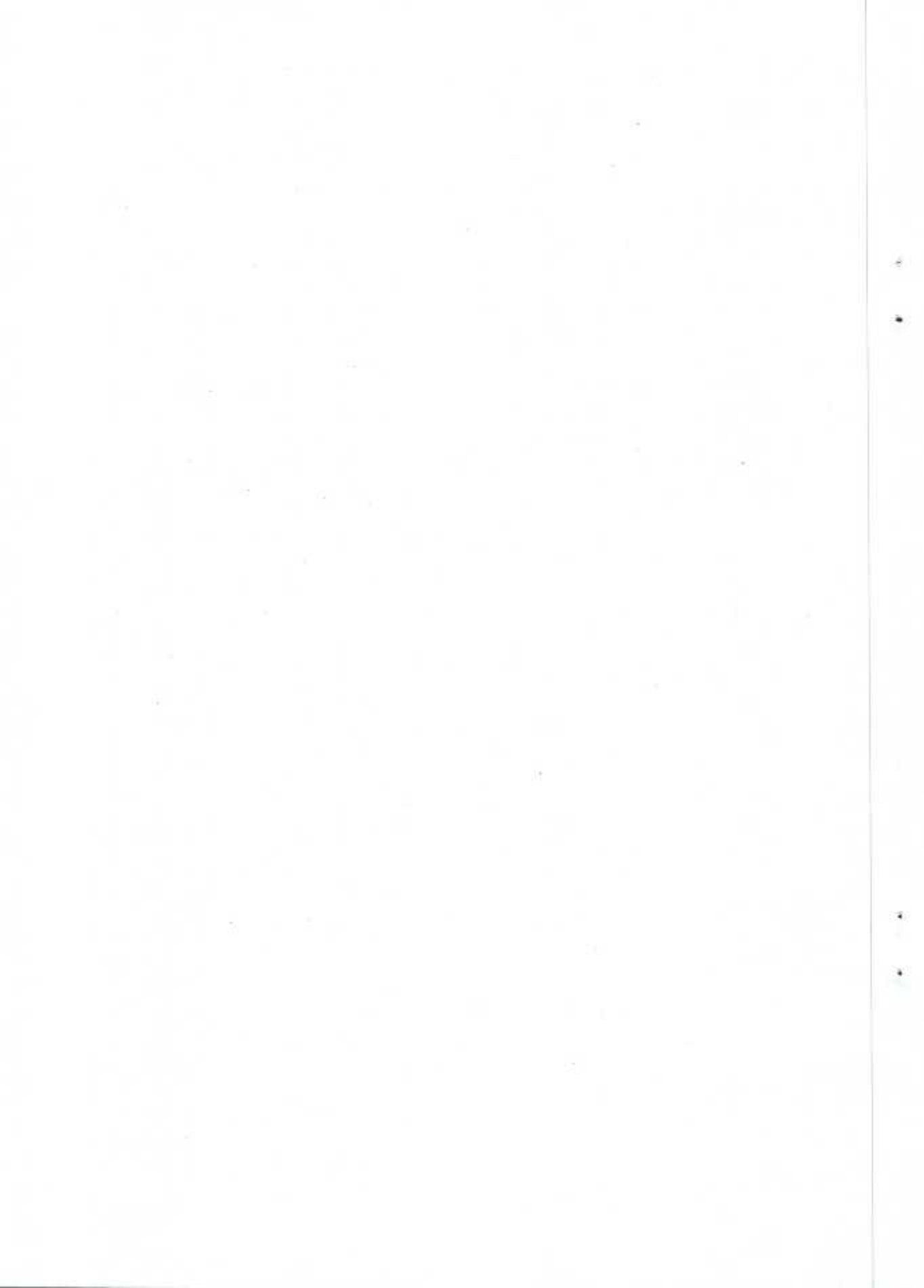
Karya-karya puisi Chairil Anwar yang ditulis pada dekade 1945-an yang menggelorakan semangat perjuangan dan kesadaran kebebasan juga dapat disebut sebagai warna lokal. Hal itu terjadi karena Chairil Anwar hidup dan berkarya dalam lokal ibu kota Jakarta menuangkan ekspresinya dalam puisi-puisi yang penuh perjuangan melawan penjajah yang mendegradasi bangsa. Kondisi lokal Chairil Anwar yang diwarnai kegigihan para tokoh bangsa untuk melawan penjajah menginspirasi dirinya untuk menuliskan puisi-puisi yang menggelorakan perjuangan dan kebebasan.

Dengan demikian, kekayaan budaya dan peradaban yang ada pada lokal-lokal di Indonesia ini sebenarnya dapat menjadi sumber inspirasi dan potensi kultural untuk menciptakan karya sastra Indonesia yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca nasional maupun internasional. Andrea Hirata sudah membuktikan dan mencoba mengangkat kekayaan budaya Indonesia ini. Itu baru sebagian kecilnya saja dari "samudra" budaya Indonesia yang sangat beragam. Sastra Indonesia modern yang sudah ada sejak masa awal kesusastraan Indonesia di masa tahun 1920-an hingga kesusastraan mutakhir saat ini, tidak terlepas dari warna lokal.

Penutup

Warna lokal pada setiap pengarang dapat ajek dan juga dapat tidak ajek. Zamawi Imron, Ahmad Tohari, dan Oka Rusmini dapat dikatakan sebagai sastrawan yang menggambarkan warna lokal yang ajek dalam karya-karyanya. Nam'a sastrawan yang tidak ajek, mungkin dapat disebutkan seperti sastrawan, NH Dini, Putu Wijaya, dan Budi Darma.

Warna lokal, yang dimaksud dalam wacana ini, tidak terbatas hanya pada diksi-diksi yang digunakan dalam suatu karya sastra. Kalau menyoal warna lokal, bahkan juga sampai pada ruh dari karya itu. Jadi, warna lokal itu, dapat soal diksi-diksi, semangat, aliran sastra, corak sastra, dan bahkan ruh dari karya itu.



Sastra Jawa Timur Mutakhir: Potensi, Apresiasi, dan Aksi Literer

Pengantar

Ketika menerima undangan sebagai pemateri dari Panitia Seminar Sastra “Meretas Sastra Jawa Timur”, penulis mengira-ngira apakah yang dimaksudkan itu Sastra Indonesia Jawa Timur Mutakhir atau juga termasuk Sastra Daerah Jawa Timur Mutakhir? Namun, selama ini, Sastra Daerah hampir tidak pernah diketahui dilekatkan dengan kata *mutakhir* dan lebih sering diikuti dengan kata *modern*. Untuk itu, sementara penulis menganggap yang dimaksudkan di sini adalah Sastra Indonesia Jawa Timur Mutakhir.

Sastra Indonesia Jawa Timur Mutakhir merupakan semua karya sastra Indonesia yang ditulis oleh sastrawan yang berdomisili di Jawa Timur dalam perkembangannya yang terkini. Batas antara modern dan mutakhir pun juga tidak dapat ditentukan secara tegas, dan karena dalam istilah lainnya ada juga *kontemporer*. Kata *kontemporer* (mungkin) itu sendiri lebih dikaitkan dengan adanya credo atau kebaruan karya pada zamannya dan *mutakhir* (mungkin) tampak lebih dikaitkan dengan perkembangan karya dalam waktu dekade terakhir (terkini), misalnya satu dasawarsa terakhir. Oleh karena itu, selanjutnya dalam kesempatan ini secara spesifik dibahas perihal Sastra Indonesia Jawa Timur Mutakhir. Karya sastra berbahasa Indonesia yang ditulis terutama oleh sastrawan Jawa Timur.

Subkultur Karya Sastra Jawa Timur

Jawa Timur, yang memiliki banyak kabupaten dan kota ini, terbagi dalam banyak subkultur budaya Jawa Timur. Masing-masing subkultur budaya Jawa Timur ini memberi pengaruh pada sastrawan Jawa Timur dalam penciptaan karya sastra Indonesia, karena mereka menyebar berasal dari berbagai daerah Jawa Timur. Dalam pemetaan sastra Indonesia Jawa Timur yang dilakukan Manuaba dkk., penciptaan sastra di Jawa Timur lebih didominasi jenis prosa dan puisi, serta memiliki kekhasan mengekspresikan kearifan lokal budaya Jawa Timur. Di samping itu, Jawa Timur memiliki peta kekuatan memproduksi karya sastra (cerpen dan puisi) dengan daerah basis Lamongan, Banyuwangi, Ngawi, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Sumenep.¹³¹

Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi sastrawan berbakat dan karya sastra yang sangat prospektif. Banyak sastrawan Jawa Timur tumbuh dan berkarya, mereka berasal dari komunitas sastra, dewan kesenian, kampus, pesantren, dan independen. Bukti karya mereka pun sudah banyak terbit, yang sekarang terkoleksi di antaranya di Balai Bahasa Jawa Timur dan Dewan Kesenian Jawa Timur, dan beberapa sudah mulai dijadikan objek kajian di kampus-kampus untuk skripsi, tesis, dan karya riset. Dari banyak nama sastrawan Jawa Timur, di antaranya ada nama-nama Mashuri (*Hubbu*), Indra Tjahyadi (*Pemanggul Mayat*), Aziz Manna (*Siti Surabaya, Tanggulendut, Prayon*), Lan Fang (alm.) (*Ciuman di Bawah Hujan, Reinkarnasi*), S. Jai (*Kumara, Gurah*), Tjahyono Widiyanto (*Cakil*), AS Sambawi (*Mawar Putih*), Yusri Fajar (*Surat dari Praha*), Wina Bojonegoro (*Negeri Atas Angin*), Mardi Luhung (*Aku Jatuh Cinta Lagi pada Istriku*), Dwi Ratih Ramadhany (*Pemilin Kematian*), Eko Endarmoko (*Ladang Pembantaian*), Shohifur Ridho Ilahi (*Rokat Perahu Mawar*), Bramantio (*Equilibrium*), dan berbagai karya lainnya serta berbagai karya sastra baru yang juga terus terbit.

Karya-karya sastra Indonesia Jawa Timur mutakhir terus-menerus terbit dari tahun ke tahun, ada yang berasal dari pemenang sayembara dan juga karya-karya yang lahir dari suatu komunitas, dewan kesenian, kampus, pesantren, dan independen itu tadi. Karya-karya sastra yang

¹³¹ I. B. Putera Manuaba, "Peta Sastra Indonesia Sastrawan Jawa Timur", dalam *Litera: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2015.

terbit sebagian besar ditulis oleh sastrawan berumur muda dan juga ada yang ditulis oleh sastrawan senior yang tetap aktif menulis seperti Shoim Anwar dan Budi Darma. Dari kenyataan kreatif sastrawan dengan karyanya itu, Jawa Timur sebenarnya sangat kaya sastrawan dan sastra Indonesia mutakhir. Dapat dikatakan juga bahwa di daerah Jawa Timur, perkembangan penciptaan sastra Indonesia sangatlah pesat.

Pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia Jawa Timur mutakhir ini, juga mendapat "angin segar" dari dua lembaga di Jawa Timur, yakni Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) dan Balai Bahasa Jawa Timur (BBJT), dengan diadakannya secara rutin sayembara sastra dan pemberian penghargaan sastra mulai beberapa tahun terakhir ini. "Angin segar" itu bukan saja membangkitkan kegairahan bersastra di daerah Jawa Timur dan membuat dunia sastra tampak mulai dihargai, tetapi juga secara tidak langsung lebih memperkenalkan karya-karya yang ada di berbagai daerah Jawa Timur dan bahkan memperkenalkan adanya komunitas-komunitas sastra yang bertumbuh di Jawa Timur kepada masyarakat—meskipun banyak juga komunitas sastra yang tidak bisa *survive* karena terkendala terutama dengan soal pendanaan. Karya-karya yang tercipta dan telah ada itu, tentu saja sebenarnya merupakan modal sastra (modal budaya) untuk membangkitkan budaya literer di Jawa Timur.

Memberdayakan Karya Sastra Jawa Timur

Geliat dan semarak kreasi karya sastra Indonesia di Jawa Timur seharusnya dapat diapresiasi masyarakat secara luas, khususnya untuk membangun budaya literer. Karya-karya sastra Jawa Timur yang dari segi kuantitas cukup banyak dan kualitasnya juga menunjukkan kekhasan kejawatimuran ini, bagi pembaca nasional dan bahkan internasional, memang kurang banyak dikenal dan diapresiasi. Apakah kira-kira penyebabnya? Selama ini, ada titik-titik lemah yang perlu dibenahi dan dikembangkan berkait dengan eksistensi sastra Indonesia Jawa Timur mutakhir.

Titik pertama, belum adanya pendataan karya sastra. Perlu ada pendataan karya-karya sastra yang terbit di seluruh Jawa Timur, yang sampai ke pelosok-pelosok daerah sehingga ada basis data yang bisa

memberikan informasi tentang karya-karya sastra yang terbit di Jawa Timur secara keseluruhan. Ini dapat dilakukan oleh pihak mana saja, asalkan hasilnya kemudian dapat disosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pembaca sastra Jawa Timur dan luar Jawa Timur yang membutuhkannya. Kesulitan yang terjadi untuk mengetahui karya-karya apa saja yang pernah diciptakan di Jawa Timur dalam periode tertentu, akan sangat dengan adanya pendataan ini dan membantu pembaca umum atau pembaca ahli (akademisi, peneliti, kritikus).

Titik kedua, belum adanya pusat dokumentasi sastra Jawa Timur. Perlu ada pusat dokumentasi sastra Jawa Timur yang resmi dan tertata baik, seperti Pusat Dokumentasi Sastra H.B.Jassin, Jakarta yang menjadi pusat koleksi karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan Jawa Timur. Jika ada pihak atau orang (entah dari dalam atau luar negeri) ingin mengetahui dan lebih tahu banyak tentang karya-karya sastra Jawa Timur, mereka dapat dengan mudah langsung menuju pusat dokumentasi itu. Pusat dokumentasi itu mungkin tidak secara khusus mendokumentasi sastra Indonesia Jawa Timur, tetapi juga akan sangat baik jika juga mendokumentasi karya sastra daerah Jawa Timur. Dengan demikian, pusat dokumentasi ini bisa menjadi sumber informasi sastra Jawa Timur dan sekaligus menjadi pusat studi bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari sastra Jawa Timur. Para siswa, mahasiswa, atau siapa pun yang ingin lebih banyak tahu tentang sastra Jawa Timur, bisa mengakses dan mencari di pusat dokumentasi sastra ini.

Titik ketiga, belum optimalnya distribusi atau penyebaran karya-karya baru sastrawan Jawa Timur. Karya-karya sastra Jawa Timur lebih banyak tercetak dalam jumlah yang terbatas, sehingga hasil-hasil karya sastra itu terkadang tidak sampai ke masyarakat pembaca, mungkin terbatas di kalangan sesama sastrawan, pengamat, atau peneliti saja. Kondisi ini sebenarnya amat disayangkan karena buah pikiran pengarang sebagai produk budaya tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. Maka itu, akan sangat baik jika ada karya-karya sastra baru yang ditulis sastrawan Jawa Timur dapat di-*launching* dan didistribusikan sampai ke masyarakat umum (sasaran) secara luas, misalnya siswa sekolah dan mahasiswa program-program sastra.

Selama ini memang sulit mencari karya-karya sastra Indonesia sastrawan Jawa Timur di koleksi-koleksi atau perpustakaan sekolah maupun kampus. Jika ada satu dua karya, dan itu biasanya atas inisiatif sastrawannya sendiri. Artinya, perlu ada pihak-pihak yang membantu mendistribusi karya sastra ciptaan sastrawan Jawa Timur secara luas, tidak hanya dalam koleksi di perpustakaan, tetapi juga terdistribusi di toko buku, tersiar dalam media elektronik atau media sosial, semua komunitas di Jawa Timur, dan juga media massa cetak. Jangan sampai terjadi: banyak karya terbit, tetapi banyak orang tidak tahu. Kalau kondisinya tetap seperti itu, budaya literer tidak akan jalan. Jika pendistribusian atau penyebaran dapat berjalan dengan baik, niscaya karya-karya sastra Jawa Timur akan makin dikenal dan juga dengan sendirinya budaya literer akan terbangun dalam masyarakat.

Titik keempat, belum ada tradisi kritik-mengkritik karya sastra baru. Ini terkait dengan keluhan klasik, tentang masih lemahnya keberadaan dan peran kritikus sastra, yang bisa mengapresiasi karya sastra pada tingkatan yang mendalam melebihi apresiasi pembaca umum. Hal itu terjadi karena dari tradisi itu diharapkan dapat melecut dan melejitkan karya-karya yang makin berkualitas. Kritikus yang dimaksudkan di sini adalah kritikus yang dapat melihat sisi lemah dan keunggulan karya, yang dapat disampaikan secara langsung, baik dalam ajang diskusi (kritik) maupun penulisan karya kritik untuk buku, majalah, atau koran.

Titik kelima, sulitnya dukungan dana penerbitan karya sastra. Selain melalui jalur sayembara untuk bisa diterbitkan, penerbitan karya agar dimungkinkan dapat dicarikan solusi untuk penerbitannya. Ini tentu saja terlebih dahulu perlu didahului dengan kelayakan karya yang akan diterbitkan, atau ada bank naskah. Karya-karya sastra yang berkualitas, meskipun pada awalnya diterbitkan dalam jumlah yang terbatas, namun bagaimana mengusahakannya agar bisa diperbanyak sehingga bisa menjangkau kebutuhan pembaca yang luas. Tahap penerbitan terbatas sebagai uji coba atau diapresiasi oleh kalangan terbatas (pembaca ideal) seperti sesama sastrawan, kritikus, untuk menilai kelayakannya, tetapi kemudian bisa diusahakan atau disepakati memperbanyak penerbitannya sehingga karya tersebut benar-benar sampai ke masyarakat sasaran pembaca.

Titik keenam, belum banyaknya aksi-aksi sastra. Perlu memperbanyak aksi-aksi sastra ke masyarakat Jawa Timur atau luar Jawa Timur, agar sastrawan dan karya-karyanya lebih dikenal. Selama ini, beberapa sastrawan yang muda berbakat Jawa Timur memang sempat diundang untuk membacakan karya-karyanya, bahkan sampai ke ajang nasional di TIM Jakarta. Namun, semua itu masih sangat terbatas. Perlu aksi-aksi literer atau pembacaan karya, yang tidak harus dilakukan hanya dalam acara sastra sendiri, tetapi sebenarnya dapat saja dikaitkan atau diikutkan dengan acara-acara publik lainnya. Seperti dalam kaitan hari-hari bersejarah atau acara-acara resmi perlu melibatkan atau melakukan budaya literer sambil memperkenalkan sastrawan berbakat dan karya-karya terbaik sastra anak bangsa. Pembudayaan literer seperti ini memang belum terjadi (mentradisi) khususnya di Jawa Timur sehingga sastra itu seakan-akan sama sekali tidak terkait dengan acara-acara kemasyarakatan atau publik. Perlunya pembudayaan ini didasarkan atas pemikiran bahwa penyadaran itu dapat dilakukan melalui sastra yang bisa melalui aksi literer atau pembacaan mandiri.

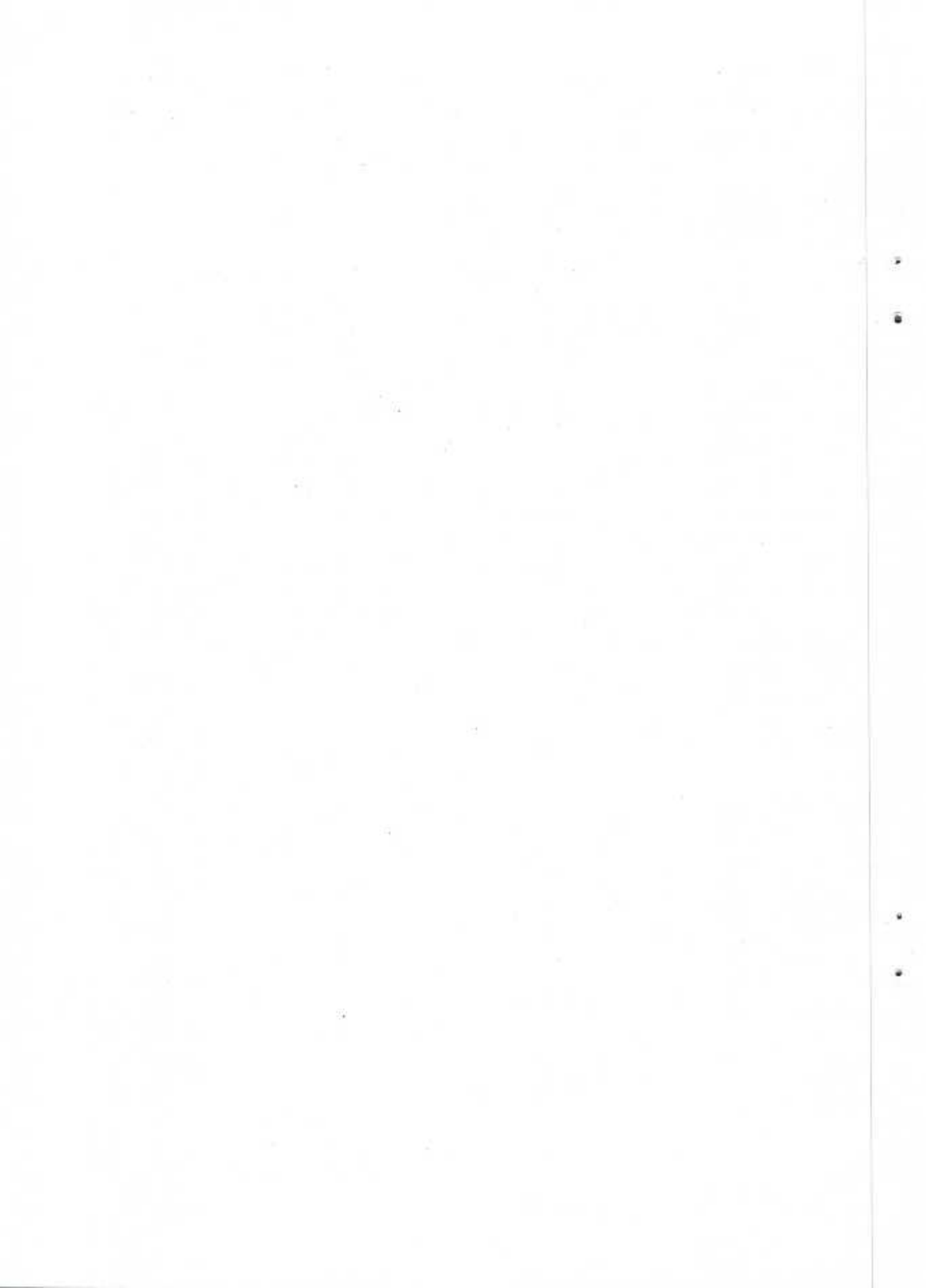
Titik ketujuh, belum ada kedalaman dan kefokusannya berkarya. Dari begitu banyak sastrawan Jawa Timur yang mencipta, ada fenomena atau kecenderungan proses kreatif yang timbul-tenggelam pada sebagian besar sastrawan Jawa Timur. Maksudnya, tradisi berkarya sudah cukup baik, tetapi dedikasi, kesinambungan, kedalaman, fokus, itu masih menjadi persoalan pada sebagian besar sastrawan Jawa Timur. Perlu menjadi sastrawan atau menciptakan karya-karya yang berciri atau berkarakter sehingga baik sastrawan maupun karyanya cukup dikenal oleh masyarakat luas. Menggarap tema-tema atau persoalan secara fokus dan mendalam, yang tidak cenderung melebar, sangat penting dalam dunia kepengarangan. Hal itu terjadi karena karya yang berkualitas itu biasanya mencerminkan kedalaman pemikiran atau renungan serta keluasan wawasan dan potensial menawarkan nilai-nilai.

Penutup

Demikian beberapa pokok pemikiran ini guna mengembangkan sastra di Jawa Timur, lebih membangun budaya literer dan mengusahakan proses penyadaran nilai-nilai seni dan budaya dalam masyarakat kita. Karya-karya sastra Jawa Timur memiliki potensi untuk itu dan memiliki potensi juga untuk dapat lebih dikenal pada pembaca nasional dan internasional.

Tujuh titik yang dipandang belum banyak diberdayakan atau dikelola sebagaimana dikemukakan, perlu mendapat perhatian dari pembaca dan berbagai pihak, sehingga karya-karya sastra dan juga sastrawan Jawa Timur lebih dikenal. Tidak hanya dikenal oleh masyarakat pembaca Jawa Timur, tetapi masyarakat pembaca nasional, bahkan masyarakat pembaca internasional.

Sebenarnya, kualitas karya-karya sastra Jawa Timur—yang jumlahnya begitu banyak—tidak kalah dengan karya-karya sastra yang sering diperbincangkan dalam forum-forum sastra. Karya sastra sastrawan Jawa Timur, dapat dikatakan, menyimpan kekayaan literer dan budaya yang belum banyak disentuh oleh kritikus—akademik maupun kritikus media massa.



Kritik Sastra Indonesia yang Menginspirasi: Mediasi dan Seminarsi

Pengantar

Ketika penulis diminta menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Kritik Sastra “Mencari Formula Baru Kritik Sastra Indonesia” yang diselenggarakan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Bahasa dan Sastra UGM, serasa cukup berat menjawab. Oleh karena, topiknya penulis anggap merupakan satu hal yang besar, yakni *mencari formula baru kritik sastra Indonesia*. Sebab, diperlukan kapabilitas sebagai kritikus, dan terlebih lagi jika sebagai pemikir kritik sastra.

Penulis hanyalah satu di antara sekian banyak orang yang pernah menulis kritik sastra di media massa, atau hanya beberapa kritik sastra akademik yang kebetulan pernah penulis tulis. Untuk beberapa kritik media massa, penulis memang kebetulan sudah menghimpun dalam sebuah buku *Kapita Selekta Kritik dan Esai Sastra Media Massa* (2017).¹³² Lain dari itu, sebelumnya hanya ada sedikit pengalaman menulis pemikiran tentang kritik sastra yang terhimpun dalam buku *Poe(li)tics: Esai-esai Politik Kritik Sastra Indonesia* (2015c).¹³³ Bagi penulis, untuk memikirkan formula kritik sastra Indonesia, diperlukan pemikiran yang sangat komprehensif. Kendati demikian adanya, berangkat dari kondisi seperti itu, satu hal yang kemudian membuat penulis memenuhi permintaan itu karena yang

¹³² L. B. Putera Manuaba, *Kapita Selekta Kritik dan Esai Sastra Media Massa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

¹³³ L. B. Putera Manuaba, “Memaknai Jejak Kritik Sastra Rawamangun vs Ganzheit: Dari Polemik ke Kolaborasi”, dalam Achmad Fawaid (ed.) *Poe(li)tics: Esai-esai Politik Kritik Sastra Indonesia*. (Yogyakarta: PKKH UGM, 2015c).

terpikir paling tidak bisa turut memberi sumbangsih bagi pencarian formula kritik sastra Indonesia. Inilah kondisi real yang melatari makalah yang penulis tulis ini.

Mengawali tulisan ini, penulis termasuk yang berpendapat bahwa realitas karya sastra Indonesia, dinamik dari masa ke masa. Sejak masa awal kesusastraan Indonesia tahun 1920-an (masa Balai Pustaka) hingga perkembangannya yang paling mutakhir menjelang dua dasawarsa tahun 2000-an, sudah ada berbagai eksplorasi yang tak terkira mengenai penciptaan karya sastra Indonesia. Bentuk, isi, jenis, corak, dan tipenya berubah-ubah dan berevolusi seiring dengan pengaruh, pergeseran, dan perkembangan zaman. Perubahan dari tahun ke tahun, bersifat gradasional—dari yang konvensional, modern, dan hingga yang postmodern. Perubahan dan eksplorasi penciptaan karya sastra Indonesia, tentu saja tidak akan pernah terhenti, namun terus bergulir menelusur ruang dan waktu ke masa depan.

Kini, realitas karya sastra Indonesia dapat kita saksikan dalam keberadaannya yang terkini seperti ini. Pengarang Indonesia, menulis dalam berbagai aliran seni penciptaan. Ada yang *gayeng* dengan aliran realis, surealis, absurd, simbolis, eksistensial, fantastis, dan seterusnya. Namun, apa pun aliran seni penciptaan yang digunakan dan dianut pengarang, namun tetap saja tidak keluar dari kodrat karya sastra itu sendiri sebagai *karya yang kompleks dan multidimensi*. Artinya, karya sastra sebagai buah ciptaan manusia pengarang, terlahir dari penghayatan yang utuh tentang dunia. Maka dari itu, dalam karya sastra, akan terekpresikan juga berbagai dimensi (sosial, politik, budaya, ekonomi, sejarah, filsafat, antropologi, ekologi, religius, dan seterusnya). Dengan keberadaan karya yang seperti itu, karya sastra menjadi semakin penting; tidak hanya sebagai karya reflektif-imajinatif, tetapi bahkan sebagai dokumen kehidupan yang multidimensi tadi.

Menjadi suatu realitas bahwa karya sastra sebenarnya dibutuhkan tidak hanya oleh orang sastra sendiri, tetapi juga oleh orang-orang nonsastra. Mereka yang dimaksudkan itu adalah para pembaca sastra dari berbagai bidang, yakni bidang sosial, budaya, sejarah, psikologi, antropologi, politik, hukum, kedokteran, dan seterusnya. Mereka itu

butuh membaca karya sastra, butuh *nilai-nilai yang terkandung dalam sastra dan yang dapat diproduksi dari sastra*. Bahkan, tidak jarang karya sastra juga digunakan sebagai objek material penelitian dari bidang-bidang itu. Ditambah lagi, jika melihat latar sang penciptanya yang juga tidak seluruhnya berasal dari orang yang berlatar bidang sastra. Bahkan, dapat dikatakan, sebagian besarnya justru adalah orang dari bidang nonsastra (dari berbagai latar belakang). Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya *karya sastra itu milik semua orang*, semua orang yang membutuhkan pencerahan dan kebijaksanaan. Karya sastra menjadi dunia kreatif bagi semua orang dari berbagai latar belakang untuk berekspresi sebebaskan-bebasnya (*licentia poetica*). Mencermati kondisi sastra dan pencipta sastra seperti itu, sastra itu—sekali lagi—dapat dikatakan sebagai karya yang sangatlah *kompleks, multidimensi, dan interdisipliner*.

Karya Sastra-Kritik Sastra, Relasi Dialektika Kreatif

Penulis berpandangan, dari karya sastra yang ada, muncul kritik sastra; dari kritik sastra yang ada, muncul karya sastra. Relasi antara karya sastra dan kritik sastra, bersifat dialektis-kreatif. Keduanya saling membutuhkan, sekaligus saling menginspirasi. Keberadaan keduanya juga saling melengkapi, dan sekaligus saling menyempurnakan. Karya sastra yang baik, menyebabkan munculnya kritik sastra yang baik; sebaliknya kritik sastra yang baik, menyebabkan terciptanya karya sastra yang baik—meskipun terkadang tidak selalu begitu.

Satu hal yang jelas, di sini dan saat ini penulis tidak sedang memperbincangkan kritik sastra dalam persentuhannya dengan politik—kendatipun sebagian orang berpendapat bahwa kritik sastra tidak bisa dilepaskan dari politik yang mengitarinya. Dalam rangka mencari kritik sastra Indonesia yang menginspirasi, kiranya kritik sastra itu perlu diperbincangkan kembali pada koridor fungsinya sebagai *yang memediasi pengarang dan pembaca sastra*. Juga, hasil kritik sastra *yang wajib diseminasi kepada pengarang* (sebagai kreator sastra); dengan harapan, kritik sastra benar-benar dapat bermanfaat untuk menginspirasi terciptanya karya-karya sastra yang berkualitas.

Namun, sebelumnya, kita perlu mempertanyakan: kritik sastra seperti apakah yang hendak dan patut kita perbincangkan? Sepanjang yang penulis ketahui, di Indonesia hanya ada *kritik sastra media massa* (nonakademik, populer)¹³⁴ dan *kritik sastra akademik* (ilmiah)¹³⁵. Manakah di antara keduanya yang mau kita cari format barunya? Mungkin salah satunya ataukah dua-duanya. Akan tetapi, pilihan salah satu atau justru dua-duanya ini, memang bukan soal penting, karena kedua-duanya itu merupakan karya kritik sastra, yang tentu saja memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Kedua-duanya pasti membutuhkan peningkatan kualitas, agar dapat lebih berperan dalam kapasitasnya sebagai *yang memediasi* dan *yang perlu diseminasi*.

Jika kritik sastra dapat berkapasitas seperti itu, niscaya karya kritik sastra akan semakin dipandang penting—baik oleh pembaca maupun pengarang. Namun, yang terang, dalam perkembangan dan pengembangan sastra Indonesia, dibutuhkan inspirasi dari karya kritik sastra. Di masa lalu, kritik-kritik sastra H.B. Jassin dianggap oleh para pengarang sangat menginspirasi dan sekaligus berwibawa karena kritik-kritiknya berdampak penting untuk memopulerkan pengarang, seperti terhadap penyair Chairil Anwar, juga pernah ada kritikus Dami N. Toda yang memopulerkan novelis novel baru Indonesia Iwan Simatupang.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kritikus Sastra Indonesia

Siapakah *kritikus sastra Indonesia* itu? Kritikus sastra Indonesia adalah orang yang menulis karya kritik sastra dari karya-karya sastra Indonesia secara berkesinambungan dari masa ke masa. Kritikus sastra Indonesia adalah orang yang senantiasa mengamati, memperhatikan, mengapresiasi,

¹³⁴ *Kritik sastra media massa*, atau acap kali disebut sebagai *kritik sastra nonakademik*, merupakan karya kritik sastra yang ditulis oleh kritikus sastra secara populer yang dimuat di media massa (baik koran budaya, resensi, atau yang berupa bentuk tulisan lainnya).

¹³⁵ *Kritik sastra akademik* (ilmiah), adalah kritik atau kajian atas karya sastra yang ditulis oleh para akademisi sastra atau peneliti yang berupa tulisan-tulisan yang mengkaji karya sastra, seperti artikel ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, yang ditulis dengan tata tulis standar ilmiah di perguruan tinggi.

mengkaji, dan menuliskan perkembangan sastra dari masa ke masa secara intensif-komprehensif. Dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan karya. Ia mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk itu. Kritikus sastra Indonesia, tentu saja mesti menjadi pembaca dan penulis yang berintegritas. Ia juga seorang kolektor karya sastra Indonesia. Juga mesti menjadi orang yang berwawasan luas, kritis, analitis, imajinatif, intuitif, dan kreatif. Bahkan, idealnya, wawasan kritikus sastra mesti melampaui wawasan pengarangnya. Oleh karena itu, karya kritik sastra itu, bisa jadi menjadi sebuah karya intertekstualitas dari karya sastra yang dibacanya. Idealnya lagi, kritikus sastra itu setidaknya mengerti dan memahami proses kreatif penciptaan karya.

Jika kritikus sastra Indonesia disyaratkan seperti itu, siapakah yang telah memenuhi kapasitas seperti itu? Dalam sejarah masa lampau, lagi-lagi kita mungkin bisa menyebut nama H.B. Jassin, meskipun kritik-kritiknya belum begitu khusus menggunakan teori-teori sastra untuk mengkritik karya-karya sastra Indonesia, karena pelibatan teorinya yang eklitik. Akan tetapi, pada masanya, kritik-kritik Jassin memang menginspirasi. Lalu, bagaimana dengan setelah masa Jassin dan masa sekarang ini? Siapakah regenerasi kritik sastra Indonesia? Sepertinya memang kita belum bisa mengidentifikasi yang tertuju pada satu nama seperti Jassin di masa lalu itu. Lalu, apakah kritikus sastra Indonesia itu masih ada?

Kritikus sastra seperti H.B. Jassin itu memang belum dapat kita lihat lagi. Akan tetapi ini tidak berarti kritikus sastra (beserta hasil kritik sastra Indonesia) sudah tidak ada lagi. Tipologi kritikus sastra Indonesia saat ini tampaknya sudah tidak memusat pada satu orang yang utuh bergelut pada dunia kritik sastra. Karya-karya kritik sastra Indonesia terlahir dari tangan seorang yang juga sekaligus sebagai sastrawan, pemerhati, peneliti, penggiat sastra, dosen, dan seterusnya. Tipologi kritikus sastra Indonesia kita, kalau boleh dikatakan di sini, sebagai *kritikus sastra sambil lalu*, yang tak sepenuhnya mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk menciptakan karya-karya kritik sastra. Ini terjadi, karena profesi sebagai kritikus sastra—yang sama dengan profesi sebagai pengarang di Indonesia—tak bisa digunakan untuk menjamin hidup. Kondisi penghargaan atas sastra dan kritik sastra memang belum secerah yang diharapkan para pengarang

dan juga kritikus sastra. Dapat dibayangkan, pada kritikus sastra Indonesia kita yang masih dalam kondisi seperti itu, tentunya akan berekses pada tradisi menulis kritik sastra yang juga belum optimal.

Berangkat dari uraian itu, kerja kritik sastra dari seorang kritikus sastra Indonesia memang memerlukan penguatan-penguatan dalam berbagai segi. Untuk optimalisasi hasil kritik sastra, memang perlu didukung dengan SDM yang juga kapabel. Artinya, jika selama ini ada penguatan-penguatan untuk ilmuwan sastra dan sastrawan, maka seharusnya juga diperlukan *penguatan dalam profesi sebagai seorang kritikus sastra*. Sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada *organisasi atau asosiasi kritikus sastra* yang menjadi forum komunikasi kritikus sastra Indonesia, terutama dalam rangka meningkatkan hasil kritik sastra—baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menguatkan potensi kritikus sastra Indonesia kita, mungkin dibutuhkan asosiasi atau organisasi ini, sehingga dalam wahana itulah hasil-hasil kritik sastra Indonesia dapat dimusyawarahkan, diperbincangkan, dikembangkan, dan ditingkatkan kualitasnya.

Dalam forum itu pula, mungkin lebih dapat diidentifikasi, siapa sajakah sesungguhnya yang termasuk sebagai kritikus sastra Indonesia. Siapa sajakah kritikus sastra yang benar-benar memproduksi hasil kritik sastra, yang secara kontinu menulis hasil kritik sastra, dan bagaimana hasil kritik sastra para kritikus itu. Jika diperlukan, mungkin perlu ditradisikan, semacam penghargaan yang diberikan kepada kritikus sastra Indonesia yang berprestasi dan inspiratif itu tadi. Dari sini kita akan mengetahui kritik sastra yang inspiratif itu.

Selanjutnya, juga perlu direncanakan, bagaimana meningkatkan kapabilitas, profesionalitas, dan integritas para kritikus sastra Indonesia kita itu. Mungkin perlu ada semacam pelatihan (*workshop*) yang intensif, atau lainnya yang merupakan program-program peningkatan itu. Selama ini, kritikus sastra merupakan bidang yang ditekuni secara otodidak, sendiri-sendiri, dan belum sistemik. Jikalau ini diperlukan, ini dapat dilakukan. Lalu, bagaimana juga dengan manajemen pengelolaan hasil-hasil kritik sastra, program seminasi kepada pengarang, evaluasi hasil

kritik sastra, penerbitan, pendistribusian, dan sebagainya. Namun yang jelas, hasil-hasil kritik sastra itu harus dipastikan benar-benar sampai kepada sasaran sehingga keberadaan kritik sastra benar-benar memberi fungsi mediasi bagi pembaca dan seminas bagi pengarang.

Di samping itu, kritikus sastra beserta hasil-hasil kritik sastranya dapat bersinergi dengan lingkungan sastra itu sendiri. Lingkungan sastra yang dimaksudkan di sini di antaranya, yakni dengan ilmuwan sastra, peneliti sastra, pengarang sastra, pembaca sastra, pemerhati sastra, penggiat sastra, komunitas sastra, penerbit sastra, pengelola jurnal sastra, perpustakaan atau koleksi-koleksi sastra. Kritikus sastra bisa saja juga sekaligus multiprofesi, tetapi yang disebut kritikus sastra itu memang yang meletakkan porsi besarnya pada kerja-kerja seorang kritikus sastra.

Formula Baru Kritik Sastra Indonesia

Kini kita perlu *mencari formula baru kritik sastra Indonesia*. Semoga rencana ini dapat terealisasi dalam seminar ini. Di sini kita perlu memastikan apa yang dimaksud *formula baru* dalam topik seminar ini. Dalam bayangan dan interpretasi penulis, formula baru itu mungkin berupa model, bentuk, atau arah kritik sastra Indonesia seiring dengan perkembangan teori-teori sastra dan sosial interdisipliner.

Sesuai dengan judul tulisan ini, penulis menawarkan *satu formula kritik sastra Indonesia yang inspiratif*. Formula yang penulis maksudkan ini adalah wujud karya kritik sastra Indonesia yang inspiratif bagi pembaca sastra, yang dapat memediasi karya sastra dengan pembaca sastra, sehingga pembaca sastra semakin mampu mengonkretkan makna atau nilai dari karya sastra yang dibaca. Lalu, yang inspiratif bagi pengarang, maksudnya ketika karya kritik sastra diseminasi kepada pengarang. Dengan membaca karya kritik sastra, para pengarang terinspirasi untuk menulis karya-karya yang lebih berkualitas, bukan karena hegemoni kritikus sastra, tetapi karena sepenuhnya pada diri pengarang itu memang sudah tumbuh kesadaran setelah membaca hasil kritik sastra yang dihasilkan kritikus sastra.

Jika kritik sastra dapat “memainkan” perannya seperti itu, *kritik sastra yang inspiratif* itulah yang menjadi formula baru. Selama ini, kita belum tahu pasti seberapa jauh hasil kritik sastra yang ada dimanfaatkan oleh pembaca atau pengarang, atau jangan-jangan tidak pernah dimanfaatkan sehingga proses kreatif menulis karya sastra sendiri dan proses kreatif menulis kritik sastra itu berjalan sendiri-sendiri tanpa ada sinergi positif.

Oleh karena itulah, sebagai *formula baru lanjutan*, sangat perlu ada *formula pasca penulisan karya kritik sastra* itu. Bagaimana hasil kritik sastra yang ditulis itu, apakah telah memberi dampak langsung atau tidak langsung; atau malahan selama ini tidak memberi dampak apa-apa kepada pembaca dan pengarang. Di sinilah perlu *digagas formula pasca penulisan kritik sastra*, yakni semacam strategi yang kita gunakan untuk memanfaatkan karya-karya kritik sastra dalam kapasitasnya sebagai yang memediasi karya sastra dengan pengarang dan dalam seminasi hasil kritik sastra yang menginspirasi pengarang untuk menulis karya-karya sastra bermutu atau berkualitas.

Sehubungan dengan perkembangan realitas karya sastra yang dinamis dan kecenderungan karya sastra yang kompleks, multidimensi, dan interdisipliner maka perlu digagas *formula kritik sastra yang interdisipliner*. Dalam arti, formula kritik sastra yang memanfaatkan teori-teori sastra atau sosial interdisipliner untuk mengkritik karya sastra. Pemanfaatan teori-teori secara interdisipliner ini dalam formula kritik sastra Indonesia karena secara dinamik realitas karya sastra Indonesia kita sekarang ini juga makin menunjukkan kekompleksan, kemultidimensian, dan keinterdisiplinerannya. Sebuah kritik sastra yang memadai, merupakan kritik sastra yang senantiasa merespons realitas karya sastra itu.

Penutup

Berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan dalam tulisan ini, dapat dinyatakan empat hal berikut. *Pertama*, relasi antara kritik sastra dan karya sastra, idealnya berada dalam bentuk relasi dialektif-kreatif, yakni relasi saling membutuhkan dan menginspirasi. Kritik sastra dan karya sastra bukanlah dua entitas yang terpisah, tetapi merupakan dua entitas yang

saling melengkapi (komplementer) satu sama lain. *Kedua*, dalam rangka penciptaan karya kritik sastra yang berkualitas, perlu ada penguatan-penguatan SDM kritikus sastra, karena akan sangat mendukung penulisan kritik sastra yang berkualitas tersebut. Penguatan itu dapat berupa pelatihan (*workshop*), pembentukan organisasi kritikus sastra, dan sinergisitas dalam lingkungan sastra, serta sarana prasarana pendukung lainnya. *Ketiga*, formula baru kritik sastra Indonesia yang digagas dalam makalah ini adalah *formula kritik sastra Indonesia yang menginspirasi*. Formula ini dipandang berperan memediasi antara karya sastra dan pembaca sastra dalam melakukan pemahaman nilai dan makna karya sastra. Dalam formula ini juga, perlu ada pengelolaan hasil kritik sastra secara optimal, agar karya kritik sastra itu tersemaikan pada para pengarang guna meningkatkan kualitas penciptaan karya sastra itu sendiri. *Keempat*, seiring dengan adanya dinamika realitas karya sastra dan kecenderungan karya sastra yang kian kompleks, multidimensi, dan interdisiplin maka perlu ada formula kritik sastra Indonesia yang juga multidimensi dan interdisiplin dengan memanfaatkan teori-teori sastra dan sosial yang berkembang hingga perkembangannya yang terkini.



Sastra Itu, Ruh Keindonesiaan Kita

Pengantar

Pada 18–20 Juli 2017 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pernah dilaksanakan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia (Munsi) II. Kebetulan, penulis menjadi salah seorang yang turut diundang atas seleksi karya sastra yang pernah diterbitkan. Penyelenggaranya adalah Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bentuk pelaksanaannya berupa diskusi panel, kelompok, dan pleno. Dalam acara itu, diundang beberapa pakar kesastraan. Target utamanya, menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam membina dan mengembangkan sastra ke depan. Di samping itu, pada acara tersebut, juga diluncurkan buku antologi sastra Munsi (Antologi Puisi, Antologi Cerpen, dan Kritik Sastra) karya sastrawan Munsi.

Peserta Munsi yang diundang sejumlah 180 orang yang terdiri atas sastrawan, pegiat sastra, dan pemangku kepentingan di bidang pengajaran sastra. Juga dihadirkan beberapa narasumber, di antaranya Ignas Kleden (intelektual LIPI), Janet de Neefe (Direktur Ubud Writer Festival), Radhar Panca Dahana (budayawan), Suminto A. Sayuti (sastrawan dan ilmuwan sastra UNY), Abdul Hadi W.M. (penyair dan budayawan), Rusli Marzuki Saria (pegiat sastra), Riris K. Toha Sarumpaet (ilmuwan sastra UI), Seno Gumira Ajidarma (sastrawan), dan Akhmad Sahal (penggiat sastra).

Rekomendasi dalam Pengembangan Sastra

Hasil rekomendasi Muni yang telah dirumuskan dan digunakan sebagai pijakan untuk membina dan mengembangkan sastra di Tanah Air, diharapkan dapat direalisasikan secara praksis, guna meletakkan peran penting sastra bagi bangsa kita, terutama dalam menjaga dan mengawal kebinekaan Indonesia. Peran sastra sebagai penjaga dan pengawal kebinekaan, sesungguhnya bukanlah hal yang baru diemban sastra kita, sebab sejak awal sastra memang telah dengan sendirinya memainkan peran itu. Sebab, sastra adalah ruh dari masyarakat, bangsa, dan negara ini. Sastra hadir sebagai jiwa zaman (*zeitgeist*) bangsa atau suara zamannya, yang mencatat, mendokumentasi, serta merefleksikan segala problematik dan fenomena bangsa.

Abdul Hadi W.M., dalam diskusi itu, menyatakan bahwa sastra mengemban tugas mulia dalam mengantar sebuah bangsa agar menjadi bangsa yang menghargai moralitas dan peradaban. Bagi Abdul Hadi, sastra mengandung kesementaraan dan sekaligus juga keabadian. Bersastra itu menjadi cermin bangsa yang berperadaban yang berarti membaca sastra sebagai karya yang terlahir dari pikiran imajinatif-kreatif yang berdialektika dengan tradisi. Tradisi dalam masyarakat merupakan hal yang penting dan tak hanya perlu dilestarikan, tetapi perlu direbut.

Bertolak dari apa yang dikatakan Abdul Hadi, kita tentu saja tak cukup berwacana tentang pentingnya kebinekaan, tetapi dengan membaca dan menghayati karya-karya yang ditulis sastrawan dalam keberagaman budaya tradisi, kita akan benar-benar memahami bagaimana jati diri bangsa kita ini sebagai bangsa yang niscaya beragam dan bineka. Hal itu terjadi karena sastrawan yang menulis karya sastra memang memiliki bakat individual, tetapi ia tak akan menjadi apa-apa kalau tak mengaitkan dengan tradisi yang harus direbut. Sebab, tradisi itu akan ajek, langgeng, dan hidup jika terus terawat dan terbuka terhadap perubahan.

Sastrawan adalah sosok personalitas yang memilih "jalan sunyi" untuk memberi makna terhadap hidup ini. Ia terkadang dipandang aneh di tengah masyarakat. Akan tetapi, sejatinya, sastrawan itu senantiasa memperjuangkan nilai-nilai yang menjadikan bangsa kita sebagai bangsa

yang beradab dan berperadaban. Bahkan, dalam diskusi Mungsi itu, juga terlontar kritik seloroh dari Abdul Hadi terhadap kondisi politisi terkini yang kemudian membandingkannya dengan sastrawan, "Politisi itu cenderung bekerja bersama untuk kepentingan sendiri, sedangkan sastrawan itu bekerja sendiri untuk kepentingan orang banyak."

Dalam diskusi Mungsi itu, juga dipahami kembali, bahwa sesungguhnya sastra Indonesia adalah sastra lokal. Keunggulan sastra Indonesia, justru terletak pada kelokalannya. Berbagai kearifan lokal yang terdapat dalam lokal-lokal di seantero masyarakat adat lokal kita, sesungguhnya merupakan "mutiara terpendam" yang belum banyak dikaryasastrakan—baik secara nasional dan internasional. Pada titik ini, tak perlu didikotomikan antara sastra daerah (lokal) dan sastra Indonesia karena kedua-duanya mesti dapat tumbuh seiring sejalan. Ini berarti, baik sastra daerah atau sastra Indonesia, mesti dipahami sebagai hal yang penting dibinakembangkan ke depan.

Kita dapat bayangkan, betapa kayanya produksi sastra kita jika semua "mutiara terpendam" di bumi Indonesia raya ini dieksplorasi dan ditulis dalam karya sastra. Namun, pada gilirannya, kita perlu memikirkan pentingnya soal penerjemahan sastra, agar kekayaan sastra kita tak terhenti pada bahasa daerah (lokal) atau pada bahasa Indonesia saja. Ini berarti, di samping diperlukan upaya mengkaryasastrakan "mutiara terpendam" kekayaan budaya itu, mesti diikuti dengan keseriusan kita dalam menerjemahkan karya-karya sastra daerah (lokal) ke dalam bahasa Indonesia dan ke bahasa internasional (utamanya Inggris).

Penutup

Karya-karya sastra kita, yang diciptakan sastrawan, benar-benar perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Misalnya, dapat diperkuat pengelolaan organisasi komunitas sastrawannya, pengembangan, dan perluasannya dalam sastrasiber (*cyber literary*), bantuan penerbitan dan distribusinya, serta internasionalisasi atas sastra kita. Diakui atau tidak, ruh keindonesiaan kita, justru terdapat dalam sastra kita.

Bahkan, tidak sedikit bidang yang merasa berkepentingan dengan sastra, karena di dalam sastra terkandung pengalaman individu dan pengamalan masyarakat yang tergambarkan dengan baik. Peristiwa apa pun yang ada di masyarakat, tentu akan "terekam" dalam sastra, entah berupa puisi, prosa, atau drama.

Karya sastra yang diciptakan sastrawan, acap kali juga dianggap sebagai dokumen sosial-budaya bagi bidang-bidang nonsastra, sehingga karya sastra itu dalam realitasnya tidak menjadi objek kajian bagi orang-orang yang menekuni bidang sastra saja, tetapi juga bidang sejarah, politik, sosial, psikologi, hukum, dan seterusnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 1999. Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia. Dalam *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Disunting oleh Yudi latif dan Idi Subandy Ibrahim. Bandung: Mizan Pustaka.
- Abrams, M.H. 1958. *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and Critical Tradition*. New York: Norton.
- Alwi, H. & Sunono, D. (eds.). 2011. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Anwar, S. 2009. *Asap Rokok di Jilbab Santri*. Surabaya: Jaring Pena.
- Anwar, A.S. 2015. Kritik Sastra dalam Peristiwa Kebudayaan. *Kompas*, 11 Oktober, halaman 27
- Arcana, P.F. 2003. *Bunga Jepun*. Jakarta: Kompas.
- Barthes, R. 1981. *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wang.
- Bawa, I.W. 2011. Perkukuh Budaya Bangsa dengan Memantapkan Peran Bahasa Daerah. Dalam *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*. Disunting oleh Yeyen Maryani dan S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Berger, P.L. & Luckmann, T. 1967. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books Doubleday & Company.
- Berger, P.L. & Luckmann, T. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- Berger, P.L. 1991. *Kabar Angin dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*. Diterjemahkan oleh J. B. Sudarmantao, Jakarta: LP3ES.

- Berger, P.L. 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* Diterjemahkan oleh Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Brata, S. tanpa tahun. Biodata Suparto Brata. Ditulis sendiri dan disebarakan.
- Budiman, A. & Mohamad, G. 1978. Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian. Dalam *Tentang Kritik sastra: Sebuah Diskusi*. Disunting oleh Lukman Ali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Chetanananda, S. 2015. Saya Spiritual Tapi Tidak Beragama. *Media Hindu, Membangun Karakter: Berwawasan, Percaya Diri dan Produktif*, Edisi 140, Oktober.
- Dananjaya, J. 1984. *Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain*. Jakarta: Grafiti Press.
- Darmayuda, I.M.S. 2001. *Desa Adat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Damono, S.D. 1994. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Darma, B. 1985. Kritik Sastra dan Karya Sastra. *Makalah Seminar Perkembangan dan Pengembangan Sastra Indonesia di Semarang, Universitas Diponegoro*, 12-13 November 1985.
- Eagleton, T. 1983. *Literary Theory: An Introduction*. England: Basil Blackwell.
- Fang, L. 2012a. *Perempuan Kembang Jepun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fang, L. 2012b. *Lelakon*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fang, L. 2008. Dua Perempuan. Dalam *20 Cerpen Indonesia Terbaik 2008*. Jakarta: Pena Kencana.
- Faruk. 1994a. *Novel-novel Tradisi Balai Pustaka 1920-1942*. (Disertasi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Faruk. 1994b. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. 2002. *Kuasa/Pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Bentang.
- Gans, J.H. 1974. *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluations of Taste*. USA: Basic Books.
- Geertz, H. 1982. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafitipress.
- Goldmann. 1981. *Method in the Sociology of Literature*. Diterjemahkan oleh William Q. Boelhower. Oxford: Basil Blackwell.
- Hall, J. 1979. *The Sociology of Literature*. London and New York: Longman.

- Hall, S. 1997. *Representation Cultural: Representations and Signifying Practice*. The Open University: Sage Publications, Ltd.
- Halim, A. (Ed.). 1980. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim, R.I. 2008. *Pecinan Kota Malang*. Malang: Guman Publishing.
- Ilahi, S.R. 2013. *Rokat Perahu Mawar*. Surabaya: Dewan Kesenian Jawa Timur.
- Iser, W. 1978. *The Act Reading: a Theory of Aesthetic Response*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Jassin, H.B. 1970. *Heboh Sastra 1968: Suatu Pertanggungjawaban Jawab*. Jakarta: Gunung Agung.
- Keraf, G. 1984. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Kleden, I. 2004. *Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kridalaksana, H. (ed.) 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kuntowijoyo. 2003. *Pistol Perdamaian. Dalam Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi*. Jakarta: Kompas.
- Jabrohim dan Sujarwanto (Eds.). 2002. *Bahasa dan Sastra Indonesia: Menuju Peran Transformasi Sosial Budaya Abad XXI*. Yogyakarta: Gama Media.
- Jenks, C. 1993. *Cultural Reproduction*. New York: Routledge.
- Jenkins, R. 2002. *Pierre Bourdieu*. New York: Routledge.
- Junus, U. 1986. *Sosiologi Sastra Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia.
- Laurenson. 1981. *Diana and Allan Swingewood*. *Sociology of Literature*. London: Granada.
- Gans, J.H. 1974. *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluations of Taste*. USA: Basic Books.
- Giddens, A. 2003. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono, Pasuruan: Pedati.
- Goldmann, L. 1977. *Toward a Sociology of the Novel*. London: Tavistok.
- Goldmann, L. 1981. *Method in the Sociology of Literature*. Diterjemahkan oleh William Q. Boelhower, London: Blackwell.
- Hardjana, A. 1988. *Kritik Sastra: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia
- Kayam, U. 1981. *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Korn, V.E.K. 1979. *Hukum Adat Waris di Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.

- Maarif, A.S. 2012. "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita". Dalam *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Disunting oleh Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi
- Manna, F.A. 2010. *Wong Kam Pung: Kumpulan Puisi*. Surabaya: Festival Seni Surabaya.
- Mangunwijaya, Y.B. 1981. *Burung-Burung Manyar*. Jakarta: Djambatan.
- Mangunwijaya, Y.B. 1983. *Roro Mendut*. Jakarta: Gramedia.
- Mangunwijaya, Y.B. 1991. *Durga Umayi*, Cetakan I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mangunwijaya, Y.B. 1992. *Burung-Burung Rantau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mangunwijaya, Y.B. 1994. *Durga Umayi*, Cetakan II. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Manuaba, I.B.P. 1992. Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ipteks. *Surabaya Post*, 22 Oktober, halaman 4.
- Manuaba, P. 1996. Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Proses Dialektika. *Nusa Tenggara*, 25 Oktober, halaman 4.
- Manuaba, P. 1999. Evolusi Bahasa Politik Kita. *Surabaya Post*, 18 Oktober, halaman 4.
- Manuaba, I.B.P. dan Setijowati, A. 2004. *Realitas Marginal dalam Sastra, Kajian dari Perspektif Konstruksi Sosial atas Karya Sastra Para Sastrawan Bali*. Hasil Penelitian LPPM Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Manuaba, I.B.P. 2005. *Realitas Marginal dalam Sastra, Kajian dari Perspektif Konstruksi Sosial atas Karya Sastra Para Sastrawan Bali*. Hasil Penelitian LPPM Universitas Airlangga. Surabaya: LPPM Unair.
- Manuaba, I.B.P. 2008. Kritik Sastra Indonesia Dalam Idealitas Siklus Ilmu Sastra: Beberapa Catatan Pinggir. Makalah disampaikan dalam acara Seminar Perdebatan Kritik Sastra di Surabaya. Diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Kajian Jawa Timur (UK2JT). Surabaya: UK2JT.
- Manuaba, I.B.P. 2009a. Pergeseran Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokal dan Global. Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Relasi Lokalitas-Globalitas Menuju Modernitas Bahasa dan Sastra Indonesia di Surabaya. Diselenggarakan oleh IKIP PGRI dan Balai Bahasa Jawa Timur. Surabaya: IKIP PGRI & Balai Bahasa Jatim.
- Manuaba, I.B.P. 2009b. *Persepsi Pengarang tentang Masyarakat: Kajian Cerpen-cerpen Karya Pengarang Bali dalam Perspektif Sosio-fenomenologis Bergerian*. Yogyakarta: Logung.
- Manuaba, I.B.P. 2010. Dekastanisasi Bahasa-bahasa. *Warta Unair*, edisi 27 Oktober.

- Manuaba, I.B.P., Dewi, T.K.S. dan Setijowati, A. 2014a. *Etnopuitika Karya Sastra Indonesia Sastrawan Jawa Timur: Kajian Holistik Sosiologi Sastra*. Penelitian Hikom Dikti. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- Manuaba, I.B.P. 2014b. *Eksotisme Sastra: Eksistensi dan Fungsi Sastra dalam Pembangunan Karakter dan Perubahan Sosial*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Sidang Terbuka Rektor Universitas Airlangga di Garuda Mukti Gedung Manajemen Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Manuaba, I.B.P. 2015a. Warna Lokal dan Internasionalisasi Sastra Indonesia. Dalam *Kebersamaan dalam Keberagaman ASEAN: Perspektif Bahasa dan Sastra*. Disunting oleh Suhandano. Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia UGM, Program Ilmu Linguistik FIB, dan Inkuls FIB UGM.
- Manuaba, I.B.P. 2015b. Perihal Sastra, Institusi, dan Perubahan Sosial. *Makalah dalam Seminar Sehari dengan tema Sastra, Institusi dan Perubahan Sosial di Surabaya*. Diselenggarakan oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur. Surabaya: HISKI dan Balai Bahasa Jatim.
- Manuaba, I. B.P. 2015c. Memaknai Jejak Kritik Sastra Rawamangun vs Ganzheit: Dari Polemik ke Kolaborasi. Dalam *Poe(l)itics: Esai-esai Politik Kritik Sastra Indonesia*. Disunting oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: PKKH UGM.
- Manuaba, I.B.P. 2008. Kritik Sastra Indonesia dalam Idealitas Siklus Ilmu Sastra: Beberapa Catatan Pinggir. Makalah disampaikan dalam acara Seminar Perdebatan Kritik Sastra di Surabaya. Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga pada tanggal 12 November. Surabaya: FIB-UA.
- Manuaba, I.B.P. 2015a. Politik Identitas dalam Sastra Indonesia. Dalam *Ragam Wacana: Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Disunting oleh Erfianti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manuaba, I.B.P. 2015b. Warna Lokal dalam Internasionalisasi Sastra Indonesia. Dalam *Kebersamaan dalam Keberagaman ASEAN: Perspektif Bahasa dan Sastra*. Disunting oleh Suhandano, Sudibyo, dan Saeful Anwar. Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia UGM, Prodi S2 Ilmu Linguistik UGM, INCULS, dan ASALS.
- Manuaba, I. B.P. 2017. *Kapita Selekta Kritik dan Esai Sastra Media Massa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Manuaba, I. B.P. 2018. Pengutamaan Bahasa Indonesia. *Kompas*, 27 Oktober 2018.
- Mashuri. 2006. *Hubbu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mashuri. 2013. *Munajat Buaya Darat: Kitab Puisi*. Yogyakarta: Dress Publishing.

- Mashuri. 2014. *Membaca Sastra Jawa Timur: Revitalisasi, Representasi, dan Regenerasi*. Surabaya: Dewan Kesenian Jawa Timur.
- Matullada. 1988. Kebudayaan Tradisional: Sekelumit tentang Sulawesi Selatan. Dalam *Masyarakat dan Kebudayaan: kumpulan Karangan untuk Selo Soemardjan*. Jakarta: Jambatan.
- Miller, D.N. (Ed.). 1987. *Twentieth Century Literary Theory: An Introductory Anthology*. New York: State University.
- Mundzuk, I. 2004. *Syahadat Sukma: Puisi dan Prosa*. Lamongan: Pustaka Pujangga.
- Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradopo, R.D. 1988. *Kritik Sastra Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gramedia.
- Rivers, W.L., Peterson, T. & Jensen, J.W. 2003. *Media Massa Masyarakat Modern*. Edisi kedua. Diterjemahkan oleh Haris Munandar & Dudy Priatna, Jakarta: Renada Media.
- Rusmini, O. 2000. *Tarian Bumi*. Magelang: IndonesiaTera.
- Rusmini, O. 2002. *Sagra*. Magelang: IndonesiaTera.
- Subagio, A. 2009. Masalah Utama Bahasa Indonesia. *Kompas*, 15 Oktober, 4.
- Sakai, G.tf. Kami Lepas Anak Kami. Dalam *20 Cerpen Indonesia Terbaik 2008*. Jakarta: Pena Kencana.
- Sa'ud, U.S. 2010. *Inovasi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Satoto, S. (Ed). 2000. *Sastra: Ideologi, Politik, dan Kekuasaan*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Singh, M.K. 2011. Pidato selaku Direktur Pusat Kebudayaan India Jawaharlal Nehru Kedutaan Besar India di Jakarta. Dalam *Perencanaan Bahasa Abad ke-21: Kendala dan Tantangan (Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa)*. Disunting oleh Sugiono dan Veven Maryani. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Singodimayan, H. 2003. *Kerudung Santet Gandrung*. Jakarta: Desantara.
- Sumardjo, J. 1979. *Masyarakat dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Nur.
- Sunarta, W. 2005. *Cakra Punarbhawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto, A. & Sudikan, Y. 2008. *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif*. Jember: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bekerjasama dengan Kompyawisda Jatim-Jember.
- Stanton, R. 1965. *An Introduction to Fiction*. New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London: Holt, Rinehart and Winston.
- Pradopo, R.D. 1988. *Kritik Sastra Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gramedia.


- Tanaka, R. 1976. *Systems Models for Literary Macro Theory*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- ▲ Taum, Y.Y. 2015. *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- ▲ Tim Peneliti. 2012. *Elemen-elemen Karakter Bangsa Masyarakat Adat Tengger*. Hasil Penelitian Kelompok Peneliti UK2D Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Tim Penyusun. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Teeuw, A. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Toer, P.A.1980. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra
- Toer, P.A. 1981. *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, P.A. 1985. *Jejak Langkah*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, P.A.1990. *Rumah Kaca*. Kuala Lumpur: Wirakarya.
- Toer, P.A.1994. *Cerita dari Blora (Kumpulan Cerpen)*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, P.A. 1995. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, P.A. *Arok Dedes*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, P.A.2000. *Gadis Pantai*. Jakarta: Hasta Mitra
- Trianto. 2011. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Cetakan IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Page, W. 2015. Tiga Lilin untuk Menyinari Kegelapan. *Media Hindu, Membangun Karakter: Berwawasan, Percaya Diri dan Produktif*, Edisi 140, Oktober.
- Rakanita, D.J. 2012. *Representasi dan Identitas Perempuan dalam Iklan Kosmetik Produk AntiAging Merek L'Oreal dan Nivea*. Depok: Universitas Indonesia.
- Rendra, W.S. 1984. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- ▲ Sompdatta, M. & Lahiri, H. 2005. *Ethnic Literature of America: Diaspora and Intercultural Studies*. New Delhi: Prestige Books.
- ▲ Swingewood, A. & Laurenson, D. 1972. *Sociology of Literature*. London: Paladin
- Wartawan. 2015. Kala Sastra Menggairah di Daerah. *Kompas*, 12 Mei.
- Wellek, R. & Warren, A. 1976. *Theory of Literature*. England: Penguin Books.
- Wellek, R. & Warren, A. 1989. *Teori Kesusastraan*. Diterjemahkan oleh Melani Budianta, Jakarta: Gramedia.

- 
- Wellek, R. & Warren, A. 1993. *Teori Kesusastraan*. Diterjemahkan oleh Melani Budianta, Jakarta: Gramedia.
- Wiana, I.K. 1993. *Kasta: Kesalahan Berabad-abad di Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Wibowo, W. 2003. *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, P. Suap. *Dalam 20 Cerpen Indonesia Terbaik 2009*. Jakarta: Pena Kencana.
- Wiyoto, R., S., Yoga. & Mashuri. 2009. *Pesta Penyair: Antologi Puisi Jawa Timur*. Surabaya: Dewan Kesenian Jawa Timur.
- Yudiono, K.S. 2009. *Pengkajian Kritik Sastra*. Jakarta: Gramadedia Widiasarana.



GLOSARIUM

<i>Aesthetic elements</i>	: elemen-elemen estetik/seni
<i>Aesthetic function</i>	: fungsi estetik/seni
Afektif	: berkenaan dengan perasaan
Afdal	: pas, mantap
Antusiasme	: semangat
Artistik	: seni
Bilingual	: mampu atau biasa menggunakan dua bahasa dengan baik
<i>Counterpart</i>	: saling melengkapi
Dekastanisasi	: menolak pengkastaan
Elaborasi	: penyempurnaan
<i>Einfuhlung</i>	: pencerahan
<i>Gayeng</i>	: sedang dan nyaman
<i>Ganzheit</i>	: sebuah teori psikologi tentang keutuhan
Geneologi	: asal-muasal
Hermeneutika sastra	: ilmu tafsir sastra
Kemristekdikti	: Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
Kapabelitas	: kemampuan kompetensi
Mediasi	: jembatan/pengantara
Nilai lokal	: nilai kedaerahan
Nirkasta	: tanpa kasta
Psikomotorik	: berhubungan dengan aktivitas fisik
<i>Survive</i>	: mapan



Oase	: sumber mata air di gurun pasir
Romantisme	: mengenang sesuatu yang sudah lewat
Resistensi	: perlawanan
Responsif	: cepat merespons
Sibersastra	: sastra siber/digital
Signifikan	: bermakna
Ungguh-ungguh	: tingkatan-tingkatan
<i>Unlimited</i>	: tidak terbatas
Diseminasi	: serupa dengan disosialisasi



INDEKS NAMA

A

Abrams, M.H.: 167
Ajidarma, Seno Gumira: 205
Akhudiat: 78
Albada, Rob van: 10
Alisjahbana, Sutan Takdir: 144
Alwi, Hasan: 30
Aminuddin, Aming: 78
Amiranti, Puput: 79
Anton W, Syaf: 79
Anwar, Asep Saeful: 165
Anwar, Chairil: 99, 144, 150, 152, 184,
198
Anwar, Shoim: 78-79
Arcana, Putu Fajar: 150
Aris, Muhammd: 78
Arisanto, Pudwianto: 79
Aryanti, Deny Tri: 78
Asyri, Widi: 79
Ayu, Jenar Mahesa: 144, 151

B

Bachri, Sutardji Calzoum: 152
Bafaqih, Putri: 79
Bahamisah, Taufiq: 79
Barthes, Roland: 8
Bawa: 30

Bekker: 135
Berger, Peter L.: 1, 46, 47, 148
Bisri, Mustofa: 152
Bogaerts, Els: 10
Bojonegoro, Wina: 188
Bramantio: 188
Broto, Suparto: 78, 171
Budiman, Arief: 131, 136-140, 163

D

Dahana, Radhar Panca: 205
Damono, Sapardi Djoko: 105, 145-146,
151-152
Danarto: 152
Darma, Budi: 72, 78-79, 151-152, 165,
185, 188
Dekker, Douwes: 120, 182
Dewantara, Ki Hajar: 50
Dewi, Ayu Kartika: 78
Dewi, Dian Aristya: 78
Dini, NH: 185

E

Eagleton, Terry: 165
Elwiq Pr, A: 79
Endarmoko, Eko: 188
Esten, Mursal: 135

F

Fajar, Yusri: 188
Fang, Lan: 79, 89, 188
Fatimar, ST: 79
Fuadi, Anwar: 144

G

Gans, J. Herbert: 125
Garvin: 13
Geertz, Hildred: 116
Goldmann, Lucien: 86-87, 119, 168
Groenendael, Victoria M.C. Clara
van: 10

H

Hadi WM, Abdul: 205-206
Hadi, Panji Kuncoro: 78
Hadjar, Saiful: 78-79
Haji, Raja Ali: 182
Halim, Amran: 4, 51
Hardjana, Andre: 159
Hariyanto, W.: 78-79
Hatta, Mohammad: 127
Hirata, Andrea: 151-153, 184
Hutagalung, M.S.: 131-133, 161

I

Ibrahim, Idi Subandy: 78
Ibrahim, Ratna Indraswari: 79
Illahi, Shohifur Ridho: 188
Imran, Zamawi: 78, 150
Imron, Zamawi: 150, 152, 185
Indri, Jeni: 78
Iser, Wolfgang: 126, 157
Ismail, Taufiq: 144, 152

J

Jai, S.: 188
Jatuthasri, Thancerat: 10
Jassin, H.B.: 80, 98, 160, 173, 188,
198-199
Jupri, M.: 79

K

Kartamihardja, Achdiat: 133
Kayam, Umar: 152
Kleden, Ignas: 116, 205
Koentjaraningrat: 45
Kurniawan, Eka: 144

L

Lamongan, Herry: 78
Laurenson, Diana: 145
Lestari, Dee: 99, 144
Luckmann, Thomas: 46-47, 148
Luhung, H.U. Mardi: 78, 188

M

Maarif, Safii: 117, 118
Malna, Afrizal: 151
Mangunwijaya, Y.B. (Mangun,
Romo): 107-109, 144, 152, 175
Manna, Aziz: 78, 188
Manuaba, I.B. Putera: 4-5, 8, 16, 32, 51,
58, 68, 133-134, 162, 167-168, 175,
178, 188, 195
Mashuri: 78-79, 188
Mathiot: 10
Matullada: 42
Meij, Dick van der: 10
Mohamad, Goenawan: 131, 137-139

Molen, Willem van der: 10
Muhlash MR: 78
Muis, Abdul: 144
Multatuli: 120, 182
Munandar, Haris:

N

Nabonenar, Bonari: 79
Nadjib, Emha Ainun: 121
Nasution, J.U.: 132-133, 161
Navis, A.A.: 152
Neefe, Janet de: 205
Noer, Arifin: 144
Noor, Agus: 251
Nursihati: 78

O

Oddang, Faisal: 151, 172
Oemarjati, Boen S.: 131-132, 161

P

Pane, Armijn: 144, 152
Panjikusmin, Ki: 160
Paranggi, Umbu Landu: 174
Parto, Bagus Putu: 79
Pradopo, Rahmat Djoko: 135
Prasetya, Helmy: 78
Prihatmi: 135

R

Raharja, Hidayat: 78
Rahmawati, Fina Lutfiana: 78
Raja, Timur Budi: 79
Ramadhany, Dwi Ratih: 188
Rendra, W.S.: 104
Rendra, W.S.: 144, 152, 175
Riantiarno, N: 175
Rivers, William L.: 2


Rusli, Marah: 120, 182
Rusli, Marah: 144, 152
Rusmini, Oka: 121, 150, 152, 185

S

Saad, M. Saleh: 131-133, 161
Sahal, Akhmad: 205
Sakai, Gus tf: 89, 88
Saria, Rusli Marzuki: 205
Sartika, Dewi: 99
Sarumpat, Riris K. Toha: 205
Sayuti, Suminto A.: 205
Sejati, Amal: 78
Setia, Beni: 78
Setiawan, Dewey: 79
Setiawan, Purnawan: 79
Shakespeare: 58
Simatupang, Iwan: 99, 144, 152, 175
Singh, M.K.: 32
Siong, Tan Tjin: 79
Siregar, Merari: 144, 152, 182
Sitanggang, S.R.H.:
Soekarno: 127
Stanton, Robert: 85
Subagio, Ari: 56
Sudikan, Yuwono: 41
Sugondo, Dendy: 30
Suryandi AG, Linus: 152
Suryono, Kardiman: 78
Susmiati, Salis: 79
Sutrisno, Mudji: 41
Swingewood, Alan: 145
Syah, Sirikit: 79

T

Teeuw, A: 103, 134, 135, 162,
Thukul, Widji: 121
Tisna, Panji: 150, 152
Tjahyadi, Indra: 78, 188



Toda, Dami N.: 198
Toer, Pramoedyana Ananta: 108, 110, 111,
121, 144, 152, 167
Tohari, Ahmad: 152, 185
Trianto: 35
Triwikromo, Triyanto: 151

U

Utami, Ayu: 144, 152

V

Vitri A., Luska: 78

W

Warren, Austin: 106, 158
Wellek, Rene: 158

Wibowo, Wahyu: 2-3
Widarmanto, Tjahyono: 79
Widianto, Tjahjono: 188
Wierega, Edwin: 10
Wijaya, Putu: 90, 144, 152, 175, 185
Winarti: 79
Wiranda, Leonardus Onny: 79
Wiyoto, Ribut: 79

Y

Yoga, S.: 78-79
Yusuf, Anas: 78-79

Z

Zaimar, Okke: 135



INDEKS ISTILAH/LEKSIKON

A

Aesthetic Elements: 106
Aesthetic Function: 106
Afektif: 227
Alam Romantisme: 43
Alinerasi: 227
Anak-Anak Belitong: 227
Anarkis: 168
Antaretnis: 32
Apostivistik: 95
Arbiter: 227

B

Bahasa Melayu Riau: 4, 49–50
Bahasa Ipteks: 227
Bahasa *Lingua Franca*: 49
Bahasa Resmi: 4, 32, 51
Balai Pustaka (BP): 87
Berbahasa Ibu: 27, 31, 33, 35–36, 54–55, 63
Bilingualisme Bahasa Ibu: 54
Budaya Adiluhung (*High Culture*): 125
Budaya Bangsa: 5, 30, 32–34, 50, 58, 62, 72–73, 129, 153
Budaya Kebaraksaraan: 227
Budaya Kelisanan: 227
Budaya Literer: 189, 191–193
Budaya Rendah (*Low Culture*): 125

C

Ciklit: 124

D

Defeminis: 168
Degradasi: 58
Dehumanis: 168
Dekastanisasi: 1, 16, 18, 23, 25, 32, 212, 217
Demoralis: 168
Derelegiusitas: 168
Desa-Kota: 43
Diaspora Muslim: 118
Dinamika Masyarakat: 27, 33, 50–51, 63, 85
Dinamika Perubahan Sosial: 167
Doktrin: 168
Dokumen Sosial: 107, 116, 122, 178, 208
Dunia Kehidupan: 1, 45, 86, 94, 109, 126, 157
Dunia Sunyi: 115

E

Egoistis: 168
Ejaan Bahasa Indonesia (EBI): 50
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD): 50

- Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia): 50
 Ejaan Soewandi: 50
 Ejaan van Ophuijsen: 50
 Entitas perkotaan: 85
- F**
- Fakta Kemanusiaan: 31
 Festival Seni Surabaya (FSS): 78
Formula Baru Kritik Sastra Indonesia: 195, 201, 203
Fungsi Laten: 18–19
Fungsi Manifes: 18–19, 21
- G**
- Genre prosa: 85
 Globalisasi: 28–29, 38
- H**
- Harmoni Sosial: 167
 Hierarkis: 168
- I**
- Identitas bangsa: 30, 33, 36, 38–39, 128–130
 Infrastruktur menulis: 37–38
 Internalisasi nilai: 33, 35, 39, 42–47, 56
 Internalisasi primer: 46–47, 148
- J**
- Jawa subkultur Tengger: 32
 Jiwa humanitas: 229
 Jiwa zaman (*zeitgeist*): 167, 206
- K**
- Kakawin: 229
 Kebanggaan Bahasa: 13
 Kekhasan Tradisi Dan Budaya: 34
- Kelompok Sosial: 86, 118
 Kesetaraan: 20–24, 112
 Kesetiaan Bahasa: 13
 Kesusastraan Melayu: 182
 Keterkejutan Budaya (*Shock-Culture*): 56
 Kitab Darmogandul: 160
 Kitab Suluk Gatoloco: 160
 Kognitif: 35, 39
 Komitmen Bangsa: 32, 72
 Kompetisi Bahasa-Bahasa: 28
 Konservatif: 168
 Konstitusi India: 34
 Kontemporer: 230
 Kontestasi Bahasa-Bahasa: 28
 Kontroversi 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh: 160
 Konvensi: 229
 Kritik Sastra Ganzheit: 131, 136, 138–141, 163
 Kritik Sastra Rawamangun: 131–132, 133–136, 140–142, 161–163
 Kritik Sastra: 74–77, 96–101, 131–136, 138–142, 157–166, 173, 195–203, 234
 Kritikus Akademik: 76, 98, 133, 170
 Kritikus Sastrawan: 98
 Kromo Inggil: 10
 Kultur Indonesia: 118
 Kurikulum: 32, 128, 170
- L**
- Lekra: 109, 160
 lontar: 182
- M**
- Makhluk Bersastra (*Homo Fabulans*): 94
 Makhluk Sosial (*Homo Socius*): 1, 123
 Manikebu: 109, 160
 Mantra: 9, 182

Masyarakat Adat Tengger: 32–33
Masyarakat Adat: 27–28, 32–33, 207
Masyarakat Agraris-Tradisional: 27
Masyarakat Heterogen: 44
Mengglobalkan Tradisi: 34
Mitos Modern: 230
Modal Sastra: 189

N

New Criticism: 163
Nilai Global: 24, 32, 43, 46–47, 60
Nilai Keindonesiaan: 32
Nilai Lokal: 33, 39, 41–47, 54
Nilai-Nilai Komunal: 39
Nirkasta: 1, 217
Njawani: 231

O

Objek Estetik: 95, 105–108, 116, 122
Obsesi Global: 129
Otoriter: 168, 179

P

Patriakis: 168
Pembaca Ideal: 126, 191
Pembaca Rea: 231
Pembiasaan: 27, 34, 36, 197, 199, 201, 203
Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*): 119
Penutur Asli: 6–7, 65, 67
Peradaban Bangsa: 167, 179
Permainan Bahasa (*Language Game*): 94
Pertarungan Nilai: 34
Pewarisan Nilai-Nilai Tradisi: 33
Politik Identitas: 117–118, 120–122
Prosa (Cerpen, Novel, Roman, Prosa Lirik, Cerber): 124

Psikologi Perkembangan: 88
Psikomotorik: 35, 39
Puisi (Dahulu Pantun dan Syair): 124
Pujangga Baru (PB): 87
Pupuh: 231

R

Reaktualisasi: 18, 23, 32
Romantisme: 43, 218

S

Sadistik: 168
Sastra Anak: 124, 192
Sastra Cina Peranakan: 124, 182
Sastra Daerah (Nusantara): 124
Sastra Hindia-Belanda: 124
Sastra Indonesia: 35, 75, 98–99, 104, 107, 118–122, 124, 129, 143–146, 148, 150–155, 160, 182–184, 187–191, 195–203, 207
Sastra Klasik (Naskah Kuno): 124
Sastra Koran (Jurnalisme Sastra): 232
Sastra Koran: 124, 160
Sastra Lisan (Tutur, Cerita Rakyat): 124
Sastra Populer (S Kecil): 124
Sastra Profetik: 160
Sastra Serius (S Besar): 124
Sastrawangi (Sastra "Lendir"): 160
Sibersastra: 124
Sistem Nilai: 44–45, 47, 59, 62, 167, 175
Strukturalisme: 163
Syair-Syair Nuruddin Ar-Raniri: 160

T

Teks Drama (Monolog, Dialog): 124
Terspesifikasi: 232
Tinlit: 124


U

Unda-usuk Bahasa: 10
Unggah-ungguh Bahasa: 16, 20, 49

W

Wahana Ganda: 33
Warga Dunia: 6, 12, 155
Warna Lokal: 149, 152–154, 184–185

Tentang Penulis

Prof. Dr. I.B. Putera Manuaba, M.Hum., lahir di Tabanan-Bali, pada tanggal 9 Agustus 1964. Menyelesaikan studi S1 pada Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar tahun 1988; menyelesaikan S2 pada Program Studi Sastra Indonesia Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1997; S3 Ilmu Sosial (Konsentrasi Sosiologi Sastra) pada Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2007. Jabatan akademik guru besar diraih pada tahun 2014.

Mengajar pada Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, sejak tahun 1990–sekarang. Ia juga menjadi pengajar pada Program Magister Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya, sejak tahun 2010–sekarang. Selain mengajar, juga meneliti di bidang bahasa, sastra, dan budaya; menulis artikel ilmiah pada jurnal; menulis artikel opini, bahasa, budaya, kritik, dan esai di beberapa koran di Indonesia (*Kompas, Jawa Pos, Bali Post, Surabaya Pos, Suara Pembaruan, Suara Indonesia, dan Suara Karya*).



Karya-karya yang telah diterbitkan, yaitu *Perjalanan Malam* (buku kumpulan puisi, 1994); *Durga Umayi: Pergulatan Hidup Manusia* (buku teks sastra, 2009), *Ziarah Peradaban* (kumpulan puisi, 2009); *Persepsi Pengarang tentang Masyarakat: Kajian tentang Cerpen-cerpen Karya Pengarang Bali dalam Perspektif Sosio-fenomenologis Bergerian* (buku teks sastra, 2009); *Meretas Keindonesiaan: Diskursus Bahasa, Agama, Budaya, Pendidikan, Kebangsaan, dan Mentalitas* (esai, 2016); *Senyum Nirmala* (kumpulan cerpen, 2016); *Kapita Selektu Kritik dan Esai Sastra Media Massa* (kritik sastra dan esai, 2017) dan *Karmapala: Sebuah Lakon Lima Sepuluh Babak* (teks drama, 2017).



Alamat Kantor Penulis

Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya, 60286;
Telp (031) 5035676, Fax (031) 5035807;
HP +628155091319,
surel: ibputeramanuaba@gmail.com.



Wacana Bahasa Sastra

I.B. PUTERA MANUABA